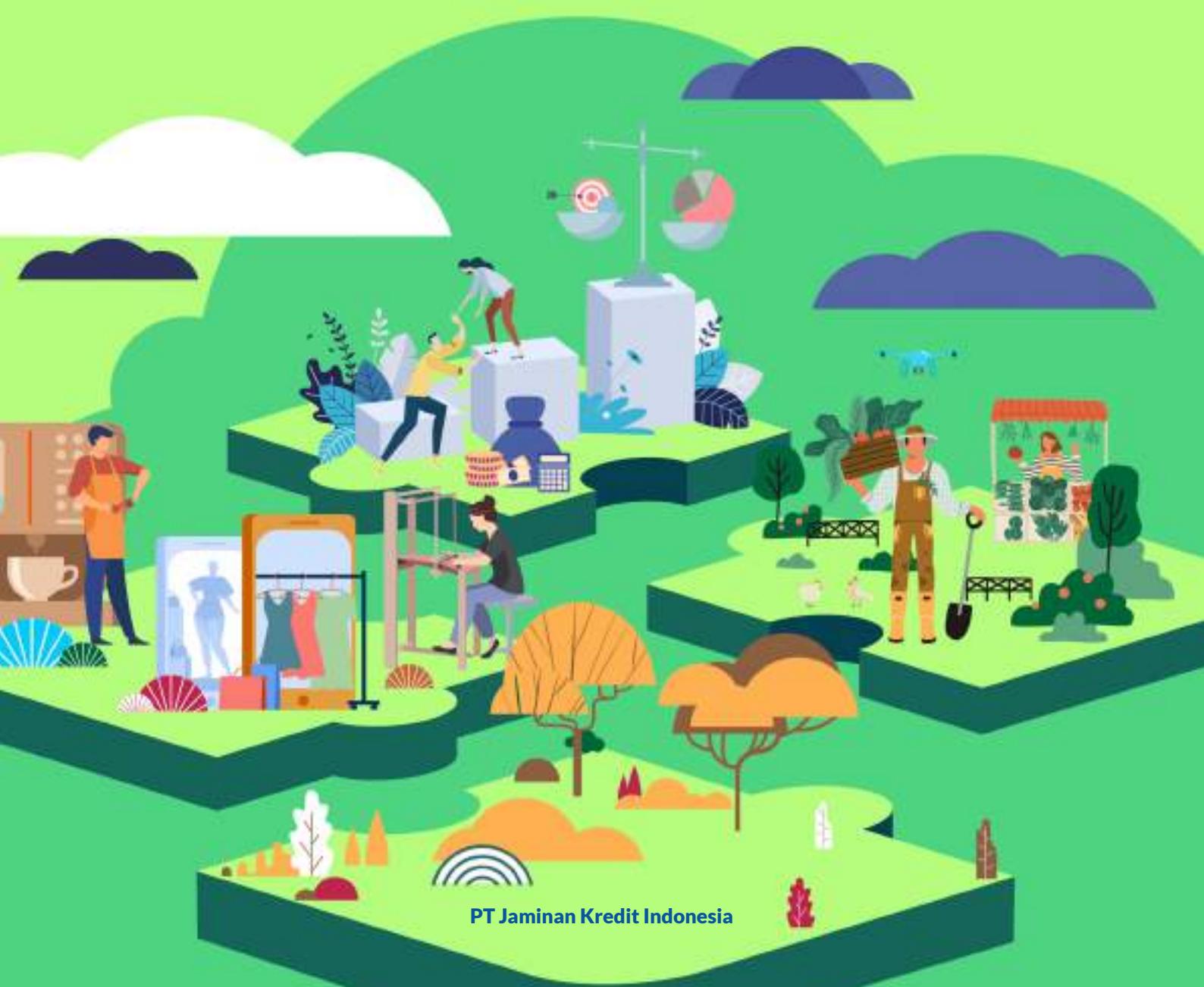


UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo

Laporan Keberlanjutan **2021** Sustainability Report



PENJELASAN TEMA

THEME EXPLANATION



UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo

Pandemi COVID-19 yang meluluhlantakkan berbagai aspek dalam sosial kemasyarakatan dan perekonomian pada umumnya justru melahirkan hikmah tersendiri. Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) justru mampu menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu pilar perekonomian masyarakat Indonesia. Penyerapan tenaga kerja hingga perputaran transaksi yang besar mencerminkan bahwa sektor UMKM mampu tampil lincah di tengah tantangan pandemi COVID-19.

Sebagai entitas yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan bagi UMKM dan Koperasi, Jamkrindo tentu memiliki komitmen yang tinggi untuk tumbuh bersama UMKM. Dengan bisnis Penjaminan yang dilakukan, Jamkrindo berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM, khususnya menjadi bagian dari infrastruktur atas penguatan permodalan bagi UMKM.

The COVID-19 pandemic, which devastated various aspects of society and the economy in general, gave birth to its own wisdom. Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are actually able to demonstrate their capabilities as one of the pillars of the Indonesian economy. The absorption of labor to the large turnover of transactions reflects that the MSME sector is able to be agile in the midst of the challenges of the COVID-19 pandemic.

As an entity appointed to provide guarantees for MSMEs and Cooperatives, Jamkrindo certainly has a high commitment to grow with MSMEs. With the Guarantee business carried out, Jamkrindo contributes to the growth of MSMEs, in particular being part of the infrastructure for strengthening MSMEs' capital.

KESINAMBUNGAN TEMA

THEME CONTINUITY

2020



Memperkuat Landasan Keberlanjutan untuk Mempercepat Pertumbuhan

Sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit yang telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Jamkrindo telah membangun fondasi yang kuat untuk memastikan perusahaan dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan juga selalu berupaya memperkuat fondasi dan menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam mengakselerasi pertumbuhan kinerja. Perusahaan menyadari bahwa komitmen untuk memperkuat fondasi keberlanjutan dapat memaksimalkan kontribusi perusahaan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan tantangan yang sangat besar bagi Perusahaan. Pada periode ini isu keberlanjutan menjadi semakin penting untuk strategi bisnis yang baik. Pertimbangan terkait dengan isu menjadi semakin kritis karena meluasnya gangguan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Strengthening Sustainability Foundation to Accelerate Growth

As a Credit Guarantee Company with more than 50 years of experience, PT Jamkrindo has built a strong foundation to ensure the company is managed by following the principles of good governance. The company also always strives to strengthen the foundation and implement the principles of sustainability in accelerating performance growth. The company realizes that a commitment to strengthen the foundation of sustainability can maximize the company's contribution to achieving the Sustainable Development Targets.

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 presents a very big challenge for the Company. During this period the issue of sustainability became increasingly important for a sound business strategy. Considerations related to the issue have become increasingly critical due to the widespread economic and social disruption caused by the COVID-19 pandemic.

2019



Triple Bottom Line (Profit, People, Planet)

Seiring dengan meningkatnya intensitas persaingan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, maka perusahaan yang tergolong hebat harus memiliki tiga pilar transformasi yaitu *Adaptability*, *Systemic Resilience*, dan *Sustainability*. Kesuksesan perusahaan tidak hanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat, namun juga tidak menyisakan persoalan bagi lingkungan di mana perusahaan beroperasi termasuk masyarakat sekitar Pemilihan judul SR mencerminkan kesadaran, komitmen, serta keyakinan manajemen dan seluruh insan Perum Jamkrindo bahwa keungulan daya saing ke depan sangat ditentukan sejauh mana perusahaan yang memiliki keseimbangan investasi baik terhadap aspek keuangan (*Profit*), SDM dan lingkungan sosial (*People*) serta kelestarian alam sekitar (*Planet*). Pemilihan tema juga mencerminkan kecermatan manajemen perusahaan untuk menemukan ekspektasi dan kebutuhan sosial dan masyarakat sebagai peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai ekspektasi *shareholders* dan *stakeholders*.

Triple Bottom Line (Profit, People, Planet)

Along with the increased competition and stakeholders' expectations, great companies must have three pillars of transformation, namely *Adaptability*, *Systemic Resilience*, and *Sustainability*. The Company's success is the ability to meet the needs of service users and the society, while not leaving problems for the environment in which the Company operates, including the surrounding community. The selection of the SR title reflects the awareness, commitment, and belief of management and all Perum Jamkrindo personnel that the competitive advantage in the future will be determined by the extent to which the Company has a balance of investment both in the financial aspects (*Profit*), HR and the social environment (*People*), as well as the preservation of the surrounding nature (*Planet*). The theme selection also reflects the Company's careful management to identify social and community expectations and needs as an opportunity for the Company to grow and develop according to the expectations of shareholders and stakeholders.

2018



Bersinergi Menguatkan Ekonomi Negeri

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Saat Indonesia dihantam badai krisis moneter, mereka tetap mampu bertahan. Walaupun terbukti tangguh, namun apabila dilihat dari sisi permodalan, kondisi UMKM masih cukup memprihatinkan. Sebab itu, upaya untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses keuangan dan modal melalui kredit perbankan perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Perum Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara berkomitmen untuk memberikan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM. Tak hanya memberikan penjaminan kredit, Perusahaan juga memberikan pendampingan sehingga UMKM bisa naik kelas dan terus bertumbuh dengan skala yang lebih besar. Melalui sinergi ini, Perum Jamkrindo turut aktif dalam upaya mengerakkan dan menguatkan perekonomian negeri.

Synergy to Empower the Nation's Economy

Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs & C) have an important and strategic role in Indonesia's economic development. When Indonesia was hit by a monetary crisis, they were still able to survive. Although proven to be strong, but when viewed in terms of capital, the condition of MSMEs is still quite alarming. Therefore, efforts to facilitate MSMEs & C to gain financial and capital access through bank loans need to be supported by all parties.

Perum Jamkrindo as a State-Owned Enterprise is committed to providing credit guarantees for MSMEs entrepreneurs. Not only providing credit guarantees, but the Company also provides assistance so that MSMEs can level up and continue to grow on a larger scale. Through this synergy, Perum Jamkrindo is active in efforts to mobilize and strengthen the domestic economy.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

2	Penjelasan Tema <i>Theme Explanation</i>
3	Kesinambungan Tema <i>Theme Continuity</i>
4	Daftar Isi <i>Table of Contents</i>
8	Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2019-2021 <i>Sustainability Performance Overview 2019-2021</i>
12	Penjelasan Direksi <i>Explanation of the Board of Directors</i>
22	Tentang Laporan Keberlanjutan <i>About Sustainability Report</i>

Profil Perusahaan *Company Profile*

30	Informasi Umum Perusahaan <i>General Information of The Company</i>
31	Sekilas Tentang Jamkrindo <i>Jamkrindo At a Glance</i>
33	Riwayat Perubahan Nama Perusahaan <i>Company Name Change History</i>
35	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>
37	Bidang Usaha Serta Produk dan Jasa <i>Line of Business and Products and Services</i>
44	Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>
46	Struktur Pemegang Saham <i>Organizational Structure</i>
48	Struktur Grup dan Kelompok Usaha <i>Group Structure and Business Group</i>
49	Informasi Entitas Anak Perusahaan <i>Information Entitas Anak Perusahaan</i>
52	Wilayah Operasional <i>Operational Area</i>
57	Skala Perusahaan <i>Scale of the Company</i>

58	Informasi Tentang Karyawan <i>Information about Employees</i>
63	Ketercakupan dalam Perjanjian Kerja Bersama <i>Coverage in Collective Labor Agreement</i>
64	Rantai Pasokan <i>Supply Chain</i>
66	Perubahan Signifikan Selama Periode Pelaporan <i>Significant Changes during the Reporting Period</i>
66	Pendekatan atau Prinsip Pencegahan <i>Prevention Approach or Principle</i>
67	Inisiatif Eksternal <i>External Initiatives</i>
72	Keanggotaan Dalam Asosiasi <i>Membership in Association</i>

Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan *Sustainable Corporate Governance*

76	Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan <i>Sustainable Corporate Governance</i>
77	Prinsip dan Tujuan Penerapan Tata Kelola <i>Principles and Objectives of Governance Implementation</i>
79	Landasan Hukum <i>Legal Foundation</i>
81	Roadmap Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Roadmap</i>
85	Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2021 <i>Development of GCG Implementation In 2021</i>
86	Struktur Tata Kelola Perusahaan <i>Corporate Governance Structure</i>
88	Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>
90	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
99	Direksi <i>Board of Directors</i>
107	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan <i>Development of Sustainable Finance Related Competency</i>
109	Manajemen Risiko dan Prinsip Pencegahan <i>Risk Management and Prevention Principles</i>



114 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

115 Kode Etik Perusahaan
Corporate Code of Conduct

119 Benturan Kepentingan
Conflict of Interest

120 Pelibatan Pemangku Kepentingan
Stakeholder Engagement

123 Permasalahan Terhadap Penerapan Keuangan
Berkelanjutan
The Implementation of Sustainable Issues

Kinerja Ekonomi Keberlanjutan Sustainable Economic Performance

126 Sekilas Tinjauan Ekonomi Nasional
Overview of The National Economy

Kinerja Lingkungan Keberlanjutan Sustainable Environmental Performance

138 Kinerja Lingkungan Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance

Kinerja Sosial Keberlanjutan Sustainable Social Performance

150 Kinerja Sosial Keberlanjutan
Sustainable Social Performance

Indeks GRI Standar GRI Standard Index

184 Indeks Isi GRI Standards
GRI Standard Content Index

189 Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen
Written Verification From Independent Parties

190 Lembar Umpan Balik
Feedback Sheet

192 Tanggapan Terhadap Umpan Balik Laporan Tahun
Sebelumnya
Response To Previous Year Report Feedback

194 Daftar Pengungkapan Sesuai POJK51/
POJK.03/2017
List Disclosure Based On POJK51/POJK.03/2017



Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2021

*Sustainability Performance
Overview 2021*





IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN 2019-2021

SUSTAINABILITY PERFORMANCE OVERVIEW 2019-2021

Deskripsi Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
KINERJA EKONOMI [OJK B.1] <i>ECONOMIC PERFORMANCE [OJK B.1]</i>				
Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	Kategori Produk/Jasa <i>Product/Services Category</i>	Jasa Penjaminan Kredit <i>Credit Guarantee Services</i>	Jasa Penjaminan Kredit <i>Credit Guarantee Services</i>	Jasa Penjaminan Kredit <i>Credit Guarantee Services</i>
Produk ramah lingkungan <i>Eco-friendly product</i>	Unit produk <i>Product Unit</i>	-	-	-
Pendapatan penjaminan <i>Guarantee income</i>	Jutaan Rupiah <i>IDR millions</i>	4.361.915	2.826.524*	2.152.072
Laba/(Rugi) bersih <i>Net Profit/(Loss)</i>	Jutaan Rupiah <i>IDR millions</i>	1.066.008	456.133	196.911
Pelibatan pemasok lokal (barang dan jasa) <i>Local suppliers engagement (goods and services)</i>	Perusahaan/ mitra <i>Company/Partner</i>	98	88*	93*
KINERJA SOSIAL [OJK B.3] <i>SOCIAL PERFORMANCE [OJK B.3]</i>				
Jumlah total pegawai tetap <i>Total number of permanent employees</i>	Orang <i>People</i>	975	965	965
Jumlah pegawai tetap wanita <i>Number of female permanent employees</i>	Orang <i>People</i>	387	374	371
Tingkat perputaran pegawai <i>Employee turnover rate</i>	Per센 <i>Percent</i>	3,79	3,94	5,28
Jumlah kecelakaan kerja <i>Number of work accidents</i>	Kasus <i>Cases</i>	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah waktu pendidikan dan pelatihan pegawai <i>Total employee education and training time</i>	Jam <i>Hour</i>	284.31	254.06	99,82
Biaya pendidikan dan pelatihan pegawai <i>Employee education and training costs</i>	Jutaan Rupiah <i>IDR billions</i>	690.397	649.013	2.041.435
Jumlah dana penyaluran dana TJSB BUMN <i>Total SOE TJSB fund distribution</i>	Miliar Rupiah <i>IDR billions</i>	11,62	16,26	10,43
Kepuasan nasabah/pelanggan <i>Customer/customer satisfaction</i>	Per센 <i>Percent</i>	87,08	85,02	83,80
KINERJA LINGKUNGAN [OJK B.2] <i>ENVIRONMENT PERFORMANCE [OJK B.2]</i>				
Penggunaan kertas <i>Paper Usage</i>	Rim <i>Ream</i>	935	1.185	1.150
Penggunaan energi (listrik dan BBM) <i>Energy Usage (electricity and fuel)</i>	Gigajoule <i>Gigajoule</i>	2.835,08	3.209,94*	4.028,44*
Penggunaan air <i>Water usage</i>	Meter kubik <i>Cubic Metre</i>	8.790	10.448	14.059

*disajikan kembali
*restated





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

PENJELASAN DIREKSI

Explanation of the Board of Directors





PENJELASAN DIREKSI [GRI 102-14] [OJK D.1]

EXPLANATION OF THE BOARD OF DIRECTORS [GRI 102-14] [OJK D.1]



Putrama Wahju Setyawan

Direktur Utama
President Director

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2021 merupakan tahun kedua Indonesia berada dalam kondisi ketidakpastian akibat pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Ketidakpastian tersebut tak hanya terjadi pada aspek sosial kemasyarakatan, namun juga terjadi pada aspek ekonomi. Kekhawatiran berlanjutnya resesi ekonomi sebagaimana terjadi pada tahun 2020 masih sulit dihindari, terutama di kalangan para pelaku usaha. Kekhawatiran itu semakin menguat saat pada bulan Juni-Juli muncul varian Delta yang penyebarannya sangat cepat, lebih ganas dan lebih mematikan dibanding varian lain. Sesuai keterangan Kementerian Kesehatan, penularan varian Delta enam kali kali lebih cepat dibandingkan *varian of concern* (VoC) yang sudah masuk ke Indonesia, seperti varian Alpha dan varian Beta.

Dalam kondisi yang tidak mudah seperti itu, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berkomitmen untuk menjalankan semua target kinerja seperti disampaikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021. Kami bersyukur komitmen tersebut membawa hasil yang sangat menggembirakan. Sebagian besar target yang ditetapkan dalam RKAP tercapai, dan Perusahaan mampu meraih kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan itu merupakan cerminan atas ketepatan Perusahaan dalam merumuskan RKAP Tahun 2021 yang disusun berdasarkan berbagai asumsi makro dan mikro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, situasi pandemi, volume penjaminan, pendapatan investasi dan sebagainya.

Bagi Jamkrindo, pencapaian kinerja ekonomi merupakan modal penting untuk mewujudkan target dan kinerja yang lain, yaitu kinerja sosial dan lingkungan. Sebagai korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk menyelaraskan antara pencapaian kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Pencapaian dan pemenuhan kinerja sosial dan lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN). Melalui Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2021 inilah, berbagai rencana, kebijakan, implementasi, tantangan dan solusi berkaitan dengan keberlanjutan kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kami sampaikan.

JAMKRINDO DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Laporan Keberlanjutan Jamkrindo disusun dengan merujuk dua panduan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, serta Standar GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB) lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan.

Dear honorable shareholder and stakeholders,

The year 2021 is the second year that Indonesia is in a state of uncertainty due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. This uncertainty does not only occur in the social aspect, but also occurs in the economic aspect. Concerns about the continuation of the economic recession as experienced in 2020 are still difficult to avoid, especially among business actors. This concern grew stronger when in June-July the Delta variant appeared, which spread very quickly, was more virulent and more deadly than other variants. According to the Ministry of Health's information, the transmission of the Delta variant is six times faster than the variant of concern (VoC) that has entered Indonesia, such as the Alpha variant and the Beta variant.

In such difficult conditions, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) is committed to implementing all performance targets as stated in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2021. We are grateful that this commitment has brought very encouraging results. Most of the targets set in the RKAP were achieved, and the Company was able to achieve better economic performance than the previous year. This success is a reflection of the Company's accuracy in formulating the 2021 RKAP which is based on various macro and micro assumptions, such as economic growth, inflation, rupiah exchange rate, pandemic situation, volume of guarantee, investment income and so on.

For Jamkrindo, achieving economic performance is an important asset to realize other targets and performance, namely social and environmental performance. As a sustainability-oriented corporation, the Company is committed to aligning the achievement of economic, social and environmental performance. Achievement and fulfillment of social and environmental performance, among others, is realized through the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN). Through this 2021 Sustainability Report of PT Jaminan Kredit Indonesia, we convey various plans, policies, implementations, challenges and solutions related to the performance of the economic, environmental and social aspects.

JAMKRINDO AND SUSTAINABLE FINANCE

The Jamkrindo Sustainability Report was prepared by referring to two guidelines, namely the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies or POJK on Sustainable Finance, as well as the GRI Standards by the Global Sustainability Standards Board (GSBB), an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards.

Dalam statusnya sebagai lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang penjaminan, sekaligus bukan emiten dan perusahaan publik, pada tahun 2021, Jamkrindo belum wajib menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan. Sesuai ketentuan yang ada, regulasi ini baru berlaku bagi perusahaan penjaminan per 1 Januari 2024. Namun demikian, Jamkrindo menjadikan POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai rujukan karena *spirit* di dalamnya selaras dengan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan.

Keuangan berkelanjutan, sesuai regulasi yang berlaku, didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyeraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dengan definisi seperti itu, maka penerbitan POJK Keuangan Berkelanjutan telah menempatkan lembaga jasa keuangan ke dalam sistem keuangan yang ramah lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pasal 43, ayat 3, huruf c, disebutkan tentang pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup.

Sesuai dengan pedoman teknis POJK Keuangan Berkelanjutan, Jamkrindo mewujudkan dukungan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui kegiatan operasional usaha dengan memperhatikan keselarasan antara kinerja aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Bentuk dukungan yang lain dilakukan Perusahaan dengan menyelenggarakan berbagai program TJSL BUMN, yang sekaligus merupakan kontribusi nyata Jamkrindo terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

INISIATIF/KEBIJAKAN STRATEGIS TAHUN 2021

Jamkrindo meyakini bahwa keberlanjutan kinerja aspek lingkungan dan sosial turut ditentukan oleh keberhasilan perusahaan dalam mewujudkan target dan kinerja aspek ekonomi. Sebagaimana tertulis dalam RKAP PT Jamkrindo tahun 2021, Perusahaan memiliki tema atau sasaran strategi “Accelerated Growth with Accountable Risk”. Sejalan dengan itu, fokus Perusahaan pada tahun 2021 adalah meningkatkan pertumbuhan melalui pengelolaan pemasaran dan risiko yang efektif dan seimbang. Untuk memjudikan hal itu, Jamkrindo memiliki strategi untuk optimalisasi sinergi BUMN, penguatan integrasi proses dengan mitra (terutama e-subrogasi), dan inisiasi layanan UMKMK Consultancy. [OJK A.1]

Untuk dapat meningkatkan potensi produk penjaminan, Jamkrindo memperluas jangkauan pelayanannya melalui integrasi dengan *Holding*, dan mengoptimalkan *brand preference* di mata pelanggan sebagai anggota *Holding*. Di sisi lain, Perusahaan pun masih memiliki kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) yang cukup besar dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. *Gearing ratio* Perusahaan pada posisi 31 Desember 2021 yaitu untuk produktif sebesar 10,98x dari maksimal 20x dan *gearing ratio* total sebesar 15,47x dari maksimal 40x.

Selanjutnya, sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan pada tahun 2021 yaitu “*Tuning & Consolidation Business to Maintain Sustainable Performance*” maka sebagai tindak lanjut, Jamkrindo menetapkan 15 (lima belas) inisiatif strategi yang

In its status as a financial service institution engaged in the guarantee sector, as well as not an issuer and public company, in 2021, Jamkrindo is not yet obliged to implement the POJK on Sustainable Finance. In accordance with existing regulations, this regulation only applies to guarantee companies as of January 1, 2024. However, Jamkrindo uses the POJK on Sustainable Finance as a reference because the spirit in it is in line with the company's commitment to sustainability.

Sustainable finance, according to applicable regulations, is defined as a comprehensive support from the financial services sector to create sustainable economic growth by aligning economic, social and environmental interests. With such a definition, the issuance of POJK on Sustainable Finance has placed financial service institutions into an environmentally friendly financial system, as mandated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Article 43, paragraph 3, letter c, mentions the development of a system of financial institutions and capital markets that are environmentally friendly.

In accordance with the POJK's technical guidelines for Sustainable Finance, Jamkrindo provides support for the implementation of sustainable finance through business operations by taking into account the harmony between the performance of economic, social and environmental aspects. Another form of support is carried out by the Company by organizing various SOE CSR programs, which is also Jamkrindo's real contribution to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

2021 STRATEGIC INITIATIVES/ POLICIES

Jamkrindo believes that the performance's sustainability of environmental and social aspects is also determined by the company's success in realizing targets and the performance of economic aspects. As written in PT Jamkrindo's RKAP 2021, the Company has a theme or strategy target of “Accelerated Growth with Accountable Risk”. Accordingly, the Company's focus in 2021 is to increase growth through effective and balanced marketing and risk management. To make this happen, Jamkrindo has a strategy for optimizing SOE synergy, strengthening process integration with partners (especially e-subrogation), and initiating MSMEK Consultancy services. [OJK A.1]

To be able to increase the potential of guarantee products, Jamkrindo expands its service range through integration with Holding, and optimizing brand preference in the eyes of customers as members of Holding. On the other hand, the Company still has a fairly large gearing ratio compared to other similar companies. The The Company's gearing ratio is at the position of December 31, 2021, which is for productive 10.98x from a maximum of 20x and a total gearing ratio of 15.47x from a maximum of 40x.

*Furthermore, in accordance with the direction of the Company's development in 2021, namely “*Tuning & Consolidation Business to Maintain Sustainable Performance*”, then as a follow-up, Jamkrindo has determined 15 (fifteen) strategic initiatives to be implemented*



dilaksanakan dalam tahun 2021 yaitu:

1. Memperkuat portofolio produk *existing*, baru, dan kolaborasi dengan BUMN berorientasi pada profitabilitas;
2. Memperkuat portofolio usaha dan investasi;
3. Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi dan perluasan pasar;
4. Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo;
5. Meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra melalui *Customer Relationship*;
6. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI;
7. Meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses kerja;
8. Meningkatkan efisiensi proses internal dan dengan mitra berbasis otomasi;
9. Meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning*;
10. Mengoptimalkan pemeringkatan dan pembinaan UMKMK untuk peningkatan *market share*;
11. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM;
12. Memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi;
13. Meningkatkan internalisasi budaya inovasi;
14. Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan prinsip TARIF (GCG);
15. Mengoptimalkan pembinaan mitra untuk mendukung misi organisasi.

PENCAPAIAN KINERJA BERKELANJUTAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Jamkrindo telah melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan seluruh insan Jamkrindo untuk menerapkan berbagai kebijakan dan inisiatif strategis yang telah disepakati. Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya dan komitmen Perusahaan dalam membangun budaya keberlanjutan. Komitmen dan kesungguhan untuk memberikan kontribusi terbaik berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan, baik kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Atas pencapaian tersebut, Jamkrindo meraih berbagai penghargaan antara lain GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021; 1st – The Best Indonesia Enterprises Risk Management Award -IV-2021 (Category Multifinance Company – BUMN & Subsidiary); Silver Winner – The Most Promising Company in Marketing 3.0; Good Performance – Based on assessment KPKU BUMN Total Score 573.75; The Best Social Economy Contribution in Special Insurance Category INDONESIA BUMN AWARDS 2021, dan lain-lain. Pencapaian kinerja aspek ekonomi, lingkungan dan sosial selengkapnya disajikan dalam uraian berikut:

Kinerja Aspek Ekonomi

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Sempat jatuh ke dalam zona resesi pada tahun 2020, perekonomian terus menggeliat sehingga mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69% (*year on year/yoY*), jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07% (*yoY*). Keberhasilan tersebut membuktikan ketepatan dan efektivitas berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta vaksinasi massal secara gratis.

in 2021, namely:

1. Strengthening the portfolio of existing, new products, and collaboration with SOEs that are oriented towards profitability;
2. Strengthening business and investment portfolios;
3. Strengthening and developing partnership networks for market penetration and expansion;
4. Increasing customer preferences for Jamkrindo products;
5. Increase customer and partner loyalty through Customer Relationships;
6. Improving the quality and coverage of IT-based customer services;
7. Improving the effectiveness and standardization of work processes;
8. Improving the efficiency of internal processes and with partners based on automation;
9. Improving business performance through the use of machine learning;
10. Optimizing the rating and development of MSMEs to increase market share;
11. Improving the competence and productivity of human resources;
12. Strengthening organizational knowledge management;
13. Improving the internalization of innovation culture;
14. Improving the culture of risk awareness and the application of the principles of Tariffs (GCG);
15. Optimizing partner development to support the organization's mission.

SUSTAINABLE PERFORMANCE ACHIEVEMENTS IN 2021

During 2021, Jamkrindo has carried out socialization and synergized with all Jamkrindo personnel to implement various policies and strategic initiatives that have been agreed upon. This policy was carried out at the same time as the Company's efforts and commitment in building a culture of sustainability. Commitment and sincerity to provide the best contribution has a positive impact on the Company's performance, both in terms of economic, environmental and social aspects. For this achievement, Jamkrindo won various awards including GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021; 1st – The Best Indonesia Enterprises Risk Management Award -IV-2021 (Category of Multifinance Company – SOEs & Subsidiary); Silver Winner – The Most Promising Company in Marketing 3.0; Good Performance – Based on the assessment of KPKU BUMN Total Score of 573.75; The Best Social Economy Contribution in Special Insurance Category INDONESIA BUMN AWARDS 2021, etc. The full achievements details on economic, environmental and social aspects of performance are presented in the following description:

Economic Aspect Performance

The year 2021 is the year of Indonesia's economic recovery due to the COVID-19 pandemic. Having fallen into a recession zone in 2020, the economy continued to stretch so that it was able to record growth of 3.69% (*year on year/yoY*), much higher than the previous year which contracted 2.07% (*yoY*). This success proves the accuracy and effectiveness of various policies taken by the government in dealing with the pandemic, such as the Community Activities Restrictions Enforcement (PPKM) and free mass vaccinations.



Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
Sustainable Economic
Performance



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

Dalam menyusun tingkat pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mendasarkan diri pada 17 lapangan usaha. Pada tahun 2021, tercatat 16 dari 17 lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif. Salah satu lapangan usaha yang tumbuh positif tersebut adalah Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, termasuk di dalamnya industri penjaminan, yaitu tumbuh 1,56%. Walau tumbuh positif, namun pencapaian tersebut lebih rendah dibanding tahun 2020, yang pertumbuhannya mencapai 3,25%.

Berkaitan dengan keberadaan Lembaga Penjamin di Indonesia, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 20 lembaga, yang terbagi menjadi 1 (satu) Perusahaan Penjamin BUMN, 18 Perusahaan Penjamin Daerah, dan 1 (satu) Perusahaan Penjamin Swasta. Sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia, kinerja lembaga penjamin di Tanah Air menunjukkan tren positif. Total aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp32,45 triliun, naik 46,76% dibandingkan Desember 2020 yang mencapai Rp22,11 triliun.

Sejalan dengan data BPS dan OJK, Jamkrindo turut mencatatkan peningkatan kinerja pada tahun 2021. Per 31 Desember 2021, Imbal Jasa Penjaminan Bersih tercatat sebesar Rp4,29 triliun atau 116,52% dari RKAP 2021 sebesar Rp3,69 triliun, pencapaian itu naik dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,63 triliun; Penjaminan Bersih sebesar Rp1,56 triliun atau 110,30% dari RKAP 2021 sebesar Rp1,41 triliun, naik dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp994,64 miliar. Setelah dikurangi beban klaim, beban usaha, dan pajak, per 31 Desember 2021, Jamkrindo mencatatkan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp1,07 triliun atau 185,38% dari RKAP 2021 sebesar Rp575,03 miliar, naik signifikan dibanding pencapaian tahun 2020 dengan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp456,13 miliar.

Kinerja Aspek Lingkungan

Jamkrindo menyadari bahwa upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan, merupakan tanggung jawab bersama, termasuk para pelaku usaha. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dalam menjalankan operasional bisnis dengan menaati berbagai regulasi terkait lingkungan. Sebagai panduan operasional, antara lain, Jamkrindo menerbitkan regulasi internal berupa Memorandum Divisi MSDM No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 terkait Program Jamkrindo Go Green Lifestyle.

Per 31 Desember 2021, pencapaian kinerja lingkungan Perusahaan antara lain mengurangi penggunaan kertas dari 1.185 rim pada tahun 2020 menjadi 935 rim pada tahun 2021. Penurunan terjadi seiring dengan optimalnya penggunaan e-office; Kebijakan penghematan juga berhasil diwujudkan dalam penggunaan air bersih, yaitu dari 10.448 meter kubik pada tahun 2020 menjadi 8.790 meter kubik pada tahun 2021. Selain kertas dan air, efisiensi juga berhasil diraih terkait penggunaan energi listrik Kantor Pusat Jamkrindo, yaitu dari 1.604,95 kWh atau 5,78 Gigajoule pada tahun 2020 menjadi 922,54 kWh atau 3,32

In compiling the rate of economic growth, the Central Statistics Agency (BPS) bases itself on 17 business fields. In 2021, 16 of the 17 business fields recorded positive growth. One of the business fields that grew positively was the Financial Services and Insurance Business Field, including the guarantee industry, which grew 1.56%. Despite positive growth, this achievement is lower than in 2020, where growth reached 3.25%.

With regard to the existence of Guarantor Institutions in Indonesia, according to the official website of the Financial Services Authority, by the end of 2021 there were 20 institutions, which are divided into 1 (one) SOE Guarantor Company, 18 Regional Guarantor Company, and 1 (one) Private Guarantor Company. In line with the improvement in the Indonesian economy, the performance of guarantee institutions in the country shows a positive trend. Total assets as of December 31, 2021 were recorded at IDR32.45 trillion, up 46.76% compared to December 2020 which reached IDR22.11 trillion.

In line with BPS and OJK data, Jamkrindo also recorded an increase in performance in 2021. As of December 31, 2021, the Net Guarantee Fee was recorded at IDR4.29 trillion or 116.52% of the 2021 RKAP of IDR3.69 trillion, an increase compared to 2020, which was IDR2.63 trillion; Net Guarantee of IDR1.56 trillion or 110.30% of the 2021 RKAP of IDR1.41 trillion, an increase compared to 2020 which reached IDR994.64 billion. After deducting claims, operating expenses, and taxes, as of December 31, 2021, Jamkrindo recorded a Profit for the Year of IDR1.07 trillion or 185.38% of the 2021 RKAP of IDR575.03 billion, a significant increase compared to the achievement in 2020 with Profit for the Year amounting to IDR456.13 billion.

Environmental Aspect Performance

Jamkrindo realizes that efforts to preserve the environment, as well as increase the carrying capacity of the environment, are a shared responsibility, including business actors. Therefore, the Company is committed to contributing to environmental preservation in carrying out business operations by complying with various regulations related to the environment. As an operational guide, among others, Jamkrindo issued internal regulations in the form of Memorandum of the HR Division No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 related to the Jamkrindo Go Green Lifestyle Program.

As of December 31, 2021, the Company's environmental performance achievements include reducing paper use from 1,185 reams in 2020 to 935 reams in 2021. The decline occurred in line with the optimal use of e-office; The saving policy has also been successfully realized in the use of clean water, from 10,448 cubic meters in 2020 to 8,790 cubic meters in 2021. In addition to paper and water, efficiency has also been achieved regarding the use of electricity at the Jamkrindo Head Office, which is from 1,604.95 kWh or 5.78 Gigajoules in 2020 to 922.54 kWh or 3.32 GJ in 2021; Meanwhile, Jamkrindo Head Office fuel usage



GJ pada tahun 2021; Adapun volume penggunaan BBM Kantor Pusat Jamkrindo turun dari dari 93.689 liter atau 3.204,16 GJ pada tahun 2020 menjadi 82.800 liter atau 2.831,76 GJ pada tahun 2021; Penurunan penggunaan energi listrik dan BBM otomatis menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.

Komitmen Jamkrindo terkait kelestarian lingkungan juga diwujudkan dengan mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp116.100.000. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya untuk pengelolaan limbah. Kepatuhan Perusahaan terhadap berbagai regulasi lingkungan dalam menjalankan usaha membawa hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain akibat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan sepanjang tahun 2021.

Kinerja Aspek Sosial

Jamkrindo mewujudkan komitmen terhadap kinerja aspek sosial melalui pemenuhan hak pemangku kepentingan internal yaitu karyawan dan manajemen lintas divisi, maupun pemangku kepentingan eksternal, antara lain, konsumen/pelanggan/nasabah dan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Pada tahun pelaporan, Perusahaan berhasil mempertahankan hubungan industrial yang harmonis dengan karyawan sehingga tidak ada pengaduan atau sengketa perburuhan. Selain itu, juga tidak tercatat adanya insiden diskriminasi, pekerja anak maupun insiden kerja paksa.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kompetensi karyawan, Perusahaan menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan. Selama tahun 2021, Jamkrindo telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 144 kali, yang diikuti oleh 3.820 karyawan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan terdiri dari *hard skill* maupun *soft skill*. Untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan, Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar biaya Rp18,5 miliar. Selain meningkatkan kompetensi karyawan, Jamkrindo juga berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Komitmen kolektif insan Jamkrindo berhasil meneruskan pencapaian tahun 2020 dengan tidak adanya kecelakaan kerja serta tidak terdapat laporan tentang penyakit akibat kerja.

Untuk nasabah/pelanggan, selain meningkatkan kualitas produk dan layanan, pemenuhan tanggung jawab dilakukan Perusahaan dengan melakukan berbagai inovasi produk dan layanan sehingga mereka memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan, sekaligus mendapatkan kepuasan maksimal. Melalui perbaikan kualitas layanan dan inovasi produk/layanan, Jamkrindo berhasil membuka kenaikan skor kepuasan pelanggan. Hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2021 menunjukkan nilai kepuasan pelanggan sebesar 87,08% kategori "Baik", meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 85,02%. Adapun indeks keterikatan pelanggan Jamkrindo tahun 2021 mencapai 87,32%, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 86,03%.

Sedangkan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal berikutnya, Perusahaan menuaikan tanggung jawab dengan menyelenggarakan Program TJSB BUMN melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dan

volume decreased from 93,689 liters or 3,204.16 GJ in 2020 to 82,800 liters or 2,831.76 GJ in 2021; Reducing the use of electrical energy and fuel automatically reduces greenhouse gas emissions as the cause of global warming and climate change.

Jamkrindo's commitment to environmental sustainability is also accomplished by spending an environmental fee of IDR116.100.000. The funds are used for various purposes, including for waste management. The Company's compliance with various environmental regulations in conducting business has resulted in no monetary fines or other sanctions due to violations of environmental regulations throughout 2021.

Social Aspect Performance

Jamkrindo accomplishes its commitment to the social aspect of performance through the fulfillment of the rights of internal stakeholders, namely employees and management across divisions, as well as external stakeholders, including consumers/customers and the community around where the company operates. In the reporting year, the Company managed to maintain harmonious industrial relations with employees so that there were no complaints or labor disputes. In addition, there were also no recorded incidents of discrimination, child labor or forced labor incidents.

In line with the commitment to improve employee competence, the Company organizes various education and training programs. During 2021, Jamkrindo has conducted 144 education and training sessions, which were attended by 3,820 employees. Types of employee competency development consist of hard skills and soft skills. To finance various education and training programs, the Company spent IDR18.5 billion. In addition to improving employee competence, Jamkrindo is also committed to creating a safe and healthy work environment. The collective commitment of Jamkrindo people has succeeded in continuing the achievement in 2020 with no work accidents and no reports of occupational diseases.

For customers, in addition to improving the quality of products and services, the Company fulfills its responsibilities by conducting various product and service innovations so that they have more choices according to their needs, while getting maximum satisfaction. Through service quality improvement and product/service innovation, Jamkrindo managed to record an increase in customer satisfaction scores. The results of the customer satisfaction survey in 2021 show a customer satisfaction value of 87.08% in the "Good" category, an increase from 2020 which was 85.02%. The Jamkrindo customer engagement index in 2021 reached 87.32%, an increase from 2020 which was 86.03%.

Meanwhile, to the community as the next external stakeholder, the Company fulfills its responsibilities by organizing the SOE CSR Program through the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and the CSR Program (Non PUMK). As of December

Program TJSL (Non PUMK). Per 31 Desember 2021, Perusahaan menyalurkan dana Program PUMK sebesar Rp3.812.000.000 atau 111,98% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp3.404.037.327. Dana tersebut disalurkan oleh 41 kantor cabang di Tanah Air kepada 132 mitra binaan yang bergerak di empat sektor, yaitu Perdagangan, Jasa, Peternakan, dan Industri. Sementara itu, Program TJSL (Non PUMK) dilaksanakan oleh 55 (lima puluh lima) kantor cabang dan 9 (sembilan) kantor wilayah di Indonesia dengan jumlah penyaluran dana sebesar Rp7.335.837.951 atau 103,01% dari RKA sebesar Rp7.300.000.000. Dana tersebut disalurkan ke dalam delapan jenis bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah.

Sejalan dengan komitmen Perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), program-program TJSL telah dipetakan sehingga menjadi jelas dukungannya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Berdasarkan pemetaan tersebut, kegiatan TJSL tahun 2021 melalui lima pilar telah mendukung 13 dari 17 TPB.

PROSPEK DAN PELUANG

Keberhasilan pemerintah mengendalikan laju penyebaran virus corona tahun 2021, sekaligus berhasil menggerakkan roda perekonomian sehingga Indonesia keluar dari resesi ekonomi dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% (*year on year/yoY*), membuatnya apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk lembaga ekonomi global, yaitu Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Ditopang komitmen pemerintah untuk meneruskan berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi serta menjaga agar perekonomian tetap tumbuh, kedua lembaga memprediksi perekonomian Indonesia tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dalam hal ini, IMF memprediksi perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,4% pada tahun 2022, sedangkan proyeksi Bank Dunia berada pada angka 5,2 %.

Proyeksi optimisme tersebut merupakan modal penting bagi para pelaku usaha, termasuk bagi Jamkrindo. Untuk itu, Perusahaan telah menetapkan target dan kinerja yang lebih tinggi dalam RKAP Tahun 2022 dibanding RKAP Tahun 2021. Antara lain, Imbal Jasa Penjaminan Bersih ditargetkan sebesar Rp4,35 triliun, Penjaminan Bersih sebesar Rp1,98 triliun, dan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp818,95 miliar. Didorong keyakinan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun 2021, Jamkrindo optimistis mampu meraih target dan kinerja RKAP Tahun 2022 tersebut.

31, 2021, the Company disbursed funds for the PUMK Program amounting to IDR3,812,000,000 or 111.98% of the 2021 RKA amounting to IDR3,404,037,327. The funds were distributed by 41 branch offices in the country to 132 fostered partners engaged in four sectors, namely Trade, Services, Livestock, and Industry. Meanwhile, the TJSL (Non PUMK) Program is implemented by 55 (fifty-five) branch offices and 9 (nine) regional offices in Indonesia with a total disbursement of IDR7,335,837,951 or 103.01% of the RKA of IDR7,300,000,000. The funds are channeled into eight types of assistance, namely aid for survivors of natural disasters, education and/or training assistance, assistance for improving health, assistance for developing public infrastructure and facilities, aid for houses of worships, assistance for nature conservation, social assistance for the community in the context of poverty alleviation, and assistance for survivors of natural and non-natural disasters due to epidemics.

In line with the Company's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs), CSR programs have been mapped so that it becomes clear their support for the Sustainable Development Goals (SDGs). Based on this mapping, TJSL activities in 2021 through five pillars have supported the 13 from 17 SDGs.

PROSPECTS AND OPPORTUNITIES

The government's success in controlling the spread of the Coronavirus in 2021, as well as successfully moving the wheels of the economy so that Indonesia came out of economic recession by recording economic growth of 3.69% (*year on year/yoY*), led to appreciation from various groups, including global economic institutions, namely: International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. Supported by the government's commitment to continue various policies in handling the pandemic and keeping the economy growing, the two institutions predict that the Indonesian economy in 2022 will be better than the previous year. In this case, the IMF predicts that the Indonesian economy will grow by 5.4% in 2022, while the World Bank's projection is at 5.2%.

This optimism projection is an important asset for business actors, including Jamkrindo. Therefore, the Company has set a higher target and performance in the 2022 RKAP compared to the 2021 RKAP. Among other things, the Net Guarantee Fee is targeted at IDR4.35 trillion, Net Guarantee of IDR1.98 trillion, and Profit for the Year of IDR818.95 billion. Confident that Indonesia's economic condition in 2022 will be better than 2021, Jamkrindo is optimistic that it will be able to achieve the target and performance of the 2022 RKAP.

PENUTUP

Kami menyadari bahwa keberhasilan Jamkrindo melalui tahun 2021 dengan membukukan kinerja membanggakan merupakan hasil kerja bersama dan dukungan dari para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan dan pengawasan, kami menyampaikan terima kasih. Ungkapan yang sama kami sampaikan kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam mengelola Perusahaan. Kepada seluruh nasabah/pelanggan, mitra kerja dan masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi, kami mengucapkan terima kasih pula atas kepercayaannya selama ini. Khusus kepada karyawan, kami memberikan apresiasi atas kerja keras, dedikasi dan loyalitas yang diberikan dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan Perusahaan.

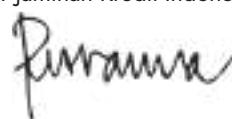
Sejalan dengan optimisme bahwa kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi tahun 2022 akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya, kami berharap agar dukungan dan kerja sama yang telah berlangsung selama ini dapat terus berlanjut. Bagi Jamkrindo, dukungan dan kerja sama tersebut merupakan fondasi yang kokoh untuk menopang kemajuan dan keberlanjutan usaha di masa depan.

CLOSING

We realize that Jamkrindo's success through 2021 by recording an impressive performance is the result of joint work and support from stakeholders, both internal and external. Thus, to the Board of Commissioners who always provide direction and supervision, we express our gratitude. We convey the same expression to the shareholders who have trusted us in managing the Company. To all customers, business partners and communities around the company's operations, we would also like to thank you for your trust so far. Especially to employees, we appreciate the hard work, dedication and loyalty given in realizing the targets set by the Company.

In line with the optimism that the social and economic conditions in 2022 will be better than the previous year, we hope that the support and cooperation that has been going on so far can continue. For Jamkrindo, this support and cooperation is a solid foundation to support business progress and sustainability in the future.

Jakarta, 23 Agustus 2022
Jakarta, August 23, 2022
 PT Jaminan Kredit Indonesia



Putrama Wahju Setyawan
 Direktur Utama
 President Director

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

About Sustainability Report





TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN

ABOUT SUSTAINABILITY REPORT

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Di era keterbukaan saat ini, termasuk masifnya penggunaan berbagai jenis media sosial, transparansi semakin menemukan makna penting. Dalam konteks itulah, Perusahaan menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021. Jamkrindo berharap penerbitan laporan bisa menjadi media terpercaya bagi segenap pemangku kepentingan terkait kinerja keberlanjutan perusahaan. Perusahaan menerbitkan Laporan Keberlanjutan setahun sekali. Laporan tahun 2021 merupakan laporan keenam. Adapun laporan sebelumnya terbit pada 26 November 2021. [GRI 102-51, 102-52]

Melalui laporan ini, Jamkrindo menyampaikan secara transparan kinerja keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial beserta dampaknya selama periode 1 Januari-31 Desember 2021, tidak termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Anak Perusahaan, terkecuali yang terkait dengan laporan keuangan dimana laporan ini merujuk pada laporan keuangan konsolidasian. Pelaporan tentang ketiga aspek tersebut sekaligus merupakan upaya Perusahaan mendukung pencapaian tujuan pembangunan global, yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang telah diadopsi Indonesia menjadi SDGs Indonesia (<http://sdgsindonesia.or.id/>). [GRI 102-45, 102-50, 102-52]

Jamkrindo menerbitkan laporan ini sebagai bagian dari penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran). Penerbitan Laporan juga merupakan upaya Perusahaan memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat 2c, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang wajibkan. Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, adalah "Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya".

Data keuangan dalam Laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data keuangan yang kami sampaikan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan dibuat dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Data kuantitatif dalam Laporan ini disajikan dengan menggunakan prinsip daya banding (*comparability*) dalam tiga tahun berturut-turut. Dengan demikian, pengguna Laporan dapat melakukan analisis tren tentang kinerja Perusahaan. Selain edisi cetak, laporan yang sama dapat diakses melalui situs resmi perusahaan www.jamkrindo.co.id. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah, kami menyediakan Lembar Umpam Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan segenap pemangku kepentingan dapat memberikan tanggapan, usulan, kritik dan saran yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan.

Transparency or openness is one of the principles of good corporate governance for PT Guarantee Kredit Indonesia or Jamkrindo. In the current era of openness, including the massive use of various types of social media, transparency is increasingly finding an important meaning. In that context, the Company publishes the 2021 Sustainability Report, which is an integral part of the Company's 2021 Annual Report. Jamkrindo hopes that the publication of the report can become a trusted medium for all stakeholders regarding the company's sustainability performance. The company publishes a Sustainability Report once a year. The 2021 report is the sixth report. The previous report was published on November 26, 2021. [GRI 102-51, 102-52]

Through this report, Jamkrindo transparently conveys the sustainability performance of economic, environmental and social aspects and their impacts during the period January 1-December 31, 2021, excluding activities organized by Subsidiaries, except those related to the financial statements where this report refers to the consolidated financial statements. . Reporting on these three aspects is also an effort by the Company to support the achievement of global development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs), which Indonesia has adopted into Indonesia's SDGs (<http://sdgsindonesia.or.id/>). [GRI 102-45, 102-50, 102-52]

Jamkrindo published this report as part of upholding the principles of Good Corporate Governance, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. Issuance of the report is also an effort by the Company to comply with the provisions of Article 66 paragraph 2c, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT), which requires that. The company submits a report on the implementation of Social and Environmental Responsibility (TJSL). Social and Environmental Responsibility, according to Article 1 of Law No. 40 of 2007, is "the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general".

Financial data in this Report uses Rupiah nomination, unless otherwise indicated. All financial data that we submit has been audited by a Public Accounting Firm for the purposes of the Company's Annual Report. Reports are made in two languages, namely Indonesian and English. The quantitative data in this report is presented using the principle of comparability for three consecutive years. Thus, Report users can perform trend analysis on the Company's performance. Apart from the printed edition, the same report can be accessed through the company's official website www.jamkrindo.co.id. For two-way communication, we provide a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is hoped that all stakeholders can provide comments, suggestions, criticisms and suggestions that are very useful for improving the quality of reporting in the future.



Rujukan Laporan dan External Assurance

Laporan ini disusun berdasarkan Standar GRI (GRI Standards) yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) lembaga yang dibentuk oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. Selain itu, laporan juga merujuk pada Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, secara resmi, Jamkrindo terkena kewajiban untuk menerapkan peraturan tersebut per 1 Januari 2024. Namun demikian, Perusahaan berinisiatif untuk menjadikan POJK Keuangan Berkelanjutan sebagai rujukan lebih awal karena spirit keberlanjutan merupakan salah satu concern Jamkrindo dalam menjalankan usaha. [GRI 102-54]

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan informasi yang valid dan komprehensif, Jamkrindo berupaya untuk menyampaikan semua informasi sesuai dengan Standar GRI dan POJK Keuangan Berkelanjutan. Untuk memudahkan pembaca menemukan informasi yang sesuai dengan rujukan, kami menyertakan penanda khusus dengan mencantumkan pengungkapan Standar GRI di belakang kalimat atau alinea yang relevan, atau berupa huruf dan angka sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK No. 51/2017. Data lengkap kecocokan isi laporan dengan kedua rujukan disajikan di bagian belakang laporan ini. [GRI 102-55]

GRI merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Namun, hal itu bukanlah persyaratan agar dapat "sesuai" dengan Pedoman. Atas pertimbangan tertentu dari manajemen, Jamkrindo belum melakukan penjaminan dari pihak ketiga yang independen. Namun demikian, Perusahaan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan di dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual. Sementara itu, untuk memenuhi prinsip validitas, apabila terdapat penyajian kembali informasi yang terbit pada tahun sebelumnya karena perbedaan metodologi perhitungan, maka dalam laporan ini akan diberi tanda *disajikan kembali. Penyajian kembali informasi dalam laporan ini antara lain berkaitan dengan tabel realisasi penyaluran dana Program Pendanaan UMK, serta Distribusi Nilai Ekonomi. [GRI 102-48, 102-56]

Proses Penetapan Isi Laporan [GRI 102-46]

Prinsip penetapan konten laporan ini didasarkan pada 4 (empat) prinsip, sesuai dengan panduan GRI, yaitu:

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Kami melibatkan pemangku kepentingan dalam penentuan topik material laporan melalui *Focus Group Discussion*.

2. Konteks Keberlanjutan

Konten dalam laporan ini adalah isu atau topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan, meliputi topik ekonomi, lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, keberlanjutan bisa diartikan sebagai kelestarian.

Report Reference and External Assurance

This report is prepared based on the GRI Standards (GRI Standards) issued by the Global Sustainability Standards Board (GSSB) an institution formed by the Global Reporting Initiative (GRI) to handle the development of sustainability reporting standards. In accordance with the options provided in the GRI Standards, namely Core Choices and Comprehensive Choices, this report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Options. In addition, the report also refers to OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies or POJK Sustainable Finance. As a credit guarantee company, Jamkrindo is officially required to implement the regulation as of January 1, 2024. However, the Company took the initiative to make POJK Sustainable Finance an early reference because the spirit of sustainability is one of Jamkrindo's concerns in running a business. [GRI 102-54]

In line with the commitment to provide valid and comprehensive information, Jamkrindo strives to convey all information in accordance with the GRI Standards and POJK Sustainable Finance. To make it easier for readers to find information that matches the reference, we include special markers by including the GRI Standard disclosures behind the relevant sentences or paragraphs, or in the form of letters and numbers as regulated in Attachment II of POJK No. 51/2017. Complete data on the suitability of the contents of the report with the two references is presented at the back of this report. [GRI 102-55]

*GRI recommends the use of external assurance by an independent third party to ensure the quality and reliability of the information presented in this report. However, it is not a requirement to be "compliant" with the Code. Based on certain considerations from management, Jamkrindo has not provided guarantees from independent third parties. However, the Company guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate and factual. Meanwhile, to comply with the principle of validity, if there is a restatement of information published in the previous year due to differences in the calculation methodology, this report will be marked with a restatement *. The restatement of information in this report relates, among other things, to the table on the realization of the distribution of funds for the MSE Funding Program, as well as the Distribution of Economic Value. [GRI 102-48, 102-56]*

Report Content Determination Process [GRI 102-46]

The principle of determining the content of this report is based on 4 (four) principles, in accordance with the GRI guidelines, namely:

1. Stakeholder Engagement

We involve stakeholders in determining the topic of the report material through Focus Group Discussions.

2. Sustainability Context

The content in this report is an issue or topic related to the context of sustainability, including economic, environmental and social topics. In this case, sustainability can be defined as sustainability.

3. Materialitas

Prinsip ini kami terapkan dengan menentukan konten laporan melalui prosedur penetapan materialitas dengan terlebih dulu mengidentifikasi topik spesifik, kemudian menetapkan bobot dari masing-masing topik tersebut melalui uji materialitas sehingga didapat topik yang material, yakni topik yang kami nilai relevan, menjadi prioritas dan penting untuk disampaikan.

4. Lengkap

Kami menegakkan prinsip ini dengan melakukan pengujian atas topik yang material, mencakup ketersediaan data maupun penetapan batasan (*boundary*) sehingga mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan.

Selanjutnya, merujuk pada panduan GRI, kami menggunakan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi Laporan, yaitu:

- 1. Identifikasi:** Kami melakukan identifikasi terhadap topik-topik yang material/penting dan menetapkan batasan (*boundary*).
- 2. Prioritas:** Kami menentukan prioritas berdasarkan topik-topik material yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya.
- 3. Validasi:** Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material.
- 4. Review:** Kami melakukan review atas isi, data dan analisis laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya.

Keempat langkah dalam menetapkan konten laporan digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penetapan Konten Laporan berikut ini:

3. Materiality

We apply this principle by determining the content of the report through a materiality determination procedure by first identifying specific topics, then determining the weight of each topic through a materiality test so that material topics are obtained, namely topics that we consider relevant, prioritize and important to convey.

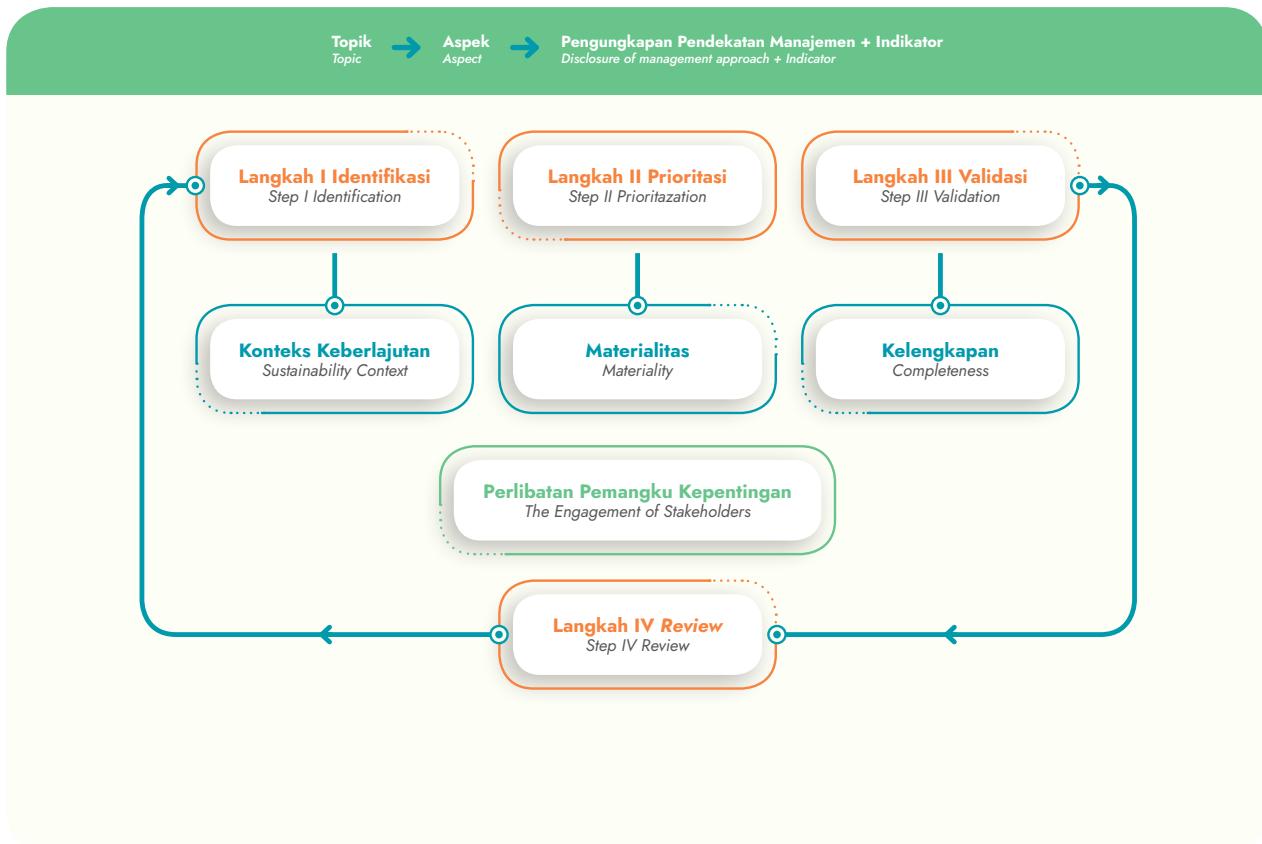
4. Complete

We enforce this principle by testing material topics, including data availability and setting boundaries so that they reflect significant economic, environmental and social impacts.

Furthermore, referring to the GRI guidelines, we use 4 (four) steps in determining the topic and content of the Report, namely:

- 1. Identification:** We identify material/important topics and set boundaries.
- 2. Priority:** We determine priorities based on the material topics identified in the previous step.
- 3. Validation:** We validate the topics that are considered material.
- 4. Review:** We review the content, data and analysis of the report after it is published in order to improve the quality of the report for the following year.

The four steps in defining report content are illustrated in the following Report Content Defined Process Flowchart:



Selanjutnya, konten laporan diulas demi memenuhi 6 (enam) prinsip kualitas yang direkomendasikan oleh GRI, meliputi:

1. Akurasi

Informasi yang disajikan akurat dan detail sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan.

2. Keseimbangan

Kinerja perusahaan yang disajikan memuat aspek positif maupun negatif (jika ada) sehingga dapat dinilai secara rasional dan menyeluruh.

3. Kejelasan

Informasi yang disajikan mudah dipahami dan dimengerti serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

4. Keterbandingan

Informasi yang disajikan konsisten dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk menilai tren kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, yaitu minimal tiga tahun.

5. Keandalan

Laporan memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan, yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan.

6. Ketepatan Waktu

Laporan diterbitkan secara rutin dan tepat waktu sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia.

Daftar Topik Material dan Boundary [GRI 102-47]

Topik material laporan keberlanjutan, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah prioritaskan organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dampak dalam Laporan ini termasuk di dalamnya yang bernilai positif. Penetapan materialitas dalam laporan ini disusun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pemangku kepentingan internal Jamkrindo.

Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa topik-topik material dan boundary tahun 2020 masih relevan dengan tahun 2021, maka topik material dan boundary laporan tahun 2021 adalah sama dengan tahun sebelumnya. Walau demikian, sejalan dengan pembaruan yang dilakukan GRI Standard terhadap topik dan pengungkapan yang berlaku per 1 Januari 2021, maka Jamkrindo melakukan penyesuaian terhadap pengungkapan Topik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Jika merujuk Topik K3 sesuai panduan tahun 2016, pengungkapan laporan tahun 2020 adalah 403-1, 403-2, 403-3 dan 403-4, maka sesuai panduan Topik K3 Tahun 2018, pengungkapan diubah menjadi 403-1, 403-4, 403-9 dan 403-10. Dengan demikian, topik material dan boundary selengkapnya adalah sebagai berikut: [GRI 102-49]

Furthermore, the report content is reviewed to meet the 6 (six) quality principles recommended by GRI, including:

1. Accuracy

The information presented is accurate and detailed so that it can be used by stakeholders to assess the company's performance.

2. Balance

The company's performance presented contains both positive and negative aspects (if any) so that they can be assessed rationally and thoroughly.

3. Clarity

The information presented is easy to understand and understand and can be accessed by stakeholders.

4. Comparability

The information presented is consistent and can be used by stakeholders to assess the trend of the company's performance within a certain period of time, which is a minimum of three years.

5. Reliability

The report contains and uses information and the processes used in preparing the report, which can be checked and reflect the quality and materiality of the information presented.

6. Punctuality

Reports are published regularly and on a timely basis so as to assist stakeholders in making decisions based on available information.

List of Material Topics and Boundaries [GRI 102-47]

Sustainability report material topics, as stated in the GRI Standards, are topics that the organization has prioritized for inclusion in the report. The dimensions used to determine priorities, among others, are economic, environmental and social impacts. The impacts in this Report include those that are positive. The determination of materiality in this report was prepared based on the results of the Focus Group Discussion (FGD) of Jamkrindo's internal stakeholders.

Furthermore, with the consideration that the material topics and boundaries in 2020 are still relevant to 2021, the material topics and boundaries for the 2021 report are the same as in the previous year. However, in line with the updates made by the GRI Standard on topics and disclosures that apply as of January 1, 2021, Jamkrindo has made adjustments to the disclosure of Occupational Health and Safety (K3) Topics. If referring to the OHS Topics according to the 2016 guidelines, the 2020 report disclosures are 403-1, 403-2, 403-3 and 403-4, then according to the 2018 OHS Topic guidelines, the disclosures are changed to 403-1, 403-4, 403-9 and 403-10. Thus, the complete material topics and boundaries are as follows: [GRI 102-49]

Daftar Topik Material dan Boundary Tahun 2021
List of Material Topics and Boundaries for 2021

Topik Material Material Topic [GRI 102-47]	Kenapa Topik Ini Material <i>Why the Topic Matters</i> [GRI 103-1]	Nomor Pengungkapan Disclosure Number	Boundary (Batasan Topik) [GRI 102-46]	
			Di dalam Jamkrindo <i>Internal of Jamkrindo</i>	Di luar Jamkrindo <i>External of Jamkrindo</i>
TOPIK EKONOMI <i>ECONOMY TOPIC</i>				
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan <i>Direct Economic Value Generated and Distributed</i>	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporan <i>Describe the Company's achievements and performance during the reporting year</i>	201-1, 201-3	✓	
Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>Indirect Economic Impact</i>	Menggambarkan manfaat atas keberadaan Perusahaan bagi masyarakat <i>Describe the benefits of the Company's existence for the community</i>	203-1, 203-2	✓	✓
Anti-Korupsi <i>Anti Corruption</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan untuk menyelenggarakan usaha secara bersih dan transparan <i>Describes the Company's commitment to conducting business in a clean and transparent manner</i>	205-3	✓	✓
Bersaing Sehat <i>Healthy Competition</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan menjalankan usaha secara sehat, anti-monopoli/anti-trust <i>Describes the Company's commitment to running a healthy, anti-monopoly/anti-trust business</i>	206-1	✓	✓
TOPIK LINGKUNGAN <i>ENVIRONMENT TOPIC</i>				
Material/Bahan Baku <i>Material/Raw Material</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan material/bahan baku <i>Describes the Company's commitment to efficiency in the use of materials/raw materials</i>	301-1	✓	✓
Energi <i>Energy</i>	Menggambarkan kedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi yang ketersediannya kian terbatas <i>Illustrates the Company's concern for managing the increasingly-limited energy</i>	302-1, 302-3, 302-4	✓	✓
Air dan Efluen <i>Water and Effluent</i>	Menggambarkan kedulian Perusahaan dalam mengelola air bersih yang pasokannya kian terbatas <i>Illustrates the Company's concern in managing managing the increasingly-limited clean water</i>	303-1, 303-3	✓	✓
TOPIK SOSIAL <i>SOCIAL TOPIC</i>				
Kepegawaian <i>Employment</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam pengelolaan pegawai seperti rekrutmen, turnover, tunjangan, dan lain-lain <i>Describes the Company's commitment in managing employees such as recruitment, turnover, benefits, and others</i>	401-1, 401-2, 401-3	✓	
Hubungan Ketenagakerjaan <i>Employment Relationship</i>	Menggambarkan mekanisme Perusahaan dalam mengomunikasikan perubahan signifikan dalam operasional usaha <i>Describe the Company's mechanism in communicating significant changes in business operations</i>	402-1	✓	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman <i>Describes the Company's commitment to providing a safe and comfortable workplace</i>	403-1, 403-4, 403-9, 403-10	✓	
Pelatihan dan Pendidikan <i>Training and Education</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas karyawan <i>Describes the Company's commitment to improving employee competence and capacity</i>	404-2, 404-3	✓	



Topik Material Material Topic [GRI 102-47]	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic Matters [GRI 103-1]	Nomor Pengungkapan Disclosure Number	Boundary (Batasan Topik) [GRI 102-46]	
			Di dalam Jamkrindo Internal of Jamkrindo	Di luar Jamkrindo External of Jamkrindo
Masyarakat lokal <i>Local community</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan terhadap pentingnya keterlibatan masyarakat lokal, termasuk menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat <i>Describes the Company's commitment to the importance of local community involvement, including providing a complaint channel for the community</i>	413-1, 413-2	✓	✓
Pemasaran dan Pelabelan <i>Marketing and Labeling</i>	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam memasarkan produk/layanan, serta penyajian informasi yang lengkap atas produk/layanan yang ditawarkan kepada nasabah/konsumen <i>Describes the Company's commitment in marketing its products/services, as well as presenting complete information on the products/services offered to customers/consumers</i>	417-1	✓	✓

Akses Informasi Atas Laporan Keberlanjutan

Access to Information on Sustainability Reports

Laporan ini ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan sebagai salah satu landasan melakukan penilaian atas kinerja Jamkrindo. Para pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi mengenai sejauh mana Perusahaan berperan serta dalam menjalankan kewajibannya bagi keberlanjutan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial selama tahun pelaporan. Untuk itu, Perusahaan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan dengan menghubungi: [GRI 102-53]

This report is addressed to all stakeholders as a basis for evaluating Jamkrindo's performance. Stakeholders can evaluate the extent to which the Company participates in carrying out its obligations for the sustainability of economic, environmental and social aspects during the reporting year. To that end, the Company provides the widest possible access to information for all stakeholders by contacting: [GRI 102-53]

SEKRETARIS PERUSAHAAN

PT Jaminan Kredit Indonesia
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon : +62 21 6540335
Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

CORPORATE SECRETARY

PT Jaminan Kredit Indonesia
Jamkrindo Building
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Central Jakarta, 10610, Indonesia
Phone : +62 21 6540335
Fax : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile





INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY

Nama Perusahaan [GRI 102-1] Company Name	PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disingkat PT Jamkrindo PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to PT Jamkrindo
 Bentuk dan Status Badan Usaha [GRI 102-5] Form and Status of Business Entity	Perseroan Terbatas (PT) <i>Limited Liability Company</i>
 Tanggal Pendirian Date of Establishment	1 Juli 1970 July 1, 1970
	Akta Pendirian No. 25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 09 April 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 No. AHU-0066418.AH.01.11.TAHUN 2020. Deed of Establishment No. 25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jamkrindo (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, No. AHU-0066418. AH.01.11. of 2020.
 Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKM), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKM), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.
 Bidang Usaha [GRI 102-2] Line of Business	Indonesia
 Negara Tempat Beroperasi [GRI 102-4] Country of Operation	9 (sembilan) Kantor Wilayah, 55 (lima puluh lima) Kantor Cabang dan 16 (enam belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia 9 (nine) Regional Offices, 55 (fifty five) Branch Offices and 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia
 Kepemilikan [GRI 102-5] Ownership	<ul style="list-style-type: none"> • Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia (0,0000128%) • Saham Seri B PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99,9999872%) • Series A Dwiwarna Shares The Government of Republik Indonesia (0.0000128%) • Series B Shares PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (99.9999872%)
 Penyerahan Modal Negara Addition of State Capital	Rp10.638.733.000.000 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) IDR10,638,733,000,000 (ten trillion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty three million rupiah)
 Jumlah Karyawan Tetap Permanent Employees	975 orang per 31 Desember 2021 975 employees as of December 31, 2021
 Alamat Kantor Pusat [GRI 102-3][OJK C.2] Head Offices Address	<p>Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia Telepon: +62 21 6540335 Faksimili: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Situs Web: www.jamkrindo.co.id</p> <p>Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Central Jakarta 10610, Indonesia Phone: +62 21 6540335 Fax: +62 21 6540344, 6540348 Email: contact@jamkrindo.co.id Website: www.jamkrindo.co.id</p>
 Media Sosial Social Media	@pt_jamkrindo @pt_jamkrindo Jamkrindo PT Jamkrindo

SEKILAS TENTANG JAMKRINDO

JAMKRINDO AT A GLANCE



PT Jaminan Kredit Indonesia, yang selanjutnya disebut juga dengan Jamkrindo atau Perusahaan, didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1981, yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1985, selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum PSU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008

PT Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter also referred to as Jamkrindo or the Company, was established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 under the name of Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, which was previously the Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. Based on Government Regulation No. 51 of 1981, which was enhanced by Government Regulation No. 27 of 1985, followed by Government Regulation No. 95 of 2000 dated November 7, 2000, the Public Company for the Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed to the Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum PSU).

Then in May 2008, through Government Regulation No. 41 dated May 19, 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha was again changed its name to Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). The change in the name of the company is related to the change in the company's business which no longer provides loans directly to UMKMK through a profit-sharing pattern, but only focuses on the UMKMK credit guarantee business. Also in 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 dated January 26, 2008 concerning Guarantee Institutions. To implement the Presidential Regulation, the Government, in this case the Ministry of Finance, issued Regulation of the Minister of Finance No. 222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 concerning Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee

tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484. AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari *Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan*.

Perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN *Holding Perasuransi dan Penjaminan* tersebut adalah:

1. Anggota *Holding Pasar Modal dan Jasa Keuangan*
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi;
 - PT Bahana Sekuritas, bergerak di bidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek;
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia;
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasehat keuangan (advisory);
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), bergerak di bidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anggota *Holding Asuransi Umum dan Penjaminan*
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum;
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank;
 - PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak di bidang asuransi sosial;
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum.
3. Anggota *Holding Asuransi Jiwa dan Kesehatan*
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa.

Company. With this regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No. KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009 which stipulates Perum Jamkrindo's business license as a credit guarantee company.

The President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of the Indonesian Credit Guarantee Public Company or Perum Jamkrindo into a Limited Liability Company through Government Regulation No. 11 of 2020 dated February 14, 2020 concerning the Change of Legal Entity for a Public Company (PERUM) of Indonesian Credit Guarantees to become a Limited Liability Company (Persero) which was promulgated on February 17, 2020. This decision was confirmed through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Legalization of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of incorporation of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of State-Owned Enterprises Building, Jakarta on February 24, 2020.

Then based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning ng Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia changed the legal entity status of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jamkrindo and officially became a subsidiary of the BUMN Insurance and Guarantee Corporation holding.

The companies that are members of the SOEs Holding for Insurance and Guarantee are:

1. Member of Capital Market and Financial Services Holding
 - a. PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), is engaged in investment management;
 - b. PT Bahana Sekuritas, is engaged in the underwriting and brokerage of securities;
 - c. PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia;
 - d. PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), is engaged in investment and financial advisory services (advisory);
 - e. PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), is engaged in building ownership, management and rental.
2. General Insurance and Guarantee Holding Member
 - a. PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") which operates in the field of credit insurance and general insurance services;
 - b. PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non-banks;
 - c. PT Asuransi Jasa Raharja ("Jasa Raharja") is engaged in social insurance;
 - d. PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is engaged in general insurance.
3. Life and Health Insurance Holding Member
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) which is engaged in life insurance.



RIWAYAT PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

COMPANY NAME CHANGE HISTORY

Kronologi proses perubahan nama Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985;
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000;
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008;
- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No. 25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero);
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0028854. AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *Holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.

The chronology of the process of changing the name of Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- *The company was initially established under the name Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which is a merger of the Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was later refined through Government Regulation No. 27 of 1985;*
- *Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000;*
- *The Company's name was changed again, to become the Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008;*
- *In the context of changing the legal entity form of Perum Jamkrindo from a Public Company (PERUM) to a Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No. 11 of 2020 which was promulgated on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed, namely Deed No. 25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00011484.AH.01.01 of 2020 concerning the Legalization of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity The Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero);*
- *Based on Government Regulation No. 20 of 2020 concerning the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and the Deed of Amendment to the Articles of Association No. 2 April 9, 2020 which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0028854.AH.01.02.In 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee Holding company under the name PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.*



Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT. Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Dairy Cows Credit, Paddy Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk. Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

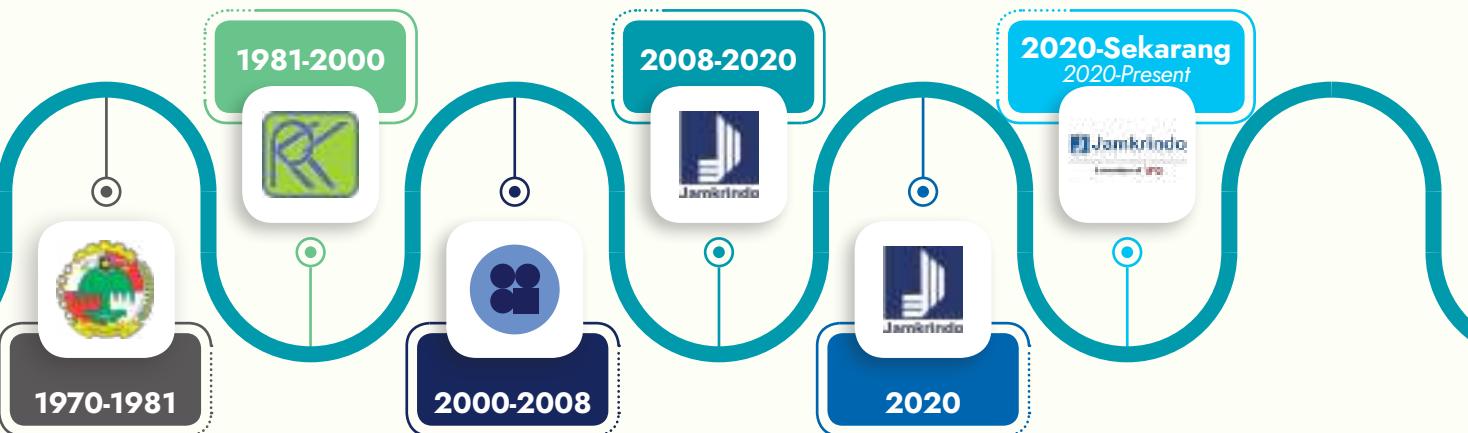
Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah. Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product.

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antara lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN [OJK C.1]

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE [OJK C.1]

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Risalah Rapat No. B.002/EKT/DIRUT/RUPS/1/2022 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, maka Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Minutes of Meeting No. B.002/EKT/DIRUT/GMS/1/2022 concerning the Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2020 to 2024, the Board of Commissioners and Board of Directors shall determine the Vision, Mission and Corporate Culture as follows:



Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional.

To become the main choice of business actors in guarantee services to support growth and equity of the national economy.



Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Improving the financial accessibility of MSMEs and Cooperatives through the provision of innovative, competitive guarantees with continuous professional, effective and efficient services.

Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi Perusahaan

Visi, Misi & Nilai Perusahaan telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023.

Budaya Perusahaan [GRI 102-16]

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK".

Key Management Approval of the Company's Vision and Mission

The Company's Vision, Mission & Values have received mutual support and approval from the Supervisory Board and the Company's Board of Directors, based on the Letter of Approval from the Ministry of SOEs No. S-286/MBU/05/2019 concerning Jamkrindo's Long-Term Corporate Plan (RJPP) for the 2019-2023 Financial Year.

Corporate Culture [GRI 102-16]

Corporate Culture In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, so Jamkrindo's corporate culture consists of 5 (five) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of "AKHLAK".



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA [OJK C.4]

LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND SERVICES [OJK C.4]

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 10, tanggal 8 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber dan Perseroan berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya;
 - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh Badan Usaha Milik Negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan;
 - d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa surety bond yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
 - j. Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;

Business Activities Based on Articles Of Association

According to Deed No.10, March 8, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association in Article 3, the Purpose and Objectives and Business Activities are stated as follows:

1. The Company has the purpose and objectives to carry out guarantee business activities for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, other Guarantees and optimizing the utilization of Company resources based on good Corporate Governance principles.
2. To carry out the purpose and objectives as referred to in paragraph (1), the Company carries out the main business activities as follows:
 - a. Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives;
 - b. Loan guarantee channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit for its members;
 - c. Credit guarantee and/or partnership program loans are distributed by State-Owned Enterprises in partnership and community development programs;
 - d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - e. Guarantee of goods purchase in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - f. Guarantee of trade transactions carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - g. Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - h. Guarantee of Bank Guarantees (Counter-the Bank Guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
 - j. Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;

- k. Penjaminan kepabeanan (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi;
- o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain;
- p. Penjaminan sistem resi gudang;
- q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
- s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi; dan
- t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan usaha utama Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan Bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama dalam hal Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan dan Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

Produk dan Jasa yang Dijalankan Perusahaan

Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit (*terjamin*) kepada penerima jaminan. Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut penerima jaminan, debitur kredit yang disebut *terjamin*, dan perusahaan penjamin kredit yang disebut *penjamin*.

Prinsip dasar penjaminan kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan *terjamin* dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial *terjamin* kepada penerima jaminan sampai penerima jaminan menyatakan kredit *terjamin* tersebut lunas. Penjaminan kredit diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit dari *terjamin* dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

- k. Customs guarantees (*Custom bonds*) carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;
- l. Excise guarantees carried out to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
- m. Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;
- n. The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;
- o. Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises;
- p. Warehouse Receipt Based Credit Guarantee;
- q. Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals according to the purposes and objectives of the Company;
- r. Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;
- s. Rating, management consulting, management services, assistance/ empowerment, along with other services for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives;
- t. Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions according to their authority.

The Company's main business activities can be carried out in the form of a Co-Guarantee, except for the main business activity in terms of providing management consulting services related to Guarantee and Rating business activities, management consulting, management services, mentoring/empowerment, as well as other services for Micro Enterprises, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives.

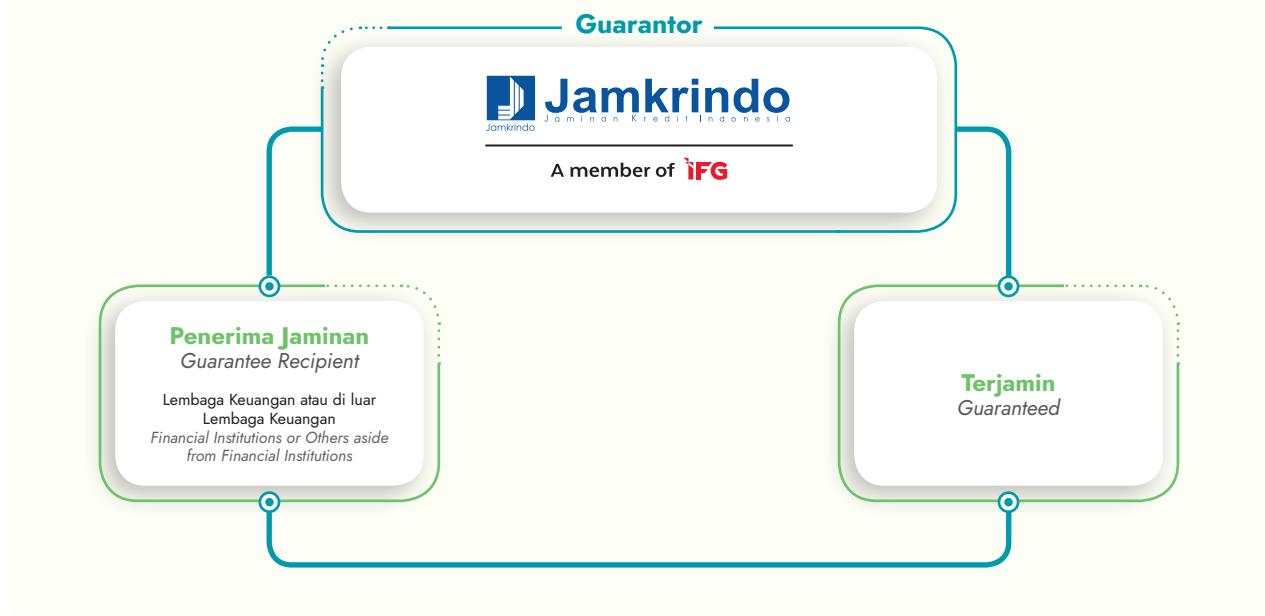
Products and Services Run by the Company

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (*Guaranteed*) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit providing business entity called the Guarantee Recipient, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Guarantee Recipient but does not eliminate the guaranteed's financial obligations to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient states the Guaranteed Credit is paid off. Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipient when the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of the fulfillment of the collateral adequacy (*unbankable*).



Skema Penjaminan Kredit Scheme of Credit Guarantee



Berikut produk dan jasa yang dijalankan Perusahaan per 31 Desember 2021.

The following are the products and services carried out by the Company as of December 31, 2021.

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee of People's Business Credit</i>	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. <i>Credit/Financing of Working Capital and/or investment to MSMEs and Cooperatives in a productive and feasible, but not yet bankable business field, which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help the development of productive businesses.</i>
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>Sejahtera Mortgage Guarantee - Housing Financing Liquidity Facility</i>	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed instalments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.</i>
Penjamin Sistem Resi Gudang <i>Guarantee on the Warehouse Receipt System</i>	Kegiatan pemberian jaminan kepada Pengelola Gudang atas Kewajibannya kepada petani dalam melakukan pengelolaan barang komoditas. <i>Activities of providing guarantees to warehouse managers for their obligations to farmers in managing commodity goods.</i>
Penjaminan Kredit Umum <i>Guarantee on General Credit</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus). <i>Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or Investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is carried out on a case by case basis).</i>
Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah plafond kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (Conditional Automatic Cover/CAC). <i>Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/ CAC).</i>

Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services</i>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.</p> <p>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bouweer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.</p>
Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.</p> <p>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</p>
Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	<p>Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (Analisa penjaminan dilakukan dengan case by case).</p> <p>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (Guarantee analysis is done on case-by-case basis).</p>
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi <i>Guarantee on Guarantee/Counter-Bank Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan Penjamin (Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan Obligee ketika Terjamin wanprestasi.</p> <p>A guarantee given by the Guarantor (jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted.</p>
Surety Bond	<p>Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada Obligee bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Obligee, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap Obligee untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut.</p> <p>A three-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations.</p>
Payment Bond	<p>Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan.</p> <p>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the payment of the Guaranteed to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.</p>
Customs Bond	<p>Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang dan impor dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada Obligee (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya.</p> <p>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.</p>
Penjaminan Keagenan Kargo <i>Supply Chain Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/Obligee.</p> <p>Guarantee given to the Guarantee Beneficiary/Obligee (Transportation Service Provider Company) for the obligations of the Guaranteed/Principal (Cargo Agent) in making the payment of freight charges to the Beneficiary of the Guaranteed/Obligee.</p>
Penjaminan Invoice Financing <i>Invoice Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada invoice yang diterbitkan oleh penerima jaminan.</p> <p>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.</p>
Penjaminan Supply Chain Financing <i>Supply Chain Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka penggeraan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK Pre Financing, KMK Post Financing dan KMK Distributor.</p> <p>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain Core Companies in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.</p>
Penjaminan Kemaritiman/Jaring <i>Maritime /Nets Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan di bidang Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.</p>
Penjaminan Pembiayaan Otomotif <i>Automotive Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna.</p> <p>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.</p>



Jenis Produk Type of Product	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Subsidy Scheme Credit Guarantee</i>	<p>Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya.</p> <p><i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks/Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.</i></p>
Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>).</p> <p><i>Warehouse Receipt Credit Guarantee given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management.</i></p>
Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh <i>lender</i> melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada <i>borrower</i>.</p> <p><i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channelled by the lenders through the organizer (peer to peer lending) to the borrower.</i></p>
Penjaminan KPR <i>Guarantee of Home Ownership Loans</i>	<p>Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko.</p> <p><i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management.</i></p>
Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) <i>Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)</i>	<p>Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank.</p> <p><i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i></p>
Penjaminan Program PEN <i>Guarantee of National Economic Recovery (PEN) Program</i>	<p>Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.</p> <p><i>Guarantee provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability and Preserving the National Economic.</i></p>

Kompetensi Inti

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. Namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada *customer*.

Core Competencies

Core competencies have great potential in strengthening competitive advantage. However, a strong competitive advantage can still be hindered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and the absence of customer relationships. Currently and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamic factors of market competition related to the potential moral hazard to customers.

Kriteria Identifikasi <i>Criteria of Identification</i>	Accessibility Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi Holding <i>Market expansion through BUMN collaboration and efficiency improvement through Holding collaboration</i>
	Unik/Langka <i>Unique/Rare</i> Satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan khusus untuk UMKM <i>The only BUMN engaged in special guarantees for MSMEs</i>
	Value Creation Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan <i>Optimizing a trusted reputation and image as a member of the Insurance and Guarantee BUMN Holding to form a brand preference in the eyes of customers</i>
Risiko <i>Risks</i>	1. Target bisnis tidak tercapai 2. Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan 3. Ketidaksesuaian data pada sistem ICPR 4. Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA 5. Kehilangan aset Perusahaan 6. Rasio klaim penjaminan yang tinggi 7. Subrogasi tidak tertagih 8. Bisnis penjaminan terhambat 9. Terhambatnya pembayaran klaim 10. Kesalahan pelaporan perpajakan <ol style="list-style-type: none"> Business targets are not achieved Transmission of COVID-19 in Company HR Data discrepancy in the ICPR system Settlement of claims not in accordance with SLA Loss of Company assets High guarantee claim ratio Subrogation is not collectible Guarantee business is hampered Delayed claim payment Tax reporting errors
Kendala <i>Limitations</i>	1. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan hambatan pada kinerja Perusahaan 2. Adanya kesulitan meningkatkan pendapatan subrogasi karena adanya kesulitan pada mitra bank dalam proses penagihan 3. Persaingan usaha yang semakin ketat <ol style="list-style-type: none"> The condition of the COVID-19 pandemic hinders the Company's performance There is difficulty in increasing subrogation revenue due to difficulties in invoicing process at bank partners Business competition is getting tighter

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas penjaminan terhadap UMKM sangat besar.
2. Jamkrindo lebih memahami UMKM.
3. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKMK
 - Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit;
 - Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*).
4. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah.
5. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
6. Penguatan model bisnis dengan bergabung dalam *Holding* Asuransi dan Penjaminan.

In accordance with the identification criteria above and the results of the Company's business model development, the Company's core competencies are as follows:

1. The guarantee capacity for MSMEs is very large.
2. Jamkrindo understands MSMEs better.
3. Have good expertise and reputation in the field of UMKMK credit guarantee
 - Speed of payment of credit guarantee claims;
 - Serving products according to the needs of partners (*customized products*).
4. Has large capital and great support from the government.
5. An information system that is integrated internally and externally with business partners.
6. Strengthening the business model by joining the Insurance and Guarantee Holding.





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

STRUKTUR ORGANISASI

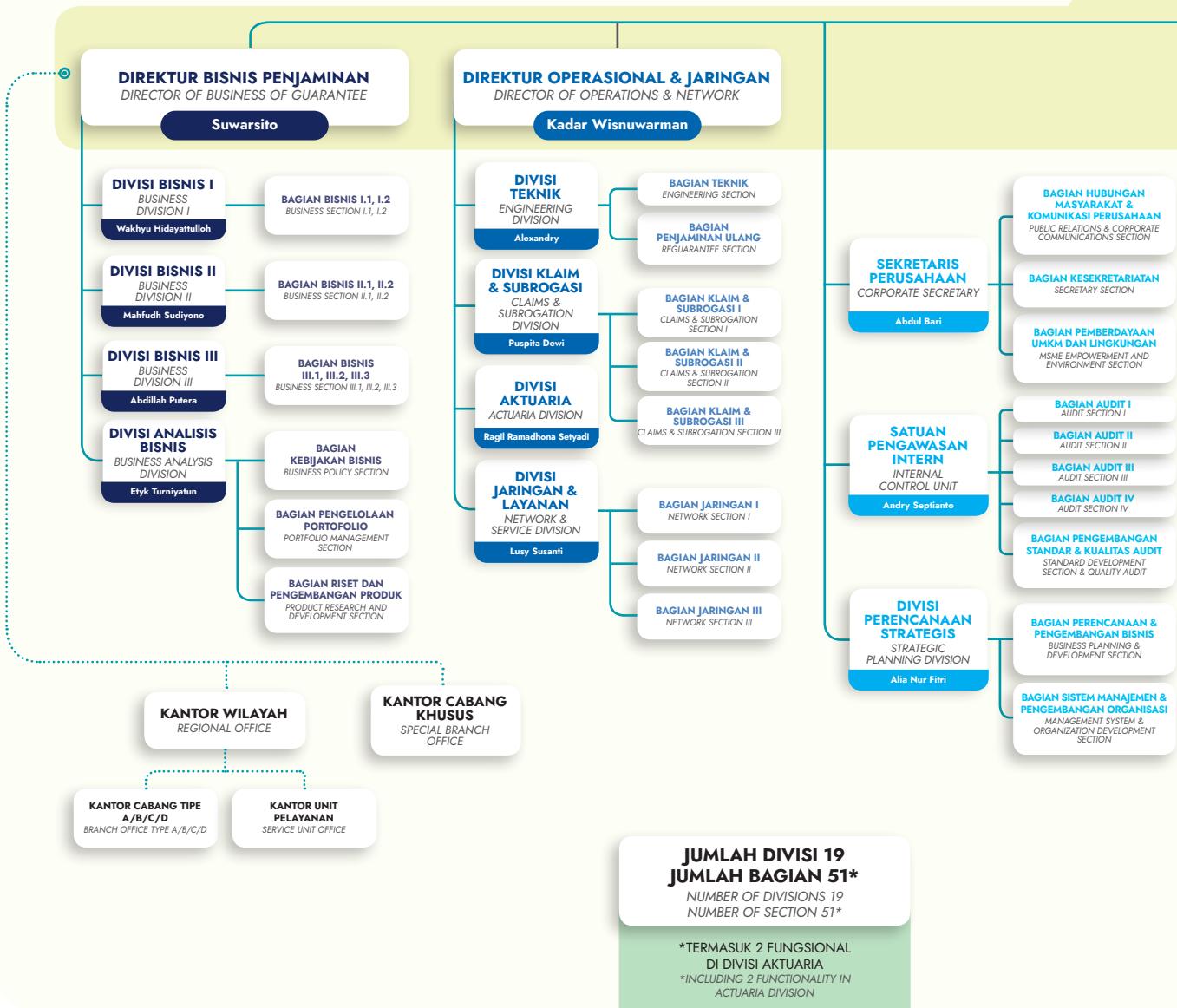
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif.

Efektivitas pengelolaan suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi dan tata laksana organisasinya. Dalam rangka merespon perubahan-perubahan lingkungan Perusahaan dan pencapaian arah bisnis jangka panjang, maka pada tahun 2021, PT Jamkrindo telah melakukan penyesuaian terhadap Struktur Organisasi Perusahaan. Struktur Organisasi PT Jamkrindo sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 01/KD/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

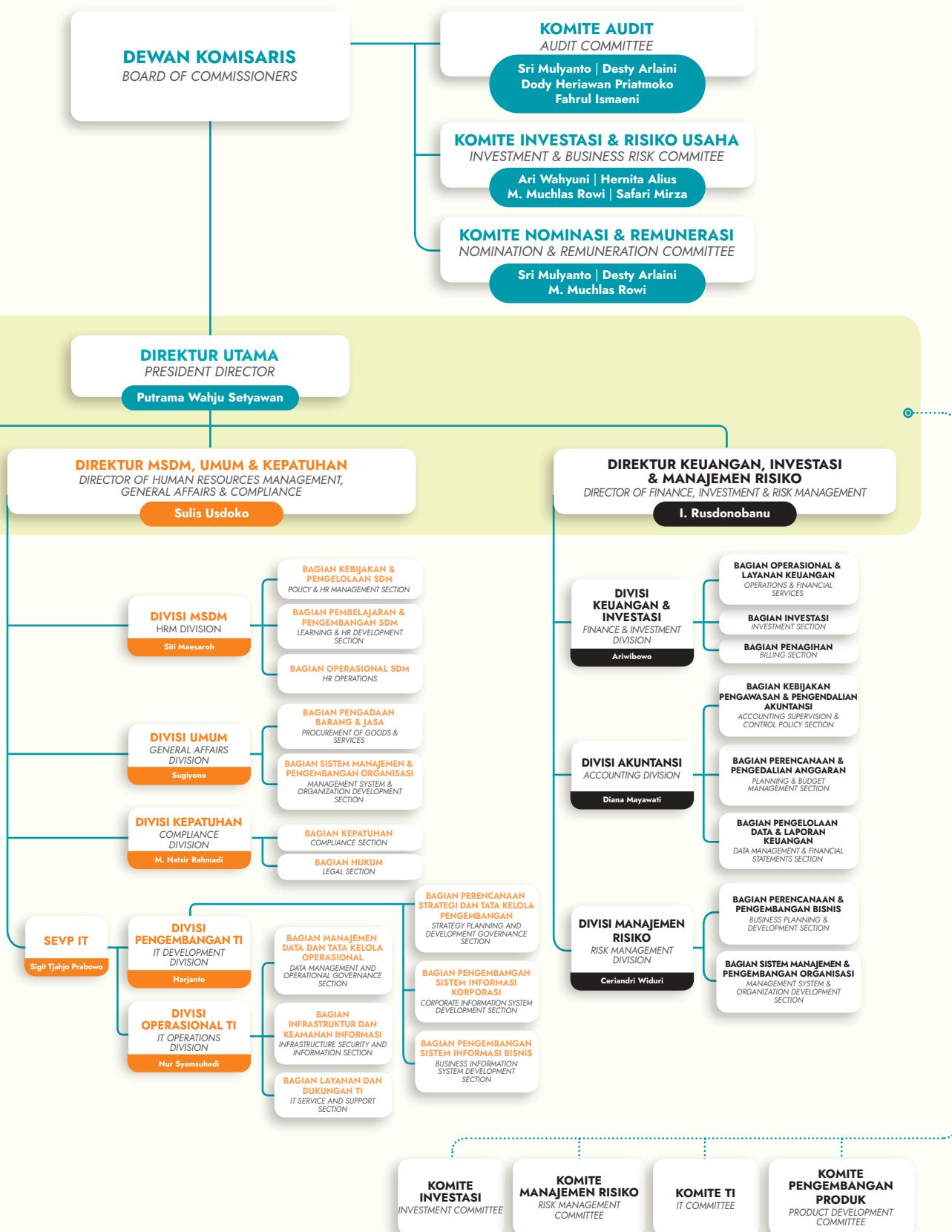
Every organization always faces the dynamics of environmental changes, both internally and externally. To deal with the dynamics of environmental change, effective organizational management is needed.

The effectiveness of the management of an organization is largely determined by the organizational structure and governance of the organization. In order to respond to changes in the Company's environment and achieve long-term business direction, in 2021, PT Jamkrindo has made adjustments to the Company's Organizational Structure. The organizational structure of PT Jamkrindo as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 01/KD/1/VIII/2021 dated August 31, 2021 are as follows:



Struktur Organisasi per 31 Desember 2021

Organizational Structure As of December 31, 2021



STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER STRUCTURE

Berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris, di Jakarta Pusat, dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, terdapat pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebanyak 10.638.733 saham.

Berikut rincian pemegang saham Jamkrindo:

1. Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B sebanyak 10.638.733 (sepuluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Based on the Deed of Establishment No. 25 dated February 24, 2020 and lastly amended by the Deed of Decision of the Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia concerning Amendments to the Articles of Association No. 2 dated April 9, 2020 made in the presence of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary, in Central Jakarta, and in connection with the stipulation of Government Regulation Number 20 of 2020 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, there was a transfer all Series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to be used as an additional 10.638.733 shares in the Republic of Indonesia's capital investment.

Following are the details of Jamkrindo's shareholders:

- 1 (one) Series A Shares owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B shares totaling 10,638,733 (ten million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty three) shares owned by the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Kepemilikan Saham Jamkrindo per 31 Desember 2021
Jamkrindo Share Ownership as of December 31, 2021

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Share	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Deposited Capital (IDR)	Percentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000,-/lembar saham Share Nominal Value = IDR1,000,000,-/share			
Pemerintah Republik Indonesia <i>Government of Indonesia</i>	1	1.365.160	0,0000128%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	10.638.733	10.638.733.000.000	99,9999872%
Jumlah Total	10.638.734	10.638.734.365.160	100,00%



Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/ Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

Information About Major/Controlling Shareholders to the Final Owner Entities

“Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,01% dan sisanya sebanyak 99,99% kepemilikan tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”

“The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.01% and the remaining 99.99% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)”

Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2 Tanggal 9 April 2020, Jamkrindo resmi menjadi anak usaha dari *Holding Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)* (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

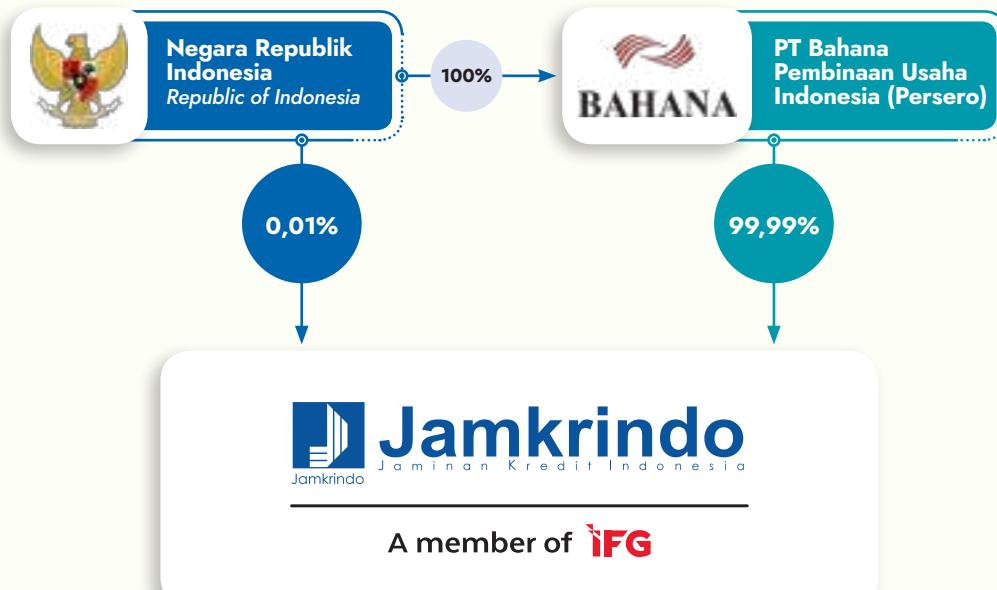
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas pemilik akhir Jamkrindo.

As explained above, based on Government Regulation No. 20 of 2020 dated March 16, 2020 regarding the addition of the Republic of Indonesia's State Equity Participation into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and the Deed of Amendment to the Articles of Association No. 2 On April 9, 2020, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee Holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as the parent entity of Jamkrindo.

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning the Delegation of the Position, Duties and Authorities of the Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) and Perusahaan Jawatan (PERJAN) to the State Minister for State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and the State Gazette of the Republic of Indonesia; the proxy of the Main Shareholder/Controlling Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). Thus, the Ministry of SOEs as the proxy for shareholders of the Government of Indonesia acts as the main/controlling shareholder as well as the ultimate owner of Jamkrindo.

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

GROUP STRUCTURE AND BUSINESS GROUP



● Entitas Pemilik Akhir
Ultimate Entity
 ● Entitas Induk
Parent Entity
 ● Entitas Anak
Subsidiaries Entity

INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

SUBSIDIARY INFORMATION

Per 31 Desember 2021, Jamkrindo memiliki satu entitas anak perusahaan, yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), yang bergerak di bidang Jasa Penjaminan Syariah.

As of December 31, 2021, Jamkrindo has one subsidiary, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar), which is engaged in Sharia Guarantee Services.

Entitas Anak Subsidiary	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (IDR-million)		Status Operasi Operation Status
					2021	2020	2021	2020	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business	Jakarta	2014	2014	99,99%	99,99%	2.445.582	1.573.879	Beroperasi Operating

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

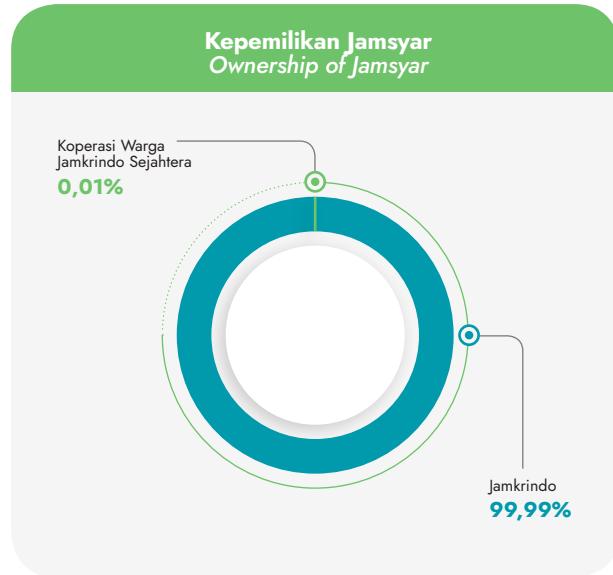


PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No. 68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No. S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, Responsif, dan Inovatif".

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was established through Notarial Deed No. 68 by Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 and registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-26462.40.10.2014 concerning the Legalization of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, then obtained an operating license from the Financial Services Authority (OJK) through letter No. KEP-134/d.05/2014 dated November 7, 2014 regarding the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Jamkrindo Syariah Guarantee, as well as OJK Letter No. S-34/nB.223/2015 dated January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Service business, carrying the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Perusahaan memiliki 99,99% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,01% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

The company owns 99.99% of Jamsyar's shares, while the remaining 0.01% is owned by the Jamkrindo Sejahtera Citizen Cooperative.





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

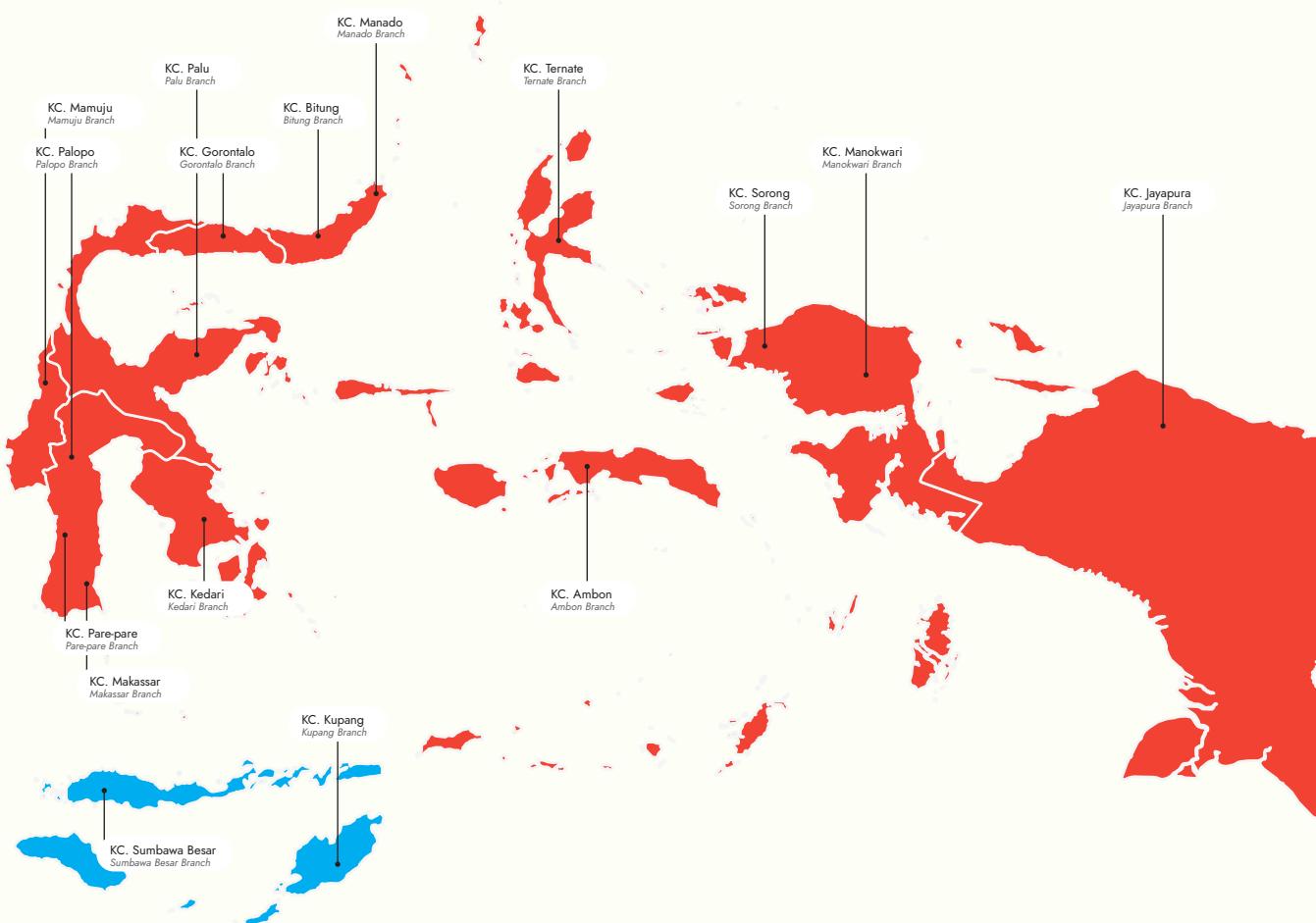
WILAYAH OPERASIONAL [GRI 102-6]

OPERATIONAL AREA [GRI 102-6]

Per 31 Desember 2021, Jamkrindo hanya beroperasi di Indonesia. Wilayah operasional Perusahaan terbagi dalam 9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP).

As of December 31, 2021, Jamkrindo only operates in Indonesia. The Company's operational areas are divided into 9 Regional Offices, 55 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP).





Kantor Pusat PT Jamkrindo [OJK C.2]

PT Jamkrindo Head Office

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540335
Fax: +62 21 6540344, 6540348
Website: www.jamkrindo.co.id
Email: contact@jamkrindo.com

ENTITAS ANAK SUBSIDIARIES

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Gedung Jamsyar
Jl. Letjend Suprapto No. 20 Blok A II 4
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 10510
Telp: +62 21 6540386
Fax: +62 21 6540389
Website: www.jamkrindosyariah.com
Email: info@jamkrindosyariah.com

Kantor Wilayah Regional Offices

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II Palembang	Jalan Basuki Rahmat Ruko No. 2-3 (Depan BLPT) Kecamatan Kemuning, Kota Palembang; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: (021) 6540335 Fax: (021) 6540387
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 744, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik Bandung 40293. Telp: (022) 87359999
V Semarang	Jl. Pamularih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024) 7614138
VI Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar - 80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No. 210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No. 25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta <i>Jakarta Special Branch Office</i>	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet, Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827/4155767 Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	JL. Jend. Sudirman No. 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp : 0761-854311, 854870 Fax : 0761-848801
	3 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
	4 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6; Telp: (0771) 316919
	5 Batam	Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No. 9 Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, Batam Center, Batam Telp (0778) 7495993 Fax (0778)469019
	6 Balige	Jl. Sisingamangaraja No. 87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/(0632) 21722
II	7 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No. 188-189, Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	8 Jambi	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 23 RT 11, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	9 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani RT. 004/Rw 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu - 38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	10 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	11 Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816
III	12 Jakarta	Gedung JAMKRINDO Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610; Telp: (021) 6540409
	13 Pontianak	Jl. Moch. Solar No. 4, RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	14 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax: (0254) 228999/ (0254) 229247
	15 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322



Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IV	16 Bandung	Jl. Soekarno Hatta No. 744, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik Bandung 40293; Telp. (022) 87359999
	17 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT.004 RW.005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	18 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 6 RT/RW 01/01 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	19 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No. 90 RT. 05/02 Kel. Cikole Kel. Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	20 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya; Telp: (0265) 314169
	21 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136/7610129 Fax: (024) 7614138
V	22 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288/5012323 Fax: (0274) 5012545
	23 Solo	Jl. Honggowongso No. 141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	24 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprapto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	25 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	26 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No. 38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
	27 Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya, Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
VI	28 Kediri	Jl. Kilisuci No. 85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
	29 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	30 Malang	Jl. Semeru No. 66, Kel. Oro-oro Dowo, Kec Klojen. Kota Malang 65112 Tlp: (0341) 3018571 Fax: (0341) 3019116
	31 Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
	32 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar; Telp: (0361) 286854
	33 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/644747 Fax: (0370) 644572
VII	34 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82, Kec. Sumbawa Besar NTB, Telp : 0371-2629239
	35 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT 20, RW 008, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088
	36 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	37 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	38 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112; Telp/fax : (0536) 4264269/(0536) 3242394
	39 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT. 04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
VIII	40 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
IX	41 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140; Telp : (0411)873031
	42 Gorontalo	Jl. HB Jassin No. 218, Kel. Libuo, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo; Telp (0435) 828003 Fax: (0435) 828002
	43 Mamuju	Jl. Urip Sumoharjo No. 55, Kabupaten Mamuju
	44 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	45 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona; Telp: (0921)3122739
	46 Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua Enterop No. 2 (Depan Kantor Distrik Jayapura Selatan) Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan; Telp/Fax : (0967) 524424/(0967) 524423
	47 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat; Telp: (0986)214184
	48 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121; Telp: (0451) 4131812
	49 Kendari	Jl. La Ode Hadi No. 56 B Kendari - 93118; Telp: (0401)3196780
	50 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado; Telp: (62-431) 865194/865198
	51 Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 1 Bitung, Sulawesi Utara; Telp: (0438) 35939
	52 Pare-pare	Jl. Andi mappatala No. 30 C, Parepare, Sulawesi Selatan; Telp: 0421-2914592
	53 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	54 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong (Samping BLKI) - Papua Barat; Telp: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP)
Service Unit Offices (KUP)

Kanwil Regional Office	KUP	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl Jendral Sudirman No. 391 Dumai Kota; Telp: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No. 366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan; Telp: 0733 3281182
	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor; Telp: (0251) 7564211
III	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center, Jalan Tegar Beriman 1, Blok A No. 29, Cibinong, Kab Bogor; Telp: (021) 29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No. 7 Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi; Telp: (021) 82691292
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi; Telp/Fax: (022) 20661506/(022) 20661522
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
VI	10 Cilacap	Jl. Jend. Sudirman No. 17, Cilacap; Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir H. Soekarno No. 360 B, Surabaya; Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
VII	12 Pamekasan	Jl. Jokotole No. 26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan; Telp: 0324 – 3510118
	13 Jember	Jl. KH Wahid Hasyim No. 12B, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur Kode pos 68137; Telp & Fax: 0331-4431044
VIII	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No. 15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No. 29 B Kel. Macanang, Kec. Tanete. Provinsi Sulawesi Selatan; Telp: 0481 2921375



SKALA PERUSAHAAN [GRI 102-7] [OJK C.3]

SCALE OF THE COMPANY [GRI 102-7] [OJK C.3]

Uraian Detail	Satuan Unit	2021	2020	2019
Jumlah karyawan tetap Number of Permanent Employees	Orang Employees	975	965	965
Total operasi Total operation	Unit Kantor Office Unit	9 Kantor Wilayah, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 55 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia</i>
Aset Asset	Jutaan Rupiah IDR millions	25.351.207	19.122.829	16.770.270
Liabilitas Liabilities	Jutaan Rupiah IDR millions	12.516.659	10.266.950	8.092.195
Ekuitas Equities	Jutaan Rupiah IDR millions	12.834.548	8.855.879	8.678.075
Imbal jasa penjaminan Guarantee Fee	Jutaan Rupiah IDR millions	4.293.841	2.633.393	2.152.072
Laba (Rugi) tahun berjalan Profit (Loss) for the Current Year	Jutaan Rupiah IDR millions	1.066.008	456.133	198.911
Produk dan jasa yang disediakan Product and services provided	Jutaan Rupiah IDR millions	22	23	23

INFORMASI TENTANG KARYAWAN [GRI 102-8] [OJK C.3]

INFORMATION ABOUT EMPLOYEES [GRI 102-8] [OJK C.3]

Jamkrindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per akhir tahun 2021, Jamkrindo memiliki 1.951 karyawan mengalami kenaikan sebesar 11,93% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2020 yaitu 1.743 orang. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya rekrutmen karyawan pada tahun 2021. Profil demografi karyawan Jamkrindo selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

Jamkrindo has employees with a superior work culture who are the most valuable assets in providing credit guarantee products and services. As of the end of 2021, Jamkrindo had 1,951 employees, an increase of 11.93% compared to the number of employees as of December 31, 2020, which was 1,743 people. The increase was mainly due to employee recruitment in 2021. The full demographic profile of Jamkrindo employees can be seen in the following table and chart:

Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2017-2021
Growth of Number of Employees in the Last 5 (Five) Years 2017-2021



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi (orang)
Demographic of Permanent Employees by Organization Level (people)

Level Organisasi Organization Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	
Senior Executive Vice President	0	0	0	0,00%	0	0	0	0%	0	0,00%
Kepala Divisi Division Head	11	6	17	1,74%	12	7	19	1,97%	-2	-10,53%
Wakil Kepala Divisi Deputy Division Head	0	1	1	0,10%	0	0	0	0%	1	100,00%
Pejabat Pranata Utama Main Institution Officer	1	2	3	0,31%	3	1	4	0,41%	-1	25,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	7	1	8	0,82%	9	0	9	0,93%	-1	11,11%



Level Organisasi Organization Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Wakil Kepala Kantor Wilayah Deputy Head of Regional Office	1	0	1	0,10%	1	0	1	0,10%	0	0,00%
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	50	6	56	5,74%	49	7	56	5,80%	0	0,00%
Kepala Bagian Unit Head	162	53	215	22,05%	165	60	225	23,32%	-10	4,44%
Pejabat Pranata Madya Intermediate Officials	9	4	13	1,33%	3	1	4	0,41%	9	225%
Kepala Seksi & Kepala KUP Head of Section & Head of KUP	13	4	17	1,74%	25	33	58	6,01%	-41	70,70%
Pranata Muda Junior Officer	0	2	2	0,20%	0	0	0	0%	2	200,00%
Staf Staff	222	204	426	43,70%	231	186	417	43,21%	9	2,16%
Pelaksana Executor	78	56	134	13,74%	78	56	134	13,88%	0	0,00%
Calon Karyawan Prospective employees	34	48	82	8,41%	15	23	38	3,94%	44	115,79%
Jumlah Total	588	387	975	100,00%	591	374	965	100,00%	10	1,04%

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female

Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level Staf. Penambahan terbesar didapatkan dari Pejabat Pranata Madya sebanyak 9 orang, sedangkan pengurangan terbesar ada di Kepala Seksi & Kepala KUP sebanyak 41 orang. Terdapat juga penambahan Calon Karyawan sebanyak 44 orang.

Based on the organizational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by the staff level. The biggest increase was obtained from Intermediate Officials which reaches as many as 9 people, while the largest reduction was in the Section Head & KUP Head as many as 41 people. There are also additional prospective employees as many as 44 people

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang) Demographic of Permanent Employees by Education Level (people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Strata-3 (S3) Doctorate	1	0	1	0,10%	1	-	1	0,10%	0	0,00%
Strata-2 (S2) Master	43	20	63	6,46%	46	21	67	6,94%	-4	-5,97%
Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) Bachelor/Diploma-4 (D4)	462	297	759	77,85%	462	284	746	77,31%	13	1,74%
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3)	53	61	114	11,69%	52	59	111	11,50%	3	2,70%
SLTA Sederajat Senior High School/Equivalent	24	9	33	3,38%	25	10	35	3,63%	-2	-5,71%
SLTP Sederajat Junior High School/Equivalent	5	0	5	0,51%	5	-	5	0,52%	0	0,00%
SD Elementary School	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Jumlah Total	588	387	975	100,00%	591	374	965	100,00%	10	1,04%

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female



Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4) yang juga mengalami kenaikan di tahun 2021, begitu pula dengan karyawan dengan jenjang Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), sedangkan terdapat pengurangan pada karyawan dengan latar belakang pendidikan Strata-2 (S2) dan SLTA sederajat.

Based on education level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by employees with a Bachelor's (S1)/Diploma 4 (D4) educational background which also increases in 2021, as well as employees with Diploma 1-2-3 (D1/D2/ D3), while there is a reduction in employees with an educational background of Strata-2 (S2) and equivalent high school.

Status Kepegawaian Employment Status	Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Demographic of Employees Based on Employment Status (people)									
	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase (%)
TETAP PERMANENT										
• Permanen (PKWTT) • Permanent (PKWTT)	583	385	968	49,62%	586	372	958	54,96%	10	4,81%
• Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah • Assigned to a Subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	4	1	5	0,26%	4	1	5	0,29%	0	0,00%
• Penugasan PT LSPP • Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,10%	1	1	2	0,11%	0	0,00%
Sub Jumlah Tetap Sub Total Permanent	588	387	975	49,98%	591	374	965	55,36%	10	4,81%
TIDAK TETAP NON PERMANENT										
• Kontrak Outsourcing • Outsourced Contracts	519	214	733	37,57%	501	195	696	39,93%	37	17,79%
• Magang Bersertifikasi • Certified Apprentice	52	80	132	6,77%	16	32	48	2,75%	84	40,38%
• Prohire • Prohire	7	2	9	0,46%	8	3	11	0,63%	-2	-0,96%
• KKWT	38	64	102	5,23%	6	17	23	1,32%	79	37,98%
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub Total of Non-permanent	616	360	976	50,03%	531	247	778	44,64%	198	95,19%
Jumlah Total	1.204	747	1.951	100,00%	1.122	621	1.743	100,00%	208	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan tidak tetap Jamkrindo lebih besar jika dibandingkan dengan karyawan tetap. Karyawan tidak tetap Jamkrindo khususnya didominasi oleh tenaga outsourcing.

Based on employment status, the composition of Jamkrindo's non-permanent employees is greater than that of permanent employees. Jamkrindo's non-permanent employees in particular are dominated by outsourcing workers.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)
Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area (people)

Penempatan/ Wilayah Kerja <i>Placement/ Operating Area</i>	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i>	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kantor Pusat <i>Head Office</i>	150	119	269	27,59%	142	106	248	25,70%	21	8,47%
Kantor Wilayah/Cabang <i>Regional/Branch Office</i>	395	248	643	65,95%	411	246	657	68,08%	-14	-2,13%
KUP <i>KUP</i>	38	18	56	5,74%	33	20	53	5,49%	3	5,66%
Penugasan Jamsyar <i>Assigned at Jamsyar</i>	4	1	5	0,51%	4	1	5	0,52%	0	0,00%
Penugasan PT LSPP <i>Assigned at PT LSPP</i>	1	1	2	0,21%	1	1	2	0,21%	0	0,00%
Jumlah Total	588	387	975	100,00%	591	374	965	100,00%	10	1,04%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Berdasarkan penempatan/wilayah kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang bertugas di Kantor Wilayah/Cabang.

Based on placement/work area, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who work in Regional/Branch Offices.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Demographic of Permanent Employees by Age Range (people)

Rentang Usia <i>Age Range</i>	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i>	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
≥ 56 tahun ≥ 56 years old	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
46-55 tahun 46-55 years old	66	25	91	9,33%	62	25	87	10,05%	4	4,60%
36-45 tahun 36-45 years old	130	79	209	21,44%	115	66	181	18,75%	28	15,47%
26-35 tahun 26-35 years old	368	234	602	61,74%	402	252	654	67,77%	-52	-7,95%
≤ 25 tahun ≤ 25 years old	24	49	73	7,49%	12	31	43	4,45%	30	69,77%
Jumlah Total	588	387	975	100,00%	591	374	965	100,00%	10	1,04%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Berdasarkan kelompok usia, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang berada dalam kelompok usia 26-35 tahun.

Based on age group, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who are in the age group of 26-35 years.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang)
Demographic of Permanent Employees by Serving Period (people)

Masa Kerja Serving Period	2021				2020				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	L M	P F	Jumlah Total	Percentase (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
≥ 30 tahun ≥ 30 years	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
21-30 tahun 21-30 years	37	20	57	5,85%	34	17	51	5,28%	6	11,76%
11-20 tahun 11-20 years	61	43	104	10,67%	63	44	107	11,09%	-3	-2,80%
2-10 tahun 2-10 years	454	275	729	74,77%	472	281	753	78,03%	-24	-3,19%
≤ 1 tahun ≤ 1 years	36	49	85	8,72%	22	32	54	5,60%	31	57,41%
Jumlah Total	588	387	975	100,00%	591	374	965	100,00%	10	1,04%

L = Laki-laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female

Berdasarkan masa kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun. Terdapat penambahan karyawan tetap Jamkrindo dengan masa kerja di bawah 1 tahun sebesar 57,41%, sedangkan karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun mengalami penurunan 3,19%.

Based on years of service, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees with 2-10 years of service. There was an additional 57.41% of Jamkrindo's permanent employees with less than 1 year of service, while permanent employees with 2-10 years of service experienced a 3.19% decrease.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Demographic of Permanent Employees by Gender (people)

Gender	2021		2020		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)	Jumlah Total	Percentase Percentage (%)
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Laki-laki Male	588	60,31%	591	61,24%	-3	-0,51%
Perempuan Female	387	39,69%	374	38,76%	13	3,48%
Jumlah Total	975	100%	965	100,00%	10	1,04%

Sebagian besar karyawan tetap Jamkrindo adalah karyawan laki-laki.

Most of Jamkrindo's permanent employees are male employees.

KETERCAKUPAN DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA [GRI 102-41]

COVERAGE IN COLLECTIVE LABOR AGREEMENT [GRI 102-41]

Karyawan Jamkrindo memiliki wadah untuk berserikat dan berkumpul berupa Serikat Pekerja bernama "Sekarya" (Serikat Karyawan). Anggota serikat pekerja saat ini berjumlah 975 orang, yang terdiri dari karyawan permanen dan karyawan penugasan PT Jamkrindo Syariah. Seluruh anggota Serikat Pekerja (100%) tercakup dan terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan manajemen Jamkrindo.

Jamkrindo employees have a forum for association and gathering in the form of a Labor Union called "Sekarya" (Worker's Union). Currently, there are 975 workers union members, consisting of permanent employees and employees assigned to PT. Jamkrindo Syariah. All members of the Labor Union (100%) are covered and bound by the Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of Jamkrindo employees and management.

Jumlah Karyawan yang menjadi anggota Serikat Pekerja dan terikat PKB
Number of Employees who are members of the Worker's Union and are bound by the PKB

Tahun Year	Jumlah Karyawan Tetap dalam Serikat Pekerja Number of Permanent Employees in Worker's Union
2021	975
2020	965
2019	965

RANTAI PASOKAN [GRI 102-9]

SUPPLY CHAIN [GRI 102-9]

Rantai pasok merupakan sistem organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam memasok produk atau layanan kepada konsumen. Untuk bisa mengelola rantai pasok, perusahaan mengimplementasikan sistem *Supply Chain Management (SCM)* yang berkaitan dengan kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian arus produk. Jamkrindo menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemasok barang dan jasa. Dalam menjalin kerja sama, Jamkrindo senantiasa berpatokan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga kerja sama tersebut saling menguntungkan.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, pengadaan barang dan jasa di Jamkrindo mengikuti regulasi/ketentuan terbaru dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, di antaranya Surat Edaran No. SE-1 O/MBU/08/2020 tentang Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Di luar itu, Perusahaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-03/Mbu/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Selain regulasi secara umum di atas, Jamkrindo telah memiliki Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa internal yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo No. 16/Per-Dir/4/VII/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 10 Juli 2019. Kemudian terdapat pembaharuan Perdir PBJ No. 03/Per-Dir/4/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Berdasarkan pedoman tersebut, berkaitan dengan etika yang harus ditegakkan oleh insan Jamkrindo dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis;
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis;

A supply chain is a system of organizations, people, activities, information and resources involved in supplying products or services to consumers. To be able to manage the supply chain, the company implements a Supply Chain Management (SCM) system that deals with the activities required for planning, controlling, and operating product flows. Jamkrindo collaborates with third parties as suppliers of goods and services. In establishing cooperation, Jamkrindo always adheres to the applicable rules and regulations so that the cooperation is mutually beneficial.

As a State-Owned Enterprise, the procurement of goods and services at Jamkrindo follows the latest regulations/stipulations from the Ministry of State-Owned Enterprises, including Circular No. SE-1 O/MBU/08/2020 concerning Increasing the Role of Micro, Small and Medium Enterprises in the Procurement of Goods and Services in State-Owned Enterprises. In addition, the Company also refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises. Apart from that, the Company is also guided by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-07/MBU/04/2021 Regarding the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. Per-03/Mbu/08/2017 concerning Guidelines for Cooperation of State-Owned Enterprises.

In addition to the regulations mentioned above, Jamkrindo already has a policy guideline for the procurement of goods and services which has been legalized through the Regulation of the Directors of the Public Company (Perum) Jamkrindo No. 16/Per-Dir/4/VII/2019 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services for Public Companies (Perum), Jaminan Kredit Indonesia dated July 10, 2019. Then there is a renewal of No.03/Per-Dir/4/III/2020 dated March 11, 2020 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services Policy.

Based on these guidelines, the ethics that must be upheld by Jamkrindo personnel in the procurement process are as follows:

1. *The company treats providers of goods or services including the procurement process according to sound, open, impartial business principles based on applicable regulations;*
2. *The company must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency and economy;*
3. *Companies use goods and services providers based on written documents;*



4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Dalam pengadaan barang dan jasa, Perusahaan berupaya semaksimal mungkin untuk mengutamakan dan memberdayakan pemasok nasional, yaitu pemasok yang menjalankan usaha dan berdomisili di Indonesia, yang terdiri dari BUMN, swasta maupun UMKM. Melalui pemberdayaan serupa itu, maka pemasok nasional akan semakin maju dan berkembang, yang pada gilirannya akan membuat perekonomian mereka semakin kuat. Selain pemasok nasional, Perusahaan juga menjalin kerja sama dengan pemasok asing, yakni pemasok yang menjalankan usaha dan berdomisili di luar negeri. Kerja sama dengan pemasok asing dilakukan apabila barang dan jasa yang diperlukan Jamkrindo tidak dapat dipenuhi oleh pemasok nasional atau karena pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh manajemen.

Berdasarkan pedoman dan kategorisasi di atas, jumlah pemasok dan nilai kontrak selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

4. The company must maintain the confidentiality of information and documents on the procurement of goods and services in accordance with the prevailing laws and regulations;
5. The company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the activities of procuring goods and services.

In the procurement of goods and services, the Company strives as much as possible to prioritize and empower national suppliers, namely suppliers who run businesses and are domiciled in Indonesia, which consist of BUMN, private sector and MSMEs. Through such empowerment, national suppliers will be more advanced and developed, which in turn will make their economy stronger. In addition to national suppliers, the Company also cooperates with foreign suppliers, namely suppliers who run their business and are domiciled abroad. Cooperation with foreign suppliers is carried out if the goods and services required by Jamkrindo cannot be fulfilled by national suppliers or due to certain considerations decided by management.

Based on the guidelines and categorization above, the total number of suppliers and the total contract value are presented in the following table:

Tabel Pemasok dan Nilai Kontrak Tahun 2019-2022
Supplier and Contract Value in 2019-2022 Table

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Number of Suppliers			Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) Procurement Contract Value (Million Rupiah)		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Pemasok barang Goods Supplier	26	23	25	17.708,649	9.172,773	12.630,183
Pemasok jasa Service Supplier	72	65	68	72.036,198	78.447,396	87.611,563
Jumlah Total	98	88	93	89.744,846	87.620,169	100.241,746

PERUBAHAN SIGNIFIKAN SELAMA PERIODE PELAPORAN [GRI 102-10] [OJK C.6]

SIGNIFICANT CHANGES DURING THE REPORTING PERIOD [GRI 102-10] [OJK C.6]

Selama periode pelaporan, terdapat beberapa perubahan signifikan pada Perusahaan. Antara lain berkurangnya kantor cabang dari 56 pada tahun 2020 menjadi 55 pada tahun 2021. Adapun kantor yang ditutup adalah Kantor Cabang Banda Aceh. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pemberlakuan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diundangkan. Dengan demikian, setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh harus segera mengubah transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syariah. Penutupan Kantor Cabang Aceh per 27 Mei 2021 sesuai dengan Surat OJK No. KEP-149/NB.111/2021 dan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 10 Juni 2021 tentang Penutupan Kantor Cabang Banda Aceh.

Sementara itu, ada rantai pasokan terjadi perubahan berupa bertambahnya jumlah pemasok barang dan jasa, yaitu dari total 88 pemasok pada tahun 2020 menjadi 98 pada tahun 2021. Penambahan tersebut berdampak dengan bertambahnya nilai kontrak dari Rp87,62 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp89,74 miliar pada tahun 2021. Perubahan rantai pasokan berpengaruh signifikan pada upaya Jamkrindo mewujudkan target dan kinerja yang telah ditetapkan.

During the reporting period, there were several significant changes in the Company. Among other things, the reduction of branch offices from 56 in 2020 to 55 in 2021. The closed office is the Banda Aceh Branch Office. This policy is related to the implementation of Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS) Aceh Qanun No. 11 of 2018 which took effect on January 4, 2019 where financial institutions operating in Aceh are required to comply with this Qanun no later than 3 (three) years since this Qanun was promulgated. Thus, every person, business entity and legal entity in Aceh must immediately convert their financial transactions to Islamic financial institutions. Closing of the Aceh Branch Office as of May 27, 2021 in accordance with OJK Letter No. KEP-149/NB.111/2021 and the Decree of the Board of Directors dated June 10, 2021 regarding the Closure of the Banda Aceh Branch Office.

Meanwhile, there is a change in the supply chain in the form of an increase/decrease in the number of suppliers of goods and services, from a total of 88 suppliers in 2020 to 98 in 2021. The addition/decrease has an impact on the increase/decrease in the contract value from IDR87.62 billion in 2020 to IDR89.74 billion in 2021. Changes in the supply chain have a significant impact on Jamkrindo's efforts to realize the targets and performance that have been set.

PENDEKATAN ATAU PRINSIP PENCEGAHAN [GRI 102-11]

PREVENTION APPROACH OR PRINCIPLE [GRI 102-11]

Dalam menjalankan operasional usaha, Jamkrindo menghadapi berbagai risiko yang berpotensi menghambat kinerja dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Terlebih, pada tahun 2021, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Untuk meminimalkan dampak yang timbul dari berbagai risiko tersebut, Perusahaan mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko, baik oleh Divisi Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko (KMR) maupun Unit Audit Internal. Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, Jamkrindo berkomitmen menjalankan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, jo. No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

In running its business operations, Jamkrindo faces various risks that have the potential to hinder performance and achieve the targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). Moreover, in 2021, the COVID-19 pandemic is still ongoing. To minimize the impact arising from these various risks, the Company optimizes the implementation of Risk Management, both by the Risk Management Division, the Risk Management Committee (KMR) and the Internal Audit Unit. In implementing risk management, Jamkrindo is committed to implementing the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, jo. No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

INISIATIF EKSTERNAL [GRI 102-12]

EXTERNAL INITIATIVES [GRI 102-12]

Untuk mewujudkan kinerja yang berkelanjutan, Jamkrindo berkomitmen untuk mematuhi ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di semua bidang usaha, baik di bidang tata kelola maupun dalam praktik bisnis secara umum. Untuk itu, Perusahaan mengadopsi standar sistem mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Atas komitmen itu, selama tahun 2021, Perusahaan mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan dalam menjalankan usaha, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial.

To realize sustainable performance, Jamkrindo is committed to complying with government regulations and applying standard standards that apply in all business fields, both in the field of governance and in business practices in general. To that end, the Company adopts quality system standards and certifications that are recognized both nationally and internationally. For this commitment, during 2021, the Company received a number of awards as evidence of appreciation from external parties for the success in running a business, both related to economic, environmental and social aspects.

Sertifikasi

Certification

Nama Sertifikat Certification	Deskripsi Singkat Brief Description	Lembaga Pemberi Certifying Agency	Tanggal Penerbitan Sertifikat Certification Date	Masa Berlaku Valid until
Sertifikasi Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 <i>ISO 9001:2015 Quality Management Certification</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standar bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan <i>Quality Management System Certification with international standards which aims to guarantee the products or services produced by a company</i>	Sucofindo	25 Oktober 2021 <i>October 25, 2021</i>	1 Mei 2024 <i>May 1, 2024</i>
Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 <i>Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification ISO 37001:2016</i>	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan <i>Certification to take preventive steps to prevent, detect, or resolve bribery that occurs within the Company</i>	PT SAI Global Indonesia	5 Agustus 2020 <i>August 5, 2020</i>	4 Agustus 2023 <i>August 4, 2023</i>
Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo <i>AA+ Rating Certification from Pefindo</i>	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit <i>Certification of Companies for Credit Risk</i>	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)	21 Desember 2021 <i>December 21, 2021</i>	1 Desember 2022 <i>December 1, 2022</i>

Penghargaan

Awards

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Internasional/Regional International/Regional-level Awards in 2021



GPEA – World Class

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
World Class

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021)

Tanggal Diberikan | Award Date:
1 Oktober 2021 | October 1, 2021



GPEA – World Class

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
World Class

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
GPEA (Global Performance Excellence Awards 2021)

Tanggal Diberikan | Award Date:
15-18 November 2021
November 15-18, 2021

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional National-level Award in 2021



Penghargaan Palang Merah Indonesia Indonesian Red Cross Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Pengumpul Dana Tertinggi 1 Tingkat Dunia Usaha/Badan/Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat
Highest Fund Raising 1 Business World Level/Entity/Central Jakarta Administrative City Office

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Palang Merah Indonesia
Indonesian Red Cross

Acara/Kegiatan | Event:
Penghargaan Palang Merah Indonesia
Indonesian Red Cross Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
4 Januari 2021 | January 4, 2021



Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 Indonesian Red Cross Fund Month for DKI Jakarta Province in 2020

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Penghargaan Unsur Perusahaan Pengumpul Bulan Dana PMI Tertinggi I Tingkat Dunia Usaha/Badan/Kantor Kota Adm Jakarta Pusat

Award for Highest Indonesian Red Cross (PMI) Month Company Element / Business World/Agency/ Central Jakarta Administrative City Office

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Governor of DKI Jakarta

Acara/Kegiatan | Event:
Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020
Indonesian Red Cross Fund Month for DKI Jakarta Province in 2020

Tanggal Diberikan | Award Date:
20 Januari 2021 | January 20, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional
Indonesian Red Cross Award



Indonesia Enterprises Risk Management Award-IV-2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

1st – The Best Indonesia Enterprises Risk Management Award -IV-2021 (Category Multifinance Company – BUMN & Subsidiary)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
ECONOMIC review

Acara/Kegiatan | Event:

Indonesia Enterprises Risk Management Award-IV-2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
9 April 2021 | April 9, 2021

BUMN Marketeers Awards 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Silver Winner – The Most Promising Company in Marketing 3.0

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMN Marketeers

Acara/Kegiatan | Event:
BUMN Marketeers Awards 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
9 Juni 2021 | June 9, 2021



Indonesia Corporate Secretary Communication Award-IV-2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

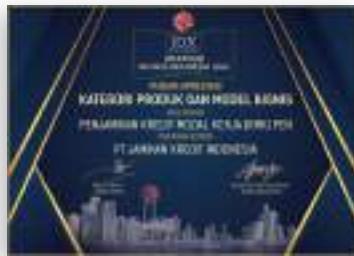
PT Jamkrindo 1st The Best Informative Website – Category Multi Finance Company – BUMN & Subsidiary – Asset Rp10 T s/d Rp30 T

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
ECONOMIC

Acara/Kegiatan | Event:
Indonesia Corporate Secretary Communication Award-IV-2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
24 Juni 2021 | June 24, 2021

Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional National Awards in 2021



IDX CHANNEL Anugerah Inovasi Indonesia 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Kategori Produk & Model | Product & Model Category

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
IDX CHANNEL

Acara/Kegiatan | Event:

IDX CHANNEL Anugerah Inovasi Indonesia 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:

24 Juni 2021 | June 24, 2021

Indonesia Best CEO Awards

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Putrama Wahju Setyawan – Indonesia Best CEO Awards
Employess' Choice 2021

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
The Iconomics

Acara/Kegiatan | Event:
Indonesia Best CEO Awards

Tanggal Diberikan | Award Date:

23 Juli 2021 | July 23, 2021



GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

Ceriandri Widuri – PT Jaminan Kredit Indonesia The Best Chief Risk Management Officer 2021 (Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:

GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:

5 Agustus 2021 | August 5, 2021

GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:

The Best GRC Overall for Corporate Governance &
Performance 2021 (Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:
GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:

5 Agustus 2021 | August 5, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional National-Level Award in 2021



GRC 2021 & Performance Excellence Award

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
ABDUL BARI – The Best Corporate Secretary 2021
(Financial Services)

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Business News

Acara/Kegiatan | Event:
GRC 2021 & Performance Excellence Award

Tanggal Diberikan | Award Date:
5 Agustus 2021 | August 5, 2021

BPEA – Business Performance Excellence Awards

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Good Performance – Based on assessment KPKU BUMN
Total Score 573.75

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
Forum Ekselen BUMN | SOEs Ekselen Forum

Acara/Kegiatan | Event:
Business Performance Excellence Awards

Tanggal Diberikan | Award Date:
1 September 2021 | September 1, 2021



3rd Anniversary Indonesia BUMN Awards 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
The Best Social Economy Contribution in Special Insurance Category INDONESIA BUMN AWARDS 2021

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
The Economics

Acara/Kegiatan | Event:
3rd Anniversary Indonesia BUMN Awards 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
12 Oktober 2021 | October 12, 2021

9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
LOCAL COLLABORATION – Kategori Adaptive Through Collaboration BUMN
LOCAL COLLABORATION – Category Adaptive Through Collaboration BUMN

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMNinc

Acara/Kegiatan | Event:
BUMN Branding and Marketing Award 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
15 Desember 2021 | December 15, 2021



Penghargaan Tahun 2021 Berskala Nasional
National-level Award in 2021



9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Deskripsi Penghargaan | Award Description:
Silver Winner Brand Communication & Activation

Pemberi Penghargaan | Organizer by:
BUMNinc

Acara/Kegiatan | Event:
9th BUMN Branding and Marketing Award 2021

Tanggal Diberikan | Award Date:
15 Desember 2021 | December 15, 2021

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI [GRI 102-13] [OJK C.5]

MEMBERSHIP IN ASSOCIATION [GRI 102-13] [OJK C.5]

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit, Jamkrindo bergabung dalam asosiasi yang relevan dengan bisnis utama Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan bisa mengikuti perkembangan, isu atau topik terbaru, serta saling bertukar informasi dan memberikan saran/masukan untuk kemajuan bersama. Selama tahun 2021, Perusahaan bergabung di asosiasi berikut:

As a company engaged in credit guarantee, Jamkrindo joins associations that are relevant to the Company's main business. Thus, the Company can follow the latest developments, issues or topics, as well as exchange information and provide suggestions/input for mutual progress. During 2021, the Company joined the following associations:

Nama Asosiasi /Perhimpunan Association Name	Posisi di Asosiasi (Pengurus/Anggota) Position in the Association	Iuran Tahunan Annual Fee
ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia) ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies)	Ketua Asosiasi dan Wakil Sekretaris Jendral II Chair of the Association and Deputy Secretary General II	100.000.000





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN

Sustainable Corporate Governance





TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN

SUSTAINABLE CORPORATE GOVERNANCE

Jamkrindo sebagai lembaga jasa keuangan yang bergerak di bidang penjaminan berkomitmen untuk memperkuat kualitas industri penjaminan nasional. Komitmen itu antara lain diwujudkan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang selanjutnya disebut juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG), di setiap kegiatan usaha maupun jenjang organisasi. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan Lembaga Penjamin dengan menggunakan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Dengan posisi seperti itu, maka penerapan GCG merupakan kunci untuk kemajuan dan keberlanjutan perusahaan, tanpa terkecuali bagi Jamkrindo.

Selain menjadi bukti kepatuhan terhadap berbagai regulasi di bidang penjaminan, Jamkrindo menerapkan tata kelola dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal itu akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh. Dengan demikian, segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang, serta kepentingan shareholders dan stakeholders akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola juga diperlukan untuk menjadikan Perusahaan lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat.

Lebih dari itu, Perusahaan meyakini bahwa penerapan GCG akan dapat mewujudkan keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sehingga menekan peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) serta meminimalkan risiko terjadinya kesalahan pengelolaan perusahaan. Dengan upaya tersebut, maka akan tercipta nilai tambah perusahaan yang optimal bagi segenap pemangku kepentingan. Hal yang tak kalah penting, bagi Jamkrindo, penerapan GCG sekaligus merupakan sarana terbaik untuk membuktikan kepada para pemegang saham bahwa investasi mereka aman, dikelola secara baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan serupa itu pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara khusus, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jamkrindo menerapkan GCG karena didorong keinginan yang kuat untuk mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Dengan posisi seperti itu, maka Jamkrindo akan mampu mempertahankan keberadaannya, bahkan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan sebagai BUMN. Untuk mendapatkan hasil terbaik dalam penerapan GCG, prinsip-prinsip GCG yang dikembangkan dan diterapkan Jamkrindo mengacu pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, yang telah diubah melalui PER-09/MBU/2012.

Jamkrindo as a financial services institution engaged in the guarantee sector is committed to strengthening the quality of the national guarantee industry. This commitment is realized, among others, by implementing Good Corporate Governance, hereinafter referred to as Good Corporate Governance (GCG), in every business activity and organizational level. In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, Good Corporate Governance is a set of processes implemented within the Guarantee Institution to determine decisions and management of the Guarantee Institution using the principles of, among others, transparency, accountability, responsibility, independence, and justice. With such position, the implementation of GCG is the key to the progress and sustainability of the company, without exception for Jamkrindo.

In addition to being a proof of compliance with various regulations in the guarantee sector, Jamkrindo implements governance with the aim and belief that it will ensure the creation of an overall business balance. Thus, all forms of interests, both business and social, individuals and groups, internal as well as external, short and long term, as well as the interests of shareholders and stakeholders will lead to a balance point. The application of governance principles is also necessary to make the Company more resilient and able to survive in the face of increasingly fierce competition.

Moreover, the Company believes that the implementation of GCG will be able to create a balance in the company's control so as to reduce the opportunities for fraud and minimize the risk of corporate mismanagement. With these efforts, optimal added value for the company will be created for all stakeholders. Equally important, for Jamkrindo, the implementation of GCG is also the best means to prove to shareholders that their investments are safe, managed well and responsibly. Such management will in turn increase the trust of shareholders and other stakeholders.

In particular, as one of the State-Owned Enterprises (SOEs), Jamkrindo implements GCG because it is driven by a strong desire to optimize the value of SOEs in order to have strong competitiveness, both nationally and internationally. With such a position, Jamkrindo will be able to maintain its existence, and even live sustainably to achieve its goals and objectives as SOE. To get the best results in the implementation of GCG, the GCG principles developed and implemented by Jamkrindo refer to the Law on Limited Liability Companies, as well as the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. Governance) in State-Owned Enterprises, which has been amended through PER-09/MBU/2012.



PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

PRINCIPLES AND OBJECTIVES OF GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Praktik GCG dikembangkan Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Jamkrindo, dimana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan GCG, Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan Perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi, mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Indonesia menjadi Pemegang Saham, penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

GCG practices were developed by Jamkrindo as a commitment to continue to innovate in an effort to improve the implementation of GCG in the organizational sphere within Jamkrindo, where this gives the Company the confidence to face every challenge ahead and become a business entity with competitive competence. In implementing GCG, Jamkrindo refers to several laws and regulations, especially Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs) and Law No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This Law provides a comprehensive foundation for aspects of organizational management, ranging from the rights and obligations of shareholders, duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with internal and external stakeholders.

As a business entity in which the Government of Indonesia is the shareholder, the implementation of GCG in the scope of the Company also refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning Stipulation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (SOEs) as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, which states that GCG are the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on legislation and business ethics. The implementation of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is a strong foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of Shareholders and stakeholders which will lead the Company to significant and sustainable progress.

Based on the Minister of SOEs' Regulation, the objectives of implementing GCG principles in SOE business entities are:

- 1. Optimizing the value of SOEs so that companies have strong competitiveness, both nationally and internationally;*
- 2. Encouraging the management of SOEs in a professional, efficient, and effective manner, as well as empowering functions and increasing the independence of the company's departments;*
- 3. Encouraging company's departments in making decisions and carrying out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOEs' social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around SOEs;*
- 4. Increasing the contribution of SOEs in the national economy;*
- 5. Improving a conducive climate for the development of national investment.*

Secara khusus, sebagaimana diatur dalam POJK No. 3/POJK.05/20172017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, penerapan GCG bertujuan untuk:

- Mengoptimalkan nilai Lembaga Penjamin bagi Pemangku Kepentingan;
- Meningkatkan pengelolaan Lembaga Penjamin secara profesional, efektif, dan efisien;
- Meningkatkan kepatuhan organ Lembaga Penjamin dan jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Lembaga Penjamin terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
- Mewujudkan Lembaga Penjamin yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan
- Meningkatkan kontribusi Lembaga Penjamin dalam perekonomian nasional.

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui asas-asas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

In particular, as regulated in POJK No. 3/POJK.05/20172017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions, the implementation of GCG aims to:

- Optimizing the value of the Guarantee Agency for Stakeholders;*
- Improve the management of the Guarantee Institution in a professional, effective, and efficient manner;*
- Improve the compliance of the Guarantee Institution departments and their subordinates so that in making decisions and carrying out actions based on high ethics, compliance with laws and regulations, and awareness of the Social Responsibility of the Guarantee Institution towards Stakeholders as well as environmental sustainability;*
- Creating a more healthy, reliable, trustworthy, and competitive Guarantee Institution; and*
- Increase the contribution of the Guarantee Institution in the national economy.*

The principle of GCG implementation used by the Company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 and the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the principles of GCG commonly known as TARIF, namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness on all Company Departments, including Shareholders, Board of Commissioners and Directors as stated in the Joint Decree of the Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance.

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Implementing Good Corporate Governance



LANDASAN HUKUM

LEGAL FOUNDATION

Penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003;
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN
 - a. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;

The implementation of GCG within Jamkrindo refers to several regulations/laws that apply in Indonesia, including:

1. Law of the Republic of Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs);
 - b. Law of the Republic of Indonesia No. 47 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - c. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 concerning Guarantees;
 - d. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption;
 - e. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
 - f. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003;
 - g. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
 - h. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
2. Government Regulation
 - a. Government Regulation No. 35 of 2018 concerning Indonesian Credit Guarantee Public Companies (Perum);
 - b. Government Regulation No. 38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation no. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property;
 - c. Government Regulation No. 45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs.
3. Regulation of the Minister of SOEs
 - a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No. PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
 - b. SOEs Minister's Regulation No. PER-01/MBU/06/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
 - c. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises;
 - d. SOEs Minister's Regulation No. PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;

- e. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - g. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN;
 - h. Peraturan Menteri BUMN No. PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara;
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
4. Keputusan Menteri BUMN
- a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- a. Peraturan OJK No. 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
6. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana terakhir diubah dalam Akta No. 10 Tanggal 08 Maret 2021.
7. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- e. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
 - f. *SOEs Minister's Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Departments for the Board of Commissioners/Board of Commissioners of State-Owned Enterprises;*
 - g. *SOEs Minister's Regulation No. PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013 regarding Guidelines for Compilation of Information Technology Management for SOEs;*
 - h. *SOEs Minister's Regulation No. PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Departments for the Board of Commissioners/Supervision Board of State-Owned Enterprises;*
 - i. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-05 MBU/2006 concerning the Audit Committee for SOEs.*
4. *Decree of the Minister of SOEs*
- a. *Decree of the SOEs State Minister Secretary No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.*
5. *Regulation of the Financial Services Authority (OJK)*
- a. *OJK Regulation No. 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantee Institutions.*
6. *The Company's Article of Association as latest amended in Deed No. 10 Dated March 8, 2021*
7. *General Guidelines of Good Corporate Governance in Indonesia by National Committee of Governance Policy.*



ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN

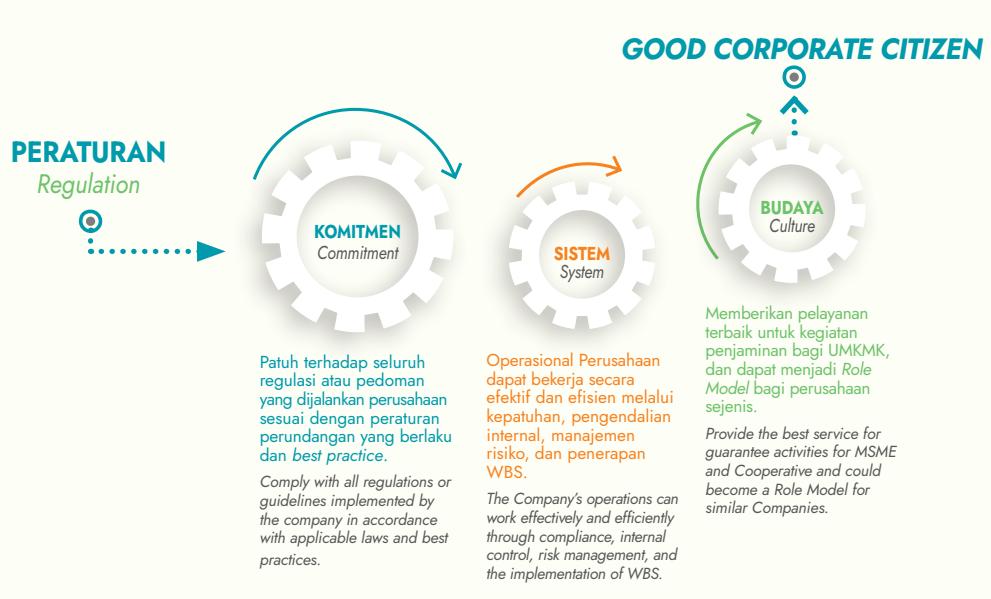
CORPORATE GOVERNANCE ROADMAP

Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Jamkrindo memiliki *roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

The GCG process is a method or mechanism carried out by the company and management in implementing GCG principles to carry out their functions and duties in accordance with the applicable laws and regulations. The commitments, GCG structure, systems and procedures that have been prepared by the Company are aimed to create added value for stakeholders through effective and efficient professional management of the company.

Jamkrindo has a roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanisms:



Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Commitment

In implementing these GCG principles, all Jamkrindo personnel are committed to obey and comply with all applicable laws and regulations, as well as those generally applicable. Support from management plays a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, the Management of Jamkrindo is an example for employees to continue to be committed to the implementation of sustainable GCG. Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and improve GCG supporting tools.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk Mendukung Visi Jamkrindo, yaitu menjadi "Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional". Selain itu juga, implementasi GCG yang dilakukan Perusahaan untuk Mendukung Misi Jamkrindo, yaitu Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Dengan demikian Perusahaan dapat memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan dan membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

System

In supporting the commitment of sustainable GCG at Jamkrindo, a company operational system is needed that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system and good risk management as well as the implementation of an effective violation reporting system.

Culture

Jamkrindo's cultural values are the basis for the Company's personnel to work more clearly and structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo personnel are committed to implementing corporate cultural values that are in line with GCG principles.

The purpose of Jamkrindo's GCG implementation is to support Jamkrindo's vision, which is to become a "Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development". In addition, the implementation of GCG that is carried out by the Company is to support Jamkrindo's mission, which is to increase the financial accessibility of MSMEK through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective and efficient services in a sustainable manner.

Thus the Company can provide value to stakeholders and build a good corporate image and reputation as well as a benchmark for other similar companies as described below:



Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penciptaan Nilai-nilai Budaya

Heading Towards Good Corporate Governance and the Creation of Cultural Values



Kinerja Ekonomi Kebertahanan
Sustainable Economic Performance



Kinerja Lingkungan Kebertahanan
Environmental Performance



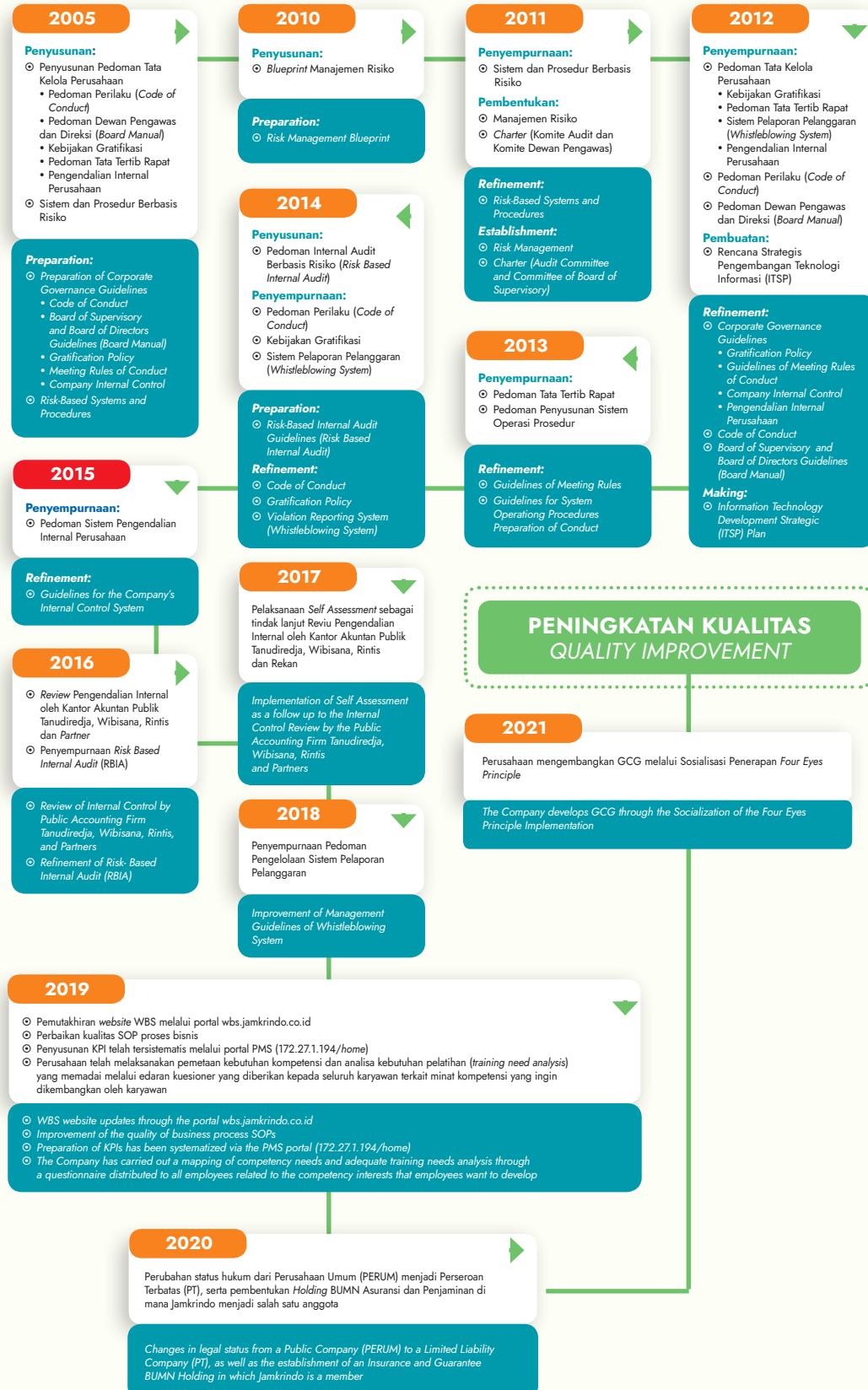
Kinerja Sosial Kebertahanan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

Pencapaian dan *milestones* penerapan GCG Jamkrindo dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Jamkrindo's GCG implementation achievements and milestones can be seen in the following picture:



PERKEMBANGAN PENERAPAN GCG DI TAHUN 2021

DEVELOPMENT OF GCG IMPLEMENTATION IN 2021

Praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Jamkrindo, melalui monitoring dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkungan Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2021, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Jamkrindo di antaranya:

1. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan *Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. B.779/EKT/DIRUT/SPI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT jamkrindo tahun 2021;
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* kepada Direktur Utama melalui Memorandum No. B.95/INT/SPI/PKA/I/2022 tanggal 31 Januari 2022;
3. *Assessment* penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2021 dilakukan secara *Self Assessment* oleh Tim Internal Perusahaan dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 153/SP/1/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengembangkan GCG melalui Sosialisasi Penerapan *Four Eyes Principle*.

GCG practices are continuously improved at Jamkrindo, through monitoring from SPI and the HR Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or abuse of position is found that causes fraud within the Company, it will be resolved and followed up in accordance with applicable regulations. During 2021, monitoring of the implementation of GCG practices at Jamkrindo includes:

1. *Submission of the Report on the Implementation of the Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance in 2021 to the Financial Services Authority through Letter No. B.779/EKT/DIRUT/SPI/IV/2022 dated April 21, 2022 concerning Submission of Report on the Implementation of Good Corporate Governance of PT Jamkrindo in 2021;*
2. *Submission of the Whistleblowing System Implementation Report to the CEO through Memorandum No. B.95/INT/SPI/PKA/I/2022 dated January 31, 2022;*
3. *Assessment of GCG implementation for the measuring year of 2021 is carried out by Self Assessment by the Company's Internal Team with the aim of providing recommendations for continuous improvement of GCG implementation within Jamkrindo. The assessment process is carried out based on Assignment Order No. 153/SP/1/XII/2021 dated December 27, 2021.*

In 2021, the Company developed GCG through Socialization on the Implementation of the Four Eyes Principles.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN [GRI 102-18]

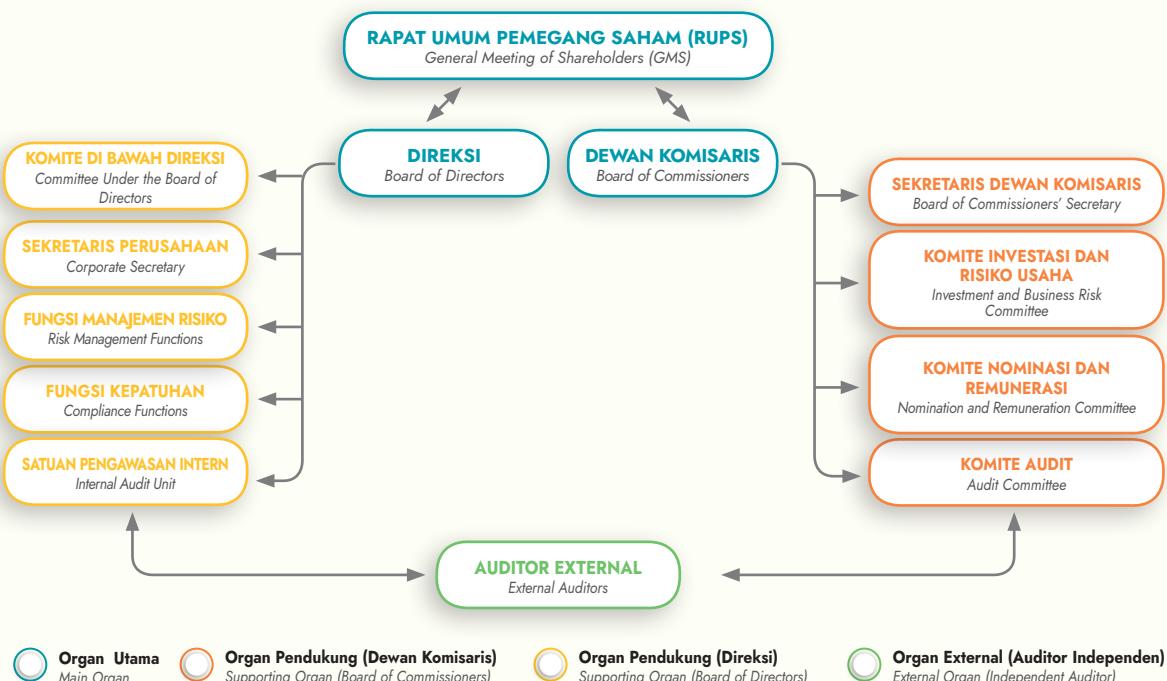
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE [GRI 102-18]

Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* sebagaimana telah dijelaskan di atas, diterapkan di lingkup Perusahaan melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Kedua aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

The Governance Principles, as described above, are implemented within the Company through 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These 2 aspects are sustainable with each other, which in the end will reflect the expected Governance Outcomes.

The Governance Structure is an organ or device owned by the Company, either an organ or device formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device formed due to internal needs in order to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the overall management of the Company. The Governance process includes the rules and regulations that apply to the Company, Permanent Procedures, Charters, documents, until the rules that regulate the relationship between organs or devices are enforced.



Organ Utama



Organ Pendukung (Dewan Komisaris) *Supporting Organ (Board of Commissioners)*



Organ Pendukung (Direksi)



Organ External (Auditor Independen)



**Ikhtisar Kinerja
Keberlanjutan 2021**
*Sustainability Performance
Overview 2021*



Penjelasan Direksi
Explanation of the Board of Directors



Tentang Laporan
Keberlanjutan
*About Sustainability
Report*



Profil Perusahaan
Company Profile



Tata Kelola Perusahaan
Berkelanjutan
Sustainable Corporate Governance

Salah satu aspek GCG yang diimplementasikan oleh Perusahaan adalah aspek Tata Kelola Keberlanjutan. Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Keberlanjutan di lingkup Perusahaan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Divisi/Unit dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program yang mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial. Per 31 Desember 2021, Jamkrindo belum memiliki organ khusus yang mengelola isu keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) secara keseluruhan. Keberlanjutan merupakan tanggung jawab Direktur Utama. [GRI 102-18]

Sementara itu, berkaitan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan baru terkena kewajiban menerapkan peraturan ini per 1 Januari 2024. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Perusahaan belum menetapkan secara spesifik pegawai, pejabat atau unit kerja sebagai penanggung jawab penerapan keuangan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Lampiran II POJK Keuangan Berkelanjutan. [OJK E.1]

One aspect of GCG implemented by the Company is the aspect of Sustainability Governance. In order to be able to carry out the entire Sustainability program within the Company, the implementation of this entire program is divided into several Divisions/Units with responsibilities in accordance with the program category referring to ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines. As of December 31, 2021, Jamkrindo does not yet have a special department that manages sustainability issues (economic, social and environmental) as a whole. Sustainability is the responsibility of the CEO. [GRI 102-18]

Meanwhile, in relation to the issuance of Financial Services Authority Regulation No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance, Jamkrindo as a guarantee company has only been subject to the obligation to implement this regulation as of January 1, 2024. Therefore, in 2021, the Company has not specifically assigned employees, officials or work units to be in charge of implementing sustainable finance, as regulated in Appendix II of the POJK on Sustainable Finance. [OJK E.1]

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

RUPS merupakan organ Perusahaan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tata kelola, dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. Wewenang yang dimiliki oleh RUPS antara lain adalah meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait kinerja perusahaan, memberhentikan Direksi dan/atau Komisaris, mengubah Anggaran Dasar, dan lain-lain.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan dibatasi oleh Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka pelaksanaan RUPS adalah hal yang esensial. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

Jenis-Jenis RUPS

RUPS Tahunan

yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

RUPS Lainnya/Luar Biasa

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

The GMS is part of the Company that holds the highest authority in the governance organizational structure, with authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. As a forum for shareholders to make important decisions, the company has an obligation to hold a GMS, so that the decisions taken are in accordance with the provisions of the articles of association and laws and regulations based on the company's business interests. The authority possessed by the GMS include, among others, requesting accountability from the Board of Commissioners and the Board of Directors regarding the company's performance, dismissing the Board of Directors and/or Commissioners, amending the Articles of Association, and others.

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and the laws and regulations. The authority of the GMS as the highest part of the Company is limited by law as stated in Article 75 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

By prioritizing the principles of GCG in the framework of the main mechanism for the protection and implementation of the rights of shareholders, the implementation of the GMS is essential. As a GCG part that serves as a forum for shareholders to make decisions, the GMS has an authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Types of GMS

RUPS Lainnya/Luar Biasa

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Other/Extraordinary GMS

which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine things that are not done at the Annual GMS.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap pengelolaan Perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun Buku 2020 dilaksanakan secara sirkuler dimana keputusan hasil RUPS ditandatangani oleh Robertus Bilitea (Direktur Utama PT Bahana) pada tanggal 11 April 2022 dan Erick Thohir (Menteri BUMN) pada tanggal 18 Mei 2022.

In addition to the two GMS mentioned above, shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as the GMS Resolutions, provided that all shareholders give written approval of the proposal to be decided on Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Both the Annual GMS and the Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure as well as a forum for shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company.

Implementation of the 2021 GMS

The Annual GMS concerning the Approval of the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia for the Financial Year of 2020 was held in a circular manner where the resolutions of the GMS were signed by Robertus Bilitea (President Director of PT Bahana) on April 11, 2022 and Erick Thohir (Minister of SOEs) on May 18, 2022.

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan No. PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
6. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan;
7. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemegang Saham;
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.

The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to provide supervision over the management of the company run by the Board of Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners is regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-02/MBU/02/2015 as amended by No. PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners is part of the Company that is in charge of:

1. *Carry out supervision over the management of the Company carried out by the Board of Directors;*
2. *Provide advice to the Board of Directors in carrying out management activities of the Company.*

The supervision carried out by the Board of Commissioners in order to assess the Company is by comparing the actual situation with the situation that should be carried out, both in the financial and/or operational technical fields. To carry out the duties as referred to above, the Board of Commissioners is obliged to do the following:

1. *Provide opinions and suggestions to the Minister regarding the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors;*
2. *Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the Minister regarding any issues deemed important for the management of the Company;*
3. *Report immediately to the Minister if there is any indication of a declining in the Company performance;*
4. *Researching and reviewing the Periodic Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and signing the Annual Report;*
5. *Monitor and ensure that the principles of GCG have been implemented effectively and sustainably;*
6. *Hold regular meetings, at least once a month;*
7. *Perform other supervisory duties as determined by the Shareholders;*
8. *Accountable for the implementation of their duties to the Shareholders.*

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir tercantum dalam Akta Notaris Hadijah, SH No. 10 tanggal 8 Maret 2021 Pasal 14 Ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Ayat 12.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2021

Selama tahun 2021 terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan keputusan sebagai berikut:

- Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia, diputuskan pemberhentian dengan hormat Sdri. Diah Natalisa sebagai Komisaris PT Jamkrindo sekaligus pengangkatan Sdri. Hernita Alius sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-182/MBU/06/2021 dan No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdri. Noor Ida Khomsiyati sebagai Komisaris PT Jamkrindo sekaligus pengangkatan Sdri. Desty Arlaini sebagai Komisaris PT Jamkrindo terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021.

Terms of Tenure

Based on the Company's Articles of Association which have been amended several times and the latest is stated in the Deed of Notary Hadijah, SH No. 10 dated March 8, 2021 Article 14 Paragraph 11 states that the terms of tenure for members of the Board of Commissioners is set for 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of tenure. However, members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the decision of the General Meeting of Shareholders by stating the reason as stated in Paragraph 12.

Structure and Composition of the Board of Commissioners in 2021

During 2021 there was a change in the structure and composition of the Board of Commissioners based on the following decisions:

- Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the CEO of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Shareholders of PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, it was decided to honorably dismiss Ms. Diah Natalisa as Commissioner of PT Jamkrindo as well as the appointment of Ms. Hernita Alius as Independent Commissioner of PT Jamkrindo as of January 18, 2021.*
- Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the CEO of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the Shareholders of PT Jamkrindo No. SK-182/MBU/06/2021 and No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, confirmed the honorable dismissal of Ms. Noor Ida Khomsiyati as Commissioner of PT Jamkrindo as well as the appointment of Ms. Desty Arlaini as Commissioner of PT Jamkrindo as of June 2, 2021.*

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris di akhir tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of the Board of Commissioners at the end of 2021 can be seen below.

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2021
The composition of the Jamkrindo Board of Commissioners as of December 31, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>October 27, 2017 until the GMS to be held in 2022</i>	Ke-1 1st
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17, 2019 until the GMS to be held in 2024</i>	Ke-1 1st
Hernita Alias	Komisaris Independen Independent Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-19/MBU/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 tanggal 18 Januari 2021 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-19/MBU/01/2021 and BPUI Decree as Series B Shareholder No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 dated January 18, 2021</i>	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>January 18, 2021 until the GMS to be held in 2026</i>	Ke-1 1st
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>January 3, 2019 until the GMS to be held in 2024</i>	Ke-1 1st
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 tanggal 2 Juni 2021 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Series A Shareholder No. SK-182/MBU/06/2021 and BPUI Decree as Series B Shareholder No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 dated June 2, 2021</i>	2 Juni 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>June 2, 2021 until the GMS to be held in 2026</i>	Ke-1 1st



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Hernita Alius
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sri Mulyanto
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner

M. Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner



Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

Profil Dewan Komisaris The Board of Commissioners Profile

Sri Mulyanto



Komisaris Utama/Independen

President Commissioner/Independent Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

27 Oktober 2017-26 Oktober 2022, Periode Pertama
October 27, 2017-October 26, 2022, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	63 tahun 63 years old
Kelahiran Birth	:	Klaten, 8 Oktober 1958 Klaten, October 8, 1958
Domisili Domicile	:	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993) • (S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983) • <i>Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States (1993)</i> • <i>Bachelor of Economics of Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)</i>
Riwayat Penunjukan History of Appointmen	:	<p>Jabatan Ketua Dewan Komisaris/Independen diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Komisaris/Komisaris Utama ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Sri Mulyanto diubah dari Ketua Dewan Pengawas/Independen menjadi Komisaris Utama/Independen.</p> <p>The position of Chairman of the Commissioner Board/Independent has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017, concerning Dismissal and Appointment of Chairman of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Chairman of the Commissioner Board/President Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Sri Mulyanto's position was changed from Chairman of the Supervisory Board/Independent to President Commissioner/Independent.</p>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	<p>Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-110/KDK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017</p> <p>OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-110/KDK.05/2017 dated December 29, 2017</p>
Riwayat Profesi Professional History	:	<p>Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementerian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian BUMN (2002).</p> <p>Director of General Affairs and HR of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, the Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, the Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, the Ministry of SOEs (2002).</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	<p>Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Sri Mulyanto does not have a concurrent position at other companies/ institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	<p>Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama. Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.</p>



Muhammad Muchlas Rowi

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

17 Oktober 2019-16 Oktober 2024, Periode Pertama
October 17, 2019-October 16, 2024, 1st Period



Warga negara Citizenship

: Indonesia

Usia Age

: 49 tahun
49 years old

Kelahiran Birth

: Garut, 31 Agustus 1972
Garut, August 31, 1972

Domisili Domicile

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

- (S1) Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2021)
- (S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019)
- (S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998)
- (S1) Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha (2021)
- Master of Management of STIE IBMT Surabaya (2019)
- Bachelor of Philosophy of Gadjah Mada University (1998)

Pendidikan Education

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen diambil sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen/Komisaris Independen ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen.

Riwayat Penunjukan History of Appointment

The position of Member of the Independent Supervisory Board has been carried out since October 17, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No. SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as the Independent Supervisory Board/Independent Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board/Independent to Independent Commissioner.

Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK

: Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-9/KDK.05/2020 tanggal 6 Mei 2020
OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-9/KDK.05/2020 dated May 6, 2020

Riwayat Profesi Professional History

Dosen Institut Bisnis Muhammadiyah, Bekasi (Juni 2022-sekarang), Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019-sekarang), Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018-sekarang), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016-2018).

Lecturer at the Muhammadiyah Business Institute, Bekasi (June 2022-present), Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019-present), Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018-present), Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016-2018).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang).
Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present).

Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.
Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si



Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

18 Januari 2021-17 Januari 2026, Periode Pertama
January 18, 2021-January 17, 2026, 1st Period

Warga negara <i>Citizenship</i>	:	Indonesia
Usia <i>Age</i>	:	62 tahun 62 years old
Kelahiran <i>Birth</i>	:	Jakarta, 13 Oktober 1959 Jakarta, October 13, 1959
Domisili <i>Domicile</i>	:	Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan <i>Education</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006) • (S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004) • (S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadipayana (1986) • (DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1981) • Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006) • Master of Management, Bhayangkara University (2004) • Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Krisnadipayana University (1986) • Diploma III from The State Accounting College (1981)
Riwayat Penunjukan <i>History of Appointment</i>	:	Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 dan No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan.
	:	<i>The position of the Independent Commissioner has been carried out since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the capital owner of PT Jamkrindo No. SK-19/MBU/01/2021 and No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is his first period as the Independent Commissioner, previously he had never served in the Supervisory Board/ Board of Commissioners of the Company</i>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK <i>Pass the Fit and Proper Test from OJK</i>	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-17/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021. OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-17/KDK.05/2021 dated April 20, 2021.
Riwayat Profesi <i>Professional History</i>	:	Direktur PT Indobagus Investama (2018), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016-2017), Supervisor Inspektor Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012-2016), Supervisor Inspektor Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009-2012), Supervisor Inspektor Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006-2009), dan Supervisor Inspektor Pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000-2006)
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	:	Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Hernita Alius does not have a concurrent position at other companies/ institutions.
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	:	Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Hernita Alius does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Ari Wahyuni



Komisaris Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

3 Januari 2019-2 Januari 2024, Periode Pertama
January 3, 2019-January 2, 2024, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	55 tahun 55 years old
Kelahiran Birth	:	Surabaya, 9 November 1966 Surabaya, November 9, 1966
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Master of Public Management Carnegie- Mellon University (1994) • (S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponogoro (1990) • Master of Public Management Carnegie- Mellon University (1994) • Bachelor of Law (civil affairs) Diponogoro University (1990)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Anggota Dewan Komisaris diambil sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	The position of Member of the Board of Commissioners has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.
Riwayat Profesi Professional History	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-66/KDK.05/2019 tanggal 6 Agustus 2019 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-66/KDK.05/2019 dated August 6, 2019
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Desember 2021-sekarang), Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018-Desember 2021), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013-September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013-2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009-2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010-2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008-2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004-2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundangan-undangan dan Bantuan Hukum BAPPEPAM (1990-2000).
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan. Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Ari Wahyuni has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of Finance.



Desty Arlaini

Komisaris Commissioner

Periode Jabatan | Term of Office

2 Juni 2021-1 Juni 2026, Periode Pertama
June 2, 2021-June 1, 2026, 1st Period



Warga negara Citizenship	: Indonesia
Usia Age	: 45 tahun 45 years old
Kelahiran Birth	: Palembang, 4 Desember 1976 Palembang, December 4, 1976
Domisili Domicile	: Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006) • (S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000) • (D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997) • Master of Management Science, University of Indonesia (2006) • Bachelor of Economics majoring in Accounting, YAI College (2000) • Associate of Accounting, State College of Accounting (1997)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	<p>Jabatan Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-182/MBU/06/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No. 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Jabatan dalam Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama.</p> <p>The position as Commissioner has been carried out since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-182/MBU/06/2021 and the Decree of President Director of PT BPUI (Persero) No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 dated June 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PT Jaminan Kredit Indonesia Board of Commissioners Member. This position is her first period as Commissioner.</p>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	: Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-50/KDK.05/2021 tanggal 10 September 2021 OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-50/KDK.05/2021 dated September 10, 2021
Riwayat Profesi Professional History	<p>Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021-sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020-2021), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020), Koordinator Kementerian BUMN (2020-2021), Pengendali Kelompok Kementerian BUMN (2020), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (2020-2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (2018-2020), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2018-2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2017-2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013-2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011-2014), Anggota Komite PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009-2011).</p> <p>Acting as Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021-present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021-present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2020-2021), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2020), Coordinator of the Ministry of SOEs (2020-2021), Controlling Group of The Ministry of SOEs (2020), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (2020-2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (2018-2020), Assistant Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2018-2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2017-2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013-2018), Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011-2014), Committee Member of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009-2011).</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	<p>Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021-sekarang).</p> <p>Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021-present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021-present).</p>
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	<p>Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.</p> <p>Desty Arlaini does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors Desty Arlaini has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs</p>



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ di bawah RUPS yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional perusahaan. Secara lebih rinci, Direksi bertugas menjalankan visi misi Perusahaan, merancang strategi bisnis, mengelola sumber daya Perusahaan, serta mengendalikan kegiatan operasi agar dapat menghasilkan kinerja keuangan dan non-keuangan yang optimal. Direksi juga menjadi representasi Perusahaan baik secara internal maupun eksternal, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Directors is a part of the GMS that is fully responsible for the implementation of the company's operations. In more detail, the Board of Directors is tasked with carrying out the Company's vision and mission, designing business strategies, managing Company resources, and controlling operations in order to produce optimal financial and non-financial performance. The Board of Directors is also a representative of the Company both internally and externally, which has the responsibility to ensure that all activities of the Company's management run efficiently and effectively and in accordance with GCG principles.

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo No. 25 tanggal 24 Februari 2020, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok Main Tasks

- 1 Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan berindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut
Carry out the management of the Company for the interests and objectives of the Company and act as the Leader in said management
- 2 Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
Representing the Company inside and outside the court
- 3 Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan
Maintain and manage the Company's assets

Tanggung Jawab Responsibility

- 1 Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan.
The Board of Directors is responsible for implementing Company regulations and management, as well as taking legal action for and on behalf of the Company and representing Jamkrindo inside and outside the court.
- 2 Secara bersama-sama atau individual, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan
Collectively or individually, be responsible for all losses that arise in the Company's assets due to the actions of the Board of Directors who violate or neglect their duties and/or obligations as stipulated in the Company Regulations and Legislation
- 3 Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap
Ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner
- 4 Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Other responsibilities in accordance with the provisions of the Company and the applicable laws and regulations

Ketentuan Masa Jabatan

Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Terms of Tenure

The tenure for members of the Board of Directors is set for 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of tenure.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2021

Selama tahun 2021, terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A dan Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B. Dengan demikian, susunan Direksi di akhir tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini.

Arrangement and Composition of the Board of Directors in 2021

During 2021, there was a change in the arrangement and composition of the Board of Directors based on the Decree of the SOEs State Minister as the Series A Shareholder and the BPUI Decree as the Series B Shareholder. Thus, the composition of the Board of Directors at the end of 2021 can be seen below.

Susunan Direksi Jamkrindo per 31 Desember 2021 The Composition of the Jamkrindo Board of Directors as of December 31, 2021				
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Tenure	Periode Jabatan Term of Office
Putrama Wahju Setyawan	Direktur Utama President Director	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-347/MBU/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-347/MBU/10/2020 dated October 26, 2020 Decree of the BPUI as Series B Shareholder No. 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2021 	26 Oktober 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 October 26, 2020 until the GMS to be held in 2025	Ke-1 First
Suwarsito	Direktur Bisnis Penjaminan Assurance Business Director	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-94/MBU/03/2021 dan Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No. 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Decree of the SOEs Minister as Series A Shareholder No. SK-94/MBU/03/2021 and BPUI Decree as Series B Shareholder No. 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 dated March 22, 2021 	22 Maret 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 March 22, 2021 until the GMS to be held in 2026	Ke-1 First
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan Director Operational and Network	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 	21 November 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 November 21, 2017 until the GMS to be held in 2022	Ke-1 First
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan HR, General & Compliance Director	<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017 	7 September 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 September 7, 2017 until the GMS to be held in 2022	Ke-1 First
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	<ul style="list-style-type: none"> Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-22/MBU/01/2018. Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No. SK-44/MBU/2014. Second Term Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-22/MBU/01/2018. First Term Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-12/MBU/2013 j.o Decree of the SOEs State Minister as Series A Shareholder No. SK-44/MBU/2014. 	15 Januari 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 January 15, 2018 until the GMS to be held in 2023	Ke-2 Second



PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Kadar W.
Direktur Operasional dan
Jaringan
Director Operational and Network

Suwarsito
Direktur Bisnis Penjaminan
Assurance Business Director

Putrama Wahju S.
Direktur Utama
President Director

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi
dan Manajemen Risiko
*Director of Finance, Investment and
Risk Management*

Sulis Usdoko
Direktur MSDM, Umum &
Kepatuhan
*HR, General & Compliance
Director*

Profil Direksi The Board of Directors Profile

Putrama Wahju Setyawan



Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan | Term of Office

26 Oktober 2020-25 Oktober 2025, Periode Pertama
October 26, 2020-October 25, 2025, 1st Period

Warga negara Citizenship

: Indonesia

Usia Age

: 52 tahun
52 years old

Kelahiran Birth

: Yogyakarta, 28 November 1969
Yogyakarta, November 28, 1969

Domisili Domicile

: DKI Jakarta, Indonesia

- (S2) Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996)
- (S1) Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1994)
- Master of Management Accounting from Gadjah Mada University (1996)
- Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1994)

Riwayat Penunjukan History of Appointment

Jabatan Direktur Utama diambil sejak 26 Oktober 2020 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Jamkrindo No. SK-347/MBU/10/2020 dan No. 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.

The position of President Director has been carried out since October 26, 2020 through the Decree of the Minister of SOEs as the shareownership of Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 and No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2020, concerning Dismissal and Appointment of President Directorof PT Jaminan Kredit Indonesia.

Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK

: Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-33/KDK.05/2021 tanggal 15 Juli 2021
OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-33/KDK.05/2021 dated July 15, 2021

Wakil Direktur BNI pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Maret 2016. Sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2011-2014), Kepala Badan Usaha Milik Negara & Pemerintah Divisi Institusi (2014-2015), Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2015-2016), dan Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Vice Director of BNI at the General Meeting of Shareholders (GMS) on March 10, 2016. Previously Served as Head of Corporate Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2011-2014), Head of State-Owned Enterprises & Government, Institutional Division (2014-2015), Head of Commercial Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2015-2016), and Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Riwayat Profesi Professional History

: Putrama Wahju Setyawan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.
Putrama Wahju Setyawan does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

: Putrama Wahju Setyawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.
Putrama Wahju Setyawan does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.

Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship



Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan

Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan | Term of Office

22 Maret 2021-21 Maret 2026, Periode Pertama
March 22, 2021-March 21, 2026, 1st Period



Warga negara Citizenship

: Indonesia

Usia Age

: 49 tahun
49 years old

Kelahiran Birth

: Sragen, 28 Februari 1972
Sragen, February 28, 1972

Domisili Domicile

: DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Education

- : (S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2007)
- (S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi (1996)
- Master of Management from Hasanuddin University, Makassar (2007)
- Bachelor of Economics from Diponegoro University, Semarang (1996)

Riwayat Penunjukan History of Appointment

Jabatan Direktur diemban sejak 22 Maret 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No. SK-94/MBU/03/2021 dan No. 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 22 Maret 2021.

The position of Director has been carried out since March 22, 2021 through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-94/MBU/03/2021 and No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Member of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia and was stated at the General Meeting of Shareholders on Monday, March 22, 2021.

Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK

: Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-40/KDK.05/2021 tanggal 19 Agustus 2021
OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-40/KDK.05/2021 dated August 19, 2021

Riwayat Profesi Professional History

Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 1977. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Divisi Bisnis PT Jamkrindo (2018-2021), Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Jakarta (2013-2016), Kepala Divisi Umum PT Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Bandung (Januari 2012-Desember 2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Pekanbaru (2011-2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin (2010-2011).

: He has had a career in Jamkrindo since 1977 with several positions that have been held including Head of Business Division of PT Jamkrindo (2018-2021), Head of Bank Guarantee Business Division (2016-2018), Head of Regional Office III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Head of Jakarta Branch Office of PT Jamkrindo (2013-2016), Head of General Affairs Division of PT Jamkrindo (2012-2013), Head of Bandung Branch Office of PT Jamkrindo (January 2012-December 2012), Head of Pekanbaru Branch Office of PT Jamkrindo (2011-2012), Head of Banjarmasin Branch Office of PT Jamkrindo (2010-2011).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

: Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.
Suwarsito does not have a concurrent position at other companies/ institutions.

Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship

Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.
Suwarsito does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.





Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional & Jaringan

Director of Operations & Network

Periode Jabatan | Term of Office

21 November 2017-20 November 2022, Periode Pertama
November 21, 2017-November 20, 2022, 1st Period

Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	50 tahun 50 years old
Kelahiran Birth	:	Malang, 31 Oktober 1971 Malang, October 31, 1971
Domisili Domicile	:	Cibubur, Jawa Barat, Indonesia Cibubur, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002) • (S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996) • Master of Management, Hasanuddin University (2002) • Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	<p>Jabatan Direktur diambil sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.</p> <p>The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director.</p>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	<p>Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-26/KDK.05/2018 tanggal 13 April 2018</p> <p>OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-26/KDK.05/2018 dated April 13, 2018</p>
Riwayat Profesi Professional History	:	<p>Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013-2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011-2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010-2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006-2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004-2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003-2004).</p> <p>Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014-2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013-2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012-2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011-2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010-2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006-2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004-2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003-2004).</p>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	<p>Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. Kadar Wisnuwarman does not have a concurrent position at other companies/institutions.</p>
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	<p>Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. Kadar Wisnuwarman does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.</p>



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan

Director of Human Resources Management, General Affairs & Compliance

Periode Jabatan | Term of Office

7 September 2017-6 September 2022, Periode Pertama
September 7, 2017-September 6, 2022, 1st Period



Warga negara Citizenship	:	Indonesia
Usia Age	:	61 tahun 61 years old
Kelahiran Birth	:	Semarang, 5 September 1960 Semarang, September 5, 1960
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Pendidikan Education	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003) • (S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985) • Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003) • Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985)
Riwayat Penunjukan History of Appointment	:	Jabatan Direktur diambil sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo <i>The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served in the Board of Directors of Perum Jamkrindo</i>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK Pass the Fit and Proper Test from OJK	:	Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-19/KDK.05/2018 tanggal 07 Maret 2018 <i>OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-19/KDK.05/2018 dated March 07, 2018</i>
Riwayat Profesi Professional History	:	Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015-2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011-2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008-2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1 dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997-2010), Staff hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986-1995). <i>Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015-2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011-2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008-2011), Head of Branch Office Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997-2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986-1995)</i>
Rangkap Jabatan Concurrent Position	:	Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. <i>Sulis Usdoko does not have a concurrent position at other companies/institutions</i>
Hubungan Afiliasi Affiliate Relationship	:	Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. <i>Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.</i>



I. Rusdonobanu



Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko

Director of Finance, Investment & Risk Management

Periode Jabatan | Term of Office

15 Januari 2018-14 Januari 2023, Periode Kedua
January 15, 2018-January 14, 2023, 2nd Period

Warga negara <i>Citizenship</i>	:	Indonesia
Usia <i>Age</i>	:	62 tahun 62 years old
Kelahiran <i>Birth</i>	:	Balikpapan, 25 Februari 1959 Balikpapan, February 25, 1959
Domisili <i>Domicile</i>	:	Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Pendidikan <i>Education</i>	:	<ul style="list-style-type: none"> • (S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995) • (S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988) • (D3) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981) • <i>Master of Science, Majoring in Economics, Northeastern University Boston, USA (1995)</i> • <i>Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, University of Pancasila (1988)</i> • <i>Diploma of Accounting of STAN Jakarta (1981)</i>
Riwayat Penunjukan <i>History of Appointments</i>	:	<p>Jabatan Direktur diambil sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.</p> <p><i>The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors Perum Jamkrindo, j.o Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Public Corporation (Perum) Jamkrindo. This position is his first period as Director. Then reappointed based on the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, for the second period.</i></p>
Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK <i>Pass the Fit and Proper test from OJK</i>	:	<p>Ketika Beliau ditunjuk sebagai Direksi Perusahaan belum ada regulasi terkait Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan dari OJK. Dengan Demikian, dasar hukum jabatan sebagai Direksi Perusahaan masih menggunakan Surat Keputusan Menteri BUMN, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 • Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-22/MBU/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 <p><i>When he was appointed as the Company's Board of Directors, there were no regulations regarding the Fit and Proper Assessment from the OJK. Thus, the legal basis for the position as a Director of the Company still uses the Decree of the Minister of SOEs, as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Decree of the Minister of SOE No. SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 • Decree of the Minister of SOE No. SK-22/MBU/01/2018 dated January 18, 2018
Riwayat Profesi <i>Professional History</i>	:	<p>Plt Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017-21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010-2013), Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011), Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011), Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 2009), Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006-2010), Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006), Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002-2006).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acting as President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017-November 21, 2017), Assistant Deputy for Services Business II, the Ministry of SOEs (2010-2013), Member of the Board of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008-2011), Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007-2011), Member of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003-2009), Assistant Deputy of Plantation Business II, the Ministry of SOEs (2006-2010), Head of Plantation Business Division IIA, the Ministry of SOEs (2006), Acting Head of Agriculture Production Facility Business Division of the Ministry of SOEs (2002-2006).
Rangkap Jabatan <i>Concurrent Position</i>	:	<p>I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain. I. Rusdonobanu does not have a concurrent position at other companies/institutions.</p>
Hubungan Afiliasi <i>Affiliate Relationship</i>	:	<p>I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama. I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.</p>



PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERKAIT KEUANGAN BERKELANJUTAN

DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCE RELATED COMPETENCY

Selama tahun 2021, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Jamkrindo telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, termasuk yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan sebagai berikut: [OJK E.2]

During 2021, members of Jamkrindo's Board of Commissioners and Directors have participated in various competency development activities, including those related to the implementation of sustainable finance as follows: [OJK E.2]

Tabel Pengembangan Kompetensi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Direksi dan Dewan Komisaris
Table of Competency Development for the Implementation of Sustainable Finance for the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education And Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris <i>Board of Directors/Board of Commissioners Development Program</i>	Webinar Corporate Governance Series : Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia Webinar Corporate Governance Series : Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia	Zoom Meeting, 8 Juli 2021 Zoom Meeting, July 8, 2021	IICD
Sri Mulyanto (Dewan Komisaris) (Board of Commissioners)	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris <i>Board of Directors/Board of Commissioners Development Program</i>	Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tata cara pendaftaran, pengumuman & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI Dissemination of KPK Regulation Number 2 of 2020 Procedures for registration, announcement & examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission	Zoom Meeting, 19 Februari 2021 Zoom Meeting, February 19, 2021	Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI Registration and Examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission Directorate
Muhammad Muchlas Rowi (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris <i>Board of Directors/Board of Commissioners Development Program</i>	Workshop Managing Risks of Innovation and Digital Transformation In The New Economy Era Managing Risks of Innovation and Digital Transformation in The New Economy Era Workshop	Zoom Meeting, 28 April 2021 Zoom Meeting, April 28, 2021	Indonesian Institute for Corporate Directorship Indonesian Institute for Corporate Directorship
	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris <i>Board of Directors/Board of Commissioners Development Program</i>	Webinar Corporate Governance Series : Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia Webinar Corporate Governance Series : Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia	Zoom Meeting, 8 July 2021 Zoom Meeting, July 8, 2021	IICD
	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris <i>Board of Directors/Board of Commissioners Development Program</i>	Training Special Directorship Program Special Directorship Program Training	Zoom Meeting, 23-25 Agustus 2021 Zoom Meeting, August 23-25, 2021	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Materials of Education And Training	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Development Program	Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tata cara pendaftaran, pengumuman & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI <i>Dissemination of KPK Regulation Number 2 of 2020 Procedures for registration, announcement & examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission</i>	Zoom Meeting, 19 Februari 2021 Zoom Meeting, February 19, 2021	Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI
	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Development Program	Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan <i>Procurement Contract Legal Expert Education</i>	Zoom Meeting, 17 Mei 2021 Zoom Meeting, May 17, 2021	The Global Voice and Network of Procurement Lawyer Profession
Ari Wahyuni (Komisaris) (Commissioner)	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Development Program	Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tata cara pendaftaran, pengumuman & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI <i>Dissemination of KPK Regulation Number 2 of 2020 Procedures for registration, announcement & examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission</i>	Zoom Meeting, 19 Februari 2021 Zoom Meeting, February 19, 2021	Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI
	Pelatihan Mandatory & Program Perusahaan Mandatory Training & Corporate Programs	Mensrea	Zoom Meeting, 20 Februari 2021 Zoom Meeting, February 20, 2021	Indonesia Financial Group (IFG)
Direksi Board of Directors	Program Pengembangan Direksi/Dewan Komisaris Board of Directors/Board of Commissioners Development Program	Sosialisasi Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tata cara pendaftaran, pengumuman & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI <i>Dissemination of KPK Regulation Number 2 of 2020 Procedures for registration, announcement & examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission</i>	Zoom Meeting, 19 Februari 2021 Zoom Meeting, February 19, 2021	Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi RI <i>Registration and Examination of LHKPN RI Corruption Eradication Commission Directorate</i>
Putrama Wahju Setyawan (Direktur Utama) (President Director)	Pelatihan Mandatory & Program Perusahaan Mandatory Training & Corporate Programs	Webinar Pencegahan Korupsi <i>Corruption Prevention Webinar</i>	Zoom Meeting, 6 Mei 2021 Zoom Meeting, May 6, 2021	IFG (Narsum Komisi Pemberantas Korupsi) IFG (Corruption Eradication Commission Informant)
Suwarsito (Direktur Bisnis Penjaminan) (Assurance Business Director)	Leadership Development Program Ke Seluruh Level Jabatan Leadership Development Program to All Position Levels	Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Tahap II Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Phase II	Zoom Meeting, 22 Maret 2021 Zoom Meeting, March 22, 2021	PT Jamkrindo
Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan) (HR, General and Compliance Director)	Self Development Program	Digital Marketing: A Strategic Perspective Online Program	Zoom Meeting, 12 Mei-7 Juli 2021 Zoom Meeting, May 12-July 7, 2021	Yale SOM Executive Education
	Self Development Program	13th Global Peter Drucker Forum 2021	Zoom Meeting, 10-17 November 2021 Zoom Meeting, November 10-17, 2021	Global Peter Drucker Forum



MANAJEMEN RISIKO DAN PRINSIP PENCEGAHAN [GRI 102-11] [OJK E.3]

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION PRINCIPLES [GRI 102-11] [OJK E.3]

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/downtime & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, di mana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidentil. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan *monitoring* dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspect of the Board of Directors in supporting the decision-making process and developing the Company's performance. Commitment in implementing Risk Management, as an integral part of the Company's overall management system, is stated in Risk Management Policies and Procedures that are built according to the context and capabilities of the Company. The Company's Risk Management is implemented in accordance with the conditions and needs of the Company using ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

In minimizing the impact of losses arising from operational activities, the Company also includes said potential loss into the Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the regulations of the Board of Directors of Jamkrindo, operational risk is the risk that is caused, among others, by inadequate and/or malfunctioning internal processes, human errors, system failures, or external problems that affect the Company's operations.

Said operational risk could be caused by several factors, namely system failure/downtime & technology, human error, equipment (mechanical and engineering), external parties, fraud, failure of internal processes, organization & HR, Counterpart, HSE (Health, Safety and Environment), and Information Technology.

In order to implement Operational Risk Management, Jamkrindo already has guidelines for carrying out Risk and Control Self Assessment (RC SA). The RC SA is carried out with a bottom-up approach, where identification and risk assessment is carried out by the Division or Section Head at the Head Office Work Unit, Branch Offices and Sub-Branch Offices. The determination of the identification and risk assessment executive level is based on the consideration that the level is the lowest official in the work unit, so that they know the technical problems and the relationship between these technical problems and the achievement of the Company's goals.

Risk Management Implementation

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Risk Management activities that carried out periodically are risk management processes which consist of 4 stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation.

At the initial stage, the process carried out is Identification and Assessment of Inherent Risk. Based on the results of risk identification and risk assessment, an evaluation is carried out to improve the risk management process.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidentil adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kegiatan insidentil berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi No. 126/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat *ad hoc*, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit

Incidental Risk Management Activities are the implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with those stipulated in the SOP for risk-based business processes and the provision of opinions related to matters that must be consulted with the Risk Management Division.

Incidental activities in the form of providing opinions on matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, write-off policies for company receivables, creating SOP, RJP, RKAP, implementing the use of new applications/software, the determination of new banks for the placement of deposits and investments, and other strategic policies.

Incidental activities in the form of giving opinions according to the Circular Letter of the Board of Directors No. 126/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning SOP for Risk Management Opinions, namely for matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, write-off policies for company receivables, creating SOP, RJPP, RKAP, implementing the use of new applications/software, the determination of new banks for the placement of deposits and investments, and other strategic policies.

Comprehensive Risk Management

For the implementation of integrated risk management, several comprehensive regulations are needed to support the implementation of risk management. In this regard, Jamkrindo has compiled the following comprehensive regulations:

1. *Board of Directors Regulation on the Implementation of Risk Management*
Board of Directors Regulation on the Implementation of Risk Management is a regulation that states the implementation of risk management and the necessary supporting tools. In this regulation, a statement regarding risk management is attached which is a statement from the Board of Directors and all Jamkrindo Officials regarding the company's risk management policies. The statement is a written form of the commitment of the Board of Directors and Jamkrindo Officials in implementing risk management in every stage of the activity.
2. *Jamkrindo's Risk Management Organization is structurally, the Board of Directors has established an organizational structure in which there is a Risk Management Division. In addition to the structural organization, there is also an ad hoc structure, namely the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) is a committee consisting of the Board of Directors and the Head of Division related to the management of the Company's Risk Management. The role of the Risk Management Committee is to conduct periodic assessments and provide recommendations for business risks, types and impacts on the Company's activities, determine the Company's risk appetite and risk tolerance, and provide reports on the implementation of the Company's Risk Management to the Board of Commissioners.*
3. *In addition, for the smooth implementation of the risk management process, in each work unit a Person in Charge (PIC) is appointed to coordinate the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out*



- kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko.
4. Kebijakan Manajemen Risiko Jamkrindo merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko.
 5. SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Jamkrindo. SOP Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No. 127/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang *Standard Operating Procedure (SOP)* Manajemen Risiko.
 6. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No. 124/SE/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo. Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah:
 - a. Penetapan Konteks dan Kriteria;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisis Risiko;
 - d. Evaluasi Risiko;
 - e. Penanganan Risiko;
 - f. Monitoring Risiko;
 - g. Komunikasi dan Konsultasi Risiko;
 - h. Pencatatan dan Pelaporan Risiko;
 - i. Toleransi Risiko.
 7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
 8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

Jenis Dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2021

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Potensi risiko SLA proses bisnis yang lambat dan tidak *service excellent*. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Implementasi ERP untuk digitalisasi & integrasi proses bisnis dan operasional;
2. Potensi risiko pendapatan Investasi tidak tercapai optimal. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Sinergi investasi dengan Induk IFG pada *instrument* yang *prudent*;

its duties, the Risk Management PIC coordinates and consults with the Risk Management Division.

4. *Jamkrindo's Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company and guidelines for formulating supporting policies at the corporate and Work Unit levels. The Risk Management Policy is then cascading down into the SOP contained in the Risk Management Division.*
5. *The Risk Management SOP is an SOP that is intended to provide technical guidance in the implementation of the risk management process at Jamkrindo. The Risk Management SOP is issued by the Circular Letter of the Board of Directors No. 127/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020 regarding Risk Management Standard Operating Procedure (SOP).*
6. *The Risk Management Implementation Instruction is issued by the Circular Letter of the Board of Directors No. 124/SE/5/XII/2020 dated December 30, 2020. The Technical Guidelines contain an explanation of the technical guidelines for the implementation of Risk Management at Jamkrindo. The technical guidelines for the implementation of Risk Management in outline are:*
 - a. *Determination of Context and Criteria;*
 - b. *Risk Identification;*
 - c. *Risk Analysis;*
 - d. *Risk Evaluation;*
 - e. *Risk Management;*
 - f. *Risk Monitoring;*
 - g. *Risk Communication and Consultation;*
 - h. *Risk Recording and Reporting;*
 - i. *Risk Tolerance.*
7. *SOP for Risk-Based Business Process is an SOP for a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the necessary risk control have been considered in the implementation of business processes, while for new types of risks it is ensured to have obtained an opinion from the Risk Management Division as a second opinion in the consideration of decision making. Given that the types of activities that exist at Jamkrindo are quite diverse, the preparation of risk-based business process SOPs is carried out in stages by each business process owner.*
8. *An Integrated Risk Management Support System has existed since 2011, the company has started to build a Risk Management Information System Application. The application serves to simplify the process of identification, risk assessment, and follow-up on risk management. With the application, risk data can be stored in a structured database.*

Types and Management of Risks During 2021

Some of the relatively significant risks in 2021 are as follows:

1. *The potential risk of SLA business processes being slow and not service excellent. Risk Mitigation carried out: ERP implementation for digitization and integration of business and operational processes;*
2. *Potential risk of investment income is not optimally achieved. Risk Mitigation carried out: Investment synergy with IFG Parent on prudent instruments;*

3. Potensi risiko tidak tertagihnya piutang perusahaan. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Meningkatkan koordinasi & rekonsiliasi dengan mitra ReAss/Co dalam penagihan piutang ReAss/Co (dengan sistem offset);
4. Potensi risiko tidak tercapai target Pertumbuhan Pendapatan, *Market Share*, Profitabilitas bisnis. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Optimalisasi Penjaminan Program (KUR & PEN) dan Produk Non Program (al. SB, KBG) yang *profitable*;
5. Potensi risiko tidak tercapainya target ROE. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Evaluasi Fitur (TC & Price) Produk & selektif dalam membangun bisnis dengan Mitra Penerima Jaminan;
6. Potensi risiko tinggi NPL KUR dan Kredit UMKM melalui Program PEN yang menyebabkan tingginya Rasio Klaim Perusahaan. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Penerapan sistem *stop loss policy* pada PEN & evaluasi RK KUR;
7. Potensi risiko tidak tercapainya target Pertumbuhan IJP Netto. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Mengembangkan kerja sama dengan mitra *existing* untuk produk penjaminan baru dan kerja sama dengan mitra baru yang prospektif;
8. Potensi risiko produk baru yang dikembangkan Perusahaan tidak *marketable & profitable*. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Optimalisasi bisnis via Jamkrindo *Online Suretyship System*;
9. Potensi risiko piutang subrogasi terjamin tidak tertagih. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Intensifikasi penagihan & rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan, kerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan subrogasi/eksekusi agunan terjamin;
10. Potensi risiko dalam implementasi *Risk Management* Tidak *Prudent & Risk Awareness* Rendah. Mitigasi Risiko yang dilakukan: Penerapan *Four Eyes Principles*, peningkatan budaya *Risk Awareness*.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko telah menyiapkan kriteria untuk mengukur keefektifan pengendalian risiko yang sudah ada. Ketika akan mengidentifikasi *Risk Control*, Divisi Manajemen Risiko menjawab pertanyaan dibawah ini:

- a. Apakah *existing control* yang dilakukan langsung menangani akar (*root*) dari penyebab atau dampak?
- b. Apakah *existing control* ini sudah didokumentasikan dan didokumentasikan secara resmi?
- c. Apakah kontrol saat ini ada didalam proses bisnis dan sudah diterapkan secara konsisten?

Dalam rangka implementasi manajemen risiko di Perusahaan, berikut deskripsi sederhana yang dapat digunakan:

	Apakah <i>existing control</i> yang dilakukan langsung menangani akar (<i>root</i>) dari penyebab atau dampak? <i>Does the existing control that is carried out directly address the root of the cause or impact?</i>	Apakah <i>existing control</i> ini sudah didokumentasikan dan didokumentasikan secara resmi? <i>Have these existing controls been documented and officially documented?</i>	Apakah kontrol saat ini ada di dalam proses bisnis dan sudah diterapkan secara konsisten? <i>Are current controls exists in business processes and are they consistently applied?</i>
YA YES	1	1	1
SEBAGIAN PARTIAL	3	2	2
TIDAK NO	6	3	3

3. *Potential risk of uncollectible company receivables. Risk Mitigation carried out: Improve coordination & reconciliation with ReAss/Co partners in collecting ReAss/Co receivables (with an offset system);*
4. *Potential risk of not achieving the target of Revenue Growth, Market Share, Business Profitability. Risk Mitigation carried out: Optimization of Guarantee Program (KUR & PEN) and Non Program Products (al. SB, KBG) which are profitable;*
5. *Potential risk of not achieving ROE targets. Risk Mitigation carried out: Product (TC & Price) Features Evaluation & be selective in building business with Assurance Recipient Partners;*
6. *The potential for high risk of NPL, KUR and MSME Credit through the PEN Program which causes a high Company Claims Ratio. Risk Mitigation carried out: Application of stop loss policy system on PEN & evaluation of RK KUR;*
7. *Potential risk of not achieving the Net IJP Growth target. Risk Mitigation carried out: Develop cooperation with existing partners for new guarantee products and cooperation with prospective new partners;*
8. *The potential risk of new products developed by the Company are not marketable and profitable. Risk Mitigation carried out: Business optimization via Jamkrindo Online Suretyship System;*
9. *The potential risk of guaranteed subrogated receivables to be uncollectible. Risk Mitigation carried out: Intensification of collection and reconciliation with Guarantee Beneficiaries, cooperation with third parties for subrogation/execution of Guaranteed collateral collection;*
10. *Potential risks in the implementation of Imprudent Risk Management & Low Risk Awareness. Risk Mitigation carried out: Implementation of the Four Eyes Principles, enhancing the culture of Risk Awareness.*

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

The Risk Management Division has prepared criteria to measure the effectiveness of existing risk controls. When it comes to identifying Risk Control, the Risk Management Division answers the following questions:

- a. Does the existing control that is carried out directly address the root of the cause or impact?
- b. Have these existing controls been documented and officially documented?
- c. Are current controls exist in business processes and are they consistently applied?

In the context of implementing risk management in the Company, the following is a simple description that can be used:



Tingkat Level	Deskripsi Description	Poin Point	Skor Point
Tidak Efektif Ineffective	<ul style="list-style-type: none"> Kemungkinan terburuk (Skor 12), pengendalian risiko tidak tepat, dan tidak didokumentasikan atau tidak beroperasi Kemungkinan terbaik (Skor 7), pengendalian risiko tepat, tetapi tidak didokumentasikan dan tidak beroperasi Worst case (Score 12), risk control is not appropriate, and not documented or not operating Best case (Score 7), risk control is appropriate, but not documented or not operating 	7-12	1
Kurang Efektif Less Effective	Sebagian pengendalian risiko tepat, tetapi dokumentasi dan operasi memerlukan banyak perbaikan <i>Some risk controls are appropriate, but documentation and operations need a lot of improvement</i>	6	0,75
Sebagian Efektif Partially Effective	Seluruh pengendalian risiko tepat, tetapi dokumentasi dan operasi memerlukan banyak perbaikan <i>All risk controls are appropriate, but documentation and operations need a lot of improvement</i>	5	0,50
Efektif Effective	Seluruh pengendalian risiko tepat, tetapi dokumentasi dan operasi perlu sedikit perbaikan <i>All risk controls are appropriate, but documentation and operations need a small improvement</i>	4	0,25
Sangat Efektif Very Effective	Seluruh pengendalian risiko tepat, terdokumentasi resmi dan secara konsisten dilakukan dalam operasi <i>All risk controls are appropriate, officially documented and consistently carried out in operations</i>	3	0,1

Kriteria sebagaimana dimaksud di atas telah diterapkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sebagai penilaian efektivitas pengendalian risiko yang telah dilakukan oleh Unit Kerja.

The criteria as referred to above have been applied in the Application of the Risk Management Information System (SIMR) as an assessment of the effectiveness of risk control that has been carried out by the Work Unit.



SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 121/Kep-Dir/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) juga telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 33/Kep-Dir/III/2015 tanggal 11 Maret 2015.

Seluruh karyawan Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan *Whistleblowing System* dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Sementara itu, Jamkrindo juga memiliki komitmen untuk membuat kebijakan untuk melindungi pelapor.

Berdasarkan laporan pengaduan karyawan kepada Tim Pengelola WBS, terdapat 1 (satu) pengaduan pada tahun 2021. Jumlah pelaporan yang masuk dan tindak lanjut selengkapnya disampaikan dalam tabel berikut:

Media Penyampaian Submission Media	2021	2020
Surat Letters	-	-
Email Email	-	5
Situs Web Website	-	-
SMS SMS	1	-
Lain-lain Others	-	-
Jumlah Total	-	5

Status Laporan Report Status	2021	2020
Laporan Dalam Proses Report In Process	-	3
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Completed Follow Up Report	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tidak Terbukti • Unproven Report • Laporan Selesai dengan Tindak Lanjut • Completed Report With Follow Up 	4	-
Jumlah Total	-	5

KODE ETIK PERUSAHAAN [GRI 102-16]

CORPORATE CODE OF CONDUCT [GRI 102-16]

Perusahaan memiliki komitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja Perusahaan dengan berbasiskan budaya Perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama;
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi);
4. Memperlakukan semua *stakeholder* sebagai mitra;
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah:

Eтика Perusahaan

Etica Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

- Perusahaan harus memperlakukan *stakeholder* secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak *stakeholder*.
- Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi *stakeholder*.
- Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
- Perusahaan harus memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada *stakeholder*.
- Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan *stakeholder* dengan baik.

Corporate Ethics with Stakeholders

- Companies must treat stakeholders decently and fairly by fulfilling the rights of stakeholders.
- Companies are required to improve performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.
- The company is obliged to maintain the confidentiality of information and data.
- Companies must ensure the provision of information that is not misleading to stakeholders.
- Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.

The company is committed to trying to improve the company's performance based on the Corporate culture through good Corporate Governance guided by the principles of transparency, fairness, accountability and independence, so that it can support the Government policies in the field of developing Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). This is stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 dated December 30, 2020.

The Company's standard of behavior is transparency and disclosure of independence, responsibility and fairness information. The application of these business ethics standards is the Company's way of doing business in order to realize its commitments to:

1. *Putting customer satisfaction as the top priority;*
2. *Applying Standards of Ethics in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance;*
3. *Always proportionally in the context of providing high-quality services to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives);*
4. *Treat all stakeholders as partners;*
5. *Companies must serve and try to anticipate the needs of stakeholders properly.*

The contents of the Company's Code of Conduct include:

Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Karyawan

- Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
- Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
- Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
- Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
- Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Company Ethics with Employees

- Companies must prioritize occupational health, safety, quality and welfare improvement of employees by fulfilling employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.
- The Company provides equal employment opportunities to all employees regardless of their background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
- The Company provides equal opportunities in employee self-development.
- The Company gives awards based on the competence and performance of employees.
- The company creates a conducive and productive work environment, communication and working relationships with superiors, subordinates and co-workers.
- The Company must respect human dignity without regarding the differences of their ethnic background, religion, gender, age, disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
- The Company must uphold the general principles of humanity, rights and obligations based on the applicable laws and regulations.
- The Company allows employees to carry out multiple activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

- Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
- Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
- Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Company Ethics with Goods and Service Providers

- The Company treats suppliers of goods or services (suppliers) including the procurement process according to sound, open, and impartial business principles based on applicable regulations.
- Companies must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations by referring to the principles of effectiveness, efficiency and economy.
- Companies use providers of goods and services based on written documents.
- The company must maintain the confidentiality of information and documents on the procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.
- The company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the procurement of goods and services.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

- Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
- Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyatakan dan atau tindakan yang tidak jujur.
- Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepahaman yang bersifat anti kompetisi.
- Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Company Ethics with Competitors

- Companies must implement fair business competition by prioritizing product excellence and service quality.
- Companies must avoid misleading behavior and/or dishonest actions.
- The company opposes anti-competitive agreements or understandings.
- The company does not cooperate without an acceptable and reasonable reason.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

- Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
- Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Company Ethics with Government

- The company must comply with the applicable Laws and Regulations.
- Companies must maintain good relations and communication with the Government.
- Companies must support Government programs in accordance with applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

- Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
- Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak asasi manusia.
- Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
- Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
- Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Company Ethics with Society

- The company maintains a clean and healthy environment.
- The company supports social, cultural, traditional, religious and human rights activities.
- The company participates in the economic empowerment of the surrounding community.
- The company optimizes the distribution of its corporate social responsibility programs to the community (the Partnership and Community Development Program).
- The Company does not take actions that lead to community discrimination based on ethnicity, religion, race and between groups.

Etika Perusahaan dengan Media Massa

- Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
- Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
- Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Corporate Ethics with Mass Media

- Companies must provide relevant information.
- The company makes the mass media as partners in creating a conducive cooperation based on a relationship of mutual respect and mutual benefit.
- The company accepts and follows up proportionally on constructive criticisms conveyed through the mass media.



Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Jamkrindo Personnel Standards of Conduct

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

- Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibilities

- All Company Personnel are required to comply with all Company regulations regarding employment.
- All Company personnel are required to understand and comply with all provisions, both issued by the Company and regulators in accordance with their field of duties and responsibilities.
- All Company Personnel must be dedicated, loyal, diligent and thorough in their work and always try to improve their knowledge and abilities for the smooth implementation of tasks.
- All Company Personnel must apply the Company's interests above personal or group interests.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

- Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
- Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor):
 - » Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkotika atau obat-obatan terlarang;
 - » Mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - » Melakukan semua bentuk perjudian;
 - » Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
- Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

Creating a Conducive Work Environment

- All Company Personnel must be polite in communicating.
- All Company personnel must uphold ethical values in working relationships with superiors, subordinates and colleagues.
- All Company personnel must avoid actions and words that contain elements of harassment, humiliation, ridicule, slander and demeaning.
- All Company Personnel are prohibited from engaging in infidelity and sexual harassment verbally, visually or physically, including harassment of privacy and status.
- All Company Personnel are prohibited (both in the office and outside the office):
 - » Use, possess, distribute or sell narcotics or illegal drugs;
 - » Consuming alcoholic beverages;
 - » Doing all forms of gambling;
 - » Doing all forms of criminal acts;
- All Company personnel are required to maintain a healthy environment.
- All Company Personnel to strive for efficient and effective use of telephones and avoid excessive use of telephones for personal interests and respond to telephone calls or call alerts at the first opportunity.

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

- Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
- Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
- Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
- Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperpanjangan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
- Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
- Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apa pun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

Avoid All Conflicts of Interest and Potentials That Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

- All Company Personnel use their power, ideas and abilities for the benefit of the Company. Work or activities outside office hours can be carried out as long as they do not take advantage of the name and interests of the Company.
- All Company Personnel who are no longer active or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property rights, data and information of the Company and conducting activities on behalf of the Company.
- All Company Personnel may not invest in Company funds on behalf of individuals or groups.
- All Company Personnel may not invest in Company funds by promising personal benefits with other parties.
- All Company Personnel may not accept bribes or payments in any form from parties who have a direct or indirect relationship with their position or duties.
- All Company Personnel may not accept and give gifts in any form that is reasonably suspected of influencing sound business decisions.
- All Company Personnel are prohibited from becoming providers of goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.
- All Company Personnel are prohibited from marking up the selling or buying price either for personal interest or for other parties.
- All Company Personnel are prohibited from using their position to give preferential treatment to other parties.



Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

- Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan dimanapun.
- Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Safeguarding Assets, Wealth, and Information for the Interest of the Company

- All Company Personnel use the Company's assets only for the benefit of the Company and are not allowed for personal or group interests.
- All Company Personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse of assets according to their respective authorities.
- All Company Personnel are required to maintain data and information along with their devices in accordance with their authority so that they are not misused, damaged, stolen, or not accessed by other irresponsible parties.
- All Company Personnel are not allowed to use the Company's name, logo, copyright, and various accessories for personal gain.
- All Company Personnel are required to keep the Company's internal information confidential and not use it for personal, family, friend, or group interests whatsoever and anywhere.
- All Company Personnel are required to make and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

- Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan *insider trading* guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat:
 - » Tidak mengatasnamakan Perusahaan;
 - » Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya;
 - » Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan;
 - » Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
- Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- Complying with Laws and Legislation
- All Company Personnel are prohibited from engaging in insider trading activities for personal gain and not acting as brokers, seekers or other intermediaries for personal or group interests in the transactions carried out by the Company.
- All Company Personnel are prohibited from being involved or involving themselves in investments and or practices that are money laundering.
- All Company personnel are prohibited from making understandings, engagements, statements either directly or indirectly indicating that the Company has an attachment to any political party, however the Company provides freedom for all Company personnel to channel their political aspirations on the condition that:
 - » a. Not on behalf of the Company;
 - » b. Did not use the Company's assets in its political activities;
 - » c. Do not make any contribution on behalf of the Company;
 - » d. If he holds a position in a political party and becomes a candidate/member of the legislature, he is considered to have resigned from the Company.
- All Company Personnel are prohibited from committing acts of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

Dalam melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan ketentuan atau sanksi pelanggaran yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal mengenai Pemberian Sanksi yang ditetapkan oleh Jamkrindo, yang berupa peringatan tertulis, penurunan *grade*, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan saran dan kekhawatiran terkait etika melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*)

Selama tahun 2021 terdapat 6 (enam) pelanggaran Kode Etik dengan jenis sanksi berupa Teguran sebanyak 2 (dua) pelanggaran, surat peringatan 1 sebanyak 3 (tiga) pelanggaran, dan Peringatan 3 sebanyak 1 (satu) pelanggaran.

In enforcing the Code of Ethics in all lines of the Company, every violation of the Code of Ethics is subject to applicable provisions or sanctions for violations as described in the internal provisions regarding the Imposition of Sanctions set by Jamkrindo, in the form of written warnings, downgrades, and termination of employment (PHK). All stakeholders can submit suggestions and concerns related to ethics through a violation reporting mechanism (Whistleblowing System/WBS)

During 2021 there were 6 (six) violations of the Code of Ethics with types of sanctions in the form of a warning of 2 (two) violations, warning letter 1 of 3 (three) violations, and Warning 3 of 1 (one) violation.



BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST

Segenap insan Jamkrindo berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan. Komitmen itu sejalan dengan semangat Perusahaan untuk mengimplementasikan GCG dimana salah satu prinsipnya adalah prinsip independensi yang menjamin pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pada prinsip independensi, Perusahaan juga berpegang teguh pada prinsip integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam lingkup perusahaan.

Salah satu bentuk konkret dari komitmen Perusahaan tersebut adalah dengan menekankan bahwa setiap individu yang berada dalam lingkup perusahaan, terutama bagi mereka yang masuk ke dalam struktur organisasi perusahaan, wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap individu juga dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ada individu yang sedang menghadapi benturan kepentingan, diwajibkan untuk segera membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Secara spesifik, Jamkrindo mengatur benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Jamkrindo telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya. Sementara itu, bagi Direksi, pernyataan yang ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direksi dan diperbaharui setiap awal tahun adalah bahwa pernyataan bahwa anggota Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha Perusahaan.

Pada tahun 2021, tidak terdapat pelanggaran yang melibatkan benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun seluruh Insan Jamkrindo.

All Jamkrindo Personnel are committed to avoid conflict of interest. This commitment is in line with the Company's spirit to implement GCG where one of the principles is the principle of independence which ensures the management of the Company independently without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations. In addition to the principle of independence, the Company also adhering to the principle of integrity that every individual within the company must possess.

One of the concrete forms of the Company's commitment is to emphasize that every individual within the scope of the company, especially those who are included in the company's organizational structure, must avoid any form of conflict of interest that may harm the Company. Individuals are also prohibited from engaging in activities that directly or indirectly benefit their personal, family, or relative interests. If there are individuals who are facing a conflict of interest, they are required to immediately free themselves from the situation or notify their leadership or the party responsible for it.

Specifically, Jamkrindo regulates conflicts of interest for the Board of Commissioners and the Board of Directors. All members of the Board of Commissioners of Jamkrindo have signed a statement letter free of conflict of interest stating that there is no affiliation with members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners. Meanwhile, for the Board of Directors, the statement signed at the beginning of the appointment as the Board of Directors and updated at the beginning of each year is a statement that the members of the Board of Directors and their families do not have share ownership or become management in the company or business activities that are directly or indirectly related to the line of business of the Company.

In 2021, there were no violations involving conflicts of interest by the Board of Commissioners, the Board of Directors, or all Jamkrindo Personnel.

PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Keberhasilan Jamkrindo menjalankan usaha tak lepas dari dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Kontribusi pemangku kepentingan terhadap keberadaan Perusahaan sangat tergantung kepentingan masing-masing pemangku kepentingan. Jamkrindo mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang terpengaruh oleh kegiatan Perusahaan. Di sisi lain, keberadaan mereka juga mempengaruhi Perusahaan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan strategi dan pencapaian tujuan.

Oleh karena posisi pemangku kepentingan yang demikian strategis, maka Jamkrindo berupaya untuk membangun kerja sama dan bersinergi dengan mereka. Langkah nyata yang diambil Perusahaan antara lain menyelenggarakan komunikasi yang intensif bersama kelompok-kelompok pemangku kepentingan, dan mengupayakan pelibatan mereka sesuai dengan harapan masing-masing pemangku kepentingan.

Jamkrindo mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan merujuk pada AA1000 Stakeholder Engagement Standard versi tahun 2015, yang membagi pemangku kepentingan dalam 6 atribut sebagai berikut:

1. *Dependency (D)*
Jika Perseroan memiliki ketergantungan pada seseorang atau sebuah organisasi, atau sebaliknya.
2. *Responsibility (R)*
Jika Perseroan memiliki tanggung jawab legal, komersial atau etika terhadap seseorang atau sebuah organisasi.
3. *Tension (T)*
Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi membutuhkan perhatian Perseroan terkait isu ekonomi, sosial atau lingkungan tertentu.
4. *Influence (I)*
Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi memiliki pengaruh terhadap Perseroan atau strategi atau kebijakan pemangku kepentingan lain.
5. *Diverse Perspective (DP)*
Jika seseorang atau suatu kelompok/organisasi memiliki pandangan yang berbeda yang dapat mempengaruhi situasi dan mendorong adanya aksi yang tidak ada sebelumnya.

Jamkrindo's success in running a business cannot be separated from the support and cooperation of stakeholders, both internal as well as external. The contribution of stakeholders to the existence of the Company is highly dependent on the interests of each stakeholder. Jamkrindo defines stakeholders as groups or individuals who are affected by the Company's activities. On the other hand, their presence also influences the Company in realizing the successful implementation of strategies and achieving goals.

Due to the strategic position of stakeholders, Jamkrindo seeks to build cooperation and synergize with them. The concrete steps taken by the Company include conducting intensive communication with stakeholder groups, and seeking their involvement in accordance with the expectations of each stakeholder.

Jamkrindo identifies stakeholders by referring to the 2015 version of the AA1000 Stakeholder Engagement Standard, which divides stakeholders into 6 attributes as follows:

1. *Dependency (D)*
If the Company has a dependency on a person or an organization, or vice versa.
2. *Responsibility (R)*
If the Company has legal, commercial or ethical responsibilities towards a person or an organization.
3. *Tension (T)*
If a person or group/organization requires the Company's attention regarding certain economic, social or environmental issues.
4. *Influence (I)*
If a person or group/organization has influence on the Company or the strategies or policies of other stakeholders.
5. *Diverse Perspective (DP)*
If a person or a group/organization has a different view that can influence the situation and encourage action that did not exist before.

Setelah dilakukan pemetaan, pemangku kepentingan Jamkrindo dan pelibatannya adalah sebagai berikut: [OJK E.4]

After mapping, Jamkrindo's stakeholders and their involvement are as follows: [OJK E.4]

Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List [GRI 102-40]	Basis Penetapan/Identifikasi Basis for Appointment/Identification [GRI 102-42]	Metode Pelibatan/Pendekatan Involvement/Approach Method [GRI 102-43]	Frekuensi Pelibatan Involvement Frequency [GRI 102-43]	Topik dan Isu Utama Kepentingan Topic and Main Issues of Interest [GRI 102-44]	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectation
Pelanggan Customer	D, R, I	Website dan Frontline Information Website and Frontline Information	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan relationship/customer retention/quality of service	Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Receive service and quality of service that is satisfying
		Kunjungan langsung Direct visit	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan relationship/customer retention/quality of service	Informasi produk dan jasa terbaru yang dimiliki Perusahaan Information on the latest products and services owned by the Company
		Call center	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan relationship/customer retention/quality of service	Mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan atau keluhan soal layanan produk dan jasa Received a solution if you have questions or complaints about product and service services
		Pengukuran Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Measurement	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/ customer retention/kualitas layanan relationship/customer retention/quality of service	Mendapatkan gambaran tentang angka kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan Get an overview of customer satisfaction and dissatisfaction rates
Pemegang Saham Shareholders	D, R, I	RUPS dan RUPSLB Extraordinary General Meeting of Shareholders	Tahunan Yearly	Dividen/ pengembangan usaha/tata kelola/manajemen Dividends/business development/ management manage/management	Perusahaan berjalan secara produktif dan meningkatnya kinerja serta mencapai target dari pemegang saham The company runs productively and improves performance and achieves the target of shareholders
Pemerintah dan DPR Government and Parliament	D, R, T, I, DP	Pelaporan Pelaksanaan Kepatuhan Compliance Implementation Report	4 (empat) kali dalam setahun 4 (four) times a year	Pembangunan/ pengembangan usaha/investasi Establishment/business development/investment	Memastikan dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku Ensure compliance with applicable laws and regulations
Pegawai Employee	D, R, T, I	Media Internal (Majalah) Internal Media (Magazine)	1 (satu) Kali dalam Sebulan 1 (once) a year	Distribusi informasi kepada karyawan Information Distribution to employee	Melakukan sosialisasi tentang kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian Conducting socialization on policies and strategies related to staffing
		Survei Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Survey	1 (satu) Kali dalam Sebulan 1 (once) a year	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	Mengukur tingkat kepuasan pegawai dan menjaring harapan mereka Measuring employee satisfaction levels and capturing their expectations
Serikat Pekerja Labor Union	D, R, T, I	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama Discussion of Collective Labor Agreement	Saat diperlukan When needed	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan Labor/welfare	Menciptakan iklim kerja yang kondusif Creating a Conducive Work Climate
		Pembahasan apabila ada persoalan karyawan dengan manajemen Discussion if there are employee problems with management	Saat diperlukan When needed	Ketenagakerjaan/ kesejahteraan Labor/welfare	Mencari solusi terbaik Looking for the best solution



Daftar Pemangku Kepentingan Stakeholder List [GRI 102-40]	Basis Penetapan/Identifikasi Basis for Appointment/Identification [GRI 102-42]	Metode Pelibatan/ Pendekatan Involvement/ Approach Method [GRI 102-43]	Frekuensi Pelibatan Involvement Frequency [GRI 102-43]	Topik dan Isu Utama Kepentingan Topic and Main Issues of Interest [GRI 102-44]	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Expectation
Mitra Kerja, Suplier Work Partners, Suppliers	D, R,T	Kontrak kerja Mitra investasi Seminar dan Workshop <i>Investment partner work contract Seminar and Workshop</i>	Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i>	Hubungan komersial <i>Commercial relationship</i>	Proses pengadaan yang obyektif memperoleh kerja sama yang saling menguntungkan <i>An objective procurement process obtains mutually beneficial cooperation</i>
Media massa Mass media	T, I, DP	Press Release	Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i>	Pelaksanaan program <i>Program implementation</i>	Sumber informasi yang terpercaya, memberikan informasi terkait bisnis Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik <i>A trusted source of information, providing information related to the Company's business that the public needs to know</i>
Masyarakat, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat <i>Society, Local Communities, Community Organizations, Non-Governmental Organizations</i>	D, R, T, I, DP	kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan <i>Strategic cooperation to carry out Corporate Responsibility programs, both in the social and environmental fields</i>	Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i>	Rencana dan aktualisasi kegiatan-kegiatan TJSL Perusahaan <i>Plan and actualization of the Company's TJSL activities</i>	Mengoptimalkan pencapaian Program TJSL Perusahaan <i>Optimizing the achievement of the Company's TJSL Program</i>



PERMASALAHAN TERHADAP PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN [OJK E.5]

THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE ISSUES [OJK E.5]

Sesuai dengan bidang usahanya sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo terkena kewajiban menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan per 1 Januari 2024. Namun demikian, Perusahaan berinisiatif untuk menerapkan peraturan tersebut lebih awal sebagai bentuk dukungan atas penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. Langkah nyata dukungan Perusahaan diwujudkan antara lain dengan mengalokasikan dana untuk melaksanakan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSB BUMN) sebesar Rp11,34 miliar. Laporan selengkapnya disampaikan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Jamkrindo Tahun 2021.

In accordance with its line of business as a credit guarantee company, Jamkrindo is subject to the obligation to implement the POJK on Sustainable Finance as of January 1, 2024. However, the Company took the initiative to implement the regulation early as a form of support for the implementation of sustainable finance in Indonesia. Real steps of the Company support were realized, among others, by allocating funds to implement various Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises (SOEs TJSB) amounting to IDR11.34 billion. The full report is submitted in the Social and Environmental Responsibility Report of the State-Owned Enterprise PT Jamkrindo 2021.

KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Sustainable Economic Performance





UMKM

SEKILAS TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

OVERVIEW OF THE NATIONAL ECONOMY

Upaya pemerintah bergotong royong dengan segenap pemangku kepentingan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di saat pandemi COVID-19 berkepanjangan selama tahun 2021 membawa hasil positif. Sempat jatuh ke dalam zona resesi pada tahun 2020, perekonomian mulai merangkak naik sejak triwulan pertama hingga keempat tahun 2021. Tumbuh minus 2,07% pada akhir tahun 2020, tiga bulan kemudian atau pada triwulan I 2021, pertumbuhan ekonomi terjadi yaitu minus 0,71%. Tiga bulan berikutnya, perekonomian Indonesia mulai mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu 7,07%, disusul 3,51% pada triwulan III, dan 5,02% pada triwulan IV. Secara akumulasi, pada tahun 2021, sebagaimana disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69% (year on year/yoY), jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya yang terkontraksi 2,07% (yoY).

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan atas ketepatan dan efektivitas kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk mengendalikan laju penyebaran virus corona, sejumlah kebijakan diterbitkan, antara lain, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 0 sampai IV yang levelnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dengan pemberlakuan seperti itu, maka status suatu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Selain berdasarkan asesmen masing-masing daerah, penentuan level PPKM juga didasarkan pada indikator kasus konfirmasi harian, tingkat bed occupancy ratio (BOR) dan pencapaian vaksinasi. Semakin kecil level PPKM, yang menjadi penanda situasinya lebih baik, maka terbuka kemungkinan untuk dilakukan pengenduran pembatasan kegiatan masyarakat.

Kebijakan lain yang tak kalah penting adalah pemberian vaksinasi massal gratis, baik untuk dosis pertama maupun kedua, yang dimulai sejak awal tahun 2021. Vaksinasi massal sebagai program unggulan dalam menahan laju pandemi telah menempatkan Indonesia masuk dalam daftar lima negara dengan tingkat vaksinasi COVID-19 terbesar di dunia setelah China, India, Amerika dan Brazil. Menurut Presiden Joko Widodo, melalui kebijakan itu, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 282 juta dosis vaksin COVID-19 dan telah mencapai target WHO pada 2021 untuk jumlah orang divaksinasi dosis penuh.

Dalam perjalannya, kemunculan varian Delta yang penyebarannya sangat cepat, lebih ganas dan lebih mematikan dibanding varian lain pada triwulan III sempat menjadi kendala. Namun demikian, komitmen dan kesungguhan pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan yang lain, termasuk korporasi, berhasil menangani kendala ini. Hal itu ditunjukkan dengan tren grafik penyebaran virus corona yang terus menurun hingga akhir tahun 2021.

The government's efforts to work together with all stakeholders to realize economic growth during the prolonged COVID-19 pandemic during 2021 brought positive results. Had fallen into a recession zone in 2020, the economy began to creep up from the first to the fourth quarter of 2021. It decreases by 2.07% at the end of 2020, three months later or in the first quarter of 2021, economic growth occurred to be minus 0.71 %. In the next three months, the Indonesian economy began to record positive growth, namely 7.07%, followed by 3.51% in the third quarter, and 5.02% in the fourth quarter. In accumulation, in 2021, as stated by the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia recorded economic growth of 3.69% (year on year/yoY), much higher than the previous year which contracted 2.07% (yoY).

This success is a reflection of the accuracy and effectiveness of the policies taken by the government. To control the spreading rate of the corona virus, a number of policies were issued, among others, the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) from level 0 to IV, the level of which was adjusted to conditions in the field. With such enforcement, the status of an area will be different from other regions. In addition to the assessment of each region, the determination of the PPKM level is also based on indicators of daily confirmed cases, bed occupancy ratio (BOR) levels and vaccination achievements. The lower the PPKM level, which indicates a better situation, the more likely it is to loosen up the restrictions on community activities.

Another policy that is no less important is the provision of free mass vaccinations, both for the first and second doses, starting in early 2021. Mass vaccination as a flagship program in containing the pandemic has put Indonesia in the list of five countries with the largest COVID-19 vaccination rates in the world after China, India, America and Brazil. According to President Joko Widodo, through this policy, Indonesia has injected more than 282 million doses of the COVID-19 vaccine and has reached the WHO target by 2021 for the number of people to be vaccinated at full doses.

Along the way, the emergence of the Delta variant, which spreads very quickly, is more virulent and more deadly than other variants in the third quarter, was an obstacle. However, the commitment and sincerity of the government together with other stakeholders, including corporations, have succeeded in overcoming this obstacle. This is indicated by the graph trend of the spread of the corona virus which continues to decline until the end of 2021.



Sejalan dengan kebijakan untuk menangani laju penyebaran virus corona, pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket stimulus di bidang ekonomi antara lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk tahun 2021, dana program ini mencapai 744,7 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai Rp695,2 triliun. Melalui program ini pemerintah optimistis dampak negatif pandemi terhadap ekonomi Indonesia bisa ditekan. Di luar PEN, pemerintah juga merilis berbagai program pemberian bantuan dan subsidi, seperti subsidi listrik, Program Keluarga Harapan (PKH) kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT), subsidi kuota internet, Bantuan Langsung Tunai UMKM, Kartu Prakerja, insentif PPn rumah dan sebagainya.

Penurunan tingkat penyebaran virus corona yang diikuti dengan pengenduran pembatasan kegiatan masyarakat dan berbagai stimulus di bidang ekonomi, berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai indikator ekonomi, seperti mobilitas penduduk kembali tumbuh positif dan *Purchasing Managers Index (PMI)* manufaktur pun kembali ke level eksansif. Tak hanya itu, indikator berupa pengeluaran, konsumsi rumah tangga, investasi, maupun kinerja konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan. Sementara itu, kinerja ekspor tetap tinggi karena permintaan mitra dagang utama Indonesia tetap kuat.

Merujuk berbagai indikator itu, maka pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 masih bisa berada di kisaran 3,7-4,5 persen. Optimisme itu terjawab setelah BPS merilis data terbaru pada 7 Februari 2022, yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 tercatat sebesar 3,69%. Pencapaian ini sekaligus menandai lepasnya ekonomi Indonesia dari resesi.

In line with the policies to deal with the spread of the corona virus, the government has also issued various stimulus packages in the economic sector, including the National Economic Recovery Program (PEN). For 2021, the program funds will reach 744.7 trillion, an increase compared to the previous year, which reached IDR695.2 trillion. Through this program, the government is optimistic that the negative impact of the pandemic on the Indonesian economy can be suppressed. Apart from PEN, the government has also released various programs to provide assistance and subsidies, such as electricity subsidies, the Family Hope Program (PKH) for basic food cards, Village Fund Direct Assistance (BLT), internet quota subsidies, MSME Cash Direct Assistance, Pre-Employment Cards, VAT housing incentives and so on.

The decline in the spread of the corona virus, which was followed by the easing of restrictions on public activities and various stimulus in the economic sector, had a positive impact on Indonesia's economic growth. Various economic indicators, such as population mobility, returned to positive growth and the manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) returned to expansionary levels. Not only that, indicators in the form of spending, household consumption, investment, and government consumption performance also showed improvement. Meanwhile, export performance remains high as demand from Indonesia's main trading partners remains strong.

Referring to these various indicators, the government is optimistic that Indonesia's economic growth in 2021 can still be in the range of 3.7-4.5 percent. This optimism was answered after BPS released the latest data on February 7, 2022, which stated that Indonesia's economic growth in 2021 was recorded at 3.69%. This achievement also marks the release of the Indonesian economy from recession.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 2015-2021 Gross Domestic Product Growth (GDP) 2015-2021



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 7 Februari 2022
Source: BPS Statistics Official News, February 7, 2022

Kinerja Industri Penjaminan [GRI 103-1]

Dalam menyusun dan menghitung angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan setiap triwulan, BPS menggunakan 17 lapangan usaha atau sektor. Selama tahun 2021, tercatat 16 lapangan usaha yang mencatatkan pertumbuhan positif, dan 1 (satu) lapangan usaha terkontraksi yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Di antara 16 lapangan usaha yang tumbuh positif tersebut adalah Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi, termasuk di dalamnya industri penjaminan, yaitu tumbuh 1,56%. Walau tumbuh positif, namun pencapaian tersebut lebih rendah dibanding tahun 2020, yang pertumbuhannya mencapai 3,25%.

Guarantee Industry Performance [GRI 103-1]

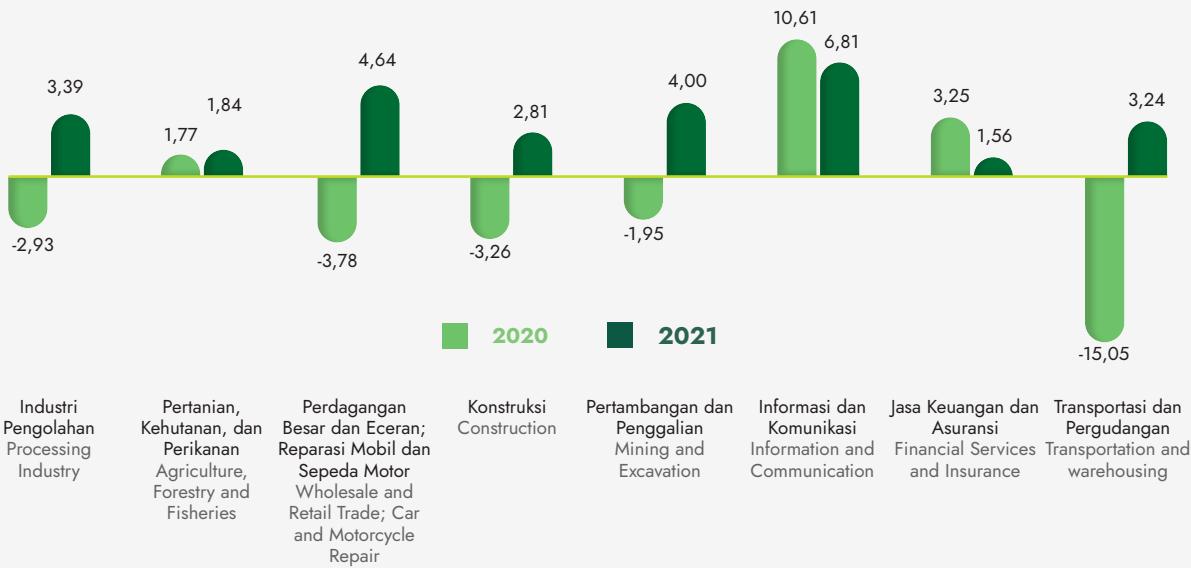
In compiling and calculating Indonesia's economic growth figures which are reported every quarter, BPS uses 17 business fields or sectors. During 2021, there were 16 business fields that recorded to have positive growth, and 1 (one) contracted business field, namely Government Administration, Defense and Mandatory Social Security. Among the 16 business fields that grew positively were the Financial Services and Insurance Business Fields, including the guarantee industry, which grew 1.56%. Despite positive growth, this achievement is lower than in 2020, where growth reached 3.25%.

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Menurut Lapangan Usaha

(64,92% PDB TAHUN 2021 Berasal dari Industri, Pertanian, Perdagangan, Konstruksi, dan Pertambangan)

Economic Growth in 2020 and 2021 by Business Field

(64.92% of GDP in 2021 will come from industry, agriculture, trade, construction and mining)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 7 Februari 2022

Source: BPS Statistics Official News, February 7th, 2022

Berkaitan dengan keberadaan Lembaga Penjamin di Indonesia, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, hingga akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 20 lembaga, yang terbagi menjadi 1 (satu) Perusahaan Penjamin BUMN, 18 Perusahaan Penjamin Daerah, dan 1 (satu) Perusahaan Penjamin Swasta. Sejalan dengan membaiknya perekonomian Indonesia, kinerja lembaga penjamin di Tanah Air menunjukkan tren positif. Total aset per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp32,45 triliun, naik 46,76% dibandingkan Desember 2020 yang mencapai Rp22,11 triliun.

Adapun Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih tercatat mengalami kenaikan sebesar 63,69% yaitu dari Rp2,89 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp4,73 triliun pada Desember 2021. Setelah dikurangi beban klaim, beban operasional, pajak dan sebagainya, total Laba (Rugi) bersih per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp607 miliar, atau naik 45,56% dibanding 31 Desember 2020 yang mencapai Rp417 miliar.

Sementara itu, total outstanding per Desember 2021 tercatat sebesar Rp219,77 triliun, turun 13,70% dibandingkan Desember 2020 yaitu sebesar Rp254,67 triliun. Dari jumlah itu, outstanding penjaminan-usaha produktif tahun 2021 mencapai 65,80%, naik dibandingkan persentase per Desember 2020, yang mencapai 60,39%. Penurunan juga terjadi terkait jumlah klaim dibayar, yaitu Rp7,05 triliun pada Desember 2020 menjadi Rp2,52 triliun pada Desember 2020 atau turun 64,24%. Khusus untuk jumlah terjamin, menurut data OJK, jumlahnya mengalami kenaikan 14,67%, yaitu dari 13.460.000 orang pada Desember 2020 menjadi 15.434.000 orang pada Desember 2021.

Menurut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), profil risiko industri penjaminan tahun 2021 adalah sedang dengan prospek yang stabil. Dari sisi pertumbuhan volume, prospek industri penjaminan tetap menjanjikan meskipun kredit perbankan

Linked to the existence of Guarantor Institutions in Indonesia, according to the official website of the Financial Services Authority, by the end of 2021 there were 20 institutions, which were divided into 1 (one) BUMN Guarantor Company, 18 Regional Guarantor Company, and 1 (one) Private Guarantor Company. In line with the improvement in the Indonesian economy, the performance of guarantee institutions in the country shows a positive trend. Total assets as of December 31, 2021 were recorded at IDR32.45 trillion, up 46.76% compared to December 2020 which reached IDR22.11 trillion.

The Net Guarantee Fee Income (IJP) recorded an increase of 63.69%, from IDR2.89 trillion in December 2020 to IDR4.73 trillion in December 2021. After deducting claims expense, operating expenses, taxes and so on, the total profit (Net loss as of December 31st, 2021 was recorded at IDR607 billion, or an increase of 45.56% compared to December 31st ,2020 which reached IDR417 billion).

Meanwhile, the outstanding total as of December 2021 was recorded at IDR219.77 trillion, decreased 13.70% compared to December 2020, which was IDR254.67 trillion. Of that amount, outstanding productive business guarantees in 2021 reached 65.80%, an increase compared to the percentage as of December 2020, which reached 60.39%. There was also a decrease in the number of claims paid, which was IDR7.05 trillion in December 2020 to IDR2.52 trillion in December 2020, a decrease of 64.24%. Specifically for the guaranteed number, according to OJK data, the number has increased by 14.67%, from 13,460,000 people in December 2020 to 15,434,000 people in December 2021.

According to PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), the risk profile of the guarantee industry in 2021 is moderate with a stable prospect. In terms of volume growth, the prospect of the guarantee industry remains promising despite the overall contraction in



secara keseluruhan mengalami kontraksi, termasuk segmen UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sebagaimana data OJK, Pefindo memprediksi penjaminan dari sektor produktif akan tetap dominan dengan kontribusi lebih dari 55 persen dari total volume penjaminan sejalan dengan fokus industri di segmen UMKM. Apalagi, percepatan pertumbuhan segmen UMKM produktif menjadi salah satu fokus pemerintah dalam program pemulihan pasca pandemi dimana industri penjaminan membantu kesinambungan aliran kredit untuk segmen tersebut.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menerapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada tahun 2020, pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha UMKM dan korporasi. Program penjaminan ini merupakan salah satu modalitas untuk memberikan stimulus pelaku usaha yang terdampak pandemi. Prosedur pemberian jaminan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.08/2020 (PMK 71/2020) untuk penjaminan kepada UMKM, dan PMK No. 98/PMK.08/2020 yang telah diubah dengan PMK 32/PMK08/2021 (PMK 98 /2020 jo. PMK 32/2021) untuk penjaminan kepada korporasi.

Merujuk hasil evaluasi terhadap Penjaminan Kredit Modal Kerja (KMK) PEN tahun 2021, pelaku usaha maupun perbankan merasakan manfaat dari program tersebut. Kementerian Keuangan menyebutkan program Penjaminan PEN gen 1 telah dimanfaatkan oleh 2.451.740 pelaku usaha UMKM dan 68 pelaku usaha korporasi dengan besaran kredit yang dijamin masing-masing sebesar Rp53,42 triliun dan Rp5,2 triliun. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program serupa pada tahun 2022. Penjaminan KMK PEN gen 2 ditargetkan dapat menyalurkan Rp26 triliun untuk UMKM dan Rp15 triliun untuk korporasi.

Kinerja Ekonomi Jamkrindo 2021

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, Jamkrindo telah menjaga *sustainability* (keberlangsungan) perusahaan melalui pertumbuhan volume dan peningkatan layanan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi (UMKM), baik langsung terhadap Terjamin maupun melalui Penerima Jaminan. Dalam perjalannya, pada tahun 2020, kinerja Perusahaan mengalami penurunan karena perekonomian Indonesia maupun global mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19 yang menyebar hampir keseluruh belahan dunia. Namun demikian, kondisi tersebut mulai mengalami perbaikan pada tahun 2021.

Dari tahun ke tahun, secara rata-rata, jumlah yang dijamin oleh Jamkrindo terus mengalami peningkatan signifikan. Kondisi ini mengharuskan Perusahaan untuk menerapkan strategi pemasaran dengan lebih selektif dalam hal mitra dan portofolio penjaminan agar dapat mengelola risiko penjaminan sesuai *Risk Appetite* Perusahaan. Di sisi lain, Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki sistem implementasi atau penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) pada setiap tahapan proses bisnis. Hal ini merupakan langkah-langkah yang terus dilakukan Perusahaan dalam rangka memitigasi risiko agar sampai pada tingkat yang bisa diterima perusahaan.

Berdasarkan kondisi faktual tersebut, Jamkrindo telah merumuskan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dengan tema atau sasaran strategi “*Accelerated Growth with Accountable Risk*”. Fokus Perusahaan pada tahun 2021 adalah

banking credit, including the MSME segment (Micro, Small and Medium Enterprises). As stated in OJK data, Pefindo predicts that guarantees from the productive sector will remain dominant with a contribution of more than 55 percent of the total guarantee volume in line with the industry's focus on the MSME segment. Moreover, accelerating the growth of the productive MSME segment is one of the government's focuses in the post-pandemic recovery program where the guarantee industry helps the continuity of credit flows for this segment.

In line with efforts to encourage economic growth, while at the same time implementing the National Economic Recovery Program (PEN), in 2020, the government launched a working capital credit guarantee program for MSMEs and corporations. This guarantee program is one of the modalities to provide stimulus for business owners affected by the pandemic. The procedure for granting guarantees is regulated by Minister of Finance Regulation No. 71/PMK.08/2020 (PMK 71/2020) for guarantees to MSMEs, and PMK No. 98/PMK.08/2020 which has been amended by PMK 32/PMK08/2021 (PMK 98/2020 in conjunction with PMK 32/2021) for guarantees to corporations.

Referring to the evaluation results of the 2021 PEN Working Capital Credit Guarantee (KMK), business actors and banks perceive the benefits of the program. The Ministry of Finance stated that the PEN Guarantee program gen 1 has been utilized by 2,451,740 MSME business actors and 68 corporate business actors with guaranteed loans amounting to IDR53.42 trillion and IDR5.2 trillion, respectively. Therefore, the government decided to continue a similar program in 2022. The KMK PEN guarantee gen 2 is targeted to be able to distribute IDR26 trillion for MSMEs and IDR15 trillion for corporations.

Jamkrindo Economic Performance in 2021

From 2015 to 2021, Jamkrindo has been maintaining the sustainability of the company through volume growth and increased services for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM), both directly to the Guaranteed and through the Guarantee Beneficiary. Along the way, in 2020, the Company's performance experienced a decline because the Indonesian and global economies experienced a slowdown due to the COVID-19 pandemic which spread to almost all parts of the world. However, these conditions began to improve in 2021.

From year to year, on average, the amount guaranteed by Jamkrindo continued to increase significantly. This condition requires the Company to implement a more selective marketing strategy in terms of partners and guarantee portfolios in order to manage insurance risk in accordance with the Company's Risk Appetite. On the other hand, the Company continuously improves the implementation system or the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) at every stage of the business process. These are the steps that the Company continues to take in order to mitigate risk so that it is acceptable level for the company.

*Based on these factual conditions, Jamkrindo has formulated the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) with the theme or strategy target of “*Accelerated Growth with Accountable Risk*”. The Company's focus in 2021 is to increase growth through*

meningkatkan pertumbuhan melalui pengelolaan pemasaran dan risiko yang efektif dan seimbang. Lebih lanjut, pada tahun pelaporan, Perusahaan memiliki strategi untuk optimalisasi sinergi BUMN, penguatan integrasi proses dengan mitra (terutama e-subrogasi), dan inisiasi layanan UMKMK Consultancy. [GRI 103-2]

Untuk dapat meningkatkan potensi produk penjaminan, Jamkrindo juga memperluas jangkauan pelayanannya melalui integrasi dengan *Holding*, mengoptimalkan *brand preference* di mata pelanggan sebagai anggota *Holding*, serta Perusahaan pun masih memiliki kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) yang cukup besar dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. *Gearing ratio* Perusahaan pada posisi 31 Desember 2021 yaitu untuk produktif sebesar 10,98x dari maksimal 20x dan *gearing ratio* total sebesar 15,47x dari maksimal 40x. [GRI 103-2]

Selama tahun 2021, manajemen Jamkrindo telah melakukan sosialisasi dan bersinergi dengan seluruh jajaran untuk menerapkan berbagai kebijakan strategis yang telah disepakati. Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya dan komitmen Perusahaan dalam membangun budaya keberlanjutan. Komitmen dan kesungguhan seluruh insan Jamkrindo untuk memberikan kontribusi terbaik berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan. Hal itu ditunjukkan dengan terwujudnya peningkatan kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kinerja ekonomi selengkapnya pada tahun pelaporan disampaikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3][OJK F.1, F.2]

effective and balanced marketing and risk management. Furthermore, in the reporting year, the Company has a strategy for optimizing SOE synergy, strengthening process integration with partners (especially e-subrogation), and initiating MSMEK Consultancy services. [GRI 103-2]

Increasing the potential of guarantee products, Jamkrindo also expands its service range through integration with Holding, optimizing brand preference in the eyes of customers as members of Holding, and the Company still has a fairly large gearing ratio compared to other similar companies. The Company's gearing ratio is at the position of December 31, 2021, which is for productive 10.98x from a maximum of 20x and a total gearing ratio of 15.47x from a maximum of 40x. [GRI 103-2]

During 2021, Jamkrindo's management has carried out socialization and synergized with all levels to implement various agreed strategic policies. The policy is carried out at the same time as the Company's efforts and commitment in building a culture of sustainability. The commitment and sincerity of all Jamkrindo personnel to provide the best contribution has a positive impact on the Company's performance. This is shown by the realization of an increase in performance in 2021 compared to the previous year. The complete economic performance in the reporting year is presented in the following table: [GRI 103-3][OJK F.1, F.2]

Tabel Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2019-2021
Consolidated Profit (Loss) Statement Table Year 2019-2021

	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	2019
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income			
Imbal jasa penjaminan <i>Guarantee Fee</i>	4.361.915	2.826.524	2.313.611
Imbal jasa kafalah <i>Kafalah fee</i>	959.276	500.292	331.501
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan <i>Increase in unearned Kafalah fee</i>	(186.986)	(140.126)	(88.315)
Premi penjaminan ulang <i>Re-guarantee Premium</i>	(840.364)	(553.297)	(404.725)
Imbal jasa penjaminan bersih <i>Guarantee fee - net</i>	4.293.841	2.633.393	2.152.072
Beban Penjaminan Guarantee Expense			
Beban klaim <i>Claim expenses</i>	2.546.951	2.180.243	2.204.814
Klaim penjaminan ulang <i>Re-guarantee claim</i>	(534.449)	(372.871)	(408.432)
Beban ujrah <i>Ujrah Expenses</i>	42.902	32.224	25.427
Biaya kafalah lainnya <i>Other Kafalah Expenses</i>	1.355	216	0
Kenaikan cadangan klaim <i>Increase in claim reserves</i>	1.286.851	527.290	435.083
Pendapatan subrogasi - bersih <i>Subrogation Income – Net</i>	(577.156)	(518.767)	(504.806)
Pendapatan ujrah penjaminan ulang <i>Re-guarantee Ujrah Income</i>	(28.693)	(17.935)	(14.127)



Tabel Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian Tahun 2019-2021
Consolidated Profit (Loss) Statement Table Year 2019-2021

	2021 (Rp-juta)	2020 (Rp-juta)	2019
Jumlah Beban Klaim <i>Total Claim Expenses</i>	2.737.761	1.830.400	1.737.959
Penjaminan Bersih <i>Guarantee - Net</i>	1.556.080	802.993	414.113
Komisi – Bersih <i>Commission - Net</i>	6.791	(27.195)	(48.138)
Pendapatan Investasi - Bersih <i>Investment Income - Net</i>	735.428	799.211	782.810
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(977.748)	(903.670)	(991.759)
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	16.820	51.130	24.612
Laba Sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	1.337.371	722.469	181.638
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	(113.178)	(118.307)	(139.147)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan <i>Profit before tax</i>	1.224.193	604.162	42.491
Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan <i>(Expense)The Benefit of Income Tax</i>	(158.185)	(148.029)	156.420
Laba Bersih Tahun Berjalan <i>Net Profit for the Year</i>	1.066.008	456.133	198.911

Selanjutnya, Jamkrindo telah memetakan antara target dan pencapaian RKAP 2021 sebagaimana tabel berikut: [GRI 103-3] [OJK F.1, F.2]

Furthermore, Jamkrindo has mapped the target and achievement of the 2021 RKAP as shown in the following table: [GRI 103-3] [OJK F.1, F.2]

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019-2021 (dalam jutaan Rupiah)
Table of Comparison of Targets and Realizations for 2019-2021 (in IDR - Million)

Uraian <i>Description</i>	2021			2020		2019	
	RKAP 2021 <i>RKAP year 2021</i>	Realisasi <i>Realization</i>	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>	RKAP 2020 <i>RKAP Year 2020</i>	Realisasi <i>Realization</i>	RKAP 2019 <i>RKAP year 2019</i>	Realisasi <i>Realization</i>
Jumlah Pendapatan Penjaminan <i>Total Guarantee Revenue</i>	3.685.142	4.293.841	116,52%	2.177.498	2.633.393	1.615.953	2.104.732
Beban Klaim <i>Claim Expense</i>	(2.274.376)	(2.546.951)	111,98%	(1.182.858)	(2.180.243)	(653.278)	(1.309.531)
Pendapatan Penjaminan Bersih <i>Pendapatan Penjaminan Bersih</i>	1.410.766	1.556.080	110,30%	994.641	802.993	962.675	795.201
Pendapatan Investasi Bersih <i>Net Investment Revenue</i>	752.793	735.428	97,69%	524.272	799.211	746.482	782.810
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(1.352.938)	(977.748)	72,27%	(821.201)	(903.670)	(993.995)	(809.813)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih <i>Other Income (Expenses) - Net</i>	15.753	16.820	106,77%	(259.349)	51.130	(1.174)	(2.484)
Laba sebelum Pajak <i>Profit before tax</i>	826.374	1.337.371	161,84%	438.364	722.469	713.989	765.714
Laba Tahun Berjalan <i>Profit for the Year</i>	575.029	1.066.008	185,38%	327.881	456.133	591.936	625.779

Uraian selengkapnya tentang kinerja ekonomi tahun 2021 disampaikan dalam Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Laporan Tahunan Perusahaan Tahun 2021 halaman 150.

Adapun perbandingan antara target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diminta dalam POJK Keuangan Berkelanjutan, Jamkrindo belum bisa menyampaikan dalam laporan ini karena belum tersedia datanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan pada laporan tahun 2024 pada saat Jamkrindo secara resmi terkena kewajiban untuk menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan. [OJK F.3]

Distribusi Nilai Ekonomi

Berdasarkan kinerja Jamkrindo di atas, maka bisa disampaikan mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, nilai ekonomi yang didistribusikan, dan nilai ekonomi yang ditahan tahun 2021. Nilai ekonomi yang dihasilkan adalah manfaat ekonomi yang diperoleh selama Perusahaan menjalankan usaha, misalnya imbalan jasa penjaminan bersih, pendapatan investasi, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan adalah manfaat ekonomi yang diberikan Perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti beban klaim, beban usaha, beban pajak, dividen, pembayaran untuk pemasok, maupun realisasi dana untuk program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJLS BUMN). Adapun nilai ekonomi yang ditahan adalah manfaat ekonomi yang disimpan Perusahaan yang diperoleh dari pengurangan nilai ekonomi yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi yang didistribusikan yang digunakan untuk pengembangan usaha. Distribusi nilai ekonomi selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 201-1]

A complete description of the economic performance in 2021 is presented in the Management Discussion and Analysis Chapter of the Company's 2021 Annual Report page 150.

As for the comparison between targets and portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are in line with the implementation of Sustainable Finance, as requested in the POJK on Sustainable Finance, because the data is not yet available. More information will be provided in the 2024 report when Jamkrindo is officially required to implement the POJK on Sustainable Finance. [OJK F.3]

Economic Value Distribution

Based on Jamkrindo's performance above, it can be conveyed regarding the direct economic value generated, the distributed economic value, and the retained economic value in 2021. The resulting economic value is the economic benefits obtained during the Company's running of business, for example net guarantee fees, income investment and other income. Meanwhile, the economic value distributed is the economic benefits provided by the Company to stakeholders, such as claims expense, operating expenses, tax expense, dividends, payments to suppliers, as well as the realization of funds for the Social and Environmental Responsibility program of State-Owned Enterprises (TJLS BUMN). The retained economic value is the economic benefit saved by the Company which is obtained from the deduction of the resulting economic value minus the distributed economic value which is used for business development. The full distribution of economic values is presented in the following table: [GRI 103-3, 201-1]

Tabel Distribusi Ekonomi Tahun 2019-2021 (dalam Jutaan Rupiah)
Economic Distribution Table Year 2019-2021 (in IDR - Million)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan <i>Direct Economic Value Generated</i>			
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee Service fee</i>	4.293.841	2.633.393	2.152.072
Pendapatan Investasi-Bersih <i>Net Investment Income</i>	735.428	799.211	782.810
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	16.820	51.130	24.612
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan <i>Direct Economic Value Generated</i>	5.046.089	3.483.734	2.959.494
Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan <i>Distributed Direct Economic Value</i>			
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	(2.737.761)	(1.830.400)	(1.737.959)
Beban Usaha, termasuk di dalamnya Beban Sumber Daya Manusia <i>Operational Expenses, including Human Resources Expense</i>	(977.748)	(903.670)	(436.882)
Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i>	(113.178)	(118.307)	(139.147)
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income Tax Benefit (Expense)</i>	(158.185)	(148.029)	156.420
Pembayaran kepada Masyarakat Melalui TJSL BUMN (d.h.PKBL) <i>Payments to the Community through TJSL BUMN (formerly known as PKBL)</i>	(11.624)	(16.261)	(10.434)
Pembayaran Dividen <i>Dividend Payment</i>	(342.100)	(400.000)	(39.754)



Tabel Distribusi Ekonomi Tahun 2019-2021 (dalam Jutaan Rupiah)
Economic Distribution Table Year 2019-2021 (in IDR - Million)

Uraian Description	2021	2020*	2019*
Jumlah Nilai Ekonomi Langsung yang Didistribusikan <i>Total Direct Economic Value Distributed</i>	(4.340.596)	(3.416.667)	(2.207.756)
Nilai Ekonomi yang Ditahan <i>Retained Economic Value</i>	705.493	337.067	751.738

*disajikan kembali
*restated

Kontribusi kepada Pemerintah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Jamkrindo berkomitmen untuk ikut andil mendukung program pemerintah. Salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara adalah memenuhi kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dengan membayar pajak secara tepat waktu. Berikut adalah rincian pembayaran pajak kepada negara selengkapnya:

Contribution to Government

Taxes have a very important role in running a country, especially in the implementation of development because taxes are a source of country income to finance all expenditures including development expenditures. On the other hand, taxes are also very important in regulating economic growth through tax policies. In line with this, Jamkrindo is committed to taking part in supporting government programs. One form of the company's contribution to the state is to fulfill the company's obligations as a taxpayer by paying taxes on time. The following is a breakdown of tax payments to the country in details:

Tabel Pembayaran Pajak Tahun 2019-2021 (dalam Jutaan Rupiah)
Tax Payment Table for 2019 – 2021 (in IDR - Million)

Jenis Pajak Tax Type	2021	2020	2019
Pajak Kini <i>Current Tax</i>	493.599	143.691	17.965
Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax</i>	(335.414)	4.338	(174.385)
Jumlah Amount	158.185	148.029	(156.420)

Imbalan Pasca Kerja

Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi semua regulasi dalam menjalankan usaha, termasuk regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan pemenuhan hak karyawan berkaitan dengan imbalan pascakerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membuka imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [GRI 103-1, 103-2]

Post-Employment Rewards

Jamkrindo is committed to complying with all regulations in running a business, including regulations related to employment. One of them is the fulfillment of employee rights related to post-employment benefits/retirement plans. In this case, the Company has enrolled its employees into pension programs, namely the Employee Welfare Insurance Program and the Employee Welfare Program through the Financial Institution Pension Fund (DPLK). In addition to the pension plan, the Company also records defined benefit post-employment benefits for employees in accordance with the Manpower Act, which was amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. [GRI 103-1, 103-2]

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti di mana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

A defined benefit pension plan is a pension plan that determines the amount of pension benefit to be provided, usually based on one or more factors such as age, years of service or compensation. In addition to the defined benefit pension plan, the Company also has a defined contribution plan in which the Company pays contributions which are calculated based on a certain percentage of the employees' basic salary to a pension insurance program organized by a financial institution pension fund. Contributions are charged to the income statement when owed.

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

1. Program JHT sebesar $30 \times$ gaji karyawan;
2. Program THT sebesar $2,5\% \times$ masa kerja \times gaji karyawan.

Pendanaan program pensiun dilakukan oleh Perusahaan dan karyawan dengan membayar iuran bulanan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan sisanya 6,6% ditanggung Perusahaan.

Pada tahun 2021, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp11,42 miliar, naik dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp8,92 miliar. [GRI 103-3, 201-3]

Kebijakan Antikorupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang harus diberantas bersama-sama. Oleh karena itu, ketegasan sikap antikorupsi perlu dikukuhkan karena korupsi bersifat sistemik serta berdampak sangat luas bagi keuangan negara, sekaligus melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Sebagai korporasi yang menjunjung tinggi integritas, Jamkrindo berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi. Komitmen ini sejalan dengan program pemerintah dan berbagai regulasi yang mengikat individu maupun entitas bisnis di Indonesia terkait tindakan korupsi dan gratifikasi. Perusahaan menekankan pentingnya antikorupsi dan anti gratifikasi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. [GRI 103-1]

Komitmen Jamkrindo terhadap praktik antikorupsi dikuatkan dengan melalui berbagai kebijakan, di antaranya mengadopsi Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI 37001 : 2016 *Anti Bribery System*, Peraturan Direksi tentang *Due Diligence*, Penundaan Transaksi Bisnis, *Anti Fraud*, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta menerapkan *Whistleblowing System*. [GRI 103-2]

Selanjutnya, untuk mendukung dan mewujudkan lingkungan usaha yang bersih, Perusahaan juga mendorong dan mengajak mitra strategis untuk menyepakati adanya klausul pasal tambahan tentang gratifikasi, anti penyuapan, antikorupsi dan anti pencucian uang sebagai bagian kesepakatan Para Pihak dalam penyusunan dan pembaruan Kerja Sama Penjaminan maupun dalam Perjanjian Kontrak dengan mitra penyedia barang dan jasa ke Perusahaan. Kebijakan dan langkah ini diambil dalam rangka mendorong seluruh *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi, gratifikasi, dan anti penyuapan. Untuk menambah pengetahuan dan peningkatan kompetensi terkait antikorupsi, Perusahaan juga memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan Jamkrindo untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan antikorupsi, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal, di antaranya:

1. Pelatihan Antikorupsi Batch 1: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan serta Pencegahannya.
2. Pelatihan Antikorupsi Batch 2: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan serta Pencegahannya.
3. Pelatihan Antikorupsi Batch 3: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan serta Pencegahannya.
4. Pelatihan Antikorupsi Batch 4: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan serta Pencegahannya.
5. Webinar Pencegahan Korupsi.
6. Pelatihan Lanjutan SPI BUMN 2021 : E-Learning Antikorupsi dan Integritas Umum.

The benefits to be obtained from the defined benefit pension plan are as follows:

1. *JHT program of $30 \times$ employee salary;*
2. *The THT program is $2.5\% \times$ years of service \times employee salaries.*

The pension plan is funded by the Company and employees by paying monthly contributions. The funding contribution is 4.4% of the employees' basic salary and the remaining 6.6% is borne by the Company.

In 2021, the Estimated Expenses for Post-Employment Benefits were recorded at IDR11.42 billion, an increase compared to 2020 which reached IDR8.92 billion. [GRI 103-3, 201-3]

Anti-Corruption Policy

Corruption is an extraordinary crime that must be eradicated together. Therefore, the firmness of the anti-corruption stance needs to be strengthened because corruption is systemic and has a very broad impact on state finances, as well as violates the social and economic rights of the wider community. As a corporation that upholds integrity, Jamkrindo is committed to preventing and eradicating corruption. This commitment is in line with government programs and various regulations that bind individuals and business entities in Indonesia regarding acts of corruption and gratification. The Company emphasizes the importance of anti-corruption and anti-gratification as a fundamental effort to implement the principles of Good Corporate Governance. [GRI 103-1]

Jamkrindo's commitment to anti-corruption practices is strengthened through various policies, including adopting the Anti-Bribery Management System Certification (SMAP) based on SNI 37001: 2016 Anti Bribery System, Board of Directors Regulations concerning Due Diligence, Postponement of Business Transactions, Anti Fraud, establishing a Gratification Control Unit (UPG), as well as implementing the Whistleblowing System. [GRI 103-2]

Furthermore, to support and create a clean business environment, the Company also encourages and invites strategic partners to agree on additional clauses on gratification, anti-bribery, anti-corruption and anti-money laundering as part of the agreement of the Parties in the preparation and renewal of Guarantee Cooperation as well as in Contract Agreement with partners providing goods and services to the Company. These policies and measures are taken in order to encourage all stakeholders to actively participate in preventing corruption, gratification and anti-bribery. To increase knowledge and competence related to anti-corruption, the Company also provides opportunities for the management and employees of Jamkrindo to take part in anti-corruption training and education, both internally and externally, including:

1. *Batch 1 Anti-Corruption Training: Recognizing and Understanding Corruption in Financial Services Sector SOEs and its Prevention.*
2. *Batch 2 Anti-Corruption Training: Recognizing and Understanding Corruption in Financial Services Sector SOEs and its Prevention.*
3. *Batch 3 Anti-Corruption Training: Recognizing and Understanding Corruption in Financial Services Sector SOEs and its Prevention.*
4. *Batch 4 Anti-Corruption Training: Recognizing and Understanding Corruption in Financial Services Sector SOEs and its Prevention.*
5. *Corruption Prevention Webinar.*
6. *2021 SOEs SPI Advanced Training : Anti-Corruption and General Integrity E-Learning.*



Komitmen dan kesungguhan insan Jamkrindo terhadap antikorupsi membawa hasil dengan tidak adanya insiden korupsi yang terbukti selama tahun pelaporan. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengambil tindakan tertentu, seperti menghentikan karyawan yang terbukti melakukan korupsi, atau menghentikan kontrak dengan mitra bisnis karena pelanggaran kasus korupsi. [GRI 103-3, 205-3]

Bersaing Sehat

Persaingan usaha merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha, termasuk di industri penjaminan. Bagi nasabah/konsumen, kondisi tersebut memberi keuntungan karena mereka bisa memilih perusahaan terbaik. Sementara itu, bagi pelaku usaha, persaingan akan membuat mereka terus berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik dan sesuai dengan harapan konsumen. [GRI 103-1]

Dalam menghadapi persaingan yang kian ketat, sekaligus untuk memenangkan persaingan, Jamkrindo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan jasa, dan menentang praktik monopoli dan *trust*. Dalam hal ini, Perusahaan berprinsip bahwa persaingan sehat merupakan salah satu cara untuk mempromosikan efisiensi ekonomi untuk menuju pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Perusahaan menjauhi persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/atau pemasaran produk dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. [GRI 103-2]

Jamkrindo mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komitmen segenap insan Perusahaan untuk menegakkan persaingan sehat membawa hasil dengan tidak adanya tindakan hukum atau sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang berwenang menangani dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada tahun 2021. [GRI 103-3, 206-1]

The commitment and sincerity of Jamkrindo's employee towards anti-corruption has resulted in no proven incidents of corruption during the reporting year. Thus, the Company does not take certain actions, such as terminating employees who are proven to have committed corruption, or terminating contracts with business partners due to violations of corruption cases. [GRI 103-3, 205-3]

Healthy Competition

Business competition is common in the business sector, including the insurance industry. For customers/consumers, this condition is benefitting because they can choose the best company. Meanwhile, for business actors, competition will make them continue to strive to provide the best results and in accordance with consumer expectations. [GRI 103-1]

In the face of increasingly fierce competition, as well as to win the competition, Jamkrindo is committed to continuously improving the quality of its products and services, and against monopolistic practices and trust. In this regard, the Company has the principle that fair competition is one way to promote economic efficiency towards sustainable development. On the other hand, the Company stays away from unfair business competition, namely competition between business actors in carrying out activities and/or marketing of products and services that are carried out dishonestly or against the law or hinder business competition. [GRI 103-2]

Jamkrindo supports the principles of fair business competition in accordance with applicable laws and regulations, among others, Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The commitment of all Company personnel to enforce fair competition has resulted in no legal action or sanctions from the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the authority authorized to handle allegations of monopolistic practices and or unfair business competition in 2021. [GRI 103-3, 206-1]

KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

*SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL
PERFORMANCE*





KINERJA LINGKUNGAN KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

Kelestarian lingkungan menjadi isu global yang menuntut perhatian bersama, termasuk Indonesia. Isu tersebut mengemuka sejalan dengan kerusakan lingkungan yang timbul akibat penerapan paradigma lama dalam membangun, yaitu mengedepankan aspek ekonomi, dan cenderung abai terhadap aspek lingkungan dan sosial. Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tersebut memicu terjadinya bencana ekologis sehingga korban jiwa dan kerugian material tak bisa dielakkan. Di sisi lain, di saat kemajuan ekonomi tercapai, justru ketimpangan sosial tercipta. [GRI 103-1]

Secara khusus, untuk mengurangi dampak buruk akibat kerusakan lingkungan, sekaligus memperkuat daya dukung lingkungan, maka seruan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pun mengemuka. Tak hanya pemerintah, pemangku kepentingan yang lain, termasuk korporasi, dituntut untuk berkontribusi dalam penanganan masalah tersebut. Berkaitan dengan penanganan tersebut, paradigma lama dalam membangun kemudian diganti dengan paradigma baru, yaitu pembangunan yang menyelaraskan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial, yang kemudian dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan itu, dalam upaya menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pembangunan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. [GRI 103-2]

Era Baru Keuangan Berkelanjutan

Pentingnya lembaga jasa keuangan memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan merupakan concern Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non bank, termasuk perusahaan penjaminan. Hal itu diwujudkan dengan terbitnya *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* di Indonesia 2015-2019 oleh OJK. Sebagai kelanjutan *roadmap* tersebut, lembaga yang sama menerbitkan *Roadmap Keuangan Berkelanjutan* di Indonesia 2021-2025. Keberadaan *roadmap* tersebut sangat penting karena memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi upaya internalisasi lingkungan hidup dan pengarusutamaan lingkungan hidup bagi lembaga jasa keuangan.

Environmental sustainability is a global issue that demands our mutual attention, including Indonesia. The issue came up in line with the environmental damage that had arisen as a result of the old paradigm application in constructing, namely prioritizing the economic aspect, and tending to ignore environmental and social aspects. In many cases, the environmental damage triggers the occurrence of ecological disasters so that loss of life and material losses are inevitable. On the other hand, when economic progress is achieved, social inequality is created. [GRI 103-1]

In particular, reducing the negative impact of environmental damage, as well as to strengthen the environment support potency, a call for the importance of preserving the environment is called out. Not only the government, other stakeholders, including corporations, are required to contribute in handling these problems. In this regard, the old paradigm in constructing was then replaced with a new paradigm, namely development that harmonizes economic, environmental and social aspects, which became known as sustainable development.

Preserving the environment, while at the same time actualized the sustainable development, Indonesia already carries various regulations, including Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. In line with that, in an effort to balance the economic, environmental, and social aspects of development in Indonesia, the Financial Service Authority issued the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies or POJK Sustainable Finance. [GRI 103-2]

A New Era of Sustainable Finance

The importance of financial service institutions' concern in environmental issues is a concern of the Financial Services Authority (OJK) as a state institution whose function is to organize an integrated regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector, both in the banking sector, capital market, and non-banks financial services sector, including guarantee companies. This was realized by the publication of the 2015-2019 Sustainable Finance Roadmap in Indonesia by the OJK. As a continuation of the roadmap, the same institution issued a Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia 2021-2025. The existence of the roadmap is crucial because it provides clear guidelines and directions for efforts to internalize the environment and accentuate the environment for financial service institutions.



Sejalan dengan *roadmap* tersebut, pada tahun 2017, OJK menerbitkan POJK Keuangan Berkelanjutan. Bagi emiten, termasuk Jamkrindo, peraturan ini berlaku per 1 Januari 2021 setelah ditunda setahun oleh OJK melalui kebijakan relaksasi karena terjadi pandemi COVID-19 berkepanjangan. Dengan peraturan ini, maka lembaga penjaminan sebagai bagian dari lembaga jasa keuangan wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *sustainable finance*. Keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Penerapan keuangan berkelanjutan diperlukan sebagai modal penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

OJK menyebutkan, *sustainable finance* memiliki lima dimensi, yaitu pencapaian keunggulan industri, sosial, dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan pemberian dukungan pada pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan Indonesia 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*).

Penerapan *sustainable finance* merupakan bentuk dukungan industri penjaminan terhadap Perjanjian Paris (Paris Agreement) yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Piagam Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim diserahkan oleh Wakil Tetap RI pada PBB di New York pada 31 Oktober 2016. Perjanjian Paris adalah komitmen warga dunia untuk menahan laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C guna mengurangi risiko dan dampak merugikan akibat perubahan iklim. Komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim.

Landsan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan [GRI 103-2]

Komitmen Jamkrindo terhadap pengelolaan lingkungan merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di bidang lingkungan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, beserta peraturan-peraturan turunannya, antara lain:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

In line with the roadmap, in 2017, OJK issued the POJK on Sustainable Finance. For the issuers, including Jamkrindo, this regulation is effective as of January 1, 2021 after being postponed for a year by the OJK through a relaxation policy due to the prolonged COVID-19 pandemic. With this regulation, guarantee institutions as part of financial service institutions are required to apply sustainable finance principles. Sustainable finance is defined as the overall support of the financial services industry for sustainable growth resulting from the alignment of economic, social and environmental interests. The implementation of sustainable finance is needed as an important capital to realize sustainable development.

OJK stated that sustainable finance has five dimensions, namely the achievement of industrial, social and economic excellence in order to reduce the threat of global warming and prevent other environmental and social problems; shifting targets towards a competitive low-carbon economy; Commendation of environmentally friendly investment in various business/economic sectors; and providing support for the implementation of Indonesia's 4P development principles (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, and pro-environment*)

The implementation of sustainable finance is a form of guarantee industry's support for the Paris Agreement which has been signed by the Indonesian government. The Charter of Paris Agreement Ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change was handed over by the Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations in New York on October 31, 2016. The Paris Agreement is a commitment by the world's citizens to curb the rate of increase in the global average temperature below 2°C in order to reduce risks and the adverse impacts of climate change. Indonesia's commitment to the Paris Agreement was realized by the issuance of Law No. 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Environmental Management Policy Foundation [GRI 103-2]

Jamkrindo's commitment to environmental management refers to various regulations that apply in the environmental field, in the form of laws, government regulations, ministerial regulations, and their derivative regulations, including:

1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
2. Law of the Republic of Indonesia No. 30 of 2007 concerning Energy;
3. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
4. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste;
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
6. Government Regulation No. 20 of 1990 concerning Water Pollution Control;
7. Government Regulation No. 74 of 2001 concerning Management of Hazardous and Toxic Materials;
8. Instruction of the President of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Savings;

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik.

Selanjutnya, dari berbagai regulasi tersebut, Jamkrindo menerbitkan regulasi internal berkaitan dengan lingkungan, antara lain berupa Memorandum Divisi MSDM No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 terkait Program Jamkrindo Go Green Lifestyle.

Komitmen Jamkrindo terhadap Lingkungan [GRI 103-2]

Sebagai bagian dari dunia usaha, sekaligus salah satu pemangku kepentingan di Tanah Air, Jamkrindo berkomitmen untuk turut menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan daya dukung lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini dipegang karena Perseroan meyakini bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komitmen terhadap lingkungan, antara lain, diterapkan melalui program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya dalam bingkai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) melalui pos bantuan pelestarian alam, bantuan peningkatan kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan melalui operasional perusahaan yang ramah lingkungan, antara lain, melakukan efisiensi dalam penggunaan kertas, energi, air, serta mengelola emisi dan limbah dengan sebaik-baiknya. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, Perseroan berpedoman pada prinsip 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*).

Pengelolaan Bahan Baku/Material Kertas

Kertas merupakan salah satu kebutuhan bahan baku atau material penting dalam operasional Jamkrindo. Kertas digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, surat-menjurut, mencetak dokumen, transaksi nasabah, dan sebagainya. Perseroan menyadari bahwa bahan baku kertas adalah pohon yang diolah menjadi bubur kertas. Dengan demikian, semakin banyak menggunakan kertas, otomatis akan sejalan dengan penambahan pohon yang ditebang sebagai bahan baku kertas. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan latar belakang seperti itu, maka Jamkrindo berupaya secara konsisten untuk mengurangi penggunaan kertas. [GRI 103-1]

Langkah efisiensi penggunaan kertas dilakukan Jamkrindo melalui berbagai kebijakan sebagai berikut: [GRI 103-2, 103-3]

1. Penggunaan teknologi informasi (*e-mail*) dalam menyampaikan informasi;
2. Pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat;
3. Mencetak naskah *draft* dalam kertas bolak-balik;
4. Melakukan pengecekan naskah secara optimal sebelum dicetak sehingga tidak perlu mencetak ulang akibat ada kesalahan dalam penulisan.

9. Decree of the State Minister of the Environment No. 111 of 2003 concerning Guidelines for Requirements and Procedures for Licensing and Guidelines for the Study of Disposal of Wastewater into Water or Water Sources;
10. Regulation of the State Minister of the Environment No. 01 of 2010 concerning Water Pollution Control Management;
11. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Savings in the Use of Electricity.

Furthermore, from these various regulations, Jamkrindo issued internal regulations related to the environment, among others in the form of Memorandum of the HR Division No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 related to the Jamkrindo Go Green Lifestyle Program.

Jamkrindo's Commitment to the Environment [GRI 103-2]

As part of the business world, as well as one of the stakeholders in the country, Jamkrindo is committed to taking part in preserving the environment and increasing the carrying capacity of the environment in order to realize sustainable development. This commitment is held because the Company believes that a good and healthy environment is a human right of every Indonesian citizen, as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Being committed to environment, among others, is implemented through the Assistance and/or Other Activities program within the framework of the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises (TJSL BUMN) through postal assistance for nature conservation, health improvement assistance, and so on. In addition, environmental care is also carried out through eco-friendly company operations, among others, paper usage efficiency, energy, water, and managing emissions and waste as well as possible. Implementing this policy, the Company is guided by the 3R principle (*Reduce, Reuse, and Recycle*).

Management of Raw Materials/Paper Materials

Paper is one of the raw materials needed or important materials in Jamkrindo's operations. Paper is used for various administrative purposes, correspondence, printing documents, customer transactions, and so on. The Company realizes that the raw material for paper is trees which are processed into pulp. Thus, the more use of paper, it will automatically be in line with the addition of felled trees as paper raw materials. Vice versa, Based on such a background, Jamkrindo strives consistently in reducing paper usage. [GRI 103-1]

Jamkrindo has taken an action to use paper efficiently through the following policies: [GRI 103-2, 103-3]

1. Use of *e-mail* in conveying information;
2. Utilization of used paper for letter drafts;
3. Print the draft text on paper back and forth;
4. Checking the script optimally before printing so it doesn't need to be reprinted due to a writing error.



Per 31 Desember 2021, volume kertas yang digunakan Jamkrindo tercatat sebanyak 935 rim, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 1.185 rim. Penurunan terjadi seiring dengan optimalnya penggunaan e-office. [GRI 103-3, 301-1]

As of December 31, 2021, the volume of paper used by Jamkrindo was recorded at 935 reams, a decrease compared to 2020 which reached 1,185 reams. The decline occurred in line with the optimal use of e-office. [GRI 103-3, 301-1]

Tabel Volume Penggunaan Kertas 2019-2021
Table of Paper Usage Volume 2019-2021

Tahun Year	A4		F4	
	Rim Reams	Berat (kg) Weight (kg)	Rim Reams	Berat (kg) Weight (kg)
2021	905	1.973	30	73
2020	1.150	2.507	35	85,05
2019	1.1000	2.398	50	121,5

Catatan:

1. Kertas A4 (A4 Paper)
 - a. Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran A4, berat 70gsm (gram square meter)
 - b. Ukuran kertas A4 = 21,0 x 29,7 cm
 - c. Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21,0 \times 29,7 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.183$ gram/rim atau 2,18 kg/rim
2. Kertas F4
 - a. Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran F4, berat 70gsm (gram square meter)
 - b. Ukuran kertas F4 = 21 x 33 cm
 - c. Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.425,5$ gram/rim atau 2,43 kg/rim

Dari penggunaan kertas di atas, Jamkrindo menghasilkan limbah kertas bekas. Untuk pengelolaan limbah tersebut, Perseroan menyerahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Adapun dokumen yang isinya rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain, maka dokumen tersebut akan dihancurkan dengan mesin penghancur kertas terlebih dulu. Walau menggunakan material kertas yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan, Jamkrindo tidak menggunakan hasil kertas daur ulang tersebut dalam operasional sehari-hari. [OJK F.5]

Note:

1. A4 Paper
 - a. Assuming the type of paper used is A4, weight 70gsm (gram square meter)
 - b. A4 paper size = 21.0 x 29.7 cm
 - c. The formula for calculating weight per ream (500 sheets) is $21.0 \times 29.7 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2.183$ grams/ream or 2.18 kg/rim
2. Paper F4
 - a. Assuming the type of paper used is F4, weight 70gsm (gram square meter)
 - b. Paper size F4 = 21 x 33 cm
 - c. The formula for calculating weight per ream (500 sheets) is $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2,425.5$ grams/ream or 2.43 kg/rim

From the use of the above paper, Jamkrindo produces waste paper. For the management of such waste, the Company submits it to a third party for recycling or reuse. As for documents whose contents are confidential and may not be known by other parties, then the document will be designed in advance with a paper shredder first. Although using paper materials that are recyclable and environmentally friendly, Jamkrindo does not use the recycled paper in its daily operations. [OJK F.5]

Pengelolaan Energi

Dalam menjalankan operasional usaha, Jamkrindo memanfaatkan dua sumber energi utama, yaitu listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Selain sebagai sumber penerangan, listrik digunakan sebagai sumber energi berbagai sarana dan prasarana peralatan elektronik perkantoran, seperti mesin AC, fotokopi, lift, personal computer, laptop, televisi, dan lain-lain. [GRI 103-1]

Perseroan menyadari bahwa ketersediaan listrik saat ini masih belum tersebar merata di seluruh Indonesia. Hal itu terjadi karena listrik yang saat ini tersedia sebagian besar masih memanfaatkan pembangkit berbahan fosil berupa batu bara, salah satu sumber energi tak terbarukan yang pasokan dan ketersediaannya terbatas. Bicara dari kondisi faktual tersebut, maka Jamkrindo berupaya untuk melakukan langkah-langkah penghematan listrik. Upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik. [GRI 103-2]

Energy Management

In running its business operations, Jamkrindo utilizes two main energy sources, namely electricity and fuel oil (BBM). Apart from being a source of lighting, electricity is used as a source of energy for various facilities and infrastructure for office electronic equipment, such as air conditioning machines, photocopiers, elevators, personal computers, laptops, televisions, and others. [GRI 103-1]

The Company realizes that the current availability of electricity is still not evenly distributed throughout Indonesia. This happens because the electricity currently available mostly uses fossil-based energy in the form of coal, one of the non-renewable energy sources whose supply and availability is limited. Reflecting on these factual conditions, Jamkrindo seeks to take steps to save electricity. These efforts are in line with the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia No. 13 of 2011 concerning Energy and Water Savings, as well as Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 13 of 2012 concerning Savings in Electricity Consumption. [GRI 103-2]

Langkah nyata yang dilakukan Jamkrindo untuk menghemat penggunaan listrik, antara lain: [GRI 103-3, 302-4] [OJK F.7, F.12]

1. Mengganti lampu dengan lampu LED;
2. Melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi waktu lembur;
3. Memperbanyak panel kaca ruangan;
4. Alat elektronik sudah dipastikan dalam kondisi mati saat karyawan pulang;
5. Optimalisasi penggunaan AC dari AC Central ke AC Cassete/*Split* sehingga dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan ruangan.

Per 31 Desember 2021, konsumsi listrik Kantor Pusat Jamkrindo tercatat sebesar 922,54 kWh atau setara dengan 3,32 Gigajoule (GJ), turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 1.604,95 kWh atau 5,78 GJ. Dasar penggunaan energi listrik adalah pencatatan dari meter listrik PLN sebagai penyedia atau pemasok energi listrik sehingga validitas datanya terjaga. [GRI 103-3, 302-1] [OJK F.6]

Sementara itu, untuk mengetahui intensitas penggunaan energi listrik, Jamkrindo belum melakukan audit energi terhadap gedung yang saat ini dipakai untuk operasional perusahaan. Untuk itu, intensitas konsumsi energi listrik dihitung dengan membagi total penggunaan energi listrik (kWh) dengan luas ruangan kantor. Per 31 Desember 2021, penggunaan listrik adalah sebesar 922,54 kWh, sedangkan luas ruangan gedung yang dipakai saat ini adalah 16.430 meter persegi. Dengan demikian, intensitas konsumsi energinya tercatat sebesar 17,98 kWh/meter persegi tahun, atau masuk kategori "Sangat Efisien" sesuai dengan rujukan Tabel IKE Standard di bawah ini: [OJK 103-3, 302-3, F.6]

The real steps taken by Jamkrindo to save electricity consumption include: [GRI 103-3, 302-4] [OJK F.7, F.12]

1. Replacing the lamp with an LED lamp;
2. Working hours efficiency by reducing overtime;
3. Multiplying glass panels in the rooms;
4. The electronic devices are confirmed to be turned off when the employee returns home;
5. Optimizing the use of AC from AC Central to AC Cassete/*Split* so that it can be controlled according to the needs of the room.

As of December 31, 2021, Jamkrindo's Head Office electricity consumption was recorded at 922.54 kWh or equivalent to 3.32 Gigajoules (GJ), a decrease compared to 2020, which reached 1,604.95 kWh or 5.78 GJ. The basis for the use of electrical energy is the recording of the PLN electricity meter as a provider or supplier of electrical energy so that the validity of the data is maintained. [GRI 103-3, 302-1] [OJK F.6]

Meanwhile, to determine the intensity of the use of electrical energy, Jamkrindo has not conducted an energy audit of the building currently used for company operations. For this reason, the intensity of electrical energy consumption is calculated by dividing the total use of electrical energy (kWh) by the area of the office space. As of December 31, 2021, electricity usage was 922.54 kWh, while the building area currently used is 16,430 square meters. Thus, the intensity of energy consumption was recorded at 17.98 kWh/sqm year, or is included in the "Very Efficient" category in accordance with the reference to the Standard IKE Table below: [OJK 103-3, 302-3, F.6]

Tabel Nilai IKE Standard di Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Berdasarkan Permen ESDM No. 13/2012

Table of IKE Standard Values in Government Office Buildings Based on the Minister of Energy and Mineral Resources No. 13/2012

Kriteria Criteria	Ber-AC with AC		Tanpa AC Without AC	
	kWh/m ² /bulan kWh/m ² /Month	kWh/m ² /tahun* kWh/m ² /year*	kWh/m ² /bulan kWh/m ² /Month	kWh/m ² /tahun* kWh/m ² /year*
Sangat efisien Very efficient	<8,5	<120	<3,4	<40,8
Efisien Efficient	8,5-14	120-168	3,4-5,6	40,8-67,2
Cukup Efisien Sufficient	14-18,5	168-222	5,6-7,4	67,2-88,8
Boros Wasteful	>18,5	>222	>7,4	>88,8

Rujukan: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik

*konversi dalam setahun

Reference: Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number: 13 of 2012 concerning Saving Electricity Usage

*conversions in a year

Selain listrik, konsumsi energi lain yang dipakai Jamkrindo adalah bahan bakar minyak (BBM), antara lain untuk kendaraan operasional dan genset. Jenis bahan bakar yang dipakai adalah bensin (Pertamax/Pertalite) dan solar. Sama seperti listrik, ketersediaan dan pasokan BBM juga terbatas karena masuk kategori energi tak terbarukan sehingga Perusahaan berkomitmen untuk melakukan efisiensi. [GRI 103-1, 103-2]

Apart from electricity, other energy consumption used by Jamkrindo is fuel oil (BBM), including for operational vehicles and generators. The type of fuel used is gasoline (Pertamax/Pertalite) and diesel. Just like electricity, the availability and supply of fuel is also limited because it is included in the non-renewable energy category, so the Company is committed to be efficient. [GRI 103-1, 103-2]



Kebijakan nyata yang diambil Perseroan untuk mendukung efisiensi penggunaan BBM, antara lain, mengurangi pertemuan/rapat tatap muka, melakukan pemeliharaan kendaraan operasional secara berkala guna mengoptimalkan kinerja mesin agar makin efisien dalam pemakaian bahan bakar, serta membatasi usia pakai kendaraan operasional maksimal dengan memperhatikan umur ekonomisnya. Pemeliharaan dan perbaikan serta pembatasan waktu penggunaan kendaraan operasional sekaligus bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari mesin kendaraan operasional sehingga sesuai dengan baku mutu yang diperbolehkan. Adapun upaya pengurangan rapat tatap muka mendapatkan momentum dengan adanya pandemi COVID-19 yang memungkinkan rapat secara *online* dengan memanfaatkan aplikasi teknologi informasi. [GRI 103-3, 302-4]

Dengan kebijakan tersebut, per 31 Desember 2021, jumlah penggunaan BBM Kantor Pusat Jamkrindo tercatat sebesar 82.800 liter atau 2.831,76 GJ, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 93.689 liter atau 3.204,16 GJ. Dasar penggunaan BBM adalah pencatatan yang dikeluarkan oleh pengguna, yaitu sopir sehingga akurasinya terjamin. [GRI 103-3, 302-1]

The real policies taken by the Company in supporting fuel consumption efficiency, among others, reducing face-to-face meetings, performing regular maintenance of operational vehicles in order to optimize engine performance to be more efficient in fuel consumption, and limiting the service life of operational vehicles by taking into account their economic life. Maintenance and reparation as well as time limits on the use of operational vehicles are also aimed at reducing greenhouse gas emissions resulting from operational vehicle engines so that they comply with the quality standards. The effort to reduce face-to-face meetings is gaining momentum with the COVID-19 pandemic, which allows online meetings by utilizing information technology applications.

[GRI 103-3, 302-4]

With this policy, as of December 31, 2021, Jamkrindo Head Office's total fuel usage was recorded at 82,800 liters or 2,831.76 GJ, a decrease compared to 2020, which reached 93,689 liters or 3,204.16 GJ. The basis for fuel usage is a record issued by the user, namely the driver so that accuracy is guaranteed. [GRI 103-3, 302-1]

Tabel Volume Penggunaan Energi Tahun 2019-2021
Table of Energy Usage Volume in 2019-2021

No.	Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
1	Listrik Electricity	kWh	922,54	1.604,95	2.608,38
		GigaJoules	3,32	5,78*	9,39*
2	BBM (Bensin dan Solar) BBM (Gasoline and Diesel)	Liter	82.800	93.689	117.516
		GigaJoules	2.831,76	3.204,16	4.019,05

*disajikan kembali

Keterangan: Konversi kWh ke Gigajoule: <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>, konversi liter ke Gigajoule: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

*restated

Description: kWh to Gigajoules Conversion <https://www.convertunits.com/from/kWh/to/gigajoule>, Liters to Gigajoules conversion: <https://hextobinary.com/unit/energy/from/gasoline/to/gigajoule>

Pengelolaan Emisi

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim dengan salah satu dampak negatifnya berupa bencana ekologi yang semakin sering terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dampaknya begitu besar, sebagai kontribusi untuk menekan pemanasan global, maka Jamkrindo melakukan pengelolaan emisi GRK yang dihasilkan sebaik-baiknya. Dalam laporan ini, emisi yang dilaporkan adalah emisi GRK langsung (Cakupan 1) yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil (bensin dan solar), dan emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung yang bersumber dari penggunaan listrik. Emisi GRK dominan yang dihasilkan cakupan 1 dan 2 adalah karbon dioksida (CO2).

Perseroan menghitung emisi GRK (Cakupan 1) langsung dengan metode yang lazim dipakai di Indonesia dan negara-negara non-Annex 1 (negara berkembang), yaitu Tier-1. Dengan metode ini, Jamkrindo menghitung emisi berdasarkan data konsumsi energi dikalikan faktor emisi default IPCC 2019 (*Intergovernmental Panel on Climate Change/Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim*).

Emission Management

Greenhouse gas (GHG) emissions are the cause of global warming and climate change with one of the negative impacts in the form of ecological disasters that are increasingly occurring in Indonesia. Therefore, the impact is so big, as a contribution to suppress global warming, Jamkrindo manages the resulting GHG emissions as well as possible. In this report, the reported emissions are (Scope 1) direct GHG emissions from fossil fuels (gasoline and diesel) usage, and indirect (Coverage 2) GHG emissions from electricity use. The dominant GHG emission produced in coverage 1 and 2 is carbon dioxide (CO2).

*The Company calculates direct GHG emissions (Scope 1) with the method commonly used in Indonesia and non-Annex 1 (developing countries) countries, namely Tier-1. With this method, Jamkrindo calculates emissions based on energy consumption data multiplied by the IPCC 2019 default emission factor (*Intergovernmental Panel on Climate Change*).*

Emisi Hasil Pembakaran Bahan Bakar
Fuel Combustion Emissions

$$\text{Emisi GRK} \quad \left(\frac{\text{Kg}}{\text{Thn}} \right) = \text{Konsumsi Energi} \quad \left(\frac{\text{TJ}}{\text{Thn}} \right) \quad \times \text{Faktor Emisi} \quad \left(\frac{\text{Kg}}{\text{TJ}} \right)$$

Sesuai hasil perhitungan dengan rumus di atas, maka selama tahun pelaporan, Perseroan menghasilkan emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) dari penggunaan bensin sebesar 189.355,32 kgCO₂eq, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 214.928,92 kgCO₂eq. [OJK F.11]

In accordance with the calculation results with the above formula, during the reporting year, the Company generated direct greenhouse gas emissions (scope 1) from the use of gasoline of 189,355.32 kgCO₂eq, a decrease compared to 2020 which reached 214,928.92 kgCO₂eq. [OJK F.11]

Tabel Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Langsung (Cakupan 1) Tahun 2019-2021
Table of Direct Greenhouse Gas Emissions Calculations (Scope 1) for 2019-2021

Bahan Bakar <i>Fuel</i>	Total Energi (TJ/Tahun) Total Energy (TJ/Year)			Faktor Emisi CO ₂ (KgCO ₂ /TJ) CO ₂ Emission Factor (KgCO ₂ /TJ)	Emisi CO ₂ (Kg CO ₂ /Tahun) CO ₂ Emissions (Kg CO ₂ /Year)		
	2021	2020	2019		2021	2020*	2019*
	C=A*B			D	E=C*D		
Bensin <i>Petrol</i>	2,73	3,03	3,82	69.300	189.355,32	210.223,28	264.713,25
Solar <i>Diesel</i>	0	0,06	0,06	74.100	0	4.705,64	4.705,64
	0	3,09	3,88		0	214.928,92	269.418,89

Selanjutnya, untuk menghitung emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2, yaitu yang bersumber dari energi dari luar berupa listrik) diperoleh dengan mengalikan konsumsi listrik (dalam kWh per tahun) dengan *average grid emission factor* yang dikeluarkan Kementerian ESDM merujuk RUPTL PLN 2015-2024 yaitu sebesar 0,934 kgCO₂/kWh (2017). Berdasarkan perhitungan itu, emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) dari penggunaan energi listrik tahun 2021 tercatat sebesar 861,65 kgCO₂eq, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 1.498,74 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-2] [OJK F.11]

Furthermore, in order to calculate indirect greenhouse gas emissions (scope 2, which is sourced from external energy in the form of electricity) it is obtained by multiplying electricity consumption (in kWh per year) by the average grid emission factor issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources referring to PLN RUPTL 2015-2024 which is 0.934 kgCO₂/kWh (2017). Based on this calculation, indirect (scope 2) greenhouse gas emissions from the use of electrical energy in 2021 were recorded at 861.65 kgCO₂eq, decrease compared to 2020, which reached 1,498.74 kgCO₂eq. [GRI 103-3, 305-2] [OJK F.11]

Tabel Emisi Gas Rumah Tidak Langsung (Cakupan 2) Tahun 2018-2020
Table of Indirect (Scope 2) House Gas Emissions 2018-2020

Konsumsi Energi <i>Energy Consumption</i>	Tahun (kWh) Year (kWh)			Emisi CO ₂ yang Dihasilkan (kg) Produced CO ₂ Emissions (kg)		
	2021	2020	2019	2021	2020*	2019*
Listrik <i>Electricity</i>	922,54	1.604,95	2.608,38	861,65	1.498,74	2.436,23

*disajikan kembali
*restated

Adapun emisi gas rumah kaca (cakupan 3) tidak langsung lainnya seperti diminta oleh POJK Keuangan Berkelanjutan dihitung dengan menggunakan kalkulator karbon dari ICAO (*International Civil Aviation Organization/Organisasi Penerbangan Sipil Internasional*). Perjalanan dinas dengan pesawat merujuk pada perjalanan dinas oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan. Namun demikian, pada tahun pelaporan, Jamkrindo

Meanwhile, other indirect (coverage 3) greenhouse gas emissions as requested by the POJK on Sustainable Finance are calculated using the carbon calculator from ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Business travel by plane refers to official travel by the Board of Commissioners, Directors, and employees. However, in the reporting year, Jamkrindo has not been able to submit calculations because the data is not yet available. The calculation



belum bisa menyampaikan perhitungan karena data belum tersedia. Perhitungan akan disampaikan pada laporan tahun 2024 pada saat Jamkrindo terkena kewajiban untuk menerapkan POJK Keuangan Berkelanjutan secara penuh. [OJK F.11]

Pengelolaan Air

Air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi operasional sehari-hari Jamkrindo. Perseroan menggunakan air untuk berbagai keperluan domestik karyawan dan manajemen, seperti kebutuhan air minum, kebersihan, sanitasi, wudu, penyiraman tanaman, dan sebagainya. [GRI 103-1]

Sama seperti listrik dan BBM, Perseroan juga menyadari bahwa ketersediaan air bersih semakin terbatas. Pasokan bahan baku untuk PDAM semakin terbatas akibat banyak sumber air baku yang tercemar, sedangkan air tanah ketersediaannya juga kian terbatas seiring dengan semakin masifnya penyedotan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri, pabrik, perkantoran, perhotelan, dan sebagainya. Jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, krisis air bersih sudah ada di depan mata. Risiko krisis air bersih pernah disampaikan Bappenas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KKLS) RPJM 2019, yang memproyeksikan ketersediaan air akan mencapai kelangkaan absolut pada 2040. Kelangkaan absolut atau 'absolute scarcity' tak lain adalah jumlah sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Kondisi faktual tentang semakin memburuknya kualitas air, serta proyeksi kelangkaan air, menjadi cukup beralasan jika langkah efisiensi menjadi penting untuk dilakukan, termasuk oleh Jamkrindo. Salah satunya dengan mengeluarkan himbauan kepada segenap insan Perseroan agar menggunakan air secara bijaksana dan tidak boros, melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, secara rutin melakukan pengecekan instalasi air, serta melakukan perbaikan segera apabila ditemukan kerusakan/kebocoran. Kebijakan lain, keran distribusi air akan ditutup setelah jam kerja. [GRI 103-2] [F.8]

Per 31 Desember 2021, volume penggunaan air Kantor Pusat Jamkrindo yang bersumber dari PDAM mencapai 8.790 meter kubik, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 10.448,2 meter kubik. Penurunan terjadi karena masih diterapkannya *work from home* sehingga karyawan belum sepenuhnya berada di kantor. Oleh karena sumber pasokan air adalah PDAM dan Perseroan tidak menggunakan air tanah, maka tidak terdapat sumber air di sekitar kantor yang terpengaruh karena penggunaan air oleh Jamkrindo. [GRI 103-3, 303-1, 303-3] [OJK F.8]

will be submitted in the 2024 report when Jamkrindo is required to fully implement the POJK on Sustainable Finance. [OJK F.11]

Water Management

Water is one of the vital necessity for Jamkrindo's daily operations. The Company uses water for various domestic needs of employees and management, such as drinking water, cleaning, sanitation, ablution, watering plants, and so on. [GRI 103-1]

The same case with electricity and fuel, the Company also realizes that the availability of clean water is limited. The supply of raw materials for PDAMs is increasingly limited due to the contamination of many sources of raw water, while groundwater availability becomes more limited in line with the massive desludging for various purposes, including for industrials, factories, offices, hotels, and so on. If it is not managed properly, the clean water crisis is in sight. The risk of a clean water crisis has been conveyed by Bappenas in the Strategic Environmental Study (KKLS) of the 2019 RPJM, which projects that water availability will reach absolute scarcity by 2040. Absolute scarcity is insufficient amount of water resources to fulfill the demands.

The factual conditions regarding the deterioration of water quality, as well as the projection of water scarcity, become quite reasonable if efficiency measures are taken by Jamkrindo. One of them is by issuing an appeal to all employees of the Company to use water wisely and not wastefully, to make working hours efficient by reducing overtime, to regularly check water installations, and immediate reparation ,if damage/leakage is found. Another policy is that the water distribution faucet will be shutted after working hours. [GRI 103-2] [F.8]

As of December 31, 2021, the volume of Jamkrindo Head Office water usage sourced from PDAM reached 8,790 cubic meters, a decrease compared to 2020, which reached 10,448.2 cubic meters. The decrease occurred due to the implementation of work from home so that employees are not fully in the office. Since the source of water supply is PDAM and the Company does not use ground water, there are no water sources around the office which are affected due to Jamkrindo's use of water. [GRI 103-3, 303-1, 303-3] [OJK F.8]

Tabel Volume Pengambilan Air Tahun 2019-2021
Table of Water Intake Volume for 2019-2021

Uraian Description	Satuan Unit	2021	2020	2019
Air PDAM PDAM water	Meter kubik Cubic Meter	8.790	10.448,20	14.059,70
Rasio penggunaan air per karyawan (m ³ /karyawan) Water usage ratio per employee (m ³ /employee)	Meter kubik/karyawan Cubic Meter/Employee	20,88	23,42	29,60



Pengelolaan Sampah/Limbah

Sejalan dengan prinsip operasional kantor yang ramah lingkungan, Jamkrindo terus berupaya untuk mengurangi sampah dan limbah dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Untuk mengurangi limbah plastik kemasan minuman sekali pakai misalnya, Perseroan meniadakan penyediaan air minum dalam kemasan, dan menggantikannya dengan menyediakan air minum isi ulang. Selaras dengan itu, Jamkrindo juga memberi *tumbler* kepada karyawan sebagai wadah air minum. Sementara itu, untuk pengelolaan sampah domestik perkantoran, Perusahaan telah menyediakan tempat sampah dalam jumlah cukup dan membedakannya berdasarkan jenis sampah: organik dan non-organik. Untuk pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir, Jamkrindo bekerja sama dengan pihak ketiga dengan mengeluarkan biaya tertentu.

Biaya Lingkungan

Selama tahun 2021, Jamkrindo mengeluarkan biaya lingkungan sebesar Rp116.100.000, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp128.040.000. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya emisi biaya *sanitact ladybin* (pembalut wanita) dan pengelolaan limbah. Biaya lingkungan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [OJK F.4]

Waste Management/Waste

In line with the operating principles of an Eco-friendly office, Jamkrindo continues to strive to reduce waste by applying the 3R (Reduce, Reuse and Recycle) principles. To reduce the plastic waste of single-use beverage packaging, for example, the Company eliminated the provision of bottled drinking water, and replaced it by providing refilled drinking water. In line with that, Jamkrindo also provided tumblers to employees as containers for drinking water. Meanwhile, for the management of domestic office waste, the Company has provided sufficient number of trash bins and separate them based on the type of waste: organic and non-organic. For waste disposal to landfill, Jamkrindo cooperates with third parties by incurring certain fees.

Environmental Cost

During 2021, Jamkrindo incurred environmental costs of IDR116,100,000, down from 2020 which reached IDR128,040,000. The funds were used for various purposes, including the cost of sanitact ladybins (sanitary napkins) and waste management. The full environmental costs are presented in the following table: [OJK F.4]

Tabel Biaya Lingkungan Tahun 2019-2021
Environmental Cost Table 2019-2021

Tahun Year	Jumlah Biaya Lingkungan Environmental Cost Table 2019-2021	Pemanfaatan/Penggunaan Utilization/Usage
2021	Rp116.100.000	<p>Biaya Sanitact Ladybin (pembalut wanita) Rp10.500.000 <i>Sanitact Ladybin (sanitary napkin) Cost IDR10,500,000</i></p> <p>Pengelolaan Limbah Cair-Rp105.600.000 <i>Liquid Waste Management-IDR105,600,000</i></p>
2020	Rp128.040.000	<p>Biaya Pengelolaan Limbah, Emisi, dan Remediasi Rp22.440.000 <i>Waste Management, Emissions, and Remediation Fees IDR22,440,000</i></p> <p>Pengelolaan Limbah Cair-Rp105.600.000 <i>Liquid Waste Management-IDR105,600,000</i></p>
2019	Rp105.600.000	<p>Pengelolaan Limbah Cair-Rp105.600.000 <i>Liquid Waste Management-IDR105,600,000</i></p>

Kepatuhan Lingkungan

Sesuai dengan spirit dan implementasi keuangan berkelanjutan, Jamkrindo menaati berbagai regulasi lingkungan dalam menjalankan usaha. Ketaatan tersebut membawa hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain akibat pelanggaran terhadap regulasi lingkungan sepanjang tahun 2021.

Environmental Compliance

In accordance with resolution and implementation of sustainable finance, Jamkrindo complies with various environmental regulations in running its business. This compliance has resulted in the absence of monetary fines or other sanctions due to violations of environmental regulations throughout 2021.





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

Sustainable Social Performance





KINERJA SOSIAL KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE SOCIAL PERFORMANCE

Keberhasilan Jamkrindo menjalankan usaha lebih dari setengah abad di Indonesia merupakan cerminan atas kuatnya dukungan para pemangku kepentingan terhadap keberadaan Perusahaan, baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan internal yang menopang eksistensi Jamkrindo antara lain pemegang saham, manajemen dan karyawan lintas divisi dan beragam level jabatan, termasuk dari entitas anak perusahaan; sedangkan pemangku kepentingan eksternal di antaranya konsumen/nasabah, mitra kerja/pemasok, kreditur, pemerintah dan DPR sebagai regulator, penerima manfaat Program Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial Badan Usaha Milik Negara (TJSB BUMN), serta masyarakat/komunitas lokal di sekitar lokasi operasional perusahaan. Masing-masing pemangku kepentingan memberikan kontribusi dan memainkan peran terhadap keberadaan Perusahaan, termasuk dalam mewujudkan target dan kinerja dari tahun ke tahun. [GRI 103-1]

Sesuai dengan konsep *tripple bottom line*, dukungan segenap pemangku kepentingan termasuk dalam pilar sosial, yaitu *people*, yang kedudukannya setara dengan pilar ekonomi (*profit*) dan pilar lingkungan (*planet*). Jamkrindo meraih dukungan dari pemangku kepentingan tak lepas dari keberhasilannya dalam memenuhi tanggung jawab kepada masing-masing pemangku kepentingan. Pemenuhan tanggung jawab secara tepat dilakukan setelah Perusahaan melakukan pemetaan dan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan. Tanpa pemetaan yang jelas, maka implementasi program dan kebijakan kepada pemangku kepentingan bisa salah sasaran.

Bagi Jamkrindo, komitmen untuk memenuhi tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan merupakan strategi terbaik guna mewujudkan hubungan yang harmonis, yang pada gilirannya akan mengukuhkan keberadaan perusahaan. Lebih dari itu, terciptanya hubungan yang harmonis sekaligus merupakan fondasi bagi keberlanjutan usaha Jamkrindo.

LANDASAN KEBIJAKAN

Dalam mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, Jamkrindo merujuk pada berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia di antaranya: [GRI 103-2]

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Successfully in running its business for more than half a century in Indonesia, Jamkrindo is a reflection of the strong support from stakeholders for the existence of the Company, both internal and external stakeholders. Internal stakeholders that support Jamkrindo's existence include shareholders, management and employees across divisions and various levels of office, including from subsidiaries; while external stakeholders include consumers/customers, work partners/suppliers, creditors, the government and the DPR as regulators, beneficiaries of the State-Owned Enterprises Environmental and Social Responsibility Program (TJSB BUMN), as well as local communities/communities around the company's operational locations. Each stakeholder contributes and plays a role in the existence of the Company, including in realizing targets and performance from year to year. [GRI 103-1]

In accordance with the triple bottom line concept, the support of all stakeholders is included in the social pillar, namely people, whose position is equal to the economic pillar (profit) and the environmental pillar (planet). Jamkrindo gains support from stakeholders due to its success in fulfilling its responsibilities to each stakeholder. Responsibilities are properly fulfilled after the Company has mapped out the interests of each stakeholder. Without a clear mapping, the implementation of programs and policies for stakeholders can be misdirected.

For Jamkrindo, the commitment to fulfill responsibilities to all stakeholders is the best strategy to create a harmonious relationship, which in turn will strengthen the company's existence. More than that, the creation of a harmonious relationship is also the foundation for the sustainability of Jamkrindo's business.

POLICY FOUNDATION

In managing relationships with stakeholders, Jamkrindo refers to various regulations that apply in Indonesia, including: [GRI 103-2]

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
3. Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation;
4. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
5. Law No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety;
6. Law No. 36 of 2009 concerning Health;
7. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises;



8. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja;
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan serangkaian regulasi tersebut, selanjutnya Jamkrindo menyusun berbagai kebijakan internal sesuai dengan bidang usaha Perusahaan, yaitu Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKM), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. Kebijakan tersebut di antaranya berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian dengan berbagai aspeknya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tanggung jawab produk, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). [GRI 103-3]

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia yaitu individu-individu yang bekerja di Jamkrindo (karyawan) merupakan aset penting untuk meraih keunggulan kompetitif. Karyawan berkemampuan menjadi pemikir, perencana, dan pengawas di Perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya perusahaan lainnya, seperti uang, teknologi, dan lainnya. Dengan pengelolaan yang maksimal, maka karyawan akan menghasilkan ide-ide bernilai tambah yang menjadi produk perusahaan. Lebih dari itu, karyawan sebagai menjadi pemangku kepentingan internal perlu diperhatikan kepentingannya. Oleh karena itu, Jamkrindo berupaya melaksanakan sistem pengelolaan karyawan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan Perusahaan dengan harapan karyawan. Kebutuhan perusahaan antara lain berupa pencapaian kinerja yang optimal, sedangkan harapan karyawan di antaranya memperoleh kesetaraan kesempatan bekerja/non diskriminasi remunerasi yang baik, jenjang karir yang jelas, dan sebagainya. [GRI 103-1]

Kesetaraan Kesempatan Bekerja [OJK F.18]

Jamkrindo menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan atau non diskriminasi di tempat kerja. Prinsip tersebut sudah diterapkan sejak proses rekrutmen dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, golongan, maupun ras. Prinsip yang sama diberlakukan kepada semua karyawan, antara lain Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki kompetensi untuk mengisi pos-pos, posisi atau jabatan yang tersedia, termasuk di posisi manajemen puncak.

Prinsip kesetaraan dalam bekerja diterapkan Jamkrindo di semua lini. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, kesetaraan dan non diskriminasi tersebut sesuai dengan Konvensi ILO No. 111/1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (*Discrimination in Respect of Employment and Occupation*), serta Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia (Kementerian

8. Government Regulation No. 11 of 2020 concerning the Change of Legal Entity for a Public Company (PERUM) of Indonesian Credit Guarantee (JAMKRINDO) to become a Limited Liability Company (PERSERO);
9. Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 32 of 1998 concerning the Guidance and Development of Small Businesses;
10. Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 7 of 2019 concerning Occupational Diseases;
11. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises.

Based on these regulations, Jamkrindo then developed various internal policies in accordance with the Company's line of business, namely Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKM), Guarantee for BUMN, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees. Among these policies are related to personnel management with various aspects, Occupational Safety and Health (K3), product responsibility, and Social and Environmental Responsibility (TJSL). [GRI 103-3]

PERSONNEL MANAGEMENT

Human resources, namely employee of Jamkrindo are important assets in achieving competitive advantage. Employees are capable of being thinkers, planners, and supervisors in the Company to be able to manage other company resources, such as money, technology, and others. With maximum management, employees will generate value-added ideas that become the company's products. More than that, employees as internal stakeholders need to pay attention to their interests. Therefore, Jamkrindo strives to implement an employee management system that is able to maintain a balance between the needs of the Company and the expectations of employees. The company's needs include achieving optimal performance, while employee expectations include obtaining equal employment opportunities/non-discrimination, good remuneration, clear career paths, and so on. [GRI 103-1]

Equal Employment Opportunity [OJK F.18]

Jamkrindo upholds the principle of equality of opportunity or non-discrimination in the workplace. This principle has been applied since the recruitment process by not discriminating against gender, ethnicity, religion, class, or race. The same principle applies to all employees, among others, the Company provides opportunities for competent employees to fill available positions, positions or positions, including in top management positions.

The principle of equality in work is applied by Jamkrindo in all lines. Apart from being a form of compliance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which was amended through the Law on Employment Creation, equality and non-discrimination in accordance with ILO Convention No. 111/1958 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, as well as Guidelines for Equality and Non-Discrimination in the Workplace in Indonesia (Ministry of Manpower and Transmigration

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI). Komitmen Jamkrindo terhadap kesetaraan kesempatan bekerja atau non diskriminasi membawa hasil dengan tidak adanya insiden diskriminasi sehingga tidak perlu ada tindakan perbaikan selama tahun pelaporan.

Rekrutmen dan Turnover

Jamkrindo secara berkala melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Rekrutman dilakukan secara terbuka/transparan dan berlaku bagi siapa pun yang memenuhi kualifikasi tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Melalui rekrutmen tersebut, Perusahaan mencari kandidat terbaik yang memiliki kemampuan serta kapasitas yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan Jamkrindo. [GRI 103-1]

Dalam proses rekrutmen, Jamkrindo memberikan kesempatan yang luas kepada kandidat yang berdomisili di sekitar perusahaan beroperasi (tenaga kerja lokal) untuk bergabung sesuai dengan kriteria kebutuhan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini dilaksanakan secara konsisten sehingga masyarakat di sekitar perusahaan dapat memetik manfaat tidak langsung atas keberadaan Jamkrindo. [GRI 103-2]

Per 31 Desember 2021, Jamkrindo merekrut karyawan baru sebanyak 143 orang, naik dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 54 orang. Karyawan baru tersebut terdiri dari 48 karyawan tetap dan 95 karyawan tidak tetap/kontrak. Komposisi karyawan baru hasil rekrutmen berdasarkan jenis kelamin, wilayah kerja, dan kelompok usia selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 401-1]

RI). Jamkrindo's commitment to equal employment opportunity or non-discrimination has resulted in no incidents of discrimination so that no corrective action is required during the reporting year.

Recruitment and Turnover

Jamkrindo periodically conducts recruitment to meet human resource needs. Recruitment is carried out openly/transparantly and applies to anyone who meets the qualifications regardless of ethnicity, religion, race and so on. Through this recruitment, the Company looks for the best candidates who have the ability and capacity in accordance with the job specifications required by Jamkrindo. [GRI 103-1]

In the recruitment process, Jamkrindo provides broad opportunities for candidates who are domiciled around the company's operations (local workforce) to join in accordance with the criteria for needs and competency standards that have been set. This policy is implemented consistently so that the community around the company can benefit indirectly from the existence of Jamkrindo. [GRI 103-2]

As of December 31, 2021, Jamkrindo recruited as many as 143 people, increase compared to 2020, which reached 54 people. The new employees consist of 48 permanent employees and 95 non-permanent/contracted employees. The full composition of new employees based on gender, work area, and age group is presented in the following table: [GRI 103-3, 401-1]

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021
New Employee Compositions by Age in 2019 - 2021

Kelompok Usia Age Group	2021	2020	2019
<25 Tahun <25 Years	80	37	12
26-35 Tahun 26-35 Years	59	13	5
36-45 Tahun 36-45 Years	2	3	-
46-55 Tahun 46-55 Years	2	-	-
>56 Tahun >56 Years	-	1	-
Jumlah Total	143	54	17

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Jenis Kelamin
New Employees Compositions by Gender

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Pria Male	58	24	6
Wanita Female	85	30	11
Jumlah Total	143	54	17

Komposisi Karyawan Baru Berdasarkan Wilayah New Employee Compositions by Working Area

Wilayah Kerja Working Area	2021	2020	2019
Kantor Pusat Headquarters	49	33	17
Kantor di Daerah Regional Office	94	21	-
Jumlah Total	143	54	17

Selain bertambah karena proses rekrutmen, jumlah karyawan Jamkrindo berkurang dengan adanya karyawan yang berhenti atau meninggalkan Perusahaan karena berbagai alasan. Per 31 Desember 2021, terdapat 37 orang karyawan yang meninggalkan Perusahaan dengan alasan 4 orang pensiun normal, 29 orang mengundurkan diri, dan 4 orang meninggal. Berdasarkan data tersebut, tingkat turnover pada tahun 2021 tercatat sebesar 3,79%, turun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 3,94%. [GRI 103-3, 401-1]

In addition to increasing number due to the recruitment process, the number of Jamkrindo employees has decreased with employees who quit or leave the Company for various reasons. As of December 31, 2021, there are 37 employee who left the Company with reasons of 4 employee retired normally, 29 employee resigned, and 4 employee died. Based on this data, the turnover rate in 2021 was recorded at 3.79%, compared to 2020 which reached 3.94%. [GRI 103-3, 401-1]

Penyebab Karyawan Meninggalkan Perusahaan Causes of Employees Leaving the Company

Penyebab Reason	2021	2020	2019
Pensiun Normal Normal Retirement	4	3	3
Pensiun Dini/Dipercepat Early/Expedited Retirement	-	0	0
Meninggal Dunia Pass away	4	1	2
Mengundurkan Diri Resign	29	34	44
Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran Dismissed for Violation	0	0	2
Jumlah Karyawan Tetap yang Keluar Number of Permanent Employees	37	38	51
Jumlah Karyawan Number of Employees	975	965	965
Turnover Karyawan Employee Turnover	3,79%	3,94%	5,28%

Komposisi karyawan yang berhenti atau meninggalkan Jamkrindo berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah kerja selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 401-1]

The full composition of employees who quit or leave Jamkrindo by age group, gender, and work area is presented in the following table: [GRI 103-3, 401-1]

Komposisi Karyawan Berhenti atau Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021 Employees Quitting or Leaving the Company by Age in 2019-2021

Kelompok Usia Age Group	2021	2020	2019
<25 Tahun <25 Years	-	-	-
26-35 Tahun 26-35 Years	21	25	29
36-45 Tahun 36-45 Years	7	9	19
46-55 Tahun 46-55 Years	9	5	3
>56 Tahun >56 Years	-	-	-
Jumlah Total	37	38	51

Komposisi Karyawan Berhenti atau Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021

Composition of Employees Quitting or Leaving the Company by Gender in 2019-2021

Jenis Kelamin Gender	2021	2020	2019
Pria Male	23	19	26
Wanita Female	14	19	25
Jumlah Total	37	38	51

Komposisi Karyawan Berhenti atau Meninggalkan Perusahaan Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2019-2021

Composition of Employees Quitting or Leaving the Company by Working Area in 2019-2021

Wilayah Kerja Working Area	2021	2020	2019
Kantor Pusat Headquarters	19	9	14
Kantor di Daerah Regional Office	18	25	37
Jumlah Total	37	34	51

Perusahaan menyadari bahwa pergantian karyawan atau *turnover* merupakan fenomena yang biasa terjadi. Namun demikian, Jamkrindo terus berupaya untuk mengelola tingkat *turnover* karyawan dengan sebaik-baiknya sehingga angkanya tidak terus bertambah. *Turnover*, terutama yang dilakukan karyawan yang masih dalam usia produktif dengan mengajukan pengunduran diri (*resign*), tetap berdampak negatif bagi Perseroan. Untuk mencari pengganti misalnya, Jamkrindo perlu melakukan rekrutmen, pelatihan, pengembangan kompetensi, dan sebagainya yang notebene memerlukan biaya besar. Kerugian akan lebih besar jika yang *resign* adalah karyawan yang cakap dan terampil di bidangnya.

Untuk menurunkan tingkat *turnover* karyawan, Jamkrindo telah melakukan kajian dan analisis internal sehingga dirasa perlu melakukan 3 (tiga) upaya, yaitu perbaikan sistem remunerasi karyawan, ketika melakukan promosi dan mutasi hendaknya memperhatikan kondisi dan umur karyawan, serta memberikan kesempatan bagi semua karyawan untuk mengembangkan *hard skill* dan *soft skill*. Ketiga upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Jamkrindo untuk memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan. [GRI 103-3]

Penilaian Karyawan dan Pengembangan Karier

Penilaian atau review atas kinerja karyawan merupakan kewajiban Jamkrindo sebagai bentuk tanggung jawab atas kinerja karyawan. Penilaian dilakukan setiap tahun antara lain untuk menentukan jenjang karir karyawan berupa promosi, mutasi, rotasi, atau demosi. Perusahaan memiliki KPI individu dan proses penilaian kinerja karyawan tersebut mengacu pada KPI tersebut.

Bagi karyawan yang berprestasi, mereka akan mendapat promosi, yaitu kenaikan posisi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya promosi maka mendorong karyawan untuk

The company realizes that changes in employee or turnover is a common phenomenon. However, Jamkrindo continues to strive to manage the employee turnover rate as well as possible so that the number does not continue to grow. Turnover, especially by employees who are still in their productive age by submitting a resignation, still has a negative impact on the Company. To find a replacement, for example, Jamkrindo needs to carry out recruitment, training, competency development, and so on which in fact requires large costs. The loss will be greater if the one who resigns is an employee who is capable and skilled in his field.

Reducing the employee turnover rate, Jamkrindo has conducted an internal study and analysis so that it is deemed necessary to make 3 (three) efforts, namely improving the employee remuneration system, keeping an eye on the condition and age of employees during promotion and employees transfer, and providing equal opportunities for all employees to develop hard skills and soft skills. These three efforts are carried out as part of Jamkrindo's efforts to provide work comfort for employees. [GRI 103-3]

Employee Assessment and Career Development

Assessment or review of employee performance is Jamkrindo's obligation as a form of responsibility for employee performance. The assessment is carried out annually, among others, to determine employee career paths in the form of promotions, transfers, rotations, or demotions. The company has individual KPIs and the employee performance appraisal process refers to these KPIs.

For excellent employee, they will get a promotion, namely an improvement in position to a higher level. With the promotion, it encourages employees to improve their abilities and enthusiasm to



meningkatkan kemampuan dan semangatnya untuk bekerja lebih produktif bagi perusahaan. Sedangkan mutasi dan rotasi diberlakukan dengan pertimbangan terkait kompetensi karyawan yang bersangkutan, pemenuhan kebutuhan unit kerja, refreshment dan replacement karyawan. Hasil penilaian karyawan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 404-3]

work more productively for the company. Meanwhile, transfers and rotations are applied with considerations related to the competence of the employee concerned, meeting the needs of work units, refreshment and replacement of employees. The full employee assessment results are presented in the following table: [GRI 103-3, 404-3]

Tabel Penilaian Karyawan dan Jenjang Karier 2019-2021
Employee Assessment Table and Career Paths 2019-2021

Tahun Year	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Peninjauan/Review Number of Employees Receiving Reviews	Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier (orang) Assessment Results and Career Development Relevance (person)		
		Promosi Promotion	Rotasi/Mutasi Rotation/Transfer	Demosi Demotion
2021	975 (100% dari total karyawan tetap) 975 (100% of total permanent employees)	68	168	0
2020	965 (100% dari total karyawan tetap) 965 (100% of total permanent employees)	56	104	0
2019	965 (100% dari total karyawan tetap) 965 (100% of total permanent employees)	56	57	0

Khusus mengenai promosi karyawan, tabel selengkapnya adalah sebagai berikut:

Specifically regarding employee promotions, the complete table is as follows:

Tabel Promosi Karyawan Tahun 2019-2021
Employee Promotion Table for 2019-2021

Jabatan Position	2021	2020	2019
Kepala Divisi/Setingkat Head of Division/Level	4	2	3
Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilayah Regional Leader/Deputy Regional Leader	2	-	3
Pemimpin Cabang Tipe A/B/C/D Branch Manager Type A/B/C/D	19	4	16
KaBag Kanpus/Wil/KCK/Cab Tipe A/B Head of Kanpus/Regional/KCK/Subsidiary Type A/B	23	17	20
KaBag Kanca Tipe C/D Head of Kanca Type C/D	14	28	20
Kepala KUP Head of KUP	6	5	4
Kasie Pusat/Wil/Cab A/B Head of Administrations Head office/Regional/Subsidiary A/B		-	-
Kasubsie Kanca Tipe C Kasubsie Kanca Tipe C	-	-	-
Kasubsie KUP Kasubsie KUP	-	-	-
Pranata Utama First Class Officer	-	-	-
Pranata Muda Junior Officer	-	-	-
Jumlah Total	68	56	66

Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status

Berdasarkan statusnya, karyawan Jamkrindo terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan *outsource*. Perbedaan status memengaruhi tunjangan yang diterima oleh karyawan. Rincian tunjangan yang diterima karyawan berdasarkan statusnya ditunjukkan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 401-2]

Employee Benefits Based on Status

Based on their status, Jamkrindo employees are divided into 3 (three) groups, namely permanent employees, contract employees, and outsourced employees. Differences in status affect the benefits received by employees. Details of the benefits received by employees based on their status are shown in the following table: [GRI 103-3, 401-2]

Tabel Tunjangan Karyawan Berdasarkan Status
Employee Benefits Table by Status

Jenis Tunjangan <i>Allowance Type</i>	Karyawan Tetap <i>Permanent Employees</i>		Karyawan Tidak Tetap <i>Non-Permanent Employees</i>		Karyawan Outsource <i>Outsourced employees</i>	
	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>	Ya <i>Yes</i>	Tidak <i>No</i>
Tunjangan Jabatan Tetap <i>Permanent Position Allowance</i>	√			√		√
Tunjangan Jabatan Tidak Tetap <i>Non-permanent Position Allowance</i>		√		√		√
Tunjangan Kesejahteraan <i>Welfare Benefits</i>	√			√		√
Tunjangan Wilayah <i>Territory Allowance</i>	√			√		√
Tunjangan Komunikasi <i>Communication Allowance</i>		√		√		√
Tunjangan Transportasi Pelatihan <i>Training Transportation Allowance</i>	√			√		√
Tunjangan Kesehatan <i>Health Benefit</i>	√			√		√

Cuti Melahirkan

Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Salah satunya terkait cuti melahirkan yang diberikan kepada karyawan perempuan yang hamil atau karyawan laki-laki yang istrinya hamil dan melahirkan. Cuti diberikan agar karyawan perempuan dapat menyiapkan kelahiran dengan baik; di sisi lain, dengan cuti tersebut, karyawan laki-laki bisa mendampingi istri dan mempersiapkan kelahiran anaknya dengan baik. [GRI 103-1]

Untuk karyawan perempuan, cuti melahirkan diberikan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan 1,5 (satu setengah) bulan sebelum perkiraan waktu melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 82. Adapun cuti bagi karyawan laki-laki yang istrinya hendak melahirkan, Jamkrindo memberikan waktu selama dua hari. [GRI 103-2]

Pada tahun 2021, karyawan perempuan yang memiliki hak cuti melahirkan dan mengambil hak tersebut sebanyak 32 orang. Setelah waktu cutinya habis, sebanyak 32 orang atau 100% telah kembali bekerja. Sementara itu, dari data tahun 2020, dari 23 karyawan wanita yang mengambil cuti melahirkan, kemudian kembali bekerja dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya adalah 23 orang atau 100%. Sementara itu, karyawan laki-laki yang memiliki hak mengambil cuti karena istrinya melahirkan pada tahun 2021 dan mengambil hak tersebut 25 orang. Adapun jumlah karyawan laki-laki yang kembali bekerja setelah hak cuti mendampingi istri berakhir pada tahun pelaporan adalah 25 orang atau 100%. Selanjutnya, sesuai data tahun 2020, dari 27 karyawan laki-laki yang mengambil cuti melahirkan, tercatat sebanyak 27 orang atau 100% telah kembali bekerja, dan tetap bekerja hingga 12 bulan berikutnya. [GRI 103-3, 401-3]

Maternity leave

Jamkrindo is committed to fulfilling the normative rights of employees as stipulated in the labor law. One of them is related to maternity leave which is given to female employees who are pregnant or male employees whose wives are pregnant and give birth. Leave is given so that female employees can prepare for the birth properly; on the other hand, with this leave, male employees can accompany their wives and prepare well for the birth of their children. [GRI 103-1]

For female employees, maternity leave is granted for 3 (three) months with the provisions of 1.5 (one and a half) months before the estimated time of delivery and 1.5 (one and a half) months after giving birth. This provision refers to the Manpower Act No. 13 of 2003 Article 82. As for the leave for male employees whose wives are about to give birth, Jamkrindo gives two days. [GRI 103-2]

In 2021, female employees who have the right to maternity leave and take this right are 32 person. After the time off, as much as 32 people or 100% have returned to work. Meanwhile, from the data for 2020, of the 23 female employees who took maternity leave, then returned to work and continued to work for the next 12 months were 23 people or 100%. Meanwhile, there are 25 male employees who have the right to take leave because their wife gave birth in 2021. The number of male employees who returned to work after the entitlement to accompanying wife's leave ended in the reporting year was 25 people or 100%. Furthermore, according to 2020 data, of the 27 male employees who took maternity leave, there were as many as 27 people or 100% have returned to work, and continue to work for the next 12 months. [GRI 103-3, 401-3]



Tabel Cuti Melahirkan Karyawan Tahun 2019-2021
Table of Maternity Leave for Employees for 2019-2021

Uraian Description	Perempuan Female					Laki-laki Male				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2021	Tiga bulan Three Months	29	29	29	29	2 hari 2 days	25	25	25	25
2020	Tiga bulan Three Months	23	23	23	23	2 hari 2 days	27	27	27	27
2019	Tiga bulan Three Months	17	17	17	17	2 hari 2 days	15	15	15	15

Keterangan:

1. Durasi cuti (hari)
2. Jumlah yang berhak cuti
3. Jumlah yang mengambil hak cuti
4. Jumlah kembali setelah cuti
5. Jumlah tetap bekerja hingga 12 bulan setelah mengambil cuti

Information:

1. Duration of leave (days)
2. Number of people entitled to leave
3. Number of people taking leave
4. The amount returned after leave
5. The number of still working up to 12 months after taking leave

Berdasarkan data di atas, karyawan yang mengambil cuti melahirkan, baik perempuan maupun laki-laki, dan kembali bekerja mencapai 100%. Hal itu menandakan bahwa Jamkrindo merupakan tempat kerja yang nyaman.

Based on the data above, employees who took maternity leave, both female and male, and returned to work reached 100%. This indicates that Jamkrindo is a comfortable place to work.

Hubungan Ketenagakerjaan

Perusahaan mengumumkan semua perubahan yang signifikan atas struktur organisasi dan operasional kepada karyawan dengan beberapa cara, di antaranya melalui surat elektronik, surat edaran, papan pengumuman atau sosialisasi secara langsung. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mengatur penyampaian informasi yang berdampak bagi karyawan. Pada tahun 2021, tidak terjadi perubahan kegiatan proses bisnis yang signifikan sehingga tidak memberikan dampak perubahan pada pola pekerjaan di lapangan. [GRI 103-3, 402-1]

Employment Relations

The Company announces all significant changes to the organizational structure and operations to employees in several ways including through electronic mail, circulars, bulletin boards or direct socialization. The Collective Labor Agreement (PKB) has regulated the delivery of information that has an impact on employees. In 2021, there will be no significant change in business process activities so that it does not have an impact on changes in work patterns in the field. [GRI 103-3, 402-1]

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, Jamkrindo secara berkesinambungan melakukan serangkaian pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi mereka. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dengan memegang prinsip kesetaraan. Selama tahun 2021, Perusahaan telah melakukan pendidikan dan pelatihan sebanyak 144 kali, yang diikuti oleh 3.820 karyawan. Jenis pengembangan kompetensi karyawan terdiri dari *hard skill* maupun *soft skill*. Rekapitulasi pengembangan karyawan selama tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut: [GRI 103-3, 404-2]

Employee Competency Development

To present employees with the best quality, Jamkrindo continuously conducts a series of education and training to develop their competencies. Education and training are held with the principle of equality. During 2021, the Company has conducted education and training for 144 times, which was attended by 3,820 employees. Types of employee competency development consist of hard skills and soft skills. The recapitulation of employee development for 2021 is presented in the following table: [GRI 103-3, 404-2]

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Table of Employee Competency Development for 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
1	Soft Skills Untuk Sekretaris Soft Skills For Secretary	2	20 Januari 2021 January 20, 2021	22 Januari 2021 January 22, 2021	PPM Manajemen
2	Workshop Training Need Analysis Workshop Training Need Analysis	3	28 Januari 2021 January 28, 2021	29 Januari 2021 January 29, 2021	Wahana Tatar Wirakelola

Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
3	Peran Corporate Secretary (Harmonisasi dan Sinkronisasi Kebijakan sesuai POJK 35/POJK.04/2014) <i>Role of Corporate Secretary (Harmonization and Synchronization of Policies according to POJK 35/POJK.04/2014)</i>	1	27 Januari 2021 January 27, 2021	27 Januari 2021 January 27, 2021	Infobank Institute
4	Pelatihan Calon Asesi Sertifikasi Kompetensi Skema Pengelolaan Hubungan Industrial <i>Training of Candidates for Competency Certification of Industrial Relations Management Scheme</i>	4	9 Februari 2021 February 9, 2021	9 Februari 2021 February 9, 2021	Forum Human Capital Indonesia
5	Practical Talent Management <i>Practical Talent Management</i>	3	13 Februari 2021 February 13, 2021	13 Februari 2021 February 13, 2021	Jasindo Insurance Academy
6	Workshop Instructional System Design <i>Instructional System Design Workshop</i>	4	15 Februari 2021 February 15, 2021	17 Februari 2021 February 17, 2021	Wahana Tatar Wirakelola
7	Pelatihan Calon Asesi Sertifikasi Kompetensi Skema Pengembangan Human Capital <i>Training for Candidates for Competency Certification for Human Capital Development Scheme</i>	4	16 Februari 2021 February 16, 2021	16 Februari 2021 February 16, 2021	Forum Human Capital Indonesia
8	Workshop Digitalisasi UMKM Bank Kalsel <i>Workshop on Digitizing MSME Bank Kalsel</i>	51	5 Februari 2021 February 5, 2021	5 Februari 2021 February 5, 2021	Eureka!/Josh Lie
9	Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) <i>Development Center (Jamkrindo Executive Development Program)</i>	11	18 Februari 2021 February 18, 2021	19 Februari 2021 February 19, 2021	PT Daya Dimensi Indonesia (DDI)
10	Pelatihan Calon Asesi Sertifikasi Kompetensi Skema Perencanaan Human Capital <i>Training for Candidates for Competency Certification for Human Capital Planning Scheme</i>	4	23 Februari 2021 February 23, 2021	23 Februari 2021 February 23, 2021	Forum Human Capital Indonesia
11	Penyusunan Perjanjian Utang Piutang dan Penjaminan yang Aman dari Segi Hukum <i>Preparation of Debt and Receivable Agreements and Guarantees that are Safe from a Legal Point of View</i>	3	23 Februari 2021 February 23, 2021	23 Februari 2021 February 23, 2021	Kontan Academy
12	Digital Public Training Interpretasi KPKU BUMN bulan Februari tahun 2021 <i>Digital Public Training Interpretation KPKU BUMN in February 2021</i>	3	24 Februari 2021 February 24, 2021	26 Februari 2021 February 26, 2021	Forum Ekselen BUMN
13	IT Project Management <i>IT Project Management</i>	2	25 Februari 2021 February 25, 2021	26 Februari 2021 February 26, 2021	Sharing Vision TM
14	Pendidikan Khusus Profesi Advokat Online Angkatan 3 Tahun 2021 <i>Special Education for Advocate Profession, 3rd Online Batch 2021</i>	2	26 Februari 2021 February 26, 2021	26 Maret 2021 March 26, 2021	Faizal Hafied & Partner Education of Law
15	Internal Control COSO -2013 <i>COSO Internal Control -2013</i>	21	9 Maret 2021 March 9, 2021	10 Maret 2021 March 10, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
16	Mens Rea dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Korporasi <i>Mens Rea and Criminal Liability in Corporate Management</i>	146	20 Februari 2021 February 20, 2021	20 Februari 2021 February 20, 2021	R. Narendra Jatna, S.H.,LL.M.
17	Internal Auditing - Standar Audit dan Kode Etik Profesi <i>Internal Auditing - Auditing Standards and Professional Code of Ethics</i>	21	18 Maret 2021 March 18, 2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
18	Antisipasi Perbankan Dalam Ekspansi Kredit Kendaraan Bermotor dan Properti Setelah Kebijakan LTV dan Relaksasi ATMR <i>Anticipation of Banking in Motor Vehicle and Property Loan Expansion After LTV Policy and RWA Relaxation</i>	6	19 Maret 2021 March 19, 2021	19 Maret 2021 March 19, 2021	Infobank Institute
19	Analisa Penjaminan Berbasis Manajemen Risiko Kredit <i>Guarantee Analysis Based on Credit Risk Management</i>	29	19 Maret 2021 March 19, 2021	1 April 2021 April 1, 2021	Banu Pratomo



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
20	Webinar "To Be a Master" dan "Saya Bahagia" Webinars "To Be a Master" and "I'm Happy"	214	27 Maret 2021 March 27, 2021	27 Maret 2021 March 27, 2021	Bpk. Imam Bustomi - Asisten Deputi Bidang TI KBUMN
21	Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Tahap II	1	10 Maret 2021 March 10, 2021	10 Maret 2021 March 10, 2021	PT Jamkrindo
22	Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Tahap II Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Phase II	2	22 Maret 2021 March 22, 2021	22 Maret 2021 March 22, 2021	PT Jamkrindo
23	Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Tahap II Development Center (Jamkrindo Executive Development Program) Phase II	1	26 Maret 2021 March 26, 2021	26 Maret 2021 March 26, 2021	PT Jamkrindo
24	Advanced Human Capital Accomplished	1	24 Maret 2021 March 24, 2021	29 Mei 2021 May 29, 2021	CHRUnika Atma
25	Pelatihan Change Agent IFG IFG Change Agent Training	18	30 Maret 2021 March 30, 2021	30 Maret 2021 March 30, 2021	KAP KPMG
26	Penggunaan Tool Sewa sesuai PSAK 74 Use of rental tools according to PSAK 74	20	18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Maret 2021 March 18, 2021	IFG
27	Workshop Change Agent IFG IFG Change Agent Workshop	21	25 Maret 2021 March 25, 2021	26 Maret 2021 March 26, 2021	IFG
28	(Workshop) Effective Report Writing For Internal Audit	1	8 April 2021 April 8, 2021	9 April 2021 April 9, 2021	Yayasan Pendidikan Internal Audit
29	"To Be a Master" dan "Saya Bahagia" "To Be a Master" and "I'm Happy"	81	31 Maret 2021 March 31, 2021	31 Maret 2021 March 31, 2021	Bpk. Imam Bustomi - Asisten Deputi Bidang TI KBUMN
30	Pelatihan Antikorupsi Batch 1: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan Serta Pencegahannya Anti-Corruption Training Batch 1: Recognizing and Understanding Corruption in SOEs in the Financial Services Sector and its Prevention	8	13 April 2021 April 13, 2021	15 April 2021 April 15, 2021	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
31	Pelatihan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification Training	40	12 April 2021 April 12, 2021	13 April 2021 April 13, 2021	FKAP
32	Pelatihan Peran Digitalisasi pada Manajemen Risiko Training on the Role of Digitization in Risk Management	29	23 April 2021 April 23, 2021	23 April 2021 April 23, 2021	Dr. Tjahjanto, S.Kom, MM Dr. Tjahjanto, S.Kom, MM
33	Pelatihan Antikorupsi Batch 2: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan Serta Pencegahannya Anti-Corruption Training Batch 2: Recognizing and Understanding Corruption in SOEs in the Financial Services Sector and its Prevention	7	20 April 2021 April 20, 2021	22 April 2021 April 22, 2021	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
34	Pelatihan Antikorupsi Batch 3: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan Serta Pencegahannya Anti-Corruption Training Batch 3: Recognizing and Understanding Corruption in SOEs in the Financial Services Sector and its Prevention	6	27 April 2021 April 27, 2021	29 April 2021 April 29, 2021	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
35	Training Awareness & Training Internal Auditor SMAP ISO 37001:2016	28	21 April 2021 April 21, 2021	23 April 2021 April 23, 2021	Konsultan ERP
36	Training Awareness & Training Internal Auditor SMAP ISO 37001:2016	17	21 April 2021 April 21, 2021	23 April 2021 April 23, 2021	Konsultan ERP
37	Workshop Penggunaan Sistem ERpAplikasi Odoo Application ERpSystem Workshop	51	26 April 2021 April 26, 2021	29 April 2021 April 29, 2021	Cerval Consulting
38	Workshop Penggunaan Sistem ERpAplikasi Odoo Application ERpSystem Workshop	90	26 April 2021 April 26, 2021	29 April 2021 April 29, 2021	Cerval Consulting
39	Workshop Penggunaan Sistem ERpAplikasi Odoo Application ERpSystem Workshop	111	26 April 2021 April 26, 2021	29 April 2021 April 29, 2021	Cerval Consulting



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
40	Development Center Jamkrindo Executive Development Program	1	20 April 2021 April 20, 2021	22 April 2021 April 22, 2021	PT Daya Dimensi Indonesia
41	Webinar Pencegahan Korupsi Corruption Prevention Webinar	95	6 Mei 2021 May 6, 2021	6 Mei 2021 May 6, 2021	IFG (Narsum Komisi Pemberatas Korupsi)
42	Pelatihan Liquidity Stress Test Liquidity Stress Test Training	36	20 Mei 2021 May 20, 2021	21 Mei 2021 May 21, 2021	PT Nayottama Dinamika Indonesia
43	Pelatihan Review dan Coaching Progres Implementasi Formulir SMAP ISO 37001 Review and Coaching Training on the Progress of Implementation of the ISO 37001 SMAP Form	22	24 Mei 2021 May 24, 2021	24 Mei 2021 May 24, 2021	Cerval Consulting
44	Pelatihan Peran Teknologi IT & Digitalisasi pada Liquidity Stress Test IT Technology & Digitalization Role Training on Liquidity Stress Test	33	28 Mei 2021 May 28, 2021	28 Mei 2021 May 28, 2021	Dr. Tjahjanto, S. Kom, MM
45	Pelatihan Fraud Auditing Fraud Auditing Training	8	3 Mei 2021 May 3, 2021	7 Mei 2021 May 7, 2021	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
46	Pelatihan Audit Forensik Forensic Audit Training	8	19 Mei 2021 May 19, 2021	21 Mei 2021 May 21, 2021	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing
47	Executive Mindfulness: Silent Mindful Listening for Leaders	27	27 Mei 2021 May 27, 2021	27 Mei 2021 May 27, 2021	Kampoong Hening
48	Pelatihan Persiapan Pelaksanaan Internal Auditor SMAP ISO 37001:2016	24	7 Juni 2021 June 7, 2021	7 Juni 2021 June 7, 2021	FKAP
49	IT Risk Management in Banking Sector Based on POJK 38/POJK.03/2016 dan International Standard	6	11 Juni 2021 June 11, 2021	11 Juni 2021 June 11, 2021	Infobank
50	Pelatihan Finnon: Understanding Financial Statements Finnon Training: Understanding Financial Statements	9	15 Juni 2021 June 15, 2021	5 Juli 2021 July 5, 2021	PPM Manajemen
51	Pelatihan Extracting Value From Successful Holding Training on Extracting Value From Successful Holding	3	15 Juni 2021 June 15, 2021	18 Juni 2021 June 18, 2021	PTC (Pertamina Training & Consulting)
52	Pelatihan Business Acumen for Everyone Business Acumen Training for Everyone	4	17 Juni 2021 June 17, 2021	17 Juni 2021 June 17, 2021	Kontan Academy
53	4DX Rencana Aksi Implementasi Solusi Pengelolaan Management Unit Kerja 4DX Action Plan for Implementation of Work Unit Management Solutions	13	2 Juni 2021 June 2, 2021	2 Juni 2021 June 2, 2021	Banu Pratomo
54	Pelatihan Manajemen Bisnis Konsultan Bisnis Business Consultant Business Management Training	3	21 April 2021 April 21, 2021	30 April 2021 April 30, 2021	Indonesia Business Consultant Federation (IBFC)
55	Pelatihan e-SPT Brevet Pajak Terapan AB AB Applied Tax Brevet e-SPT training	4	19 Mei 2021 May 19, 2021	9 Agustus 2021 August 9, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
56	Workshop Managing Risks of Innovation and Digital Transformation in The New Economy Era	1	29 April 2021 April 29, 2021	29 April 2021 April 29, 2021	Indonesian Institute for Corporate Directorship
57	Webinar Legal and Compliance Aspect in Fraud Risk Management	8	23 Juni 2021 June 23, 2021	23 Juni 2021 June 23, 2021	IPC Learning & Consulting
58	Pelatihan Talent Management Transformation: Strategi Meningkatkan Daya Saing di Era Digital Talent Management Transformation Training: Strategies to Increase Competitiveness in the Digital Age	2	23 Juni 2021 June 23, 2021	24 Juni 2021 June 24, 2021	Infobank
59	Pelatihan Memahami Analisa Kredit dan Teknik Penyusunan Proposal Kredit Training on Understanding Credit Analysis and Credit Proposal Preparation Techniques	6	24 Juni 2021 June 24, 2021	25 Juni 2021 June 25, 2021	Infobank



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
60	Pelatihan Antikorupsi Batch 4: Mengenali dan Memahami Korupsi pada BUMN Sektor Jasa Keuangan Serta Pencegahannya <i>Anti-Corruption Training Batch 4: Recognizing and Understanding Corruption in SOEs in the Financial Services Sector and its Prevention</i>	7	5 Juli 2021 July 5, 2021	7 Juli 2021 July 7, 2021	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
61	Pelatihan Lanjutan SPI BUMN 2021 : E-Learning Antikorupsi dan Integritas Umum SOE SPI Advanced Training 2021: Anti-Corruption E-Learning and General Integrity	4	5 Juli 2021 July 5, 2021	8 Juli 2021 July 8, 2021	Pusat Edukasi Antikorupsi
62	Webinar Kolaborasi Workstream Predictability and Investment Asset Liability Management	8	15 Juli 2021 July 15, 2021	15 Juli 2021 July 15, 2021	IFG (PMO)
63	Pemahaman Teknik Supervisi Monitoring Kredit Untuk Memitigasi Risiko Kredit Bermasalah	4	12 Juli 2021 July 12, 2021	14 Juli 2021 July 14, 2021	Banking Finance Development Center (BFDC)
64	Pelatihan Project Procurement and Risk Management	3	13 Juli 2021 July 13, 2021	16 Juli 2021 July 16, 2021	PPM Manajemen
65	Workshop Digital Mindset IFG	5	14 Juli 2021 July 14, 2021	15 Juli 2021 July 15, 2021	IFG (PT Enigma Cipta Humanika)
66	Workshop Liability Profile	16	19 Juli 2021 July 19, 2021	30 Juli 2021 July 30, 2021	IFG
67	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 1: Branch Manager Positive Thinking	96	16 Juli 2021 July 16, 2021	16 Juli 2021 July 16, 2021	Jamkrindo/Bapak Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan)
68	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 2: Business Aspect - Rencana Aksi Pengelolaan KC Medan BMDP Series Deepening in Order to Strengthen Experiential Learning: Series 2: Business Aspect - Medan Branch Office	96	23 Juli 2021 July 23, 2021	23 Juli 2021 July 23, 2021	PT Jamkrindo/Bapak Winddy Dwi Cahyo (Pemimpin Cabang Medan)
69	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 3: Financial Aspect- Rencana Aksi Pengelolaan KC Jakarta dan Roll Out Implementasi Document Management System (DMS) BMDP Series Deepening in Order to Strengthen Experiential Learning: Series 3: Financial Aspect- Jakarta Branch Office Management Action Plan and Roll Out of Document Management System (DMS) Implementation	94	2 Agustus 2021 August 2, 2021	2 Agustus 2021 August 2, 2021	PT Jamkrindo 1. Bapak Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan) 2. Bapak Abdul Bari (Sekretaris Perusahaan) 3. Bapak Mohammad Robith Azmi (Pemimpin Cabang Jakarta)
70	Webinar Corporate Governance Series: Advancing Sustainability: Governing and Reporting Forging a Sustainable Future for Better Indonesia	2	8 Juli 2021 July 8, 2021	8 Juli 2021 July 8, 2021	IICD
71	Pelatihan Sistem Kearsipan Digital Digital Archive System Training	5	12 Agustus 2021 August 12, 2021	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Infobank
72	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Sesi 1: Data Management in Banking Industry Experience	55	10 Agustus 2021 August 10, 2021	10 Agustus 2021 August 10, 2021	PT Jamkrindo/Nefo P. Trianggono
73	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Sesi 2: Data Management in Banking Industry Experience	59	13 Agustus 2021 August 13, 2021	13 Agustus 2021 August 13, 2021	PT Jamkrindo/Nefo P. Trianggono



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
74	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Sesi 3: Operational Aspect	92	20 Agustus 2021 August 20, 2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	PT Jamkrindo/Ahmad Arifin
75	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 9 BMDP Series: Deepening in Order to Strengthen Experiential Learning: Series 9	54	5 November 2021 November 5, 2021	5 November 2021 November 5, 2021	PT Jamkrindo
76	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 10 BMDP Series: Deepening in Order to Strengthen Experiential Learning: Series 10	40	18 November 2021 November 18, 2021	18 November 2021 November 18, 2021	PT Jamkrindo
77	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Sesi 4: Manajemen Informasi Sistem (sesi 1) BMDP Series: Deepening in Order to Strengthen Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Session 4: System Information Management (session 1)	95	27 Agustus 2021 August 27, 2021	27 Agustus 2021 August 27, 2021	PT Jamkrindo/Bapak Tjahjanto
78	Pemahaman Teknik Supervisi Monitoring Kredit Untuk Memitigasi Risiko Kredit Bermasalah Understanding of Credit Monitoring Supervision Techniques to Mitigate Non-performing Credit Risk	4	18 Agustus 2021 August 18, 2021	20 Agustus 2021 August 20, 2021	BFDC
79	Webinar Sukses Mulia Leadership Session "Team Leadership" Sukses Mulia Webinar Leadership Session "Team Leadership"	2	3 Agustus 2021 August 3, 2021	3 Agustus 2021 August 3, 2021	Kubik Leadership
80	Webinar Sukses Mulia Leadership Session "Essential Leadership" Sukses Mulia Webinar Leadership Session "Essential Leadership"	2	17 Agustus 2021 August 17, 2021	17 Agustus 2021 August 17, 2021	Kubik Leadership
81	Webinar Sukses Mulia Leadership Session "Potensial Leadership" Sukses Mulia Webinar Leadership Session "Potensial Leadership"	2	31 Agustus 2021 August 31, 2021	31 Agustus 2021 August 31, 2021	Kubik Leadership
82	Webinar Sukses Mulia Leadership Session "Star Employee" Sukses Mulia Webinar Leadership Session "Star Employee"	2	7 September 2021 September 7, 2021	7 September 2021 September 7, 2021	Kubik Leadership
83	Pelatihan Sistem Karsipan Digital Digital Archive System Training	5	12 Agustus 2021 August 12, 2021	12 Agustus 2021 August 12, 2021	Infobank
84	FHCI Leaders Talk Sharing Session "Leading Digital" FHCI Leaders Talk Sharing Session "Leading Digital"	14	19 Agustus 2021 August 19, 2021	19 Agustus 2021 August 19, 2021	FHCI
85	Creative Selling Techniques	1	24 Agustus 2021 August 24, 2021	26 Agustus 2021 August 26, 2021	PPM Manajemen
86	GRC Webinar Series Enhancing Your ERM Enhancing Your ERM	4	30 Agustus 2021 August 30, 2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021	LSPMR
87	Webinar Joint Regional Seminar (JRS) dengan Tema "The Post-pandemic Actuarial World" Webinar Joint Regional Seminar (JRS) with the Theme "The Post-pandemic Actuarial World"	1	8 September 2021 September 8, 2021	28 September 2021 September 28, 2021	Persatuan Aktuaris Indonesia



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
88	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Sesi 5: Manajemen Informasi Sistem (sesi 2) BMDP Series <i>Deepening in the Context of Strengthening</i> Experiential Learning: Series 4: Operational Aspect Session 5: System Information Management (session 2)	91	3 September 2021 September 3, 2021	3 September 2021 September 8, 2021	PT Jamkrindo / Bapak Tjahjanto
89	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 5: People Aspect KC Palembang BMDP Series <i>Deepening in the Context of Strengthening</i> Experiential Learning: Series 5: People Aspect KC Palembang	58	10 September 2021 September 10, 2021	10 September 2021 September 10, 2021	PT Jamkrindo / Ibu Widyaningrum
90	Assignment BMDP Series Profiling SDM Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Series 5: People Aspect Assignment BMDP Series	56	9 September 2021 September 9, 2021	10 September 2021 September 10, 2021	PT Jamkrindo / Ibu Widyaningrum
91	Pelatihan Pendamping UMKM Yunior	40	10 September 2021 September 10, 2021	18 September 2021 September 18, 2021	LSP Perkoperasian Indonesia
92	IT Security Awareness (sesi 1)	73	28 September 2021 September 28, 2021	28 September 2021 September 28, 2021	PT Jamkrindo Dr. Tjahjanto Dr. Shelvie
93	IT Security Awareness (sesi 2)	148	29 September 2021 September 29, 2021	29 September 2021 September 29, 2021	PT Jamkrindo Dr. Tjahjanto Dr. Shelvie
94	Microsoft Excel for Accountant	4	23 September 2021 September 23, 2021	25 September 2021 September 25, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
95	Macro and VBA Microsoft Excel for Accountant	1	28 September 2021 September 28, 2021	30 September 2021 September 30, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
96	Pelatihan Making Digital Talent BUMN SOE Digital Talent Making Training	85	16 September 2021 September 16, 2021	30 September 2021 September 30, 2021	Digital Learning Institute (DLI) by Telkom
97	Workshop Pengembangan GRC GRC Development Workshop	32	4 Oktober 2021 October 4, 2021	4 Oktober 2021 October 4, 2021	Ir. Jerry Marmen, M. S., M.Ec, M.Mgt,PhD (GRC Expert)
98	Program Sustainable Sharing (SISHA) Industrial Realtions "Tantangan Industrial Peace: Menjaga Produktivitas di Masa Pandemi" Sustainable Sharing Program (SISHA) Industrial Realtions "The Challenge of Industrial Peace: Maintaining Productivity in a Pandemic Period"	2	29 September 2021 September 29, 2021	29 September 2021 September 29, 2021	FHCI dan Pertamina
99	Training Special Directorship Program	1	23 Agustus 2021 August 23, 2021	25 Agustus 2021 August 25, 2021	Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
100	Executive Development Program (EDP)	8	6 Oktober 2021 October 6, 2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021	LMFEB UI
101	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan Experiential Learning: Operational Aspect sesi 6: Digital Mindset	121	1 Oktober 2021 October 1, 2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021	Bapak Imam Bustomi



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
102	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan <i>Experiential Learning:</i> <i>People Aspect Sesi 2: Managing People</i>	107	8 Oktober 2021 October 8, 2021	8 Oktober 2021 October 8, 2021	Sulis Usdoko
103	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan <i>Experiential Learning:</i> <i>Operational Aspect: Digital Mindset (sesi 2)</i> Presentasi Assignment Digital Mindset	54	15 Oktober 2021 October 15, 2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021	Imam Bustomi
104	BMDP Series Pendalaman Dalam Rangka Penguatan <i>Experiential Learning:</i> <i>Operational Aspect: Digital Leadership</i>	56	22 Oktober 2021 October 22, 2021	22 Oktober 2021 October 22, 2021	Imam Bustomi
105	Risk Based Budgeting	1	6 Oktober 2021 October 6, 2021	8 Oktober 2021 October 8, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
106	Corporate Cash Management	1	21 Oktober 2021 October 21, 2021	23 Oktober 2021 October 23, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
107	Budgeting Practices and Cash Flow Forecasting Techniques	3	26 Oktober 2021 October 26, 2021	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Ikatan Akuntansi Indonesia
108	Workshop Internal Audit for Organizational Resilience	6	20 Oktober 2021 October 20, 2021	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Perhimpunan Auditor Internal Indonesia
109	Strategic Discussion Forum dan Sharing Best Practices — Business Judgment Rule	2	26 Oktober 2021 October 26, 2021	28 Oktober 2021 October 28, 2021	Pertamina Training and Consulting
110	Risk Management Batch 2	3	27 Oktober 2021 October 27, 2021	28 Oktober 2021 October 28, 2021	IFG, LPP Agro
111	Asset Liability Management	3	29 Oktober 2021 October 29, 2021	30 Oktober 2021 October 30, 2021	IFG, LPP Agro
112	Pelatihan Problem Solving dan Decision Making Batch 2 <i>Problem Solving and Decision Making Batch 2</i>	5	18 Oktober 2021 October 18, 2021	23 Oktober 2021 October 23, 2021	PPM Manajemen Training
113	Digital Salesmanship Marketing Strategy In Digital Era	5	6 Oktober 2021 October 6, 2021	7 Oktober 2021 October 7, 2021	BFDC
114	Workshop Pengembangan GRC Batch II <i>GRC Batch II Development Workshop</i>	16	13 Oktober 2021 October 13, 2021	13 Oktober 2021 October 13, 2021	Ir. Jerry Marmen, M. S., M.Ec, M.Mgt,PhD (GRC Expert)
115	Pelatihan Business Intelligence dan Data Science <i>Business Intelligence and Data Science Training</i>	5	9 Oktober 2021 October 9, 2021	31 Oktober 2021 October 31, 2021	Sekolah Data Pacmann
116	Market Outlook & Portfolio Management	5	9 November 2021 November 9, 2021	9 November 2021 November 9, 2021	PT Duage Management Indonesia
117	Digital Marketing: A Strategic Perspective Online Program	1	12 Mei 2021 May 12, 2021	7 Mei 2021 May 7, 2021	Yale SOM Executive Education
118	Cadangan Teknis Asuransi <i>Insurance Technical Reserve</i>	3	12 November 2021 November 12, 2021	19 November 2021 November 19, 2021	Padma Aktuaria Consulting
119	Pendidikan Ahli K3 Umum Sertifikasi Kemnaker <i>Education for General K3 Expert Certification Ministry of Manpower</i>	2	11 Oktober 2021 October 11, 2021	25 Oktober 2021 October 25, 2021	Phitagoras Training and Consulting
120	Petugas P3K Sertifikasi Kemnakertrans RI <i>First Aid Officer Certification Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration</i>	1	16 November 2021 November 16, 2021	18 November 2021 November 18, 2021	Formasi Training
121	Pelatihan Manajemen Risiko <i>Risk Management Training</i>	3	6 Oktober 2021 October 6, 2021	7 Oktober 2021 October 7, 2021	Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI)
122	Workshop Good Corporate Governance (GCG)	6	11-13 Oktober 2021 October 11-13, 2021	21 Oktober 2021 October 21, 2021	Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI
123	Workshop Good Corporate Governance (GCG) Batch 2	3	1-3 November 2021 November 1-3, 2021	8 November 2021 November 8, 2021	Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI



Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021
Tabel Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2021

No	Nama Training Training Name	Jumlah Peserta Number of Participants	Tanggal Date		Vendor/Tempat Training Training Vendor/Venue
			Mulai Start	Selesai End	
124	Workshop Penerapan Management Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Batch 1 Workshop on Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology Batch 1	32	19 November 2021 November 19, 2021	20 November 2021 November 20, 2021	PT Jamkrindo
125	The 3rd Indonesia Human Capital Summit 2021	86	16 November 2021 November 16, 2021	17 November 2021 November 17, 2021	IFG
126	Directorship Development Program (DDP) Preliminary Assignment	15	18 Oktober 2021 18 October 2021	23 Oktober 2021 23 October 2021	PPM Manajemen
127	Directorship Development Program (DDP) Virtual Class Experience 1: Identify the Challenge to transform	15	25 Oktober 2021 25 October 2021	30 Oktober 2021 30 October 2021	PPM Manajemen
128	Directorship Development Program (DDP) Workplace Implementation Project Phase 1	15	1 November 2021 November 1, 2021	5 November 2021 November 5, 2021	PPM Manajemen
129	Directorship Development Program (DDP) Virtual Class Experience 2: Designing Transformation Roadmap	15	8 November 2021 November 8, 2021	13 November 2021 November 13, 2021	PPM Manajemen
130	Directorship Development Program (DDP) Individual & Group Coaching Experience 2: Designing Transformation Roadmap	15	8 November 2021 November 8, 2021	13 November 2021 November 13, 2021	PPM Manajemen
131	Directorship Development Program (DDP) Workplace Implementation Project Phase 2	15	15 November 2021 November 15, 2021	19 November 2021 November 19, 2021	PPM Manajemen
132	Directorship Development Program (DDP) Virtual Class Experience 3: Leading the Transformation	15	22 November 2021 November 22, 2021	27 November 2021 November 27, 2021	PPM Manajemen
133	Directorship Development Program (DDP) Workplace Implementation Project Phase 3	15	29 November 2021 November 29, 2021	3 Desember 2021 3 December 2021	PPM Manajemen
134	Digital Marketing: A Strategic Perspective Online Program	1	12 Mei 2021 May 12, 2021	7 Juli 2021 July 7, 2021	Yale SOM Executive Education
135	13th Global Peter Drucker Forum 2021	3	10 November 2021 November 10, 2021	17 November 2021 November 17, 2021	Global Peter Drucker Forum
136	Workshop Penerapan Management Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Batch 2 Workshop on Application of Risk Management in the Use of Information Technology Batch 2	185	3 Desember 2021 December 3, 2021	5 Desember 2021 December 5, 2021	PT Jamkrindo
137	Workshop Penerapan Management Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Batch 3 Workshop on Application of Risk Management in the Use of Information Technology Batch 3	65	17 Desember 2021 December 17, 2021	18 Desember 2021 December 18, 2021	PT Jamkrindo
138	Basic Legal Drafting	2	15 November 2021 November 15, 2021	17 November 2021 November 17, 2021	PT LPP Agro Nusantara
139	Basic Corporate Finance	9	15 November 2021 November 15, 2021	17 November 2021 November 17, 2021	PT LPP Agro Nusantara
140	Intermediate Corporate Finance	8	13 November 2021 November 13, 2021	15 November 2021 November 15, 2021	PT Duage Manajemen Indonesia
141	Workshop Training Evaluation	2	22 Oktober 2021 October 22, 2021	29 Oktober 2021 October 29, 2021	PT Wahana Tatar Wirakelola
142	Professional Etiquete in Workplace	4	22 Oktober 2021 October 22, 2021	12 November 2021 November 12, 2021	PT Duage Manajemen Indonesia
143	Pelatihan Making Digital Talent BUMN	135	14 September 2021 September 14, 2021	30 September 2021 September 30, 2021	Digital Learning Institute (DLI) by Telkom
144	2021 Annual Technical Update: Financial Services Accounting & Tax Webinar	5	30 November 2021 November 30, 2021	30 November 2021 November 30, 2021	PwC Financial Services Assurance & Tax Specialists



Sesuai dengan rekapitulasi pengembangan kompetensi di atas, total jam pelatihan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 274.011 jam, naik dibandingkan tahun 2020, yang mencapai 237.290 jam. Kenaikan terjadi karena kebutuhan pengembangan kompetensi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun rerata jam pelatihan menurut level jabatan disajikan dalam tabel berikut: [OJK F.22]

In accordance with the competency development recapitulation above, the total hours of training in 2021 were recorded at 274,011 hours, an increase compared to 2020, which reached 237,290 hours. The increase was due to the need for competency development which was higher than the previous year. The average hours of training by position level are presented in the following table: [OJK F.22]

Tabel Pelatihan tahun 2019-2021
2019-2021 Training Table

Uraian <i>Description</i>	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan <i>Amount of Employees who Getting Training</i>			Jam Pelatihan <i>Training Hours</i>			Rata-rata Jam Pelatihan Setiap Karyawan <i>Average Hours of Each Employee Training</i>		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Keseluruhan <i>Total</i>	26.833	28.359	13.124	274.011	237.290	96.423	284,31	254,06	99,82
Berdasarkan kategori jabatan karyawan <i>Sorted by Employee Position</i>									
Manajemen <i>Management</i>	10.733	11.344	5.249	156.186	94.916	38.569	113,724	101,624	39,928
Staf <i>Staff</i>	16.100	17.015	7.875	117.825	142.374	57.854	170,586	127,436	59,892

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021, terlihat bahwa rerata jam pelatihan level staf tercatat sebanyak 170,586 jam/tahun, sedangkan level manajemen, yang terdiri dari level L1 hingga L3 sebanyak 113,724 jam/tahun. Perbedaan rerata jam pelatihan antara manajemen dan staf terjadi karena penyesuaian kebutuhan yang dimiliki oleh karyawan maupun perusahaan.

Selanjutnya, untuk membiayai berbagai program pendidikan dan pelatihan di atas, per 31 Desember 2021, Jamkrindo mengeluarkan biaya sebesar Rp18,5 miliar, turun dibandingkan tahun 2020, yang mencapai Rp19,11 miliar. Penurunan biaya pendidikan dan pelatihan terjadi karena pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dijalankan dengan metode *online learning*.

Based on the table above, in 2021, it can be seen that the average hours of training at the staff level were 170.586 hours/year, while the management level, consisting of L1 to L3 levels, was 113.724 hours/year. The difference in the average hours of training between management and staff occurs because of the adjustment to the needs of both employees and the company.

Furthermore, to finance the sharing of the education and training programs above, as of December 31, 2021, Jamkrindo spent IDR18.5 billion, decrease compared to 2020, which reached IDR19.11 billion. The decrease in education and training costs occurred because the training carried out in 2021 was carried out using the online learning method.

Tabel Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019-2021
Table of Education and Training Cost for 2019-2021

Tahun <i>Year</i>	Realisasi <i>Realization</i>
2021	Rp18,53 miliar/billion
2020	Rp19,11 miliar*/billion*
2019	Rp26,79 miliar/billion

*disajikan kembali
*restated

Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa [OJK F.19]

Jamkrindo senantiasa patuh terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan usia minimal dan jam kerja karyawan. Kepatuhan tersebut sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menghapus praktik pekerja anak dan kerja paksa.

Child Labor and Forced Labor [OJK F.19]

Jamkrindo always complies with various labor regulations in Indonesia, including those relating to the minimum age and working hours of employees. This compliance is in line with the Company's commitment to eliminating the practice of child labor and forced labor.



Sejalan dengan komitmen itu, Perusahaan memastikan bahwa seluruh karyawan, baik tetap, kontrak maupun *outsource* telah berusia di atas 18 tahun atau kategori dewasa. Sementara itu, berkaitan dengan jam kerja, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pelaksanaan jam kerja bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini, Perusahaan menentukan bahwa jam kerja karyawan adalah 40 jam per minggu dengan waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu. Ketentuan tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 77, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dengan ketentuan seperti itu, maka setiap karyawan memiliki waktu istirahat yang cukup. Sementara itu, untuk karyawan yang menjalani lembur karena jenis pekerjaannya, yaitu melebihi 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, mereka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari kerja paksa.

Selain merupakan implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tentang usia karyawan di Jamkrindo selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). Adapun pemberlakuan jam kerja dengan batasan waktu yang jelas sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Kepatuhan Jamkrindo terhadap regulasi ketenagakerjaan dengan tidak mempekerjakan anak serta tidak ada kerja paksa membawa hasil dengan tidak adanya sanksi atau denda dari regulator terkait kedua isu tersebut. Selain itu, selama tahun pelaporan, Perusahaan juga tidak mencatat adanya pengaduan terkait pekerja anak dan kerja paksa.

Upah Minimum Regional [OJK F.20]

Selain tidak mempekerjakan anak serta menghindarkan terjadinya kerja paksa, Jamkrindo juga berkomitmen untuk memenuhi regulasi ketenagakerjaan yang berkaitan dengan imbalan kerja atau upah karyawan. Dalam memberikan upah, termasuk untuk karyawan tetap level terendah, Perusahaan menerapkan prinsip tanpa diskriminasi sehingga setiap karyawan memperoleh perlakuan yang sama. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, pemberian upah minimum untuk karyawan level terendah, diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak bagi karyawan. Besaran upah minimum menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok, tingkat inflasi, standar kelayakan hidup, dan variabel lainnya di masing-masing provinsi di mana Perusahaan beroperasi.

In line with that commitment, the Company ensures that all employees, whether permanent, contract or outsourced, are over 18 years of age or in the adult category. Meanwhile, with regard to working hours, Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation states that the implementation of working hours for workers/laborers in companies is regulated in work agreements, company regulations, or collective labor agreements. In this case, the Company determines that the employee's working hours are 40 hours per week with 5 (five) days working a week. These provisions are in line with the provisions in article 77, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, namely 8 (eight) hours in 1 (one) day and 40 (forty) hours in 1 (one) week for 5 (five) working days in 1 (one) week. Complying with the provisions, every employee has sufficient rest time. Meanwhile, for employees who undergo overtime due to the type of work, which exceeds 40 (forty) hours in 1 (one) week, they will receive compensation in accordance with applicable regulations so as to avoid forced labor.

Apart from implementing the Manpower Act and the Job Creation Act, the provisions regarding the age of employees at Jamkrindo are in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (ILO Convention Regarding the Minimum Age to be Admitted to Work), and Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2000 concerning Ratification of ILO Convention No. 138. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour). The implementation of working hours with clear time limits is in line with the Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 1999 concerning Ratification of the ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labor.

Jamkrindo's compliance with labor regulations by not employing children and no forced labor has resulted in no sanctions or fines from regulators related to these two issues. In addition, during the reporting year, the Company also did not record any complaints related to child labor and forced labor.

Regional Minimum Wage [OJK F.20]

In compliance to not employing children and avoiding forced labor, Jamkrindo is also committed to complying with labor regulations relating to employee benefits or wages. In providing wages, including for the lowest level permanent employees, the Company applies the principle of non-discrimination so that every employee gets the same treatment. In accordance with applicable regulations, the provision of minimum wages for the lowest level employees is directed at achieving the needs of a decent living for employees. The minimum wage is adjusted to the price of basic needs, inflation rate, standard of living, and other variables in each province where the Company operates.

Pemberian upah minimum yang berlaku di Jamkrindo telah selaras dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. Selain itu, pemberian upah minimum untuk tahun 2021 juga telah memenuhi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/11/HK.04/X/2020 tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai contoh, upah minimum yang diberikan Jamkrindo untuk karyawan tetap di tingkat terendah di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp4.416.186 atau 100% dari UMR di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah operasi. Dalam memberikan upah, termasuk remunerasi, Jamkrindo tidak membedakan berdasarkan gender, melainkan berpatokan pada kompetensi karyawan.

Kepuasan Karyawan

Untuk memastikan apakah karyawan puas dengan komitmen Perusahaan dan memiliki keterikatan yang baik dengan Perusahaan, maka secara regular Jamkrindo melakukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Survei dilakukan untuk melihat persepsi karyawan dalam aspek kepuasan dan keterikatan mereka terhadap Perusahaan, kebijakan, serta program pengelolaan SDM yang dijalankan selama tahun 2021.

Survei kepuasan karyawan Jamkrindo pada tahun 2021 dilakukan di Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kanwil, dan KCK Unit Kerja Jamkrindo dengan jumlah responden sejumlah 600 karyawan dari 903 karyawan tetap. Responden survei ini didominasi oleh karyawan laki-laki dengan jumlah 62,7% dan sebanyak 37,3% karyawan perempuan.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan engagement karyawan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

The provision of minimum wages in force at Jamkrindo is in line with the Manpower Act, the Job Creation Act and the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 226 of 2000 concerning Amendments to Article 1, Article 3, Article 4, Article 8, Article 11, Article 20 , and Article 21 of the Regulation of the Minister of Manpower No. PER-01/MEN/1999 concerning Minimum Wage. In addition, the provision of minimum wages for 2021 has also complied with the Circular Letter of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. M/11/HK.04/X/2020 of 2020 concerning Minimum Wage Determination in 2021 during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. For example, the minimum wage provided by Jamkrindo for permanent employees at the lowest level in DKI Jakarta Province is IDR4,416,186 or 100% of the UMR in the DKI Jakarta area. This policy applies to all areas of operation. In providing wages, including remuneration, Jamkrindo does not differentiate based on gender, but is based on employee competence.

Employee Satisfaction

To ensure that employees are satisfied with the Company's commitments and have a good relationship with the Company, Jamkrindo regularly conducts employee satisfaction and engagement surveys. The survey was conducted to see employee perceptions in terms of their satisfaction and engagement with the Company, policies, and HR management programs carried out during 2021.

The Jamkrindo employee satisfaction survey in 2021 was conducted at the Head Office, 9 (nine) Regional Offices, and KCK Jamkrindo Work Units with a total of 600 employees from 903 permanent employees. Respondents to this survey were dominated by male employees with a total of 62.7% and 37.3% female employees.

The results of the employee satisfaction survey using the employee satisfaction and employee engagement index are expected to be utilized by the Company to further improve its performance.

Indeks Kepuasan Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja
Employee Satisfaction Index by Work Area

Uraian Description	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	
	2021	2020
Kantor Pusat Head Office	82,89	79,59
Wilayah I Region I	81,52	81,90
Wilayah II Region II	82,10	81,65
Wilayah III Region III	77,88	80,11
Wilayah IV Region IV	79,35	80,79
Wilayah V Region V	79,68	79,33
Wilayah VI Region VI	82,52	83,39
Wilayah VII Region VII	82,75	83,60



Indeks Kepuasan Karyawan berdasarkan Wilayah Kerja
Employee Satisfaction Index by Work Area

Uraian Description	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	
	2021	2020
Wilayah VIII Region VIII	81,88	79,58
Wilayah IX Region IX	82,41	81,51
Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	80,00	81,04

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan karyawan tahun 2021, di seluruh wilayah kerja Jamkrindo berada pada Kategori Baik. Nilai indeks kepuasan tertinggi diperoleh Kantor Pusat sebesar 82,89. Beberapa aspek yang mendukung Kantor Pusat memiliki indeks kepuasan tertinggi meliputi:

1. Perusahaan memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan kebutuhan karyawan;
2. Karyawan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan;
3. Kantor Jamkrindo bersih dan rapi sehingga menciptakan suasana nyaman dalam bekerja.

Di sisi lain, secara keseluruhan indeks di setiap wilayah berada pada kategori Baik, terdapat 3 wilayah kerja yang belum mencapai skor target yang ditentukan oleh perusahaan yakni 80. Ketiga wilayah kerja tersebut yaitu Kanwil III (77,88), Kanwil IV (79,35), dan Kanwil V (79,68). Adapun beberapa aspek yang menyebabkan Kanwil III, IV, dan V memiliki indeks kepuasan terendah sebagai berikut.

1. Perusahaan mau, bersedia, dan cepat dalam merespon keluhan karyawan;
2. Fasilitas digital kantor (komputer dan jaringan internet) memadai untuk mendukung pekerjaan;
3. Ketepatan waktu dalam pembayaran pendapatan/take home pay/tunjangan/incentif/bonus;
4. Beban, kontribusi, tanggung jawab, dan risiko kerja yang dihadapi karyawan sebanding dengan gaji yang diterima.

Selain survei kepuasan karyawan, Perusahaan juga menyelenggarakan Survei Keterikatan Karyawan. Survei dilakukan untuk melihat persepsi para pegawai dalam aspek keterikatan mereka terhadap Perusahaan dan persepsi mereka terhadap kebijakan serta program pengelolaan SDM yang dijalankan. Hasil dari survei ini telah disampaikan sebagai *management report* kepada Direksi dan digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola SDM dalam rangka terus menerus memperbaiki sistem serta meningkatkan berbagai aspek yang telah dinilai baik dalam pelaksanaan pengelolaan SDM.

Nilai keterikatan dibangun dari 12 pernyataan loyalitas dan emosional karyawan yang dikutip dari Teori Gallup. Adapun dalam penelitian ini, klasifikasi kategori keterikatan karyawan terbagi menjadi 3 yaitu:

Based on the results of the 2021 employee satisfaction index survey, all Jamkrindo work areas are in the Good Category. The highest satisfaction index value was achieved by the Head Office with 82.89. Several aspects that supports the Head Office to achieve the highest satisfaction index include:

1. *The company provides opportunities for worship according to the needs of employees;*
2. *Employees work in accordance with the company's vision and mission;*
3. *The Jamkrindo office is clean and tidy so it creates a comfortable working atmosphere.*

On the other hand, the overall index in each region is in the Good category, there are 3 work areas that have not reached the target score set by the company, which is 80. The three working areas are Regional Office III (77.88), Regional Office IV (79.35), and Regional Office V (79.68). There are several aspects that cause Regional Offices III, IV, and V have the lowest satisfaction index as follows.

1. *The company is eager, willing, and quick to respond to employee complaints;*
2. *Adequate office digital facilities (computer and internet network) to support work;*
3. *Timely payment of income/take home pay/allowances/incentives/bonus;*
4. *Workloads, contributions, responsibilities, and risks faced by employees are proportional to the salary received.*

In addition to employee satisfaction surveys, the Company also conducts Employee Engagement Surveys. The survey was conducted to examine the perceptions of employees in terms of their attachment to the Company and their perceptions of the policies and programs of HR management being implemented. The results of this survey have been submitted as a management report to the Board of Directors and used as input for HR managers in order to continuously improve the system and improve various aspects that have been considered good in the implementation of HR management.

The value of engagement is built from 12 employees' loyalty and emotional statements quoted from Gallup Theory. As for this study, the classification of employee engagement categories is divided into 3, namely:

Indikator Skor Score Indicator	Kategori Keterikatan Engagement Category
Setuju (Skor 3) Agree (Score 3)	Terikat Engaged
Ragu-Ragu (Skor 2) Uncertain (Score 2)	Tidak Terikat Not Engaged
Tidak Setuju (Skor 1) Disagree (Score 1)	Tidak Terikat Sama Sekali Actively Disengaged

Hasil Penelitian terhadap Keterlekatan Karyawan Jamkrindo Tahun 2021

Research Results on Employee Engagement at Jamkrindo in 2021



Hasil penelitian terhadap keterlekatan karyawan Jamkrindo tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 88,9% (533 orang) dari responden karyawan tergolong sebagai karyawan yang terikat atau dapat dikatakan bahwa skor keterlekatan karyawan Jamkrindo adalah sebesar 90,5% (tergolong sebagai Kategori Terikat), dan mengalami peningkatan dari tahun lalu yang nilainya 88,9%. Sedangkan Karyawan Jamkrindo yang masuk ke dalam Kategori Tidak Terikat (Not Engaged) adalah sebesar 9,5%, menurun dibandingkan dari tahun sebelumnya yang bernilai 10% dan kategori tidak terikat sama sekali (actively disengaged) sudah tidak ada di mana tahun lalu sebesar 1,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa keterlekatan karyawan Jamkrindo mengalami peningkatan yang baik dibandingkan tahun 2020.

The results of the study on the attachment of Jamkrindo employees in 2021 showed that as many as 88.9% (533 people) of the employee respondents were classified as engaged employees or it could be said that the Jamkrindo employee attachment score was 90.5% (classified as Engaged Category), and experienced an increase from last year's 88.9%. Meanwhile, Jamkrindo employees who fall into the Not Engaged Category are 9.5%, a decrease compared to the previous year which was 10% and the actively disengaged category is gone where last year it was 1.2%. This value indicates that Jamkrindo employee engagement has improved significantly compared to 2020.

LINGKUNGAN KERJA LAYAK DAN AMAN [GRI F.21]

Seiring dengan upaya menghadirkan sumber daya manusia yang berkualitas, Jamkrindo berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman sesuai kaidah Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perusahaan meyakini lingkungan kerja serupa itu berkontribusi besar terhadap performa dan kinerja karyawan. Dengan lingkungan kerja yang layak dan aman, maka semua karyawan bisa bekerja dengan tenang tanpa diliputi kekhawatiran bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyakit akibat kerja maupun insiden kecelakaan kerja, baik kategori ringan, sedang, berat, apalagi fatal. Tujuan akhir K3 di Perusahaan adalah terwujudnya angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*) serta tidak adanya penyakit akibat kerja.

[GRI 103-1]

DECENT AND SAFE WORKING ENVIRONMENT [GRI F.21]

Along with efforts to provide high quality human resources, Jamkrindo is committed to create a decent and safe working environment in accordance with Occupational Health and Safety (OHS) rules. The company believes that a similar work environment contributes greatly to employee performance and performance. With a proper and safe work environment, all employees can work calmly without worrying that unwanted things will happen, such as work-related illnesses or accidents at work, whether in the light, medium, severe, or even fatal categories. The ultimate goal of OHS in the Company is the realization of a zero accident rate and the absence of occupational diseases. [GRI 103-1]



Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan telah memiliki sejumlah kebijakan K3 yang menjadi acuan dan panduan dalam operasional sehari-hari. Kebijakan tersebut adalah di antaranya: [GRI 103-2]

1. Surat Edaran No. 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Januari 2021 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Kebijakan Umum Business Continuity Management (BCM);
3. Surat Edaran Direksi No. 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Langkah nyata sebagai implementasi berbagai kebijakan di atas, Jamkrindo menyediakan berbagai sarana dan prasarana K3 antara lain jalur evakuasi, alat deteksi asap, *sprinkle*, alat pemadam api ringan, *hydrant*, kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di setiap lantai gedung kantor, tempat ibadah, ruang parkir, tempat istirahat, kantin, keamanan 24 jam, dan lain-lain. Selain menyediakan berbagai fasilitas tersebut, Perusahaan melakukan pengecekan berkala berbagai sarana dan prasarana K3 tersebut untuk memastikan semua berfungsi dengan baik. Selain itu, perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi Mandiri Inhealth. [GRI 103-3]

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk kedaruratan, antara lain, Perusahaan memberikan pelatihan dan simulasi tanggap darurat berupa:

1. Memutar video prosedur simulasi evakuasi tanggap darurat sebelum mulai rapat/acara;
2. Memberikan sosialisasi dan buku saku tanggap bencana kepada Unit kerja;
3. Melaksanakan simulasi tanggap darurat gempa bumi kepada pengguna gedung;
4. Melaksanakan simulasi tanggap darurat kebakaran kepada pengguna gedung;
5. Memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan yang ditunjuk.

Kebijakan lain yang tak kalah penting, dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan karyawan, maka Perusahaan melakukan sertifikasi atas perangkat gedung antara lain instalasi proteksi kebakaran, motor diesel (genset), instalasi listrik, elevator penumpang (lift) dan instalasi penyalur petir. Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari ke Peraturan Gubernur No. 19 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produk Teknis Lainnya menyatakan setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan pesawat, instalasi mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Ibu Kota Jakarta.

To realize this goal, the Company already has a number of OHS policies that serve as references and guidelines in daily operations. These policies include: [GRI 103-2]

1. Circular Letter No. 132/SE/4/XII/2020 dated January 30, 2021 concerning the Management of the Occupational Health and Safety Management System of PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Board of Directors Regulation No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 dated September 4, 2020 concerning General Policy on Business Continuity Management (BCM);
3. Circular Letter of the Board of Directors No. 132/SE/4/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning the Management of the Occupational Health and Safety Management System.

As a concrete step to implement the various policies above, Jamkrindo provides various OHS facilities and infrastructure, including evacuation routes, smoke detection devices, sprinklers, light fire extinguishers, hydrants, First Aid boxes (P3K) on every floor of office buildings, places of worship, parking space, rest area, canteen, 24-hour security, and many more. In addition to providing these various facilities, the Company periodically checks the various OHS facilities and infrastructure to ensure that all are functioning properly. In addition, the company has also included employees in the BPJS health insurance and Mandiri Inhealth Insurance program. [GRI 103-3]

Activities carried out for emergencies include, among others, the Company providing training and emergency response simulations in the form of:

1. Play the emergency response evacuation simulation procedure video before starting the meeting/event;
2. Provide socialization and disaster response pocket book to work units;
3. Implement earthquake emergency response simulations to building users;
4. Implement fire emergency response simulations to building users;
5. Provide occupational health and safety training to appointed employees.

Another policy that is no less important, in order to maintain employee safety and security, the Company certifies building equipment including fire protection installations, diesel motors (gensets), electrical installations, passenger elevators (lifts) and lightning distribution installations. This is also a follow-up to the Governor's Regulation No. 19 of 2008 concerning Procedures for Licensing the Use of Installation Tools, Machinery, Equipment, Materials, Goods and Other Technical Products states that every company that carries out the planning, manufacture, installation, use, technical change, dismantling or destruction of tools, installation of machinery, equipment, materials, goods and other technical products must have a permit from the Head of the Department of Manpower and Transmigration of the Jakarta Capital City Government.

Sementara itu, berkaitan dengan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 selama tahun 2021, Jamkrindo melanjutkan kebijakan tahun sebelumnya, yaitu preventif dan kuratif. Walau sudah dilakukan langkah-langkah pencegahan, namun masih ada karyawan yang terinfeksi virus corona sehingga diperlukan tindakan dan perawatan. Rekapitulasi penanganan karyawan yang terinfeksi virus corona dan biaya yang dikeluarkan Perusahaan adalah sebagai berikut: [GRI 103-3]

Meanwhile, in relation to the ongoing COVID-19 pandemic during 2021, Jamkrindo continues the policies of the previous year, namely preventive and curative. Although preventive measures have been taken, there are still employees who are infected with the corona virus so it is necessary action and care. The recapitulation of the handling of employees infected with the corona virus and the costs incurred by the Company are as follows: [GRI 103-3]

Penanganan COVID-19 Tahun 2020-2021 <i>Handling COVID-19 Year 2020-2021</i>				
Tahun Year	Pegawai Terinfeksi/Terkonfirmasi Infected/Confirmed Employees	Sembuh Recovered	Meninggal Death	Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19 Costs incurred for handling COVID-19
2021	72	72	0	Rp3.070.655.692
2020	26	26	0	Rp709.944.500

Organisasi Pelaksana K3

Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian K3, Jamkrindo telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penerapan SMK3 dikukuhkan melalui Surat Edaran No. 24/SE/4/VIII/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam menerapkan SMK3, Perusahaan diwajibkan untuk menyusun Rencana K3, yang dalam penyusunannya harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Wakil Pekerja dan Pihak Lain yang terkait. [GRI 103-3, 403-1]

Merujuk Peraturan Menteri Kerja No. PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Jamkrindo membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna melaksanakan K3 yang efektif. P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja guna saling berpartisipasi aktif dalam penerapan K3. Tugas P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan (baik diminta maupun tidak) kepada pengusaha mengenai masalah K3.

P2K3 di Jamkrindo dibentuk pada 12 Maret 2021 dengan Penanggung jawab adalah Direktur MSDM dan dikoordinatori oleh Kepala Bagian Administrasi dan Umum Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dengan tim anggota P2K3 sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari regu evaluasi, regu penyelamat dokumen, dan regu pemadam lantai/zona. Kemudian, dalam P2K3 juga terdapat koordinator badan pengelola, koordinator regu keamanan, koordinator engineer, dan tim tanggap darurat yang terdiri dari 11 (sebelas) pihak dengan total 21 (dua puluh satu) anggota. Keberadaan P2K3 telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan selama tahun pelaporan. [GRI 130-3, 403-4]

OHS Implementing Organization

To increase the effectiveness of achieving OHS, Jamkrindo has implemented an Occupational Health and Safety Management System (SMK3). The application of SMK3 was confirmed through Circular No. 24/SE/4/VIII/2018 concerning Guidelines for the Implementation of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3). In implementing SMK3, the Company is required to prepare an OHS Plan, which in its preparation the company must involve K3 Experts, the Occupational Safety and Health Committee (P2K3), Workers' Representatives and other related parties. [GRI 103-3, 403-1]

Referring to the Regulation of the Minister of Work No. PER-04/MEN/1987 concerning Occupational Safety and Health Supervisory Committee and Procedure for Appointing Occupational Safety Experts, Jamkrindo formed an Occupational Safety and Health Committee (P2K3) to carry out effective K3. P2K3 is an auxiliary agency in the workplace which is a forum for cooperation between employers and workers to actively participate in the implementation of K3. The task of P2K3 is to provide advice and considerations (whether requested or not) to entrepreneurs regarding K3 issues.

P2K3 at Jamkrindo was formed on March 12, 2021 with the person in charge is the Director of HR and coordinated by the Head of Administration and General Affairs of the Human Resources Management (MSDM) Division with a team of P2K3 members of 60 (sixty) people consisting of an evaluation team, a document rescue team , and floor/zone firefighters. Then, in P2K3 there are also coordinators of management, coordinators of security teams, coordinators of engineers, and emergency response teams consisting of 11 (eleven) parties with a total of 21 (twenty one) members. The existence of P2K3 has been socialized to stakeholders during the reporting year. [GRI 130-3, 403-4]

Pelatihan K3

Dalam upaya mewujudkan target *zero accident* dan tidak adanya penyakit akibat kerja, Jamkrindo melakukan berbagai strategi agar tetap bisa menjalankan pelatihan K3. Strategi yang ditempuh antara lain menyesuaikan format pelatihan yaitu secara *online* karena selama tahun 2021, pandemi COVID-19 masih berlangsung. Dengan strategi tersebut, selama tahun pelaporan, Jamkrindo menyelenggarakan Pelatihan K3 sebagai berikut: [GRI 103-3]

No.	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Schedule	Tujuan Goals	Jumlah Peserta Participants
1	Sertifikasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) <i>First Aid (P3K) Certification in Accidents</i>	16-18 November 2021 November 16-18, 2021	Memberikan pembinaan dan sertifikasi P3K <i>Provide first aid training and certification</i>	1 (orang) 1 (person)
2	K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat D <i>OHS Fire Fighting Level D</i>	22-24 November 2021 November 22-24, 2021	Memberikan pembinaan dan sertifikasi K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat D <i>Provide guidance and certification of OHS Fire Management Level D</i>	2 (orang) 2 (people)
3	Ahli K3 Umum <i>General OHS Expert</i>	11-25 November 2021 October 11-25, 2021	Memberikan pembinaan dan sertifikasi Ahli K3 Umum <i>Provide guidance and certification of General OHS Experts</i>	2 (orang) 2 (people)

Kinerja K3 Tahun 2021

Selama tahun 2021, manajemen dan karyawan Jamkrindo telah menerapkan berbagai program terkait K3. Penerapan tersebut didorong oleh kesadaran bahwa upaya mewujudkan lingkungan kerja yang layak dan aman merupakan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan secara kolektif tersebut, Jamkrindo berhasil meneruskan pencapaian tahun 2020 dengan mencapai angka kecelakaan kerja nol serta tidak terdapat laporan tentang penyakit akibat kerja. [GRI 103-3, 403-9, 403-10]

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT

Pandemi COVID-19 berkepanjangan selama tahun 2021 merupakan ujian sekaligus tantangan bagi pemerintah, masyarakat, dan para pelaku usaha. Sebagai entitas bisnis, Jamkrindo juga turut terdampak atas pandemi tersebut. Walau demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk membantu dan peduli terhadap kondisi yang dialami masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Komitmen itu diwujudkan sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan dalam menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. [GRI 103-1]

Implementasi TJSL oleh Jamkrindo dikemas dalam berbagai kegiatan menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN), yang diatur melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN).

OHS training

In an effort to achieve the target of zero accidents and the absence of work-related diseases, Jamkrindo implements various strategies so that they can continue to carry out OSH training. The strategies adopted include adjusting the training format, namely switching it to online because during 2021, the COVID-19 pandemic is still ongoing. With this strategy, during the reporting year, Jamkrindo organized the following OSH Training: [GRI 103-3]

OSH Performance in 2021

During 2021, Jamkrindo's management and employees have implemented various OSH-related programs. This application is driven by the awareness that efforts to create a decent and safe work environment are a shared responsibility. In line with the efforts that have been made collectively, Jamkrindo has succeeded in continuing its achievements in 2020 by achieving zero work accidents and no reports of occupational diseases. [GRI 103-3, 403-9, 403-10]

RESPONSIBILITY TO THE COMMUNITY

The prolonged COVID-19 pandemic throughout 2021 is a test as well as a challenge for the government, society, and business actors. As a business entity, Jamkrindo was also affected by the pandemic. However, the Company remains committed to helping and caring for the conditions experienced by the community around the company's operations. This commitment is manifested as a form of the Company's compliance in implementing Social and Environmental Responsibility (TJSL), as regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. CSR is the Company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general. [GRI 103-1]

The implementation of TJSL by Jamkrindo is packaged in sharing activities to implement Social and Environmental Responsibility for State-Owned Enterprises (TJSL BUMN), which is regulated through Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned

Merujuk peraturan terbaru ini, BUMN bisa menerapkan TJSL melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Program Pendanaan UMK, serta Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya yang dikemas menjadi Program TJSL (Non PUMK) di Jamkrindo. Peraturan baru yang terbit dan mulai berlaku pada April 2021 dan berlaku surut ini menghapus peraturan sebelumnya, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan TJSL BUMN sekaligus merupakan bentuk dukungan nyata Perusahaan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta pelibatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Informasi selengkapnya tentang TJSL BUMN disampaikan dalam Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Jamkrindo Tahun 2021. [GRI 103-2, 103-3]

Penerapan TJSL BUMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [OJK F.25]

Per 31 Januari 2021, sebagai salah satu lembaga jasa keuangan perusahaan penjaminan, Jamkrindo belum terkena kewajiban untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK Keuangan Berkelanjutan. Sesuai regulasi tersebut, POJK Keuangan Berkelanjutan berlaku untuk perusahaan penjaminan per 1 Januari 2024. Namun demikian, Perusahaan berinisiatif untuk lebih awal menerapkan peraturan tersebut karena *spirit* berkelanjutan yang diusung selaras dengan *spirit* Jamkrindo.

Sesuai dengan POJK Keuangan Berkelanjutan, maka setiap lembaga jasa keuangan yang diwajibkan melaksanakan TJSL wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan. Laporan penggunaan dana TJSL dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan. Selanjutnya, berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik sebagai pedoman teknis, Laporan Keberlanjutan antara lain memuat informasi mengenai kegiatan TJSL yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan mendukung bisnis perusahaan dikaitkan dengan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia.

Jamkrindo telah melakukan pemetaan pelaksanaan TJSL BUMN dengan pencapaian 17 (Tujuh Belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. Dalam hal ini, Perusahaan menyusun prioritas TPB/SDGs dengan menganalisa risiko dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan TJSL BUMN tersebut. Hingga akhir tahun 2021, implementasi program TJSL BUMN terbukti membawa dampak positif bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. [OJK F.23]

Program TJSL BUMN Tahun 2021 [OJK F.23, F.25]

Program Pendanaan UMK (PUMK)

Selama tahun 2021, Jamkrindo menyalurkan pinjaman dana melalui Program Pendanaan UMK (d.h. Program Kemitraan) sebesar Rp3.812.000.000 melalui kantor-kantor cabang di daerah kepada 132 mitra binaan yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Realisasi dana untuk program ini mencapai 111,98% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp3.404.037.327. Jumlah tersebut turun dibandingkan penyaluran tahun 2020 yang mencapai Rp4.372.000.000.

Enterprises (TJSL BUMN). Referring to this latest regulation, SOEs can implement TJSL through the Micro and Small Enterprises Funding Program or the MSE Funding Program, as well as Aid and/or Other Activities packaged into the TJSL Program (Non PUMK) at Jamkrindo. This new regulation which was issued and entered into force in April 2021 and is retroactively applied removes the previous regulation, namely the Partnership and Community Development Program (PKBL). The implementation of SOE CSR is also a form of the Company's real support for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), as well as involvement in the context of community empowerment. More information about SOE CSR is presented in PT Jamkrindo's 2021 Environmental and Social Responsibility Report. [GRI 103-2, 103-3]

Implementation of SOE CSR and Sustainable Development Goals [OJK F.25]

As of January 31, 2021, as one of the financial service institutions of guarantee companies, Jamkrindo has not been subject to the obligation to implement Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies or POJK on Sustainable Finance. In accordance with these regulations, the POJK on Sustainable Finance applies to guarantee companies as of January 1, 2024. However, the Company took the initiative to implement these regulations early because the sustainable spirit carried is in line with the spirit of Jamkrindo.

In accordance with the POJK on Sustainable Finance, every financial service institution that is required to implement CSR is required to allocate part of the CSR funds to support the activities of implementing Sustainable Finance. The report on the use of TJSL funds is included in the Sustainability Report. Furthermore, based on the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 16 /SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies as a technical guideline, the Sustainability Report, among others, contains information on CSR activities related to community empowerment and supporting company business in relation to the 17 (seventeen) Sustainable Development Goals/ TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) in Indonesia.

Jamkrindo has mapped the implementation of SOE CSR with the achievement of 17 (Seventeen) Sustainable Development Goals (TPB) in Indonesia. In this case, the Company sets priorities for TPB/SDGs by analyzing the risks and impacts arising from the SOE's CSR activities. Until the end of 2021, the implementation of the BUMN TJSL program has proven to have a positive impact on the community as beneficiaries. [OJK F.23]

BUMN TJSL Program 2021 [OJK F.23, F.25]

MSE Funding Program (PUMK)

During 2021, Jamkrindo disbursed loan funds through the MSE Funding Program (d.h. Partnership Program) amounting to IDR3,812,000,000 through regional branch offices to 132 fostered partners spread across 31 provinces in Indonesia. Funds Realization for this program reached 111.98% of the 2021 RKA of IDR3,404,037,327. This amount decreased compared to the distribution in 2020 which reached IDR4,372,000,000.



Dana program Pendanaan UMK disalurkan ke empat sektor usaha mitra binaan yaitu Sektor Perdagangan, Jasa, Peternakan, dan Industri. Jumlah sektor usaha mengalami pengurangan dibanding penyaluran tahun 2020 yang mencakup enam sektor, yaitu Sektor Perdagangan, Jasa, Peternakan, Industri, Pertanian, dan Perikanan. Penyaluran Pendanaan UMK mendukung pencapaian TPB/SDGs ke-1 Tanpa Kemiskinan, ke-2 Tanpa Kelaparan, ke-5 Kesetaraan Gender, ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta ke-12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab [GRI 103-3, 203-2, 413-1]

The MSE Funding program funds are distributed to the four business sectors of the fostered partners, namely the Trade, Services, Livestock, and Industry Sector. The number of business sectors has decreased compared to the distribution in 2020 which includes six sectors, namely the Trade, Services, Livestock, Industry, Agriculture, and Fisheries Sector. The distribution of MSE Funding supports the achievement of the TPB/SDGs namely: 1st Without Poverty, 2nd Without Hunger, 5th Gender Equality, 8th Decent Work and Economic Growth, and 12th Responsible Consumption and Production. [GRI 103-3, 203-2, 413-1]

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Pendanaan UMK (d.h. Program Kemitraan) Tahun 2019-2021
Table of Realization of Funding for the UMK Funding Program (formerly the Partnership Program) for 2019-2021

Uraian Description	2021		2020*		2019	
	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Fostered Partners (MB)	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Sektor Industri Industrial Sector	3	95.000.000	3	60.000.000	57	2.287.500.000
Sektor Perdagangan Trade Sector	77	2.147.000.000	76	2.453.000.000	17	639.000.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector	-	-	21	395.000.000	1	15.000.000
Sektor Peternakan Livestock Sector	21	620.000.000	14	420.000.000	15	750.000.000
Sektor Perkebunan Plantation Sector	-	-	-	-	22	1.100.000.000
Sektor Perikanan Fishery Sector	-	-	11	330.000.000	2	80.000.000
Sektor Jasa Service Sector	31	950.000.000	27	715.000.000	7	260.000.000
Sektor Lainnya Other Sectors	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Sub Total	132	3.812.000.000	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000
Dana Pembinaan Partnership Development Fund	-	475.743.245	-	-	-	-
Jumlah Total	132	4.287.743.245	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000

*disajikan kembali

*restated

Program Bantuan dan atau Kegiatan Lainnya

Program TJSL (Non PUMK) [GRI 103-3, 203-1]

Komitmen Jamkrindo untuk mendukung pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui berbagai Program TJSL (Non PUMK). Program ini merupakan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Program TJSL (Non PUMK) disalurkan melalui 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam;
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
3. Bantuan peningkatan kesehatan;
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum.
5. Bantuan sarana ibadah;
6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:

Assistance Programs and or Other Activities

TJSL Program (Non PUMK) [GRI 103-3, 203-1]

Jamkrindo's commitment to support sustainable development is also realized through various TJSL (Non PUMK) Programs. This program is an empowerment of the social conditions of the community around the company's operational areas. The TJSL (Non PUMK) program is distributed through 7 (seven) types of assistance as follows:

1. Assistance for survivors of natural disasters;
2. Educational assistance, may be in the form of training, educational infrastructure and facilities;
3. Health improvement assistance;
4. Assistance for the development of public infrastructure and/or facilities;
5. Assistance for worship facilities;
6. Assistance for nature conservation; and/or.
7. Community social assistance in the context of poverty alleviation, including for:

- a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
- b. Penyediaan sarana air bersih;
- c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
- d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Pendanaan UMK;
- e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
- f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
- g. Bantuan peralatan usaha.

Selama tahun 2021, Jamkrindo menyalurkan dana Program TJSL (Non PUMK) sebesar Rp7,34 miliar, turun dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp11,79 miliar. Realisasi pendanaan tahun 2021 adalah 103,01% dari RKA Tahun 2021 sebesar Rp7,30 miliar.

- a. Electrification in areas that do not have electricity;
- b. Provision of clean water facilities;
- c. Provision of toilet facilities (MCK);
- d. Education, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses other than the UMK Funding Program Foster Partners;
- e. Repair of houses for the underprivileged;
- f. Nursery assistance for agriculture, animal husbandry and fisheries; or
- g. Business equipment assistance.

During 2021, Jamkrindo disbursed funds for the TJSL Program (Non PUMK) of IDR7.34 billion, down from the previous year, which was recorded at IDR11.79 billion. The realization of funding in 2021 is 103.01% of the 2021 RKA of IDR7.30 billion.

Tabel Realisasi Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya Tahun 2019-2021
Table of Realization of TJSL Program (Non PUMK) for 2019-2021

No.	Uraian Description	2021	2020	2019
1	Bantuan Korban Bencana Alam <i>Aid to Natural Disaster Survivors</i>	537.847.012	2.967.326.379	237.032.782
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	993.302.524	2.029.064.103	1.001.117.503
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan <i>Health Improvement Assistance</i>	1.304.648.454	589.155.332	233.414.000
4	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum <i>Infrastructure Development and Public Facilities Assistance</i>	340.000.000	198.933.826	201.539.566
5	Bantuan Sarana Ibadah <i>Places of Worship Facilities Assistance</i>	684.350.000	1.443.994.364	517.951.600
6	Bantuan Pelestarian Alam <i>Nature Conservation Assistance</i>	-	231.261.536	137.793.333
7	Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan <i>Community Social Assistance in the context of alleviation Poverty</i>	3.271.494.131	3.887.469.898	2.973.553.093
8	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam karena Wabah <i>Assistance to the survivors of Natural Disasters and Non Natural disaster due to Plague</i>	204.195.830	710.671.954	-
Jumlah <i>Total</i>		7.335.837.951	11.787.877.391	5.302.401.877

Penyaluran dana Program TJSL (Non PUMK) mendukung pencapaian TPB/SDGs ke-1 Tanpa Kemiskinan, ke-2 Tanpa Kelaparan, ke-3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, ke-4 Pendidikan Berkualitas, ke-5 Kesetaraan Gender, ke-6 Air Bersih dan Terjangkau, ke-7 Energi Bersih dan Terjangkau, ke-9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, ke-11 Kota dan Permukiman yang Berkelaanjutan, ke-13 Peranganan Perubahan Iklim, serta ke-14 Ekosistem Daratan. [GRI 103-3, 203-2, 413-1]

Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan [GRI 103-3, 203-1] [OJK F.23, F.25]

Pembangunan berbagai bentuk infrastruktur bagi masyarakat di sekitar operasional perusahaan sebagaimana tercantum dalam tabel Program Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya di atas merupakan salah satu prioritas pelaksanaan TJSL BUMN oleh Jamkrindo Tahun 2021. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya manfaat yang diambil dari ketersediaan infrastruktur tersebut. Ketersediaan sarana pendidikan dan/atau pelatihan misalnya, akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan pembangunan sarana kesehatan, termasuk fasilitas MCK,

The distribution of TJSL (Non PUMK) Program funds supports the achievement of the TPB/SDGs namely: 1st Without Poverty, 2nd Without Hunger, 3rd Healthy and Prosperous Life, 4th Quality Education, 5th Gender Equality, 6th Clean and Affordable Water, 7th Clean and Affordable Energy, 9th Industry, Innovation and Infrastructure, 11th Sustainable Cities and Settlements, 13th Addressing Climate Change, and 14th Land Ecosystem. [GRI 103-3, 203-2, 413-1]

Infrastructure Investment and Service Support [GRI 103-3, 203-1] [OJK F.23, F.25]

The development of various forms of infrastructure for the community around the company's operations as listed in the Table of Assistance and/or Other Activities above is one of the priorities for the implementation of SOE TJSL by Jamkrindo in 2021. This is inseparable from the many benefits taken from the availability of the infrastructure. The availability of educational and/or training facilities, for example, will be able to improve the quality of education. Meanwhile, the construction of health facilities, including toilet facilities, will improve the quality of public



akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Adapun bantuan untuk pembangunan atau kelengkapan sarana dan prasarana ibadah akan membuat penganut agama tersebut bisa menunaikan ibadah dengan khusuk.

Selama tahun 2021, Jamkrindo banyak menerima proposal atau usulan program bantuan pembangunan infrastruktur dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyerap dan mengakomodasi proposal tersebut. Namun demikian, Perusahaan tetap melakukan seleksi agar program-program yang terpilih bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hingga akhir tahun pelaporan, beragam infrastruktur telah dibangun Perusahaan sebagai investasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Semua program tersebut merupakan bantuan dari Jamkrindo sehingga masyarakat dapat menggunakannya secara gratis. Beragam investasi infrastruktur yang dibangun berdasarkan bantuan Jamkrindo terbukti mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi masyarakat.

Dampak Ekonomi Tidak Langsung yang Signifikan [GRI 103-3, 203-2]

Sebelum terbit regulasi tentang TJSI BUMN, dampak ekonomi tidak langsung atas keberadaan Jamkrindo sudah dirasakan masyarakat di sekitar operasional perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Dampak positif itu, antara lain, Perusahaan membuka lapangan kerja sehingga warga setempat/lokal bisa bergabung menjadi karyawan setelah lolos proses rekrutmen. Selain itu, keberadaan Perusahaan juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjadi pemasok atau vendor barang dan jasa yang dibutuhkan Jamkrindo. Pada gilirannya, terserapnya pekerja lokal dan terjalinya kerja sama dengan penyedia atau vendor barang dan jasa lokal akan meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. [OJK F.23]

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, Jamkrindo senantiasa berusaha memastikan bahwa keputusan dan operasional bisnis yang dilakukannya memberikan dampak negatif seminimal mungkin kepada masyarakat dan lingkungan. Sejalan dengan tanggung jawab tersebut, Perusahaan membuka saluran komunikasi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat untuk menyampaikan pengaduan atau tanggapan mereka apabila terdapat dampak negatif atas operasional Jamkrindo. Pada tahun pelaporan, Perusahaan menerima empat pengaduan, dan semua sudah ditindaklanjuti serta diselesaikan dengan baik. Jumlah pengaduan ini turun dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 8 pengaduan. [OJK F.23, F.24]

TANGGUNG JAWAB PRODUK

Tahun 2021 merupakan tahun penuh tantangan bagi Jamkrindo dalam menjalankan bisnis. Hal itu tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian di berbagai bidang, termasuk di bidang ekonomi, akibat masih terjadinya pandemi COVID-19. Walau demikian, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan terbaik agar nasabah/konsumen meraih kepuasan maksimal. Berbagai upaya yang telah dilakukan Jamkrindo untuk memberikan produk dan layanan terbaik selama tahun 2021 disampaikan dalam uraian berikut: [GRI 103-1, 103-2]

health. As for assistance for the construction or completeness of worship facilities and infrastructure, adherents of that religion will be able to carry out worship solemnly.

During 2021, Jamkrindo received many proposals or proposals for infrastructure development assistance programs and made every effort to absorb and accommodate these proposals. However, the Company continues to make selections so that the selected programs can provide optimal benefits for the community. Until the end of the reporting year, the Company has built various infrastructures as investments that are very beneficial for the local community. All of these programs are assistance from Jamkrindo so that people can use them for free. Various infrastructure investments built based on Jamkrindo's assistance have proven to be able to bring change and progress to the community.

Significant Indirect Economic Impact [GRI 103-3, 203-2]

Before the issuance of the regulation on SOE CSR, the indirect economic impact of Jamkrindo's existence was already felt by the community around the company's operations and other stakeholders. The positive impacts, among others, are that the Company creates job opportunities so that local residents can join as employees after passing the recruitment process. In addition, the existence of the Company also opens opportunities for local business actors to become suppliers or vendors of goods and services needed by Jamkrindo. In turn, the absorption of local workers and the establishment of cooperation with providers or vendors of local goods and services will increase income and encourage economic growth of the local community. [OJK F.23]

Community Complaint Management Mechanism

As a responsible corporation, Jamkrindo always strives to ensure that its business decisions and operations have a minimal negative impact on society and the environment. In line with these responsibilities, the Company opens communication channels that can be used by stakeholders and local communities to submit their complaints or responses if there are negative impacts on Jamkrindo's operations. In the reporting year, the Company received four complaints, and all of them have been followed up and settled properly. The number of complaints decreased compared to the previous year, which recorded 8 complaints. [OJK F.23, F.24]

PRODUCT RESPONSIBILITY

The year 2021 is a year full of challenges for Jamkrindo in running a business. This is inseparable from conditions of uncertainty in various fields, including in the economic field, due to the ongoing COVID-19 pandemic. However, the Company is committed to providing the best products and services so that customers/consumers achieve maximum satisfaction. Various efforts that have been made by Jamkrindo to provide the best products and services during 2021 are presented in the following description: [GRI 103-1, 103-2]

Perlakuan Setara untuk Nasabah/Konsumen [OJK F.17]

Nasabah/Konsumen merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi Jamkrindo. Keberadaan mereka sangat menentukan perkembangan dan keberlangsungan Perusahaan. Semakin banyak nasabah yang berhasil diraih dan dijaga kepercayaannya, maka keberlangsungan usaha Jamkrindo akan lebih terjamin. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena posisi nasabah/konsumen yang demikian strategis, maka Perusahaan terus berupaya untuk memberikan produk dan layanan terbaik dan setara kepada seluruh konsumen tanpa terkecuali.

Jamkrindo memperlakukan nasabah/konsumen secara setara dengan memberikan layanan dengan kualitas terbaik karena mereka memiliki hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821). Selain itu, dalam memberikan layanan kepada nasabah, Perusahaan juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Komitmen untuk memperlakukan nasabah/konsumen secara setara membawa hasil dengan tidak adanya pengaduan akibat diskriminasi dari konsumen selama tahun pelaporan yang ditujukan kepada Jamkrindo.

Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa [OJK F.26]

Inovasi merupakan salah satu kunci bagi Jamkrindo agar usahanya semakin maju dan berkembang dan keberadaannya diterima oleh nasabah/konsumen. Untuk itu, Perusahaan senantiasa melakukan inovasi produk dan layanan agar sesuai dengan harapan nasabah dan tuntutan zaman terkini. Adapun inovasi produk dan layanan yang dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan *stop-loss limit* pada Penjaminan Kredit Konstruksi BPD Sulselbar;
2. Penjaminan Pembiayaan Piutang (*Invoice Financing*) dengan skema *peer to peer lending*;
3. Penyempurnaan aplikasi penjaminan Bank Garansi dengan penambahan fitur proses SP3;
4. Penambahan fitur menu data produksi *Surety Bond* pada aplikasi *Jamkrindo Online Suretyship* (iOS);
5. Penambahan fitur pada aplikasi penjaminan yaitu fasilitas pencetakan Berita Acara Komite Penjaminan untuk penjaminan dengan pola *Conditional Automatic Cover* (CAC);
6. Peluncuran aplikasi *Marketing toolkits* untuk membantu tugas tenaga pemasaran perusahaan.

Produk yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Konsumen [OJK F.27]

Produk dan layanan yang ditawarkan Jamkrindo telah memenuhi semua persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga telah teruji keamanannya bagi nasabah. Selaras dengan itu, untuk menekan risiko kerugian seminimal mungkin atas produk dan jasa tersebut, Perusahaan secara intensif menyampaikan informasi terkait risiko produk penjaminan yang dapat dijamin dan yang tidak dapat dijamin kepada nasabah (Terjamin). Risiko Penjaminan yang dapat dijamin oleh PT Jamkrindo adalah risiko sebab kegagalan Terjamin dalam

Equal Treatment for Customers/Consumers [OJK F.17]

The customer/consumer is one of the main stakeholders for Jamkrindo. Their existence greatly determines the development and sustainability of the Company. The more customers that are successfully achieved and their trust is maintained, the sustainability of Jamkrindo's business will be more guaranteed. Vice versa. Due to the strategic position of customers/consumers, the Company continues to strive to provide the best and equal products and services to all consumers without exception.

Jamkrindo treats customers/consumers equally by providing the highest quality services because they have rights as regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 No. 22, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 3821). In addition, in providing services to customers, the Company also refers to the Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The commitment to treat customers/consumers equally has resulted in no complaints due to discrimination from consumers during the reporting year addressed to Jamkrindo.

Product/Service Innovation and Development [OJK F.26]

Innovation is one of the keys for Jamkrindo so that its business can progress and develop and its existence is accepted by customers/consumers. For this reason, the Company continues to innovate products and services to meet customer expectations and the demands of the current era. The product and service innovations carried out during 2021 are as follows:

1. Application of stop-loss limit on Construction Credit Guarantee for BPD Sulselbar;
2. Guarantee of Receivable Financing (*Invoice Financing*) with a peer-to-peer lending scheme;
3. Completion of the Bank Guarantee application with the addition of the SP3 process feature;
4. Added the Surety Bond production data menu feature to the Jamkrindo Online Suretyship (iOS) application;
5. Added features to the guarantee application, namely the printing facility of the Minutes of the Guarantee Committee for guarantees with the Conditional Automatic Cover (CAC) pattern;
6. Launching of the Marketing toolkits application to assist the company's marketing staff.

Products whose Safety has been Evaluated for Consumers [OJK F.27]

The products and services offered by Jamkrindo have met all requirements and received approval from the Financial Services Authority so that their safety has been tested for customers. In line with that, in order to minimize the risk of loss for these products and services, the Company intensively conveys information related to the risks of guaranteed and non-guaranteed guarantee products to customers (Guaranteed). Guarantee risk that can be guaranteed by PT Jamkrindo is the risk of the Guaranteed failure to complete its financial obligations to the Guarantee Recipient (Bank/Non-Bank)



menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan (Bank/Non Bank) baik yang disebabkan karena nasabah (Terjamin) mengalami kegagalan usaha, kegagalan dalam menyelesaikan proyek, sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan kredit/pembayaran sampai dengan kelayakan 4 (diragukan).

Adapun kerugian yang tidak dapat dijamin PT Jamkrindo, antara lain kerugian yang disebabkan *force majeure, fraud, sidestreaming, transaksi fiktif* dan hal-hal lain yang disepakati antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

Dalam rangka meningkatkan *risk awareness* dan literasi penjaminan kepada para nasabah, PT Jamkrindo melakukan beberapa program kerja antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi Penjaminan UMKM PT jamkrindo melalui kegiatan *Webinar* dan *Workshop*.
2. Pendampingan dan Pembinaan UMKM, antara lain:
 - a. *Coaching Clinic* UMKM;
 - b. *Business Class*;
 - c. Pendampingan Pembuatan legalitas usaha (*NIB Berbasis Risiko*);
 - d. Pelatihan Literasi Keuangan UMKM;
 - e. Pelatihan Optimalisasi Sosial Media dan *Digital Marketing* dalam Bisnis UMKM;
 - f. *Mentoring Pendamping Pemulihian Ekonomi*.
3. Pemerintahan UMKM
 - a. Pengembangan Platform UMKM Layak;
 - b. Pemanfaatan Data J-Score UMKM untuk kegiatan Bisnis;
 - c. Program Kemitraan.

Dampak Produk/Jasa bagi Pemangku Kepentingan [OJK F.28]

Seluruh produk dan layanan yang ditawarkan Jamkrindo telah dievaluasi keamanannya bagi mitra Jamkrindo dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memberikan layanan terbaik, Jamkrindo memberikan informasi produk dan layanan secara transparan. Perusahaan telah memanfaatkan secara optimal penggunaan situs perusahaan, brosur, banner dan mobil keliling untuk mengomunikasikan informasi produk atau layanan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan. Upaya tersebut berdampak positif bagi Perusahaan dengan tidak adanya insiden ketidakpatuhan terkait informasi produk dan layanan, serta tidak terdapat dampak negatif dari produk dan layanan yang ditawarkan Jamkrindo. [GRI 103-3, 413-2, 417-1]

Produk/Jasa yang Ditarik Kembali [OJK F.29]

Selama tahun 2021, tidak ada produk dan layanan Jamkrindo yang ditarik kembali dengan alasan apa pun.

Pengaduan Nasabah [OJK F.24]

Sebagai bagian dari pemangku kepentingan utama, maka merupakan hal yang wajar apabila nasabah/konsumen memiliki ekspektasi tinggi atas kinerja produk dan layanan Jamkrindo. Seiring dengan itu, apabila terdapat kesenjangan ekspektasi, Perusahaan menyediakan berbagai saluran penyampaian keluhan atau pengaduan bagi nasabah/konsumen melalui layanan *contact center* 1500701, facsimile, *email*, *website/situs*, *live chat*, media sosial, atau menyampaikan secara langsung ke kantor operasional Jamkrindo. Semua keluhan atau pengaduan nasabah yang masuk dikelola oleh Divisi Jaringan dan Layanan PT Jamkrindo.

either due to the customer (Guaranteed) experiencing business failure, failure to complete the project, causing credit/financing arrears. up to collectability 4 (doubtful).

The losses that cannot be guaranteed by PT Jamkrindo include losses caused by force majeure, fraud, sidestreaming, fictitious transactions and other matters agreed between the Guarantor and the Guarantee Beneficiary.

In order to increase risk awareness and guarantee literacy to customers, PT Jamkrindo carries out several work programs, including the following:

1. *Information Dissemination and Education of PT Jamkrindo's Guarantee for MSMEs through Webinars and Workshops.*
2. *Mentoring and Guidance of MSMEs, including:*
 - a. *MSME Coaching Clinic*;
 - b. *Business Class*;
 - c. *Assistance in making business legalities (Risk-Based NIB)*;
 - d. *MSME Financial Literacy Training*;
 - e. *Training on Optimization of Social Media and Digital Marketing in MSME Business*;
 - f. *Mentoring Assisting Economic Recovery*.
3. *MSME Rating*
 - a. *Development of Eligible MSME Platforms*;
 - b. *Utilization of MSME J-Score Data for Business activities*;
 - c. *Partnership Program*.

Impact of Products/Services for Stakeholders [OJK F.28]

All products and services offered by Jamkrindo have been evaluated for safety for Jamkrindo partners and have been approved by the Financial Services Authority (OJK). To provide the best service, Jamkrindo provides product and service information transparently. The company has made optimal use of the company's website, brochures, banners and mobile cars to communicate product or service information to stakeholders, including customers. These efforts have had a positive impact on the Company with no incidents of non-compliance related to product and service information, and there were no negative impacts from the products and services offered by Jamkrindo. [GRI 103-3, 413-2, 417-1]

Products/Services Withdrawn [OJK F.29]

During 2021, no Jamkrindo products and services are recalled for any reason.

Customer Complaints [OJK F.24]

As part of the main stakeholders, it is natural for customers/consumers to have high expectations for the performance of Jamkrindo's products and services. Along with that, if there is a gap in expectations, the Company provides various channels for submitting complaints or complaints to customers/consumers via contact center 1500701, facsimile, email, website/site, live chat, social media or submitting it directly to the Jamkrindo operational office. All incoming customer complaint(s) are managed by the Network and Service Division of PT Jamkrindo.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan POJK tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka Perusahaan menerapkan prinsip untuk menangani pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana dan cepat. Terhadap pengaduan yang masuk, Perusahaan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaiannya paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya, dan perpanjangan waktu tersebut diberitahukan secara tertulis kepada nasabah/konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu 20 hari pertama berakhir. Atas pengaduan yang masuk, tindak lanjut dan penyelesaiannya, Jamkrindo melaporkannya secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2021, Perusahaan menerima pengaduan nasabah/konsumen sebanyak 4 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 4 kasus sudah diselesaikan dan 0 kasus masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

As regulated in the Law on Consumer Protection and the POJK on Consumer Protection in the Financial Services Sector, the Company applies the principles of handling complaints and resolving customer disputes simply and quickly. With respect to incoming complaints, the Company will immediately follow up and resolve them no later than 20 working days after the date of receipt of the complaint. In the event of certain conditions, the Company may extend the period up to a maximum of the next 20 working days, and the extension of time shall be notified in writing to the customer/consumer who filed a complaint before the end of the first 20 days. On incoming complaints, their follow-up and resolution, Jamkrindo reports them regularly to the Financial Services Authority.

During 2021, the Company received 4 cases of customer/consumer complaints. Of that number, 4 cases have been settled and 0 cases are still in the process of being resolved, as presented in the following table:

Tabel Jumlah Pengaduan Nasabah dan Tindak Lanjut Tahun 2019-2021
Table of Number of Customer Complaints and Follow-Ups for 2019-2021

Uraian Description	Jumlah Keluhan Diterima Number of Complaints received		Status Status
	Sudah Diselesaikan Has Settled	Dalam Proses Penyelesaian In Progress of Settlement	
2021	4	0	Selesai ditindaklanjuti Completed
2020	8	0	Selesai ditindaklanjuti Completed
2019	9	0	Selesai ditindaklanjuti Completed

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan [OJK F.30]

Kepuasan nasabah/konsumen/pelanggan menjadi salah satu indikator pencapaian Jamkrindo terkait pemenuhan harapan mereka terhadap produk dan layanan yang ditawarkan Perusahaan. Pencapaian tersebut diukur dengan mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) No. 75/SPK/UMU/XI/2020 tentang Pengadaan Konsultan untuk Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Keterikatan Pelanggan. Pelaksanaannya pun mengacu pada kaidah implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat No. S-445/D7.MBU/10/2016. Survei kepuasan pelanggan melibatkan 3 (tiga) responden yang terdiri dari: mitra kerja saat ini, calon mitra kerja, dan pesaing mitra kerja, dan mantan mitra kerja. Pelanggan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jenis produk dan jenis instansinya.

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Nilai kepuasan pelanggan Jamkrindo yaitu 87,08% kategori "Baik", meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 85,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Jamkrindo kepada pelanggannya. Adapun indeks keterikatan pelanggan Jamkrindo di tahun 2021 yaitu 87,32%, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 86,03%. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pelanggan lebih terikat dengan Jamkrindo.

Customer Satisfaction and Engagement Survey [OJK F.30]

Customer/consumer/customer satisfaction is one of Jamkrindo's indicators of achievement regarding the fulfillment of their expectations for the products and services offered by the Company. This achievement is measured by referring to the Work Order (SPK) No. 75/SPK/UMU/XI/2020 concerning Procurement of Consultants for Customer Satisfaction Surveys and Customer Engagement Surveys. The implementation also refers to the implementation of the SOE Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) set by the Ministry of SOEs through letter No. S-445/D7.MBU/10/2016. The customer satisfaction survey involves 3 (three) respondents consisting of: current partners, potential partners, and Current partners, potential partners, and former partners. Customers are divided into 2 (two) groups, namely the type of product and the type of agency.

The survey results show a good level of satisfaction. The value of Jamkrindo's customer satisfaction is 87.08% in the "Good" category, an increase from 2020 which was 85.02%. This indicates that there is an increase in the quality of services provided by Jamkrindo to its customers. As for Jamkrindo customer engagement index in 2021 is 87.32%, an increase from 2020 which was 86.03%. This shows that currently customers are more engaged to Jamkrindo.



KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI

Kepatuhan sosial ekonomi merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa Jamkrindo telah menjalankan tindakan etis kepada vendor, lembaga pemerintah, karyawan, konsumen, serta masyarakat lokal. Sebagai BUMN, Jamkrindo berkewajiban untuk menjalankan kepatuhan sosial ekonomi tersebut, yakni dengan menjunjung tinggi hukum mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga eksistensi Jamkrindo agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sandungan hukum.

Komitmen Jamkrindo dalam mematuhi regulasi di bidang sosial dan ekonomi membawa hasil dengan tidak ada sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi tersebut. [GRI 103-3, 419-1]

SOCIAL ECONOMY COMPLIANCE

Socio-economic compliance is an action that shows that Jamkrindo has carried out ethical actions to vendors, government agencies, employees, consumers, and local communities. As a BUMN, Jamkrindo is obliged to carry out the socio-economic compliance, namely by upholding the law and complying with all applicable rules and regulations. This is intended to gain trust and maintain the existence of Jamkrindo so that business activities can run smoothly without any legal stumbling blocks.

Jamkrindo's commitment to complying with regulations in the social and economic fields has resulted in no sanctions or fines due to non-compliance with the laws and regulations in the social and economic fields. [GRI 103-3, 419-1]



INDEKS ISI GRI STANDARDS

GRI STANDARD CONTENT INDEX





INDEKS ISI GRI STANDARDS [GRI 102-55]

GRI STANDARD CONTENT INDEX [GRI 102-55]

Indikator Standar GRI GRI Standard Indicator	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omision Omission
GRI 102: PENGUNGKAPAN UMUM 2016 <i>GRI 102: 2016 GENERAL DISCLOSURE</i>			
Pengungkapan Disclosure	Profil Organisasi Organization Profile		
102-1	Nama perusahaan <i>Company name</i>	30	
102-2	Kegiatan, merek, produk, dan jasa <i>Activities, brands, products and services</i>	30	
102-3	Lokasi kantor pusat <i>Head Office location</i>	30	
102-4	Lokasi operasi <i>Operation location</i>	30	
102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum <i>Ownership and legal form</i>	30	
102-6	Pasar yang dilayani <i>Markets served</i>	30	
102-7	Skala organisasi <i>Organizational scale</i>	57	
102-8	Informasi mengenai karyawan <i>Information about employees</i>	58	
102-9	Rantai pasokan <i>Supply chain</i>	64	
102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya <i>Significant changes to the organization and its supply chain</i>	66	
102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan <i>Prevention approach or principle</i>	66,109	
102-12	Inisiatif eksternal <i>External initiatives</i>	67	
102-13	Keanggotaan asosiasi <i>Association membership</i>	72	
Pengungkapan Disclosure	Strategi Strategy		
102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior <i>Statement from a Senior decision maker</i>	14	
Pengungkapan Disclosure	Etika dan Integritas Ethics and Integrity		
102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku <i>Values, principles, standards, and norms of behavioral</i>	16	
Pengungkapan Disclosure	Tata Kelola Governance		
102-18	Struktur tata kelola <i>Structure of Governance</i>	86	
Pengungkapan Disclosure	Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement		
102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan <i>List of stakeholder groups</i>	121	
102-41	Perjanjian perundingan kolektif <i>Collective bargaining agreement</i>	63	



Indikator Standar GRI GRI Standard Indicator	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Ommission
102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan <i>Identify and select stakeholders</i>	121	
102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan <i>Approach to stakeholder engagement</i>	121	
102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan <i>Main topics and issues raised</i>	121	
Pengungkapan Disclosure			
102-45	Praktik Pelaporan <i>Reporting Practices</i> Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi <i>Entities included in the consolidated financial statements</i>	22	
102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik <i>Define report content and topic boundaries</i>	23	
102-47	Daftar topik material <i>List of material topics</i>	25	
102-48	Penyajian kembali informasi <i>Information restatement</i>	23	
102-49	Perubahan dalam pelaporan <i>Changes in reporting</i>	25	
102-50	Periode pelaporan <i>Reporting period</i>	22	
102-51	Tanggal laporan terbaru <i>Latest report date</i>	22	
102-52	Siklus pelaporan <i>Reporting cycle</i>	22	
102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan <i>Contact point for inquiries regarding reports</i>	27	
102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI <i>Claims that reporting complies with GRI Standards</i>	23	
102-55	Indeks isi GRI <i>GRI content index</i>	23	
102-56	Assurance oleh pihak eksternal <i>Assurance by external parties</i>	23	

PENGUNGKAPAN STANDAR KHUSUS 2016 2016 SPECIAL STANDARD DISCLOSURES

TOPIK EKONOMI ECONOMY TOPIC

Kinerja Ekonomi Economy Performance

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,127,134
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	130,134
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	130,131, 132,134
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016 2016 Economic Performance	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value generated and distributed</i>	132
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya <i>Obligations of defined benefit pension plans and other pension plans</i>	134

Dampak Ekonomi Tidak Langsung Indirect Economic Impact

GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,173
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	174
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	174,176,177
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016 2016 Indirect Economic Impact	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	175,176
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang Signifikan <i>The indirect significant economic impact</i>	175,177



Indikator Standar GRI GRI Standard Indicator		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Omission
Antikorupsi Anti-Corruption				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,134	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	134	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	135	
GRI 205: Antikorupsi 2016 2016 Anti-Corruption	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil <i>Proportion of expenditure for Local suppliers</i>	135	
Perilaku Anti-Persaingan Anti-Competition Behaviour				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,135	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	135	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	135	
GRI 206: Perilaku Anti- Persaingan 2016 2016 Anti-Competition Approach	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli <i>Legal measures for anti-competitive behavior, anti-trust and monopolistic practices</i>	135	
TOPIK LINGKUNGAN ENVIRONMENT TOPIC				
Material Material				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,138,140	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	138,139,140	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	140,141	
GRI 301: Material 2016 2016 Material	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume <i>Materials used by weight or volume</i>	141	
Energi Energy				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 2016 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,138,141	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	138,139, 140,141	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	142	
	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in the organization</i>	142,143	
GRI 302: Energi 2016 2016 Energy	302-3	Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	142	
	302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction of energy consumption</i>	142,143	
Air dan Efluen Water and Effluent				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2018 2018 Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	26,138,145	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	138,139, 140,145	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	145	
GRI 303: Air dan Efluen 2018 2018 Water and Effluent	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interaction with water as a shared resource</i>	145	
	303-3	Pengambilan air <i>Water intake</i>	145	



Indikator Standar GRI GRI Standard Indicator	PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Ommission
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPIC			
Kepegawaian Employment			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>2016 Management Approach</i>	103-1 Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i> 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i> 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	26,150,151, 152,156 150,152,156 151,152, 153,154, 155,156	
GRI 401: Kepegawaian 2016 <i>2016 Employment</i>	401-1 Perekutran karyawan baru dan pergantian karyawan <i>New employee recruitment and employee turnover</i> 401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees</i> 401-3 Cuti melahirkan <i>Maternity leave</i>	152,153 155 156	
Hubungan Ketenagakerjaan Employment Relationship			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>2016 Management Approach</i>	103-1 Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i> 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i> 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	26,150 150 151,157	
GRI 402: Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 2016 <i>Manpower/ Management Relationship</i>	402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional <i>Minimum notification period regarding operational changes</i>	157	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Health and Work Safety			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2018 <i>2018 Management Approach</i>	103-1 Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i> 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i> 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	26,150 150 151,172,173	
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018 <i>2018 Health and Work Safety</i>	403-1 Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja <i>Occupational safety and health management system</i> 403-4 Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang kesehatan dan keselamatan kerja <i>Workers' participation, consultation and communication on occupational health and safety</i> 403-9 Kecelakaan kerja <i>Work accident</i> 403-10 Penyakit akibat kerja <i>Occupational illness</i>	172 172 173 173	
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education			
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>2016 Management Approach</i>	103-1 Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i> 103-2 Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i> 103-3 Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	26,150 150 151,155, 157	

Indikator Standar GRI GRI Standard Indicator		PENGUNGKAPAN DISCLOSURE	Hlm. Page	Omission Omission
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016 <i>2016 Training and Education</i>	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs to improve employee skills and transition assistance programs</i>	157	
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees who receive regular performance and career development reviews</i>	155	
Masyarakat Lokal <i>Local Communities</i>				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>2016 Management Approach</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	27,150, 173,174,177	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	150,174,177	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	151,174, 179	
GRI 413: Masyarakat Lokal 2016 <i>2016 Local Communities</i>	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan <i>Operations with local community involvement, impact assessment, and program development</i>	175,176 179	
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Operations that have actual and potentially significant negative impacts on local communities</i>		
Pemasaran dan Pelabelan <i>Marketing and Labeling</i>				
GRI 103: Pendekatan Manajemen 2016 <i>2016 Management Approach</i>	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	27,177	
	103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	177	
	103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Evaluation of the Management Approach</i>	179	
GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan 2016 <i>2016 Marketing and Labeling</i>	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa <i>Requirements for product and service labeling and information</i>	179	



VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN [OJK G.1]

WRITTEN VERIFICATION FROM INDEPENDENT PARTIES [OJK G.1]

Laporan Keberlanjutan PT Jamkrindo Tahun 2021 belum diverifikasi oleh Penyedia Jasa Assurance (Assurance Services Provider) yang independen. Namun demikian, Perusahaan menjamin bahwa seluruh informasi yang diungkapkan dalam laporan ini adalah benar, akurat, dan faktual.

PT Jamkrindo's 2021 Sustainability Report has not been verified by an independent Assurance Services Provider. However, the Company guarantees that all information disclosed in this report is true, accurate and factual.



Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
Sustainable Economic
Performance



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

LEMBAR UMPAN BALIK [OJK G.2]

FEEDBACK SHEET [OJK G.2]

Terima kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara yang telah berkenan membaca Laporan Keberlanjutan PT Jamkrindo Tahun 2021. Untuk meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya, kami berharap Bapak/Ibu/Saudara bersedia untuk memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia dan mengisi titik-titik di Lembar Umpam Balik ini, kemudian mengirimkannya kepada kami.

1. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dilakukan oleh Jamkrindo:

a. Setuju Agree b. Tidak Setuju Disagree

2. Laporan Keberlanjutan ini sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan Jamkrindo:

a. Setuju Agree b. Tidak Setuju Disagree

3. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini mudah dimengerti dan dipahami:

a. Setuju Agree b. Tidak Setuju Disagree

4. Materi dan data dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah cukup lengkap:

a. Setuju Agree b. Tidak Setuju Disagree

5. Apakah desain, tata letak, grafis, dan foto-foto dalam Laporan Keberlanjutan ini sudah bagus?

a. Setuju Agree b. Tidak Setuju Disagree

6. Informasi apa yang paling bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

.....
.....
.....
.....
.....

7. Informasi apa yang dinilai kurang bermanfaat dari Laporan Keberlanjutan ini?

.....
.....
.....
.....

Thank you for reading the 2021 PT Jamkrindo Sustainability Report. To improve the quality of the report for the next year, we would appreciate if you can answer the following questions in this Feedback, and send it to us.

1. This Sustainability Report has provided clear information regarding the economic, social, and environmental performance of Jamkrindo:

c. Tidak tahu Don't know

2. This Sustainability Report has provided clear information regarding the fulfillment of Jamkrindo's social and environmental responsibilities:

c. Tidak tahu Don't know

3. The material and data in this Sustainability Report are easy to understand and understand:

c. Tidak tahu Don't know

4. The materials and data in this Sustainability Report are quite complete:

c. Tidak tahu Don't know

5. Are the designs, layouts, graphics and photos in this Sustainability Report good?

c. Tidak tahu Don't know

6. What information is most useful from this Sustainability Report?

.....
.....
.....
.....

7. Which information is considered less useful from this Sustainability Report?

.....
.....
.....



8. Informasi apa yang dinilai masih kurang dari Laporan Keberlanjutan ini dan perlu ditambahkan pada Laporan Keberlanjutan mendatang?
-
.....
.....
.....
.....

8. What information is considered lacking in this Sustainability Report and needs to be added to the next Sustainability Report?
-
.....
.....
.....

Identitas Pengirim:

Nama :
Email :

Identifikasi menurut kategori pemangku kepentingan (lingkari salah satu)

1. Pelanggan/Konsumen
2. Pemegang Saham
3. Pemerintah dan DPR
4. Pegawai
5. Serikat Pekerja
6. Mitra Kerja/Suplier
7. Media Massa
8. Masyarakat, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
9. Masyarakat
10. Lain-lain, sebutkan.....

Mohon Lembar Umpan Balik ini dikirim ke:

Sekretaris Perusahaan

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon : +62 21 6540335
Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

Sender's Identity:

Nama :
Email :

Identification by stakeholder category (please circle one)

1. Customer
2. Shareholders
3. Government and House of Representatives
4. Employee
5. Union
6. Supplier
7. Media
8. General Public, Local Communities, Community Organizations, Non-Governmental Organizations
9. General Public
10. Others, please mention.....

Please send this Feedback Sheet to:

Corporate Secretary

PT Jaminan Kredit Indonesia

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon : +62 21 6540335
Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

TANGGAPAN TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA [OJK G.3]

RESPONSE TO PREVIOUS YEAR REPORT FEEDBACK [OJK G.3]

Selama tahun 2021, PT Jamkrindo tidak mendapat tanggapan spesifik terkait Laporan Keberlanjutan Tahun 2020. Namun demikian, Perusahaan berkomitmen untuk menyempurnakan isi laporan sesuai panduan Standar GRI dan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Jamkrindo berharap laporan ini menjadi rujukan bagi segenap pemangku kepentingan terkait kinerja keberlanjutan Perusahaan selama tahun pelaporan.

During 2021, PT Jamkrindo did not receive a specific response regarding the 2020 Sustainability Report. However, the Company is committed to improving the contents of the report according to the guidelines of the GRI Standards and POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies. Jamkrindo hopes that this report will become a reference for all stakeholders regarding the Company's sustainability performance during the reporting year.





Kinerja Ekonomi
Keberlanjutan
*Sustainable Economic
Performance*



Kinerja Lingkungan
Keberlanjutan
Sustainable Environmental Performance



Kinerja Sosial
Keberlanjutan
Sustainable Social Performance



Indeks GRI Standar
GRI Standard Index

DAFTAR PENGUNGKAPAN SESUAI POJK 51/ POJK.03/2017 [OJK G.4]

LIST DISCLOSURE BASED ON POJK 51/POJK.03/2017 [OJK G.4]

No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
STRATEGI KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY STRATEGY		
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Explanation on Sustainability Strategy</i>	14
IKHTISAR KINERJA ASPEK KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY ASPECT PERFORMANCE OVERVIEW		
B.1	Aspek Ekonomi <i>Aspect of Economy</i>	8
B.2	Aspek Lingkungan Hidup <i>Aspect of Environment</i>	8
B.3	Aspek Sosial <i>Aspect of Social</i>	8
PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan <i>Vision, Mission and Sustainability Values</i>	35
C.2	Alamat Perusahaan <i>Company's address</i>	30,53
C.3	Skala Usaha <i>Business Scale</i>	57,58
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan <i>Products, Services, and Business Activities Conducted</i>	37
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi <i>Membership of the Association</i>	72
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan <i>Significant Changes in Issuers and Public Companies</i>	66
PENJELASAN DIREKSI EXPLANATION BY THE BOARD OF DIRECTORS		
D.1	Penjelasan Direksi <i>Explanation by the Board of Directors</i>	12
TATA KELOLA KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE GOVERNANCE		
E.1	Penanggungjawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Person in Charge for the Implementation of Sustainable Finance</i>	87
E.2	Pengembangan Kompetensi Terkait Keuangan Berkelanjutan <i>Competency Development Related to Sustainable Finance</i>	107
E.3	Penilaian Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Risk Assessment on the Implementation of Sustainable Finance</i>	109
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Relations</i>	121
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Problems with the Implementation of Sustainable Finance</i>	123
KINERJA KEBERLANJUTAN SUSTAINABLE PERFORMANCE		
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan <i>Activities to Build a Culture of Sustainability</i>	130



No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
KINERJA EKONOMI <i>ECONOMIC PERFORMANCE</i>		
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi <i>Comparison of Production Targets and Performance, Portfolio, Target Financing, or Investment, Income and Profit and Loss</i>	130
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi Pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Comparison of Portfolio Targets and Performances, Financing Targets, or Investments in Financial Instruments or Projects that are in Line with the Implementation of Sustainable Finance</i>	132
KINERJA LINGKUNGAN HIDUP <i>ENVIRONMENTAL PERFORMANCE</i>		
Aspek Umum General Aspect		
F.4	Biaya Lingkungan Hidup <i>Cost of Environment</i>	146
Aspek Material Material Aspect		
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan <i>The Use of Material tha</i>	141
Aspek Energi Energy Aspect		
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan <i>Amount and Intensity of Energy Used</i>	142
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan <i>Efforts and Achievements of Energy Efficiency and Use of Renewable Energy</i>	142
Aspek Air Water Aspect		
F.8	Penggunaan Air <i>The Use of Water</i>	145
Aspek Keanekaragaman Hayati Biodiversity Aspect		
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati <i>Impact of Operational Areas Near or In the Conservation Areas or Areas With Biodiversity</i>	N/R
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati <i>Biodiversity Conservation Effort</i>	N/R
Aspek Emisi Emission Aspect		
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya (Cakupan 1, 2 dan 3) <i>Amount and Intensity of Emissions Produced by Type (Scope 1, 2 and 3)</i>	144, 145
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan <i>Emission Reduction Efforts and Achievements</i>	142
Aspek Limbah dan Efluen Waste and Effluent Aspect		
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis <i>Amount of Waste and Effluent Produced by Type</i>	N/R
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen <i>Waste and Effluent Management Mechanism</i>	N/R
F.15	Tumpahan yang Terjadi (Jika Ada) <i>Spills that Occur (If There Are Any)</i>	N/R
Aspek Pengaduan Terkait Lingkungan Hidup Complaint Aspect Regarding Environment		
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan <i>Number and Material of Environmental Complaints Received and Resolved</i>	N/R
Kinerja Sosial Social Performance		
F.17	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen <i>Commitment of LJK, Issuers, or Public Companies to Provide Services for Equal Products and/or Services to Consumers</i>	178



No Indeks Index No.	Nama Indeks Index Name	Hal. Page
Aspek Ketenagakerjaan Aspect of Employment		
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja <i>Equal Employment Opportunity</i>	151
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa <i>Child Labor and Forced Labor</i>	166
F.20	Upah Minimum Regional <i>Regional minimum wage</i>	167
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman <i>Decent and Safe Working Environment</i>	170
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai <i>Employee Capabilities Training and Development</i>	166
Aspek Masyarakat Aspect of the Society		
F.23	Dampak Operasi Terhadap Masyarakat Sekitar <i>Impact of Operations on Surrounding Communities</i>	174,176, 177
F.24	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaint</i>	177,180
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) <i>Environmental Social Responsibility Activities (TJSL)</i>	174,176
Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan Sustainable Product/Service Development Responsibility		
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Innovation and Development of Sustainable Financial Products/Services</i>	178
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan <i>Products/Services that Have Been Evaluated for Safety for Customers</i>	179
F.28	Dampak Produk/Jasa <i>Product/Service Impact</i>	179
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali <i>Number of Products Recall</i>	179
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan <i>Customer Satisfaction Survey on Sustainable Financial Products and/or Services</i>	180
Lain-lain Others		
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika Ada) <i>Written Verification from Independent Party (if available)</i>	189
G.2	Lembar Umpam Balik <i>Feedback Form</i>	190
G.3	Tanggapan terhadap Umpam Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya <i>Responses to the Previous Year's Sustainability Report Feedback</i>	191
G.4	Daftar Pengungkapan Sesuai POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik <i>List of Disclosures in accordance with POJK 51/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies</i>	194





A member of IFG

UMKM MAJU BERSAMA JAMKRINDO

MSMEs Advanced with Jamkrindo



A member of IFG

PT Jaminan Kredit Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar Kemayoran

☎ (+62-21) 654 0335

📠 (+62-21) 654 0335

✉ contact@jamkrindo.co.id

🌐 www.jamkrindo.co.id

